



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-09/Renja-Kalbar/09/2022

RENCANA KERJA

PROVINSI
KALIMANTAN
BARAT



INDONESIA's
FOLU NET SINK
2030





RENCANA KERJA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Keterangan Gambar Sampul:

1. Hutan Wisata Baning
2. Owa Kelempiaiu

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat

ISBN:

xxx - xxxx - xxx - xx

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, Sutarmidji.

REVIEWERS:

Agus Justianto, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Harisson.

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofig, Drasospolino, Rinekso Soekmadi, Gusti Hardiansyah, Farah Diba.

CONTRIBUTORS OF MOEF:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R Karlansyah, Emma Rachmawaty, Kepala Balai Besar TN Betungkerihun Danau Sentarum Provinsi Kalbar, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kapuas, Novie Trionoadi Kepala BPKH Wil. III Pontianak, Kepala Balai KSDA Kalbar, Kepala Balai PPI dan Karhutla Wil. Kalimantan, Kepala Balai PSKL Wil. Kalimantan, Kepala Balai PHP Wil. VIII Pontianak, Kepala Balai Gakkum Wil. Kalimantan, Kepala Balai TN Gunung Palung Pro. Kalbar, Kepala Balai TN Bukit Baka Bukit Raya Prov. Kalbar, Kepala Seksi Wil. III Balai Gakkum, Koordinator Manggala Agni BPPI dan Karhutla Wil. Kalimantan.

CONTRIBUTORS OF PROVINCE KALIMANTAN BARAT:

Adi Yani (Kepala Dinas LHK Prov. Kalbar), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar, Kepala Dinas PUPR Pro. Kalbar, Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalbar, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala Dinas TPH Prov. Kalbar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Prov. Kalbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas LHK Kalbar, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kalbar, Kepala UPT KPH se Kalbar, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas LHK Kalbar, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kalbar, Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Kepala Bidang Perlindungan KSDAE Dinas LHK Kalbar, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kalbar, Kepala Bidang Penangan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran Dinas LHK Kalbar, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kalbar, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan LHK Dinas LHK Kalbar, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kalbar.

FACILITATORS:

Nurlela Komalasari, Efsa Caesarriantika, Hasnawati Hamzah, Romilla Sari, Agung Bayu Nalendro, Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko, Claudia Meitriwane SilalahiAmung Hidayat, Hendra Saputra, Shinta Widyastuti, Welli Azwar, Dewi Rahmaniah, Zharifah Eliyana, Riza Nopinilianti, Albertus Agung Iman Kalis, Felix Belawan, Ismiyati Utami Dewi, Dhaur Giesna Alghiefary, Ahmad Sardana, Ervan Judiarto, Yenny, Handayani, Stevan Agbart.

Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan menegakkan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan *updated NDC* meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. *Enhanced NDC* ini adalah transisi menuju *Second NDC* yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050* dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita.

Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah diatur secara detail program



dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung Net Zero Emission, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Barat.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kemudahan dan berkah-Nya dokumen Rencana Kerja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan. Indonesia's FOLU *Net Sink* (IFNET) 2030 merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan **Paris Agreement 2015** yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, khususnya dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Sektor kehutanan memainkan peran sangat sentral dan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, dengan target kontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau *net-zero emission*.

Dalam upayanya pencegahan perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyiapkan berbagai instrumen kebijakan yang mendukung. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 201 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan serta Mekanisme Pertukaran Data Kegiatan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD +)* merupakan komitmen Provinsi Kalimantan Barat dalam skema Result Based Payment serta mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) memastikan bahwa upaya penurunan emisi yang bersifat multi sektor dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun target di bidang kehutanan dan lahan gambut mencapai 697.355.670,80 ton CO₂-eq.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi sektor pembangunan berbasis lahan dalam kontribusinya terhadap pencegahan perubahan iklim di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai provinsi dengan luas kawasan hutan sebesar 8,3 juta ha, 281 unit HGU kebun, 701 IUP tambang, serta masih luasnya areal berhutan di luar kawasan hutan, menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi penting dan strategis dalam perspektif perubahan iklim. Rencana Kerja FOLU Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi katalisator yang diharapkan mampu mengakselerasi implementasi kebijakan dan program-program terkait perubahan iklim yang sudah ada, karena target luasan, lokasi kegiatan serta penanggung jawabnya sudah lebih jelas dan terukur sebagaimana dituangkan ke dalam 12 rencana aksi mitigasi (rencana operasional - RO).

Target FOLU Provinsi Kalimantan Barat 2023 - 2030 dicanangkan seluas 7,6 juta ha atau 52,18% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dari luasan tersebut, 4,2 juta ha diantaranya terdapat di hutan produksi, 1,9 juta ha di hutan lindung, 1,3 juta ha di APL, dan hanya sekitar 0,15 juta ha di hutan konservasi. Dalam dokumen ini juga sudah dijabarkan secara rinci program dan

kegiatan di setiap lokasi. Data tersebut dikumpulkan melalui proses panjang yang melibatkan semua stakeholders dan telah diverifikasi intensif dalam program asistensi baik dengan KPH, UPT, maupun pemegang ijin berusaha.

Untuk mengimplementasikan program dan kegiatan FOLU di Provinsi Kalimantan Barat tentu diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 25,2 triliun sampai dengan 2030. Sementara kemampuan pendanaan mandiri dari berbagai sumber diperkirakan hanya sekitar Rp. 728 miliar, sehingga terdapat gap pendanaan yang sangat besar. Dalam hal memenuhi pendanaan ini, tentu harus direncanakan lebih serius dengan mengundang partisipasi lembaga-lembaga pendanaan baik nasional maupun global melalui berbagai skema yang rasional dan realistis. Penguatan pendanaan mandiri oleh pemegang ijin juga harus dilakukan secara masif, karena penanggungjawab kegiatan FOLU ini berada pada masing-masing pemangku kawasan.

Program ini sangat besar dan diharapkan mampu mengundang partisipasi semua elemen. Oleh karenanya kesadaran para pemangku kepentingan akan kemaslahatan program ini perlu terus digalakkan. Seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Barat harus mengambil peran sesuai kemampuannya masing-masing, sehingga program ini dapat mengakar kokoh di tingkat tapak agar pada akhirnya berbuah manis berupa terciptanya kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat yang baik dibarengi dengan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Barat.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat beserta semua elemen pendukungnya, atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan. Semoga segala jerih upaya tersebut dicatat sebagai amal kebaikan sekaligus sebagai sumbangsih untuk pembangunan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, November 2022
Gubernur Kalimantan Barat



SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan pendekatan penyerapan dan emisi karbon yang seimbang (*carbon Net Sink*) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 atau *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (IFNETS 2030) untuk pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam rangka mendukung IFNET, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja *Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat (RKFNET). Tujuan penyusunan dokumen RKFNET Provinsi Kalimantan Barat ini untuk 1) menjabarkan target Rencana Operasional IFNET ke dalam detail rencana aksi penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, 2) menentukan penanggung jawab dari setiap rencana aksi penurunan emisi GRK, 3) menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi GRK provinsi, dan 4) merumuskan tahapan monitoring dan evaluasi terhadap detail rencana aksi penurunan emisi GRK.

RKFNET disusun dengan melibatkan berbagai stakeholders dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Kalimantan Barat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di wilayah Kalimantan Barat, akademisi, mitra pembangunan dan perusahaan dari sektor kehutanan (PBPH - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), perkebunan, pertambangan serta sektor usaha berbasis lahan lainnya. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dalam beberapa rangkaian diskusi grup dipimpin (FGD – *Focus Group Discussion*) dengan para pihak terkait, workshop, asistensi dengan UPT dan PBPH, analisis spasial, dan studi literatur pada bulan Agustus-September 2022.

RKFNET meliputi 12 (dua belas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu; 1) pencegahan deforestasi pada lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi pada lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon (PCK) dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove. Masing-masing rencana aksi akan dilaksanakan pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai arahan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) yang meliputi; (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF). Area yang masuk kategori prioritas tinggi ialah yang nilai IPL 7 sampai 9 dan yang masuk kategori sedang ialah yang nilai IPL 5 dan 6, dan yang rendah yang nilai IPL 1 sampai 4.

Pesan kunci dari RKFNET adalah tutupan hutan yang perlu dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk berkontribusi pada target IFNET dengan asumsi net emisi per kapita sebesar 4,23-ton CO₂e adalah sebesar 7,6 juta ha dengan target serapan total adalah 32,1 juta ton CO₂e atau setara dengan 12% dari total kontribusi nasional. Untuk melaksanakan 12 kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan sesuai arahan IFNET sebesar 7,6 juta ha, maka diperlukan pendanaan sebesar Rp25,2 triliun. Disisi lain, mengacu pada identifikasi pembiayaan yang dilakukan sampai 2030, maka pembiayaan yang tersedia hanya sebesar Rp728,2 miliar. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih membutuhkan tambahan pendanaan sebesar Rp24,5 triliun untuk mencapai target RKFNET. Kesenjangan pembiayaan ini akan menjadi usulan kepada pihak terkait di level nasional maupun mengembangkan skema pembiayaan internasional yang memungkinkan, termasuk mengoptimalkan dan mensinergikan pembiayaan dari proyek-proyek yang berjalan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan RKFNET harus didukung sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dan komprehensif. Setiap pelaksanaan rencana aksi mitigasi harus dilengkapi dengan *Social and Environmental Safeguard* (SES) yang terintegrasi dengan Safeguard Information Sistem REDD+ (SIS REDD+) yang telah dirancang nasional, memastikan setiap program dan kegiatan yang

dirancang teregistrasi dalam *National Registry System* (NRM), serta memastikan ada *Benefit Sharing Mechanism* (BSM). Selain itu, perlu disusun kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi mitigasi, memperkuat kelembagaan dari level provinsi sampai desa, serta unit manajemen di tingkat tapak, maupun membangun harmonisasi atas kesenjangan yang terjadi antara perencanaan dan capaian pelaksanaan program kegiatan RKFNET.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 932/LHK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NETSINK2030* PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 tentang *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk pengendalian perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nation Framework Conventions On Climate Changes* (Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/ 2/2022 tentang *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
- 10.. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

- 12.. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- Memperhatikan 1. Buku Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Tahun 2022;
2. Buku Manual Pembacaan Data Rencana Operasional (Renops) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Tahun 2022;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.777 /PKTL/IPSDH/PLA.1/6/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penyampaian Informasi Geospasial Tematik (IGT) *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
4. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor Sk.45/SETJEN/ROUM/KLN.0/7/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat.
5. Buku *Forest Reference Emission Level (FREL)* Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2016;
6. Dokumen Strategi Intervensi Penurunan Emisi (SIPE) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina I dan II:
- Memberikan perlindungan dalam rangka pelaksanaan dan hasil kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.
- b. Pengarah :
- Memberikan arahan kerja pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat.

c. Ketua I dan II :

1. Melaksanakan arahan dari Pengarah;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat;
3. Mengkoordinir anggota dalam pembagian tugas, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas yang dibebankan kepada anggota; dan
4. Membuat Laporan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat kepada Penanggung Jawab;

d. Anggota:

Melaksanakan tugas yang diberikan dan melaporkan hasil kerja kepada Ketua Pelaksana.

e. Tim Pelaksana Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

1. Ketua

- a) Melaksanakan pengendalian penyusunan manual/ guidelines kebakaran hutan dan lahan, memantapkan prosedur pencegahan permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan;
- b) Melaksanakan implementasi pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan;
- c) Secara khusus memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat;
- d) Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan.
- e) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines perhutanan sosial;
- f) Melaksanakan implementasi perhutanan sosial;
- g) Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi perhutanan sosial.
- h) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- i) Melaksanakan implementasi penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- j) Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengelolaan hutan lestari dengan kegiatan utama meliputi penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pemulihan kawasan dan penegakan hukum, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

2. Anggota
 - a) Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana Bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
 - b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
 - c) Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; dan
 - d) Membuat Laporan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Pelaksana Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
- f. Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
 1. Ketua
 - a) Melaksanakan penyusunan manual/ guideline rehabilitas hutan dan lahan;
 - b) Melaksanakan implementasi rencana rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c) Melaksanakan implementasi rencana operasional rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan Kerjasama masyarakat.
 - e) Melaksanakan penyusunan manual/ guideline operasional penanaman dan konservasi mangrove;
 - f) Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman dan konservasi mangrove;
 - g) Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan gambut penanaman dan konservasi mangrove;
 - h) Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan Kerjasama masyarakat.
 - i) Melaksanakan penyusunan manual/ guideline operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian;
 - j) Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian;
 - k) Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian.

2. Anggota

- a) Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana Bidang Peningkatan Cadangan Karbon;
- b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Peningkatan Cadangan Karbon;
- c) Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; dan
- d) Membuat Laporan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Pelaksana Bidang Peningkatan Cadangan Karbon.

g. Tim Pelaksana Bidang Konservasi

1. Ketua

- a) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies;
- b) Melaksanakan implementasi operasional perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, pelestarian, pengawetan, dan keanekaragaman hayati secara pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies;
- c) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya dan pengembangan kebun raya;
- d) Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan kebun raya;
- e) Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, dan mendorong serta mendukung pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola taman hutan raya dan kebun raya;
- f) Mendorong dan memfasilitasi RTH, Tahura dan Kebun Raya dengan dukungan KPBU dan kerja sama masyarakat.
- g) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, high conservation value forest dan penataan fragmentasi habitat;
- h) Melaksanakan implementasi operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, high conservation value forest dan melakukan penataan, tata kelola habitat yang terfragmentasi dan pemulihannya.

- i) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional kemitraan konservasi;
 - j) Melaksanakan implementasi operasional kemitraan konservasi;
 - k) Mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak;
 - l) Menyiapkan dan fasilitasi langkah kemitraan masyarakat;
2. Anggota
- a) Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana Bidang Konservasi;
 - b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Konservasi;
 - c) Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Konservasi; dan
 - d) Membuat Laporan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Pelaksana Bidang Konservasi.
- h. Tim Pelaksana Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut
1. Ketua
- a) Melaksanakan penyusunan manual / guidelines operasional tata kelola gambut dalam konsesi, desa mandiri peduli gambut dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya;
 - b) Melaksanakan implementasi pengembangan program Desa Gambut (DMPG); operasi Mandiri Peduli
 - c) Melaksanakan pengendalian perizinan di area gambut;
 - d) Melaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan kawasan gambut;
 - e) Pengendalian, pengawasan tata laksana dan kelola gambut;.
 - f) Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (reweting) gambut, penyiapan dan dukungan sarana;
 - g) Melaksanakan implementasi operasional pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, penyiapan dan dukungan sarana.
2. Anggota
- a) Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- c) Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
- d) Membuat Laporan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Pelaksana Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut.

i. Tim Pelaksana Bidang Instrumen dan Informasi

1. Ketua

- a) Melaksanakan penyiapan informasi hasil kerja dengan berbagai sarana audiovisual material;
- b) Menyiapkan standar sesuai kebutuhan;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- d) Melaksanakan transformasi sarana pojok iklim, dengan tahapan kerja dan desain kelembagaan serta operasionalnya;
- e) Membangun kerja sama para pihak untuk keperluan sosialisasi edukasi publik;
- f) Membangun forum interaksi atau konsultasi regulasi, operasi dan evaluasi kegiatan serta analisis feedback; serta membuat dan mengelola dashboard monitoring lapangan harian;
- g) Menyiapkan manual langkah penegakan hukum;
- h) Melaksanakan penegakan hukum;
- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j) Mendorong pola kerja paralegal bersama masyarakat;
- k) Menyusun standar dan menetapkan pedoman menurut kebutuhan;
- l) Melaksanakan fasilitasi penerapan standar, NSPK, dan kebijakan (sosialisasi, promosi, diseminasi, bimbingan teknis, pendampingan teknis);
- m) Melaksanakan monitoring dan mengikuti perkembangan kebijakan yang menonjol dan memerlukan penelaahan/ penyesuaian;
- n) Memformulasikan arah kebijakan baru dari hasil evaluasi dan perkembangan implementasi;
- o) Membangun interaksi dalam penguatan dukungan kebijakan dan referensi untuk pengembangan kebijakan

2. Anggota

- a) Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana Bidang Instrumen dan Informasi;
- b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat Bidang Instrumen dan Informasi;

- c) Melaksanakan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat Bidang Instrumen dan Informasi; dan
- d) Membuat Laporan Program Kerja dan Rencana Operasional Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua Pelaksana Bidang Instrumen dan Informasi.

J. Tim Ahli

- 1. Ketua
 - a) Sinkronisasi dengan rencana pada masing-masing satuan kerja terkait di daerah;
 - b) Melakukan pendetailan rencana pada tingkat Kabupaten dan atau KPH;
 - c) Melakukan validasi terhadap data dan informasi di level tapak;
- 2. Anggota
 - a) Melengkapi outline detail pada setiap bidangnya sesuai dengan kondisi tapak;
 - b) Menyusun draf sementara dengan koordinasi tenaga pusat;
 - c) Melengkapi draf awal, draf sementara dan draf akhir.

k. Tim Teknis/Sekretariat :

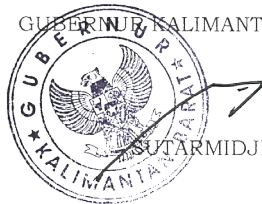
- 1. Ketua
 - a) Membantu dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat
 - b) Memberi masukan dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Wakil Ketua

Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Bidang dan Tim Ahli dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry And Other Land Use Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Barat
- 3. Anggota
 - a) Membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi
 - b) Melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Nasional

- KETIGA Sasaran kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Barat meliputi : pengurangan laju deForestryasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari, perhutanan social, rehabilitasi hutan dengan regular dan sistematis, rehabilitasi hutan non rotasi pada kondisi lahan kritis dan menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik.
- KEEMPAT Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dilaksanakan dengan melibatkan para pihak terkait lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten secara kolaboratif bersama-sama dengan Akademis, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat secara luas melalui kerja-kerja program struktural, kemitraan dan pembinaan kemasyarakatan.
- KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Gubemur Kalimantan Barat
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

- 1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- 2.Wakil Gubemur Kalimantan Barat di Pontianak;
- 3.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Kepala Balai Besar Taman Nasional Tipe A Betung Kerihun Danau Sentarum di Putussibau;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas di Pontianak;
15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III di Pontianak;
16. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII di Pontianak;
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A Kalimantan Barat di Pontianak;
18. Kepala Balai Taman Nasional Tipe B Gunung Palung di Ketapang;
19. Kepala Balai Taman Nasional Tipe B Bukit Baka Bukit Raya di Sintang;
20. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan di Banjarbaru;
21. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan di Palangkaraya;
22. Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Pontianak;
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Provinsi Kalimantan Barat;
24. Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di Pontianak;
25. Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
26. Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
27. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 932/LHK/2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL
INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030 PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DA- LAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pembina I
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kalimantan Barat	Pengarah
4.	Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua I
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua II
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kaliman- tan Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kali- mantan Barat	Anggota
14	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak	Anggota

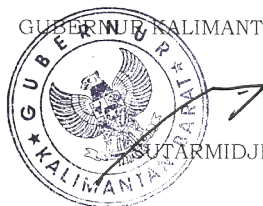
15.	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Tim Pelaksana Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
16.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
17.	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Pontianak	Anggota
18.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan	Anggota
19.	Koordinator Manggala Agni Balai Pengendalian Peru bahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan	Anggota
20.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan se-Kalimantan Barat	Anggota
21.	Ketua APhi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Ketua GIZ Indonesia/FIP-5	Anggota
23.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
24.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
25.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina J asa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
26.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kaliman tan Barat	Anggota
27.	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas	Anggota
28.	Ketua Sampan Kalimantan	Anggota
29.	Ketua Blue Forests - Yayasan Hutan Biru	Anggota
30.	Ketua Yayasan Kahati	Anggota
31.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Anggota

32.	Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Tim Pelaksana Bidang Konservasi
33.	Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
34.	Kepala Balai Besar Taman Nasional Tipe A Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Anggota
35.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A Kalimantan Barat	Anggota
36.	Kepala Balai Taman Nasional Tipe B Gunung Palung	Anggota
37.	Kepala Balai Taman Nasional Tipe B Bukit Baka Bukit Raya	Anggota
38.	Ketua GAPKI Kalimantan Barat	Anggota
39.	Ketua Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) Kalimantan Barat	Anggota
40.	Pimpinan KalFor	Anggota
41.	Ketua FFI Kalbar	Anggota
42.	Ketua PRCF Kalbar	Anggota
43.	Ketua Tropenbos Indonesia	Anggota
44.	Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH)	Anggota
45.	Ketua Yayasan Planet Indonesia	Anggota
46.	Ketua Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)	Anggota
47.	Ketua Yayasan Natural Kapital Indonesia	Anggota
48.	Ketua Jari Indonesia Borneo Barat	Anggota
49.	Ketua GEMAW AN	Anggota
50.	Ketua WALHI	Anggota
51.	Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua Tim Pelaksana Bidang Pengelolaan Ekosistem Garnbut

52.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
53.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
54.	Sekretaris TRGMD Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
55.	Pimpinan ICRAF	Anggota
56.	Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
57.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
58.	Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Anggota
59.	Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan	Anggota
60.	Direktur Kemitraan Partnership	Anggota
	Dr. Rinekso Soekmadi, M.Sc, F.Trop (Institut Pertanian Bogor)	Anggota
61.	Prof. Dr. Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc.Q, IPU (Guru Besar Bidang Manajemen Hutan Universitas Tanjungpura Pontianak)	Ketua Tim Ahli
62.	Dr. Farah Diba, S.Hut, M.Si (Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak)	Anggota
63.	Dwi Yoga Budi Pranoto	Anggota
64.	Zuhry Haryono	Anggota
65.	Nurlela Komalasari, S.Hut, M.Sc (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)	Ketua Tim Teknis/ Sekretariat
66.	Amung Hidayat, S.P, M.Si (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Wakil Ketua Tim Teknis/ Sekretariat
67.	Sekretaris Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	Anggota

68.	Efsa Caesarantika, S.Hut, M.Sc (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)	Anggota
69.	Hendra Saputra, S.Hut, M.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
70.	Shinta Widyastuti, S.Hut, M.T (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
71.	Welli Azwar, S.Hut, M.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
72.	Dewi Rahmaniah, S.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
73.	Zharifah Eliyana, S.Hut, MMD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
74.	Riza Nopinilianti, S.Hut, M.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
75.	Albertus Agung Iman Kalis, S.Hut, M.T (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
76.	Felix Belawing, S.Hut, M.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
77.	Ismiyati Utami Dewi, S.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
78.	Dhaur Giesna Alghiefary, ST (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
79.	Ahmad Sardana, S.Si, M.T, M.Sc (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak)	Anggota
80.	Handayani, S.P (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak)	Anggota
81.	Stevan Agbart, S.Hut (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak)	Anggota

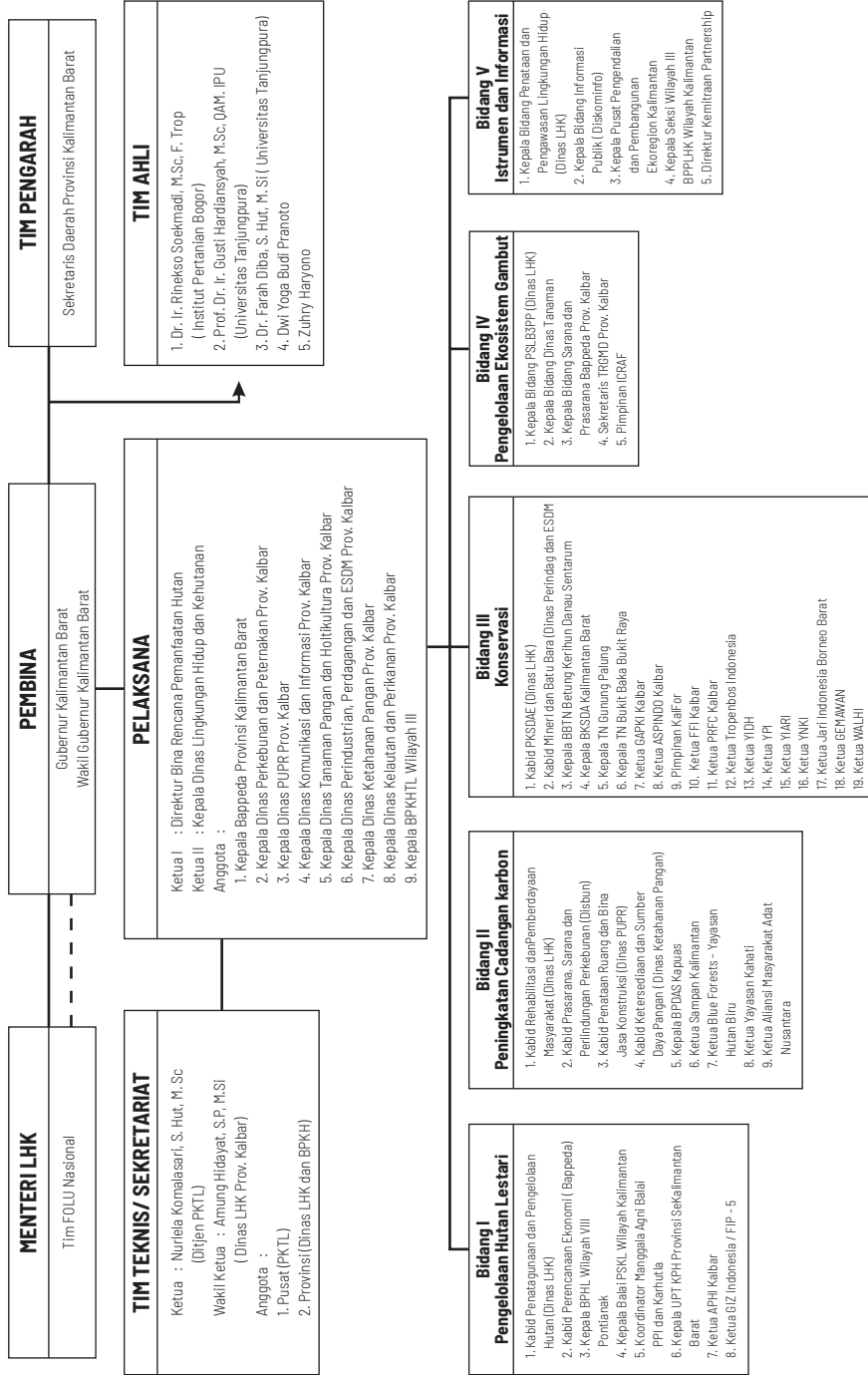
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 932/LHK/2022

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SUB NASIONAL INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE Net Sink 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE Net Sink 2030 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 5

Daftar Isi 24

Daftar Tabel 26

Daftar Gambar 28

BAB I. Pendahuluan 34

1.1. Latar Belakang 34

1.2. Tujuan dan Sasaran 35

1.3. Dasar Hukum 36

1.4. Struktur Organisasi 39

1.5. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja 40

BAB II. Kondisi Umum Dan Kerangka Regulasi Pendukung FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat 47

2.1. Kondisi Geografis 27

2.1.1. Topografi 49

2.1.2. Geologi dan Tanah 50

2.1.3. Hidrologi dan DAS 52

2.1.4. Klimatologi 53

2.1.5. Gambut 54

2.1.6. Penutupan Lahan 55

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah 61

2.1.8. Kondisi Sosial dan Budaya 64

2.1.9. Kondisi Ekonomi 66

2.1.10. Keanekaragaman Hayati 73

2.2. Kerangka Regulasi dan Kegiatan Regional Pendukung FOLU Net Sink 2030 75

BAB III. Rencana Kerja Aksi Mitigasi 2022 – 2030 Dan Pendanaan Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat 83

3.1. Strategi Nasional Untuk Aksi Mitigasi NDC 83

3.2. Strategi Provinsi Kalimantan Barat dalam Mendukung FOLU *Net Sink* 2030 86

3.2.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari 100

3.2.2. Strategi Peningkatan Cadangan Karbon 100

3.2.3. Strategi Konservasi 102

3.2.4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut 103



3.2.5. Strategi Instrumen dan Informasi	104
3.3. Target, Program dan Kegiatan Tahun 2022 – 2030	104
3.3.1. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari (RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6)	105
3.3.2. Bidang Peningkatan Cadangan Karbon (RO7, RO8)	108
3.3.3. Bidang Konservasi (RO11 dan KK di RO lain)	110
3.3.4. Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut (RO9, RO10, RO12)	113
3.3.5. Bidang Instrumen dan Informasi	115
3.4. Rencana Pendanaan	118
3.4.1. Pembiayaan yang teridentifikasi Untuk Pencapaian Rencana Operasional	118
3.4.2. Rencana Sumber Pendanaan yang Dapat Diakses	134
3.4.3. Skema Pendanaan Existing Project/ Proyek yang Sedang Dikembangkan Sebagai Bentuk Kerjasama Pemerintah	136

BAB IV. Monitoring Dan Evaluasi Aksi Mitigasi Folu Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Barat

4.1. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi	148
4.2. Strategi Monitoring dan Evaluasi	149
4.3. Jaring Pengaman Sosial (Safeguards)	152
4.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi	154
4.5. Tanggung Jawab dan Penilaian Capaian Kinerja	156

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan	159
5.2. Saran	160
5.3. Disclaimer	161

Daftar Pusaka

Lampiran



Daftar Tabel

TABEL 1.	Jumlah kecamatan dan kelurahan/desa di Kalimantan Barat
TABEL 2.	Sebaran luasan lahan gambut kabupaten/kota di Kalimantan Barat
TABEL 3.	Unit KPH Beserta Luasannya di Provinsi Kalimantan Barat
TABEL 4.	Kondisi Tutupan Hutan Kalimantan Barat 2010-2020
TABEL 5.	Target Penanaman Pohon di Sekolah Se-Kalimantan Barat
TABEL 6.	Target Penurunan Emisi dalam NDC
TABEL 7.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 Di Provinsi Kalimantan Barat
TABEL 8.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial
TABEL 9.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (non pemegang izin)
TABEL 10.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 pada Kawasan Areal Penggunaan Lain
TABEL 11.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 pada Kawasan Hak Guna Usaha
TABEL 12.	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi RO1-RO12 pada Kawasan Konservasi
TABEL 13.	Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
TABEL 14.	Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon
TABEL 15.	Rencana Kerja Bidang Konservasi
TABEL 16.	Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut
TABEL 17.	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi
TABEL 18.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO1
TABEL 19.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO2
TABEL 20.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO3
TABEL 21.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO4
TABEL 22.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO5
TABEL 23.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO6
TABEL 24.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO7
TABEL 25.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO8
TABEL 26.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO9
TABEL 27.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan R10
TABEL 28.	Identifikasi Indikatif Pembiayaan R11

TABEL 29. Identifikasi Indikatif Pembiayaan R12

TABEL 30. Identifikasi Indikatif Pembiayaan R13

Daftar Gambar

- GAMBAR 1.** Peta Kalimantan Barat
- GAMBAR 2.** Peta Topografi Kalimantan Barat
- GAMBAR 3.** Peta Geologi Kalimantan Barat
- GAMBAR 4.** Peta Jenis Tanah Kalimantan Barat
- GAMBAR 5.** Peta Hidrologi dan DAS Kalimantan Barat
- GAMBAR 6.** Peta Curah Hujan Kalimantan Barat
- GAMBAR 7.** Peta Penutupan Lahan Kalimantan Barat
- GAMBAR 8.** Peta KPH Provinsi Kalimantan Barat
- GAMBAR 9.** Peta KEE Bentang Alam Kabupaten Ketapang
- GAMBAR 10.** Peta KEE Bentang Alam Kabupaten Kayong Utara
- GAMBAR 11.** Flora dan Fauna Langka di Kalimantan Barat
- GAMBAR 12.** Diagram peta jalan aksi mitigasi NDC
- GAMBAR 13.** Peta Sebaran RO di Kalimantan Barat
- GAMBAR 14.** Model Intervensi Aktivitas Peat-IMPACT
- GAMBAR 15.** Peta Wilayah Pengembangan FORCLIME Di Kalimantan Barat
- GAMBAR 16.** Kelembagaan Pokja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat

Daftar Lampiran

- LAMPIRAN 1** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah VIII Pontianak
- LAMPIRAN 2** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPDAS Kapuas
- LAMPIRAN 3** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan
- LAMPIRAN 4** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPSKL Wilayah Kalimantan
- LAMPIRAN 5** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari KPH di Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 6** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- LAMPIRAN 7** Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari KHDTK Untan

LAMPIRAN 8	Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon BPDAS Kapuas
LAMPIRAN 9	Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon BPSKL
LAMPIRAN 10	Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon KPH Di Kalimantan Barat
LAMPIRAN 11	Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
LAMPIRAN 12	Rencana Kerja Bidang peningkatan Cadangan Karbon KHDTK Untan
LAMPIRAN 13	Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS)
LAMPIRAN 14	Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)
LAMPIRAN 15	Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP)
LAMPIRAN 16	Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDA Kalimantan Barat)
LAMPIRAN 17	Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas
LAMPIRAN 18	Rencana Kerja Bidang Konservasi BPSKL Wilayah Kalimantan
LAMPIRAN 19	Rencana Kerja Bidang Konservasi KPH Di Kalimantan Barat
LAMPIRAN 20	Rencana Kerja Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
LAMPIRAN 21	Rencana Kerja Bidang Konservasi pada KHDTK Untan
LAMPIRAN 22	Kegiatan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut TRGD
LAMPIRAN 23	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
LAMPIRAN 24	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
LAMPIRAN 25	Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut KPH Di Kalimantan Barat
LAMPIRAN 26	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah III Pontianak
LAMPIRAN 27	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai Pelestarian Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII Pontianak
LAMPIRAN 28	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan
LAMPIRAN 29	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan
LAMPIRAN 30	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi KPH Di Kalimantan Barat
LAMPIRAN 31	Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Pada KHDTK Untan
LAMPIRAN 32	Di Luar Kawasan Hutan (KALFOR)

LAMPIRAN 33	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HHK-HA
LAMPIRAN 34	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HHK-HT
LAMPIRAN 35	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan RE
LAMPIRAN 36	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PS
LAMPIRAN 37	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan KHDTK
LAMPIRAN 38	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain HGU
LAMPIRAN 39	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain ILOK
LAMPIRAN 40	Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain IUP
LAMPIRAN 41	Tabel Daftar Nama Kawasan Konservasi
LAMPIRAN 42	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Bengkayang
LAMPIRAN 43	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Landak
LAMPIRAN 44	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Melawi
LAMPIRAN 45	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Mempawah
LAMPIRAN 46	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sambas
LAMPIRAN 47	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kota Singkawang
LAMPIRAN 48	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sanggau
LAMPIRAN 49	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sekadau
LAMPIRAN 50	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Kapuas Hulu
LAMPIRAN 51	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Kayong Utara
LAMPIRAN 52	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Ketapang
LAMPIRAN 53	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kota Pontianak
LAMPIRAN 54	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Kubu Raya
LAMPIRAN 55	Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sintang

BAB 01



PENDAHULUAN

BAB I | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertemuan Negara Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties*, COP 21 UNFCCC) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Persetujuan Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional, *National Determined Contribution* (NDC) dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC. Dokumen peta jalan (*Road Map*) merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per subsektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target.

Sebagai National Focal Point Indonesia untuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas di tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, Road Map NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Dokumen NDC Indonesia menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional, yakni sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO₂ dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta ton CO₂ dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Target NDC Indonesia sebesar 29% secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi GRK sebesar 17,2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0,10% pada sektor industri, dan 0,38% pada sektor limbah.

Sektor kehutanan dan lahan berkontribusi terhadap 17% dari 29% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM1, atau 24% dari 41% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM2. Aksi mitigasi pada sektor FOLU difokuskan pada lima aksi mitigasi utama. Aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU adalah penurunan emisi dari kebakaran gambut, deforestasi, dan dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*) Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (net emitter), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO₂e, sementara pada skenario LTS yang sejalan dari target Paris (LCCP), sektor ini sudah mencapai kondisi net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e. Memperhatikan hal tersebut Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam rangka implementasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030, Provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana kerja yang memberikan penjelasan atas; 1) capaian, target dan strategi; 2) implementasi dan operasional, dan 3) monitoring dan evaluasi untuk 12 (dua belas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu; 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

- a. Menjabarkan target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah (GRK) kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat sub nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi GRK sektor kehutanan dan lahan pada tingkat sub nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat sub nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat sub nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah tercapainya tingkat emisi nasional GRK sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban sub nasional Provinsi Kalimantan Barat terhadap rencana operasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);

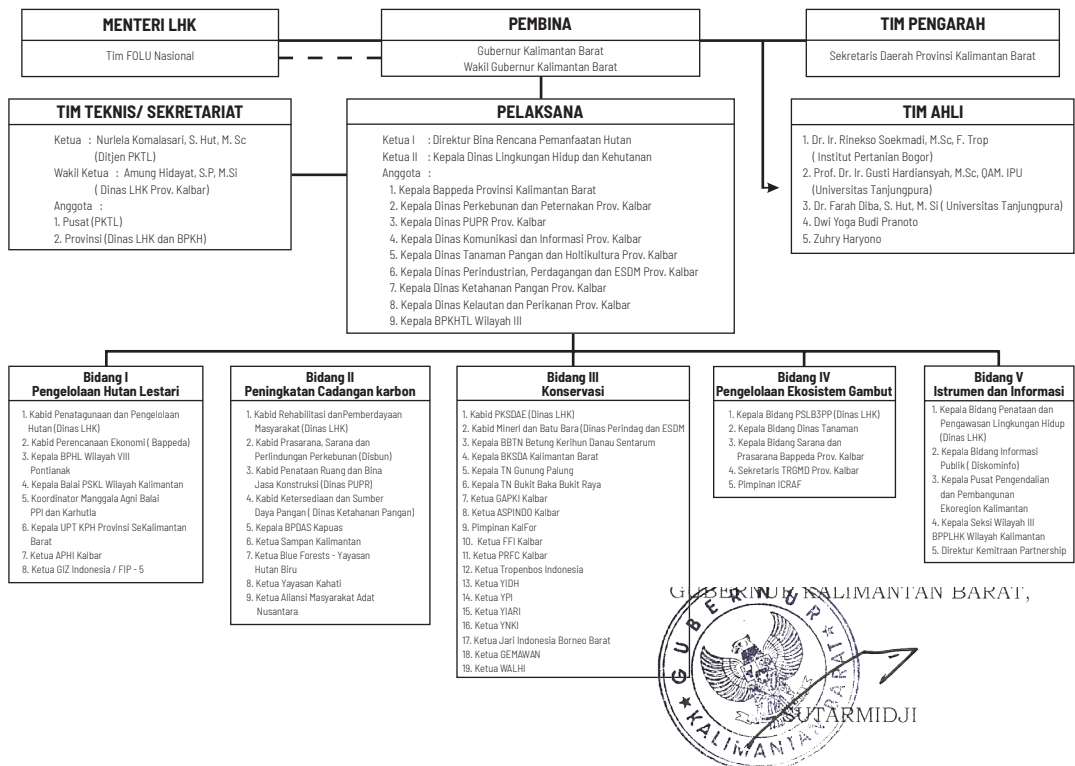
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030;
33. Keputusan Gubernur Nomor 1215/DLHK/2020 Tentang Target Penurunan dan Alokasi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030;
34. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 928/LHK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Struktur Organisasi



1.5. Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Kelompok kerja Bidang I bertanggung-jawab mengenai pengelolaan hutan lestari, hal ini dirincikan dalam matriks di bawah ini:

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
1	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hutan	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines pengendalian kebakaran hutan dan lahan, memantapkan prosedur pencegahan permanen pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan b. Melaksanakan implementasi pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan c. Secara khusus memantapkan sistem paralegal bagi Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Adat d. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengendalian kebakaran hutan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan
2	Perhutanan Sosial	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines perhutanan sosial b. Melaksanakan implementasi perhutanan sosial c. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi perhutanan sosial
3	Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan b. Melaksanakan implementasi penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan c. Melaksanakan monitoring dan pencatatan serta evaluasi implementasi operasional pengelolaan hutan lestari dengan kegiatan utama meliputi penerapan teknik reduced impact logging, penerapan teknik pengelolaan hutan lestari, pemulihan kawasan dan penegakan hukum, pengelolaan perizinan berusaha pemanfaatan hutan

Kelompok kerja Bidang II bertanggung-jawab mengenai peningkatan cadangan karbon, hal ini dirincikan dalam matriks di bawah ini:

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	a. Melaksanakan penyusunan manual/guideline ehabilitas hutan dan lahan b. Melaksanakan implementasi rencana rehabilitasi hutan dan lahan c. Melaksanakan implementasi rencana operasional rehabilitasi hutan dan lahan d. Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan Kerjasama masyarakat.
2	Pengelolaan Ekosistem Mangrove	a. Melaksanakan penyusunan manual/guideline operasional penanaman dan konservasi mangrove; b. Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman dan konservasi mangrove; c. Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan gambut penanaman dan konservasi mangrove; d. Mengembangkan inovasi kebijakan bidang RHL dalam pola kerja KPBU dan Kerjasama masyarakat.
3	Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian	a. Melaksanakan penyusunan manual/guideline operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian b. Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian; c. Melaksanakan implementasi rencana operasional penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, ruang terbuka hijau dan ekoriparian.

Kelompok kerja Bidang II bertanggung-jawab mengenai peningkatan cadangan karbon, hal ini dirincikan dalam matriks di bawah ini:

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
1	Konservasi Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies b. Melaksanakan implementasi operasional perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies
2	Intensifikasi Jasa Lingkungan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, KHDTK	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines operasional intensifikasi jasa lingkungan, taman nasional, taman hutan raya dan pengembangan kebun raya b. Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, pengembangan dan pengelolaan taman nasional, taman hutan raya dan pengembangan kebun raya c. Melaksanakan implementasi operasional intensifikasi jasa lingkungan, dan mendorong serta mendukung pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola taman hutan raya dan kebun raya d. Mendorong dan memfasilitasi RTH, taman hutan raya dan kebun raya dengan dukungan KPBU dan kerja sama masyarakat.
3	High Conservation Value Forest dan Kelola Fragmentasi Habitat	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, high conservation value forest dan penataan fragmentasi habitat; b. Melaksanakan implementasi operasional pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, high conservation value forest dan melakukan penataan, tata kelola habitat yang terfragmentasi dan pemulihannya.
4	Kemitraan Konservasi	a. Melaksanakan penyusunan manual/guidelines operasional kemitraan konservasi; b. Melaksanakan implementasi operasional kemitraan konservasi; c. Mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak; d. Menyiapkan dan fasilitasi langkah kemitraan konservasi bagi masyarakat;

Kelompok kerja Bidang IV bertanggung-jawab mengenai pengelolaan ekosistem gambut, hal ini dirincikan dalam matriks di bawah ini:

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
1	Kemitraan Kelola Gambut	a. Melaksanakan penyusunan manual / guidelines operasional tata kelola gambut dalam konsesi, Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya b. Melaksanakan implementasi operasi pengembangan program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) c. Melaksanakan pengendalian perizinan di area gambut d. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan kawasan gambut e. Pengendalian, pengawasan tata laksana dan kelola gambut
2	Rewetting dan Sarana	a. Melaksanakan penyusunan manual/ guidelines operasional pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (rewetting) gambut, penyiapan dan dukungan sarana b. Melaksanakan implementasi operasional pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, penyiapan dan dukungan sarana.

Kelompok kerja Bidang V bertanggung-jawab mengenai instrumen dan informasi, hal ini dirincikan dalam matriks di bawah ini:

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
1	Sosialisasi dan Komunikasi	a. Melaksanakan penyiapan informasi hasil kerja dengan berbagai sarana audiovisual material b. Menyiapkan standar sesuai kebutuhan c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan d. Melaksanakan transformasi sarana pojok iklim, dengan tahapan kerja dan desain kelembagaan serta operasionalnya e. Membangun kerja sama para pihak untuk keperluan sosialisasi edukasi publik f. Membangun forum interaksi atau konsultasi regulasi, operasi dan evaluasi kegiatan serta analisis feedback; serta membuat dan mengelola dashboard monitoring lapangan harian.

No	Unsur Kelompok Kerja	Tugas
2	Law Enforcement (Penegakan Hukum)	a. Menyiapkan manual langkah penegakan hukum b. Melaksanakan penegakan hukum c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi d. Mendorong pola kerja paralegal bersama masyarakat
3	Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standarisasi	a. Menyusun standar dan menetapkan pedoman menurut kebutuhan b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar, NSPK, dan kebijakan (sosialisasi, promosi, diseminasi, bimbingan teknis, pendampingan teknis) c. Melaksanakan monitoring dan mengikuti perkembangan kebijakan yang menonjol dan memerlukan penelaahan/penyesuaian d. Memformulasikan arah kebijakan baru dari hasil evaluasi dan perkembangan implementasi e. Membangun interaksi dalam penguatan dukungan kebijakan dan referensi untuk pengembangan kebijakan



BAB 02

KONDISI UMUM DAN KERANGKA REGULASI
PENDUKUNG FOLU NET SINK 2030 SUB
NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB II | KONDISI UMUM DAN KERANGKA REGULASI PENDUKUNG FOLU NET SINK 2030 SUB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1. Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08' LU serta 3°05' LS serta di antara 108°0' BT 114°10' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses darat untuk masuk dan keluar dari negara asing.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan dataran rendah dengan luas sekitar 147.315 km² atau 7.53% dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Batas-batas wilayah Kalimantan Barat selengkapnya adalah:

Utara : Serawak (Malaysia)

Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah

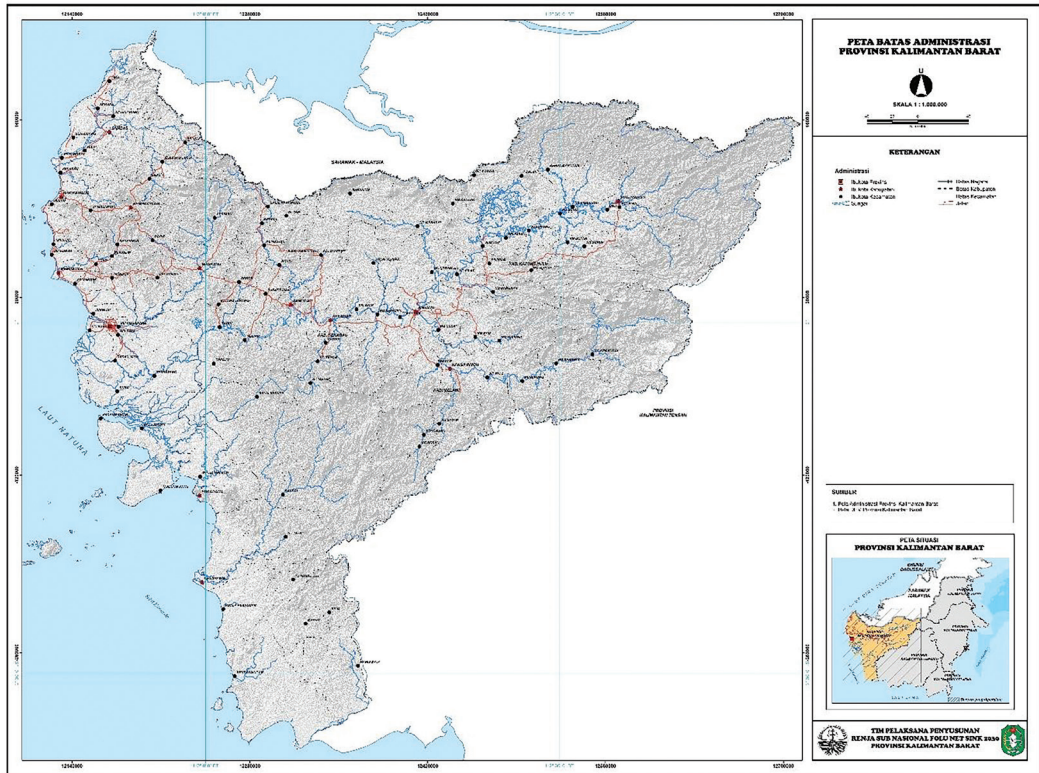
Timur : Kalimantan Tengah

Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu 12 kabupaten dan dua kota. Ke 14 kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

TABEL 1. | Jumlah kecamatan dan kelurahan/desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk
Kabupaten Sambas	19		193	5.903,29	639.741
Kabupaten Mempawah	9	7	60	1.935,42	307.846
Kabupaten Sanggau	15	6	163	12.595,56	489.409
Kabupaten Ketapang	20	9	253	30.139,24	574.966
Kabupaten Sintang	14	16	390	22.087,44	423.303
Kabupaten Kapuas Hulu	23	4	278	31.225,50	258.225
Kabupaten Bengkayang	17	2	122	5.542,82	289.688
Kabupaten Landak	13		156	8.347,94	404.155
Kabupaten Sekadau	7		87	5.754,57	215.67
Kabupaten Melawi	11		169	10.122,51	209.069
Kabupaten Kayong Utara	6		43	4.162,14	128.009
Kabupaten Kubu Raya	9		117	8.550,35	610.212
Kota Pontianak	6	29		118,21	672.440.
Kota Singkawang	5	26		550,19	239.260.
Total Kalimantan Barat	174	99	2.031	147.035,20	5.461.993

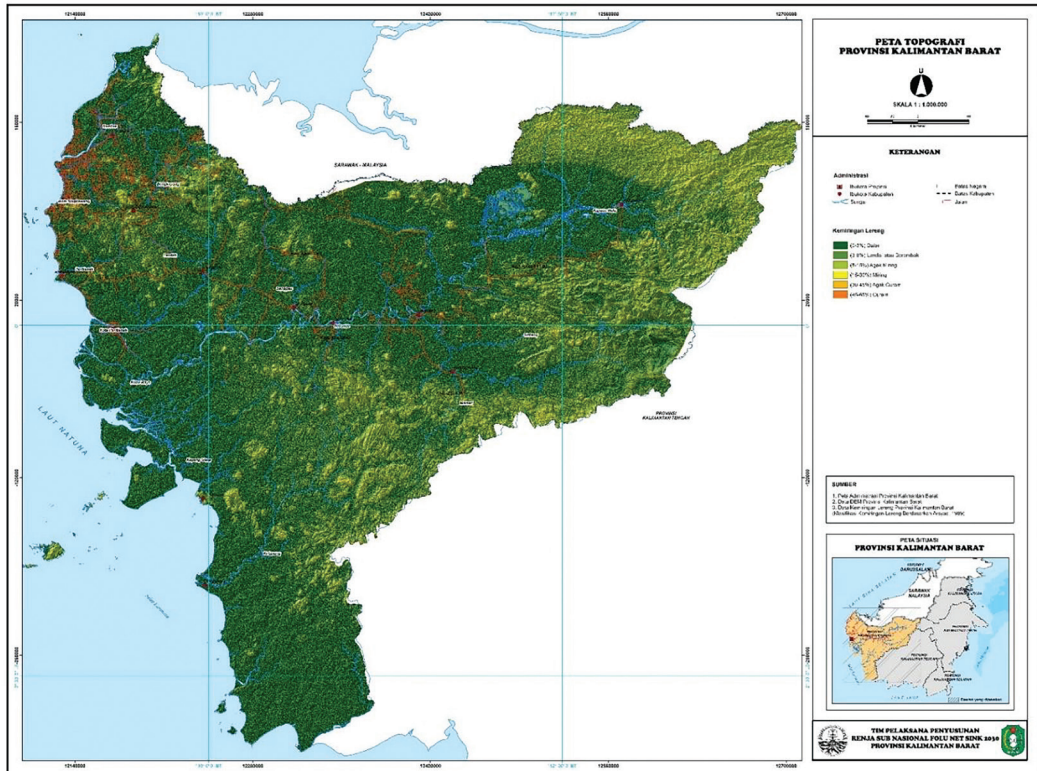


Gambar 1. Peta Kalimantan Barat

2.1.1. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna dan Selat Karimata, sepanjang daerah dataran berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah dataran diapit oleh Pegunungan Kalingkang Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturaya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian 2.278 m dari permukaan laut dan terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 m di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.

Sekitar 29,21% atau 4.287.880 ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2% atau cenderung datar. Sementara itu, sekitar 33,34% atau 4.894.333 ha berada pada kelas lereng 2-15% atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31% atau 3.127.844 ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40% atau cenderung curam dan sekitar 16,15% atau 2.370.643 ha wilayah



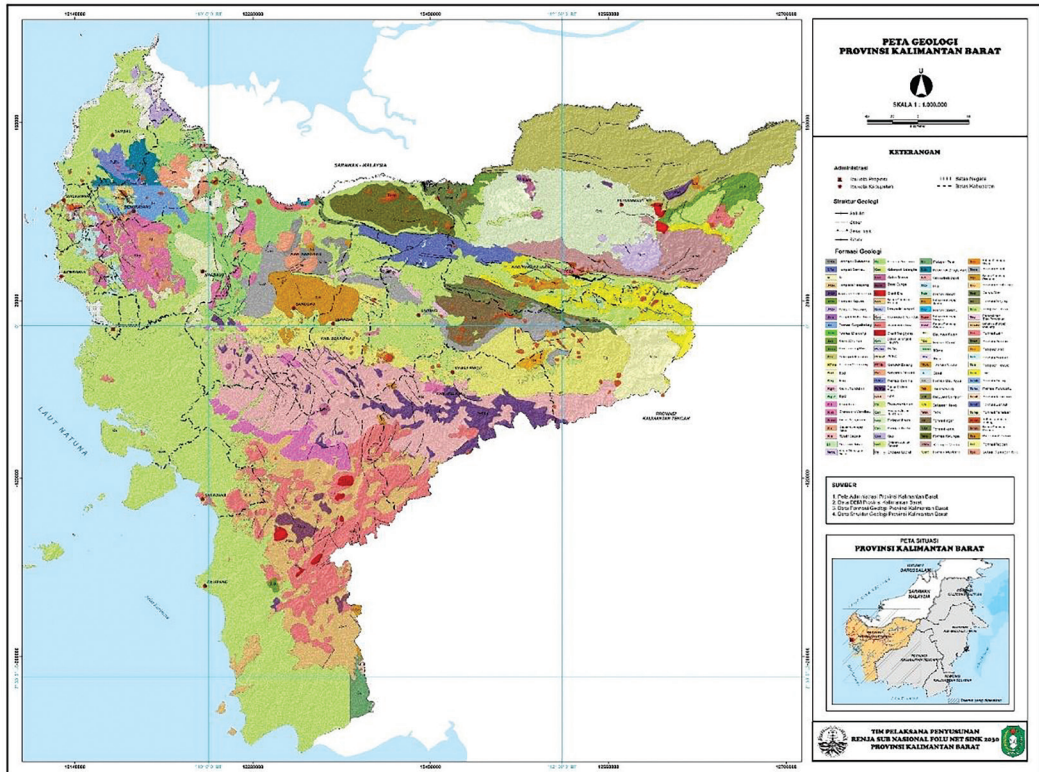
Gambar 2. Peta Topografi Kalimantan Barat

2.1.2. Geologi dan Tanah

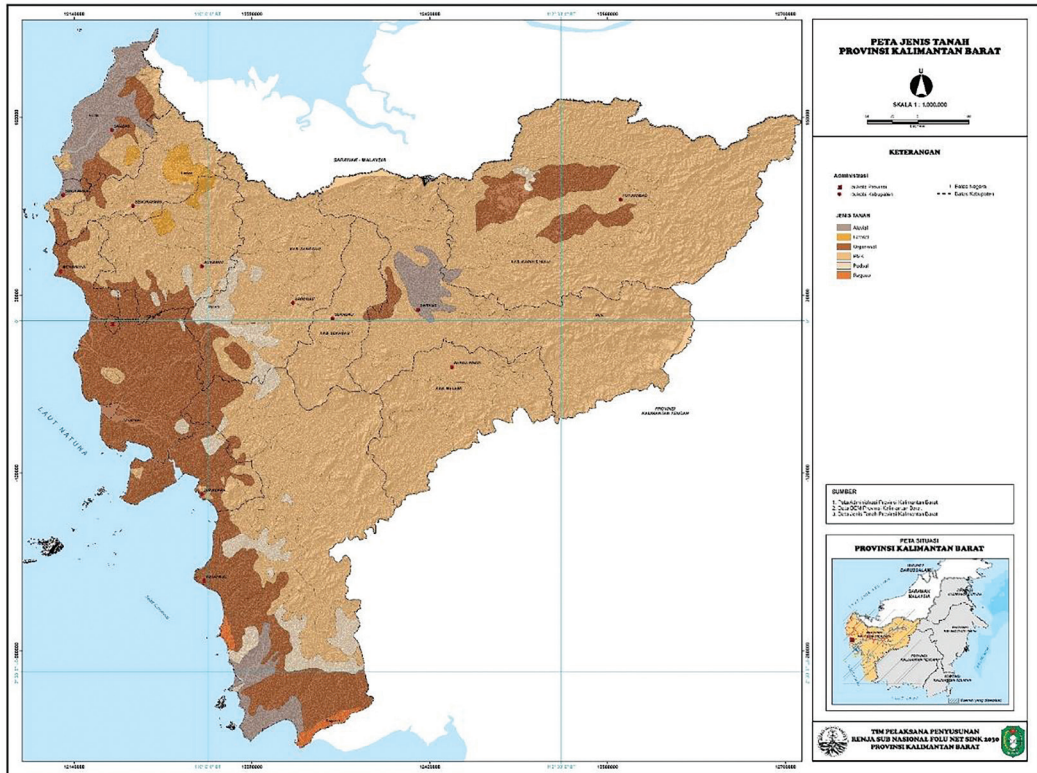
Kalimantan Barat terbagi menjadi tiga satuan bentang alam yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan dataran perbukitan dengan pola sungai dendritik. Dataran rendah ditempati sebagian wilayah pantai didominasi endapan aluvium, pasir dan batuan granit terbentang dari Kabupaten Sambas, Singkawang, Pontianak, hingga Ketapang Barat, yaitu Sukadana dan Kendawangan. Dataran tinggi menempati bagian tengah terdiri dari batuan sedimen, batuan terobosan, dan metasedimen yang terbentang dari Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang Timur dan Nanga Pinoh. Sedangkan dataran perbukitan menempati wilayah Kalimantan Barat bagian Utara yang membentang dari Bengkayang Timur, Sanggau, Sintang hingga Kapuas Hulu. Kabupaten Melawi dan sebagian wilayah Kabupaten Sintang memiliki morfologi dataran tinggi dan terbentang Sungai Melawi yang didominasi oleh batuan sedimen.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah sedang yakni seluas 6.714.126 ha, sedangkan seluas 3.439.943 ha merupakan jenis tekstur tanah halus, sementara seluas 2.762.006 ha merupakan jenis tekstur tanah kasar, dan seluas 1.543.752 ha merupakan jenis tekstur tanah gambut, serta seluas 220.873 ha merupakan jenis tekstur tanah rawa.

Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 ha memiliki kandungan tanah Kwartar. Sedangkan seluas 3.102.464 ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan seluas 1.468.680 ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Na



Gambar 3. Peta Geologi Kalimantan Barat

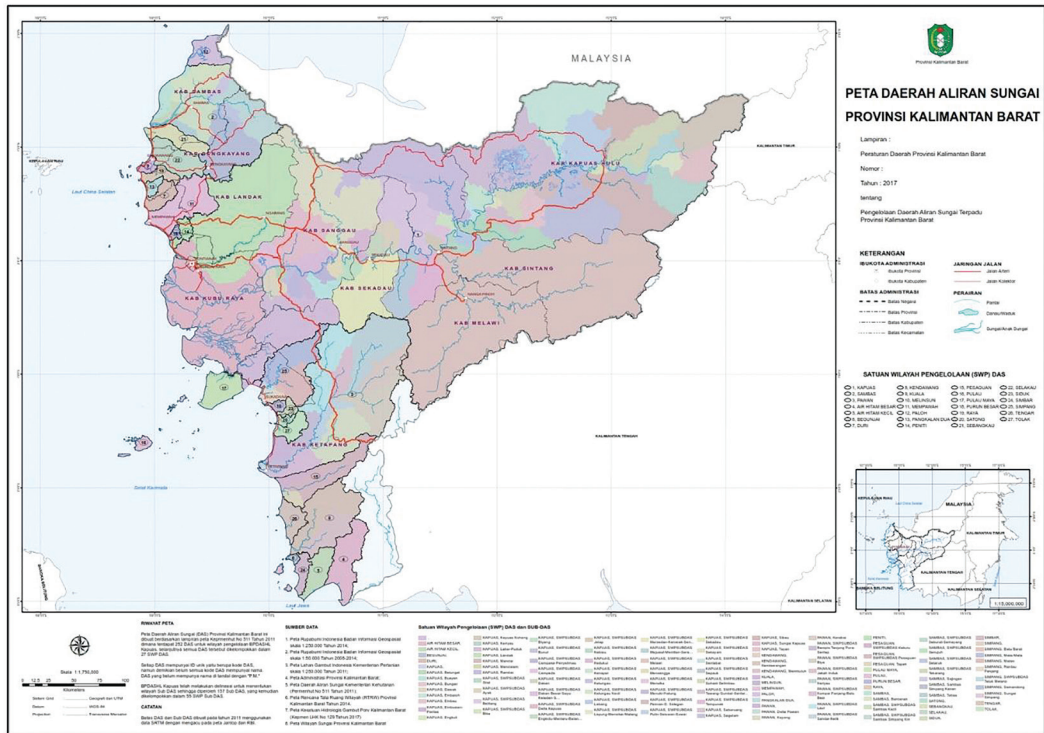


Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kalimantan Barat

2.1.3. Hidrologi dan DAS

Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang dijuluki dengan “Seribu Sungai”, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

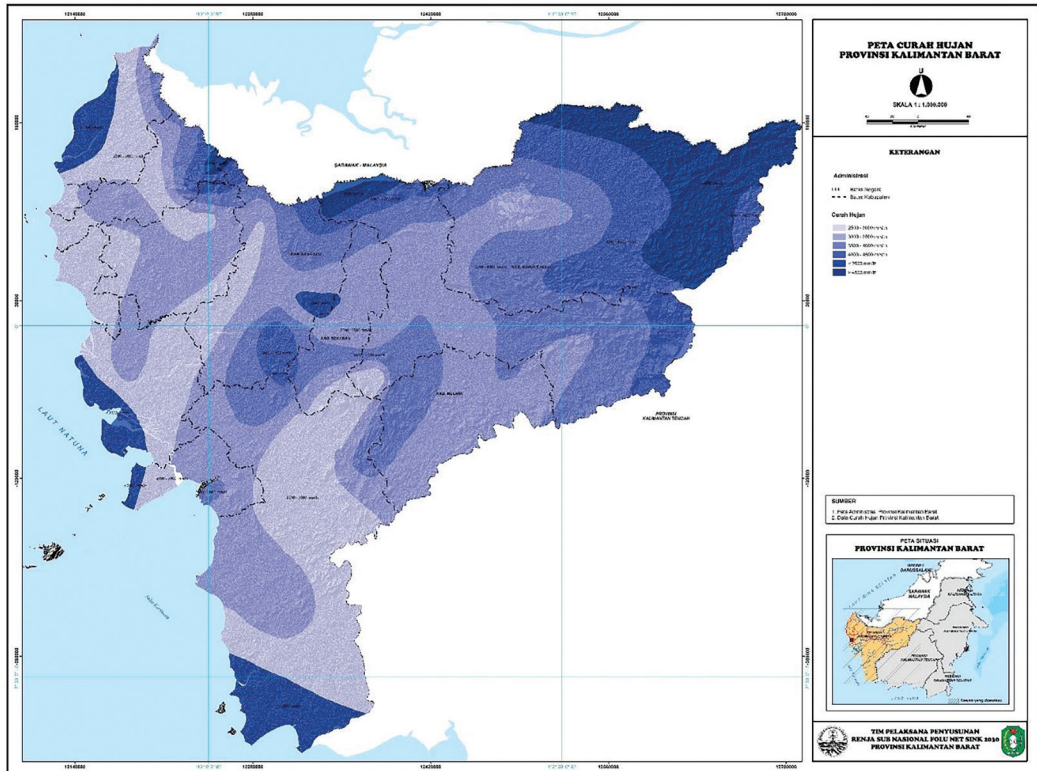
Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas (117.500 ha) dan Danau Luar I (5.400 ha). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Terdapat



Gambar 5. Peta Jenis Tanah Kalimantan Barat

2.1.4. Klimatologi

Posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa, sehingga iklim di Kalimantan Barat berupa iklim Tropis dengan dua musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari Stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 21,40°C pada rata-rata akhir tahun 2021 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 34,60°C pada rata-rata akhir tahun 2021. Kelembaban terendah 49% dan kelembaban tertinggi 98% dengan rata-rata kelembaban 79% pada tahun 2021. Pada akhir tahun 2021 tercatat curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi sebesar 2918,2 mm dengan jumlah hari hujan tertinggi 208 hari serta penyinaran matahari 67,50%.



Gambar 6. Peta Curah Hujan Kalimantan Barat

2.1.5. Gambut

Luasan gambut di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1.681.882 ha atau 11,28% di Indonesia (BBSDLP, 2011). Angka ini lebih kecil dari perkiraan Wetlands Internasional (2002) sebesar 1.746.654 ha, dengan rincian kabupaten kota sebagai berikut:

TABEL 2. | Sebaran luasan lahan gambut kabupaten/kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	Luasan (ha)	Proporsi (%)
Kabupaten Sambas	77.955	4,63
Kabupaten Bengkayang	43.746	2,60
Kabupaten Landak	60.121	3,60
Kabupaten Mempawah	72.242	4,30
Kabupaten sanggau	84.325	5,01
Kabupaten Ketapang	253.182	15,05
Kabupaten Sintang	65.476	3,90
Kabupaten Kapuas Hulu	265.557	15,80
Kabupaten Sekadau	11.357	0,70
Kabupaten Melawi	5.425	0,32
Kabupaten Kayong Utara	215.949	12,85
Kabupaten Kubu Raya	521.808	31,03
Kota Pontianak	2.28	0,14
Kota singkawang	459	0,03
Total Kalimantan Barat	1.681.882	100%

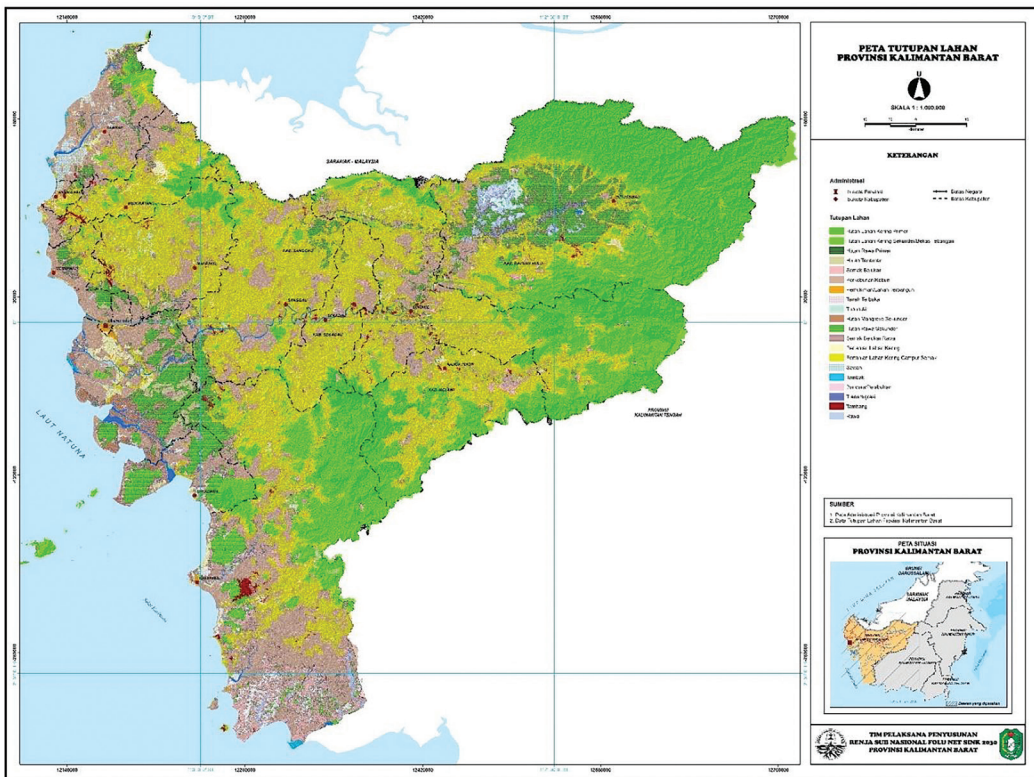
Sumber: FREL, 2016

Luasan lahan gambut tiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya (31,03%), Kapuas Hulu (15,80%) dan Kabupaten Ketapang (15,05%). Lahan gambut pada tiga kabupaten tersebut hampir 50% keseluruhan lahan gambut di Kalimantan Barat.

2.1.6. Penutupan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, total luas kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721 ha dan kawasan non budidaya 8.322.447 ha. Kawasan

lindung terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam terestrial/daratan seluas 1.430.101 ha, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 190.945 ha, dan hutan lindung seluas 2.310.873 ha.



Gambar 7. Peta Penutupan Lahan Kalimantan Barat

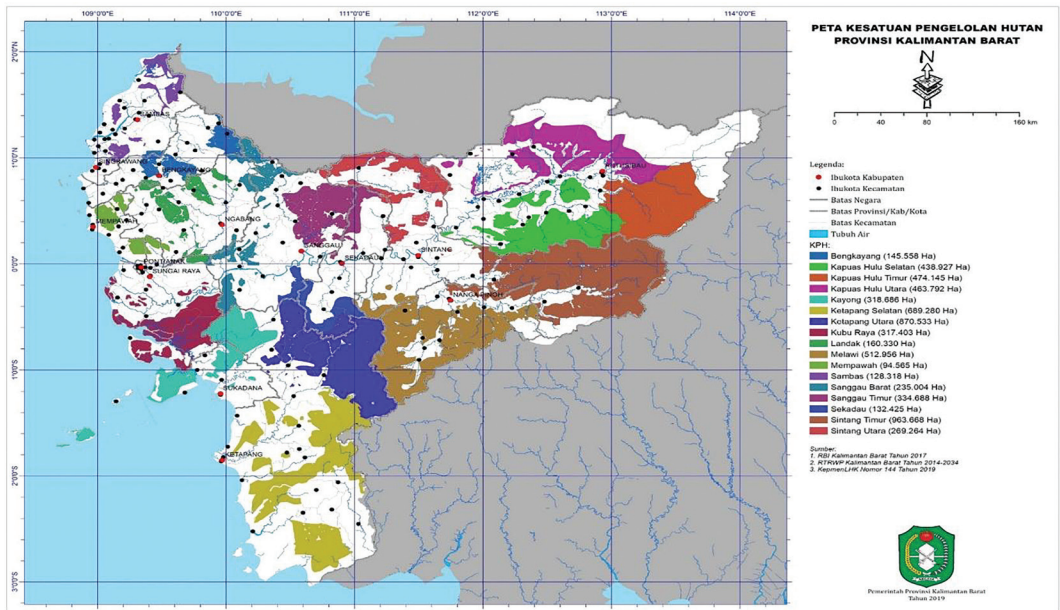
Penetapan wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan basis kewilayahan dan peruntukan kawasan. Wilayah KPH Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 yang telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tentang Penetapan Wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan SK tersebut, kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat dibagi habis ke dalam 34 Unit Pengelolaan Hutan dengan luas mencapai $\pm 6.549.542$ ha atau $\pm 45\%$ dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan perincian:

a. KPHL sejumlah 6 Unit seluas 1.451.470 ha

b. KPHP sejumlah 28 Unit seluas 5.098.072 ha

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan Pembentukan UPT KPH Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 93 hingga Nomor 109 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 hingga Nomor 49 Tahun 2020.



Gambar 8. Peta KPH Provinsi Kalimantan Barat

TABEL 3. | Sebaran luasan lahan gambut kabupaten/kota di Kalimantan Barat

No	KPH	Unit	Luas			TOTAL
			HL	HP	HPT	
1	Bengkayang	II	29.749	69.696	46.113	145.558
2	Kapuas Hulu Selatan	XXI	201.848	80.694	156.386	438.927
3	Kapuas Hulu Timur	XXI	331.658	35.000.	107.487	474.145

No	KPH	Unit	Luas			TOTAL
			HL	HP	HPT	
4	Kapuas hulu Utara	XVIII, XIX	264.222	70.983	128.587	463.792
5	Kayong	XXV	75.318	243.369		318.686
6	Ketapang Selatan	XXIX, XXX, XXXI, XXXII	117.959	387.032	184.289	689,280
7	Ketapang Utara	XXVI, XXVII, XXVIII	183.243	49.613	448.927	681.784
8	Kubu Raya	XXXIII	140.064	113.681	63.658	317.403
9	Landak	VI, VII	47.551	112.779		160.33
10	Melawi	XIII,XXII,XXIII,XXIV	269.59	163.193	268.922	701.705
11	Mempawah	VIII	4.574	68.853	21.138	94.565
12	Sambas	I	25.616	91.519	11.182	128.317
13	Sanggau Barat	III,V	62.128	136,760	36.116	235.005
14	Sanggau Timur	IV, XI	42.839	291.849		334.688
15	Sekadau	XIII	67.920.	34.264.	30.241.	132.425
16	Sintang Timur	XIV, XV, XVI, XVII	365.956	44.207	553.505	963.668
17	Sintang Utara	IX, X, XXXIV	76.906	121.623	70.735	269.264
	TOTAL		2.307.141	2.115.116	2.127.285	6.549.541

Sumber: Forum KPH Kalimantan Barat, 2022

Melihat tabel di atas, KPH terluas adalah KPH Sintang Timur dengan pengelolaan berada pada Unit XIV, Unit XV, Unit XVI dan Unit XVII dengan luasan sekitar 14,71% dari total KPH di Kalimantan Barat. Sedangkan KPH terkecil adalah KPH Mempawah dengan pengelolaan berada pada Unit VIII seluas 1,44% dari total KPH di Kalimantan Barat. KPH di Kalimantan Barat mengelola kawasan seluas 44,89% dari total wilayah daratan Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi penutupan hutan sangat dinamis dan berubah dengan cepat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dengan menggunakan data series hasil penafsiran citra satelit, maka laju deforestasi di Provinsi Kalimantan Barat dapat diprediksi. Hal ini dapat dilihat dari tabel deforestasi periode 2010 hingga 2020 yang terjadi di Kalimantan Barat

TABEL 4. | Kondisi Tutupan Hutan Kalimantan Barat 2010-2020

No	Kelas Penutupan Lahan	Tahun 2010	Tahun 2020
1	Hutan Kering Primer	2.300.589	2.233.804
2	Hutan Kering Sekunder	2.423.687	2.063.796
3	Hutan Rawa Primer	27.978	
4	Hutan Rawa Sekunder	1.552.236	1.133.251
5	Hutan Mangrove Primer		
6	Hutan Mangrove Sekunder	118.756	118,476
Total		6.422.247	5.549.328

Sumber: BPKH Wilayah III Pontianak, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dalam periode selama sepuluh tahun, laju deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat seluas 892.919 ha, atau bila dirata-ratakan per tahun terjadi deforestasi seluas 89,29 ha. Sementara itu, terkait dengan laju degradasi hutan berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan penurunan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar $\pm 1.497.619$ ha antara tahun 1990 – 2012 yang mana setara dengan rata-rata kehilangan hutan tahunan 68.840 ha dan penurunan kualitas hutan dari degradasi seluas ± 238.414 ha yang mana setara 10.837 ha antara tahun 1990 – 2012.

Area penting berikutnya di Kalimantan Barat adalah kawasan yang dalam pengelolaannya karena sebagai areal penyelamatan habitat spesies penting dan ekosistem penting, yaitu Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Lokasi KEE berada di bentang alam Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 718/Dishut/2017. Bentang alam yang menjadi KEE adalah kawasan Rawa Air Tawar – DAS – DAS Mendawak dan Koridor Orangutan Sungai Putri – Gunung Tarak – Gunung Palung.



Kalimantan Barat memiliki Kebun Raya Sambas yang merupakan satu-satunya kebun raya di Provinsi Kalimantan Barat dan salah satu terbesar di dunia dengan luasan sekitar 300 ha, Kebun Raya Sambas ini patut dikembangkan untuk konservasi tumbuhan dengan prioritas tumbuhan khas Kalimantan. Kawasan Kebun Raya Sambas secara umum merupakan lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan sekunder dengan tipe hutan dataran rendah dan sedikit hutan rawa serta hutan riparian. Keanekaragaman hutan Kalimantan merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Dari seluruh keragaman hayati tersebut berbagai spesies tumbuhan maupun satwa liar hidup bebas menghuninya dan merupakan keunikan tersendiri dari Kebun Raya Sambas.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; kawasan peruntukan hortikultura; kawasan peruntukan perkebunan; kawasan peruntukan peternakan; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan pertahanan.

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 ha yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
- Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 ha yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
- Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 ha yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu

B. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 ha yang diarahkan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Pengembangan kawasan hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

D. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada

di diseluruh kabupaten/kota dengan tanaman komoditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada dan Kakao.

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di seluruh Kabupaten dan Kota Singkawang.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi:

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

- Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
- Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
- Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
- Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
- Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
- Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
- Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
- Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;
- Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
- Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
- Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
- Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata

B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.

C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

- Kawasan strategis ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
- Kawasan strategis ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
- Kawasan strategis ekosistem Gunung Nyiut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;
- Kawasan strategis ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- Kawasan rawan bencana alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang

3. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

A. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung

B. Kawasan perlindungan setempat

- Pantai tersebar di enam kabupaten dan satu kota yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang dan Kota Singkawang dengan lebar jalur paling sedikit 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
- Sempadan sungai besar yang berada pada Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh di WS Sambas; Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti di WS Mempawah; Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriayu (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang di WS Kapuas; Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriayu (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan di WS Pawan; Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah di WS Kendawangan-Jelai. Sedangkan sempadan sungai kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di lima kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.

C. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

D. Kawasan rawan bencana alam

- Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.
- Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak

E. Kawasan lindung geologi

- Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
- Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota

F. Kawasan lindung lainnya

- Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.
- Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas

2.1.8. Kondisi Sosial dan Budaya

Daerah Kalimantan Barat dihuni oleh penduduk asli Dayak dan aneka ragam suku bangsa. Suku bangsa dominan besar yaitu Dayak, Melayu dan Tionghoa, yang melebihi 90% penduduk Kalimantan Barat. Selain itu terdapat juga suku-suku bangsa lain antara lain Bugis, Jawa, Madura, Minangkabau, Sunda, Batak dan lain-lain yang jumlahnya di bawah 10%.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat secara umum adalah Bahasa Indonesia. Selain itu terdapat pula bahasa-bahasa daerah yang juga banyak dipakai seperti Bahasa Melayu dan beragam jenis Bahasa Dayak. Menurut penelitian Institut Dayakologi terdapat 188 dialek yang dituturkan oleh suku Dayak dan Bahasa Tionghoa seperti Tiochiu dan Khek/Hakka. Bahasa Melayu di Kalimantan Barat terdiri atas beberapa jenis, antara lain Bahasa Melayu Pontianak, Bahasa Melayu Sanggau dan Bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu Pontianak sendiri memiliki logat yang hampir mirip dengan bahasa Melayu Malaysia dan Melayu Riau.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat (2022), jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 5.470.797 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih banyak sebesar 51,3% dibandingkan penduduk perempuan. Di antara kelompok umur (pokmur) penduduk tertinggi 0-4 tahun sebesar 8,6% dari keseluruhan umur 0 tahun hingga 75+ tahun.

Penduduk miskin, yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada bulan September 2021 tercatat 354.000 orang. Selama periode Maret – September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 2.140 orang (dari 86.900 orang pada Maret 2021 menjadi 89.040 orang pada

September 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 16.030 orang (dari 280.990 orang pada Maret 2021 menjadi 264.960 orang pada September 2021). Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Selama periode Maret-September 2021, garis kemiskinan di perkotaan naik sebesar 5,28%, yaitu dari Rp. 513.341,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 540.474,- per kapita per bulan pada September 2021. Sementara itu, garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami kenaikan sebesar 4,10% dari Rp 467.362,- perkapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 486.544,- per kapita per bulan pada September 2021.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas baik yang bekerja ataupun sementara tidak bekerja dan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menganggur. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, maka semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Sehingga jika angkatan kerja di suatu daerah banyak dan dapat dimanfaatkan secara maksimal, daerah tersebut tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan/produksi suatu barang dan jasa. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 2.635.760 penduduk, dengan rincian terdapat sebanyak 1.621.687 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 1.014.073 penduduk berjenis kelamin perempuan.

Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang sedang fokus pada pengendalian Covid-19 harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kemiskinan karena pandemi ini akan menambah jumlah pengangguran di Kalimantan Barat. Terutama masyarakat yang bekerja dari sektor informal atau yang pekerja lepas harian yang memiliki sumber pendapatan melalui perdagangan di tempat ramai, pariwisata, area terbuka, acara kerumunan sosial. Dengan adanya pembatasan gerak masyarakat, sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan dan meningkatkan sisi penawaran tenaga kerja akibat PHK.

Dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, himbauan untuk melakukan physical distancing yang memberikan efek domino tersendiri bagi masyarakat sehingga tidak semua masyarakat mematuhi himbauan ini terutama kelas masyarakat yang rentan dengan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja formal di Indonesia berjumlah 55.272.968 orang sedangkan pekerja informal sejumlah 74.093.224. Jumlah pekerja informal lebih banyak ini menyebabkan kerentanan sosial sehingga dihadapkan pada pilihan untuk mematuhi himbauan pemerintah atau berinteraksi untuk mencari nafkah. Misalnya dalam kebijakan physical distancing pemerintah dengan anjuran untuk “di rumah aja”. Berdasarkan pertimbangan rasional dari sisi kesehatan, slogan “di rumah aja” mampu menghentikan penyebaran virus Covid-19. Namun anjuran ini menjadi irasional ketika diterjemahkan oleh kalangan bawah, pekerja informal, maupun pekerja lepas harian yang harus memenuhi kebutuhan makannya secara harian dan mengharuskan bekerja atau berkegiatan dari di luar rumah.

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat cenderung stabil yang berada di sekitaran 4% tetapi pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan tetap diam di rumah membuat tingkat pengangguran naik sekitar 1,65 poin atau 39,66%. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama kabupaten/kota yang mengandalkan

leading sector jasa. Kota Pontianak dan Kota Singkawang merupakan kabupaten/kota yang paling merasakan dampak dari Covid-19 ini karena kedua kota tersebut sangat mengandalkan sektor jasa. Selain itu, dari penduduk usia kerja di Kalimantan Barat yang mencapai 2,6 juta dan terdapat 326.210 orang yang terdampak Covid-19 atau 12,6%. Dengan berkurangnya jam kerja merupakan efek Covid-19 yang paling terasa untuk penduduk usia kerja dengan jumlah 269.210 orang atau sebesar 82,53%. Sedangkan jumlah penganggur karena efek Covid-19 sebanyak 33.220 orang atau sekitar 21,92% terhadap total penganggur (151.560 orang) di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan sektor pekerja informal di Kalimantan Barat didominasi oleh laki-laki.

Secara umum, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat bahwa fenomena pemulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari Luar Negeri saat Covid-19 menambah pencari kerja di daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan hubungan kerja sehingga mau tak mau PMI tersebut harus bersaing mencari pekerjaan di kampung halaman. Saat ini jumlah PMI asal Kalimantan Barat yang pulang dari Januari-November Tahun 2020 sebanyak 392 orang. Pada tahun 2020 ini, terjadi peningkatan pemulangan PMI bermasalah baik karena deportasi maupun repatriasi asal Kalimantan Barat sebesar 84% yakni dari 1141 orang di tahun 2019 menjadi 2061 di tahun 2020 (30 November 2020). Hal ini terjadi karena Malaysia mengalami resesi akibat pandemik Covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi Malaysia pada Kuartal II sebesar 17,1% dan Kuartal II sebesar 2,7%.

Sebanyak 11 karya budaya asal Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2021. Karya budaya tersebut termasuk keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan. Karya budaya tersebut antara lain (1) Gelar Adat Toana, (2) Tari Pedang Mualang, (3) Pengkang, (4) Babungkong Dayak Mahap, (5) Tari Otar-Otar, (6) Jerok (Jerok Daun Getah Ketungau Tesaek Sekadau), (7) Antar Ajong, (8) Kelepai Dayak Kerabat Sekadau, (9) Jappin Lambut, (10) Tubuk Masam dan Tubuk Jemui Ketungau Tesaek Sekadau, (11) Sungkui Dayak Taman Sekado

2.1.9. Kondisi Ekonomi

Berbagai negara dan daerah melakukan kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan social and *physical distancing* (menjaga jarak aman antar individu dan menghindari kerumunan) merupakan hal yang sulit untuk budaya masyarakat Indonesia yang memiliki perilaku sosial dengan tingkat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Pemerintah Indonesia sendiri membuat slogan tersendiri dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 yang lebih luas sehingga masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan tertentu namun tetap menjaga protokol kesehatan.

Data di periode Mei 2022, menurut Bank Indonesia (2022) pada laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I 2022

terus melanjutkan pertumbuhan positif meskipun mengalami perlambatan. Perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,05% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,31% (yoy). Pertumbuhan yang positif ini searah dengan pertumbuhan yang terjadi pada regional Kalimantan dan nasional. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional kawasan Kalimantan yang tumbuh sebesar 3,21% (yoy), besaran pertumbuhan Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 tercatat lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy), pertumbuhan Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 tersebut tercatat lebih rendah. Provinsi Kalimantan Barat memiliki pangsa sebesar 15,53% terhadap perekonomian kawasan Kalimantan pada triwulan I 2022. Pangsa tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,26%. Di sisi lain, kontribusi total perekonomian kawasan Kalimantan terhadap perekonomian nasional pada triwulan I 2022 sebesar 8,09%, menurun dibandingkan dengan kontribusi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,33% seiring perlambatan kinerja beberapa sektor utama kawasan Kalimantan.

Pada triwulan I 2022, perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peningkatan kinerja beberapa komponen penawaran terutama pertambangan dan perdagangan yang masing-masing tumbuh 41,23% dan 9,31% (yoy), serta memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,00% dan 1,23%. Peningkatan kinerja pertambangan ditopang oleh harga komoditas yang relatif tinggi dan ekspor komoditas unggulan seperti bauksit dan alumina, sehingga meningkatkan pertumbuhan komponen pertambangan. Selain itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran juga dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan permintaan di tengah pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan oleh pemerintah, berlanjutnya tren peningkatan harga komoditas utama Kalimantan Barat, libur awal tahun, dan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Dari sisi penawaran, kinerja Lapangan Usaha (LU) triwulan I 2022 melanjutkan perbaikan pada beberapa komponen. Secara triwulanan, sebagian besar komponen penawaran pada triwulan I 2022 melanjutkan pertumbuhan positif secara year on-year (yoy) dari triwulan IV 2021 kecuali LU pertanian, administrasi pemerintahan, dan real estate yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan pada LU pertambangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan sebagai pangsa terbesar dalam perekonomian Kalimantan Barat menjadi faktor yang mendorong kinerja pertumbuhan pada triwulan I 2022. Pertumbuhan LU pertambangan tercatat tinggi mencapai 41,23% (yoy) pada triwulan I 2022. Kinerja LU perdagangan besar dan eceran; konstruksi; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta informasi dan komunikasi masing-masing turut mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,31% (yoy); 8,02% (yoy); 1,77% (yoy); 10,31% (yoy); 10,70% (yoy); dan 4,62% (yoy). Di sisi lain, terdapat LU yang mengalami kontraksi pada triwulan I 2022, yaitu LU pertanian, administrasi pemerintahan, dan real estate. LU pertanian, administrasi pemerintahan, dan real estate masing-masing mengalami kontraksi sebesar -5,45% (yoy), -3,34% (yoy), dan -0,02% (yoy).

Kontraksi tersebut lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -4,17% (yoy), -1,55% (yoy), dan -8,67% (yoy). Perlambatan kinerja LU pertanian disebabkan oleh penurunan produksi pertanian karet dan palawija akibat fenomena alih lahan karet menjadi perkebunan kelapa sawit dan La Nina yang terjadi pada awal tahun. Sedangkan perlambatan kinerja pada LU administrasi pemerintahan disebabkan oleh penurunan

konsumsi pemerintah pada triwulan I 2022, tercermin dari kontraksi realisasi belanja APBD dan APBN di daerah secara *year on year*.

Berdasarkan pangsa terhadap PDRB, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 masih didominasi oleh empat LU utama, yaitu LU pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi, dengan total pangsa sebesar 63,70% terhadap ekonomi Kalimantan Barat. LU pertanian masih mendominasi pangsa PDRB yaitu sebesar 22,54% diikuti oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi masing-masing sebesar 16,48%, 12,86% dan 11,82%. Dari sisi kontribusi atau andil terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I 2022, LU pertambangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi terbesar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Andil tertinggi disumbangkan oleh LU pertambangan serta perdagangan besar dan eceran yang masing-masing memberikan andil sebesar 2,00% dan 1,23%. LU lainnya dengan andil yang tinggi terhadap realisasi pertumbuhan pada triwulan I 2022 antara lain konstruksi dengan andil sebesar 0,77%, transportasi dan pergudangan dengan andil sebesar 0,32%, serta industri pengolahan dengan andil sebesar 0,28%.

Berdasarkan analisis pemetaan matriks komponen sisi penawaran PDRB Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 diketahui bahwa terdapat tiga LU yang termasuk dalam pemetaan kuadran potensial dengan persentase pertumbuhan dan pangsa yang melebihi rata-rata seluruh lapangan usaha pada triwulan berjalan, yaitu LU pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi.

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 3,50% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,17% (yoy). Penanganan Covid-19 yang makin baik, perayaan HBKN, dan libur awal tahun di tengah tingginya harga komoditas unggulan dan pelonggaran kebijakan syarat tes Covid-19 untuk penerbangan meningkatkan keyakinan masyarakat. Hal tersebut terindikasi dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2022. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat sehingga mendorong perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 mengalami peningkatan menjadi 148,81 dari sebesar 140,75 pada triwulan IV 2021. Kenaikan NTP tersebut didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani, terutama pada perkebunan rakyat (NTPR). Hal ini antara lain disebabkan oleh peningkatan harga TBS sepanjang triwulan I 2022. Harga rata-rata TBS pada triwulan I 2022 sebesar Rp. 3.174/kg atau tumbuh sebesar 62,10% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.958/kg. Harga TBS tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata pada triwulan IV 2021 sebesar Rp. 2.838/kg. Sementara itu, harga rata-rata karet pada triwulan I 2022 sebesar Rp. 22.568/kg atau meningkat dibandingkan dengan rata-rata harga periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 21.206/kg.

Kinerja investasi yang tercermin melalui indikator PMTB tercatat tumbuh sebesar 1,43% (yoy) pada triwulan I 2022, yang didorong oleh kenaikan realisasi investasi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Pertumbuhan positif investasi terjadi baik pada nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masing-masing

tumbuh 106,4% (yoy) dan 141,76% (yoy). Secara kumulatif, realisasi PMDN triwulan I 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi PMDN pada triwulan I 2022 secara nominal tercatat sebesar Rp. 3,07 triliun atau meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang sebesar Rp. 1,27 triliun. Secara presentase, realisasi PMDN triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 141,76% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 51,24% (yoy).

Pertumbuhan realisasi PMDN terutama terjadi pada sektor primer (pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan) dan tersier (PHR, konstruksi, LGA, transportasi dan perdagangan, perumahan, dan jasa lainnya) yang masing-masing tumbuh 311,4% (yoy) dan 141,76% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan jumlah proyek PMDN pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 1.371 proyek atau mengalami peningkatan sebesar 67,20% (yoy). Investasi pada proyek strategis nasional dan investasi pelaku usaha dalam negeri yang masih berlangsung, terutama pada perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bijih bauksit mendorong kinerja investasi Kalimantan Barat secara umum pada triwulan I 2022.

Realisasi PMA pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD 209,68 juta atau tumbuh sebesar 106,42% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi PMA triwulan I 2022 terjadi pada semua sektor, terutama sektor primer dan tersier dengan masing-masing tingkat pertumbuhan 176,88% (yoy) dan 772,38% (yoy). Berdasarkan bidang usahanya, peningkatan PMA terbesar tercatat di bidang usaha industri perkebunan dan industri logam dasar. Menurut data dari DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat, jumlah realisasi PMA triwulan I 2022 tertinggi berada di Kabupaten Ketapang, antara lain disumbang oleh proyek pembangunan pabrik industri alumina, CPO, dan perkebunan kelapa sawit. Secara spasial, Kabupaten Ketapang menjadi tujuan utama PMA dan PMDN pada triwulan I 2022. Realisasi investasi PMA sepanjang triwulan I 2022 di Kabupaten Ketapang mencapai USD 142,78 juta disusul Kabupaten Bengkayang sebesar USD 20,01 juta, dan Kabupaten Landak sebesar USD 19,51 juta. Sementara itu, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Ketapang sepanjang triwulan I 2022 mencapai Rp. 1,1 triliun, diikuti realisasi PMDN di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mempawah, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp. 752,17 miliar, dan Rp. 485,67 miliar. Tingginya realisasi PMA di Kabupaten Ketapang disumbang oleh proyek pembangunan smelter alumina, pembangunan pabrik CPO, dan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, realisasi PMDN di Kabupaten Ketapang terutama didorong oleh investasi pada pertambangan bijih bauksit dan perkebunan kelapa sawit sementara realisasi di Kabupaten Mempawah terutama didorong oleh kelanjutan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan smelter alumina.

Kinerja ekspor pada triwulan I 2022 mengalami pertumbuhan positif. Ekspor Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 10,70% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 69,97% (yoy). Realisasi nilai ekspor triwulan I 2022 tumbuh menjadi USD 809 juta atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar USD 786 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ekspor unggulan Kalimantan Barat seperti alumina, bauksit, dan CPO. Secara triwulanan, nilai ekspor komoditas CPO sepanjang triwulan I 2022 tercatat sebesar USD 168,7 juta atau tumbuh 41,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan dengan triwulan IV 2021 sebesar USD 210,13 juta. Selanjutnya, nilai ekspor komoditas bauksit pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD 181,14 juta atau tumbuh 94,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan dengan triwulan IV 2021

sebesar USD 241,21 juta (123,37%, yoy). Nilai ekspor alumina pada triwulan I 2022 mencapai USD 157,25 juta atau tumbuh 101,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar USD 119,86 juta (64,54%, yoy). Di sisi lain, nilai ekspor karet pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD 71,99 juta atau berkontraksi -4,65% (yoy).

Sementara itu, volume ekspor CPO pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 133,68 ribu ton atau berkontraksi -3,71% (yoy), menurun dari triwulan IV 2021 yang sebesar 187,71 ribu ton (48,02%, yoy). Selanjutnya, volume ekspor komoditas bauksit pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 5,04 juta ton atau tumbuh 73,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,37 juta ton (98,55%, yoy). Sedangkan, volume ekspor alumina pada triwulan I 2022 mencapai 417,8 ribu ton atau tumbuh 60,16% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 312,43 ribu ton (21,72%, yoy). Hal tersebut sejalan dengan penambahan kapasitas produksi alumina sebagai dampak dari selesainya pembangunan smelter alumina di Kabupaten Ketapang pada triwulan I 2022. Permintaan komoditas bauksit dan alumina yang masih tinggi dari negara mitra dagang menjadi faktor pendorong kinerja ekspor. Di sisi lain, volume ekspor komoditas karet pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 39,3 ribu ton atau berkontraksi -17,09% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 39,38 ribu ton.

Komposisi negara tujuan ekspor utama Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 relatif masih sama seperti triwulan sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan pada serapan ekspor oleh Malaysia sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor Smelter Grade Alumina (SGA). Tiongkok, Jepang, India, dan Malaysia merupakan pasar terbesar bagi komoditas ekspor Kalimantan Barat. Pangsa keempat negara tersebut menyerap produk ekspor Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 sebesar 65,03% dari total ekspor Kalimantan Barat. Tiongkok dan India masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kalimantan Barat pada triwulan I 2022, dengan serapan total sebesar 50,26% dari total ekspor Kalimantan Barat. Secara spasial, ekspor ke Tiongkok menyumbang 29,21% dari total ekspor Kalimantan Barat selama triwulan I 2022. Tiongkok juga masih menjadi pasar terbesar bagi bauksit Kalimantan Barat.

Aktivitas impor Kalimantan Barat mencatatkan transaksi positif sebesar USD 32,37 juta pada triwulan I 2022. Nominal tersebut terutama disumbang oleh impor bahan baku sebesar 82,90% dari total impor Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan I 2022. Impor barang bahan baku pada triwulan I 2022 mengalami penurunan menjadi USD 26,83 juta atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar USD 43,40 juta. Di sisi lain, impor barang modal pada triwulan I 2022 tercatat sebesar USD 5,53 juta atau mengalami penurunan dari triwulan IV 2021 yang sebesar USD 12,27 juta. Nilai impor barang konsumsi pada triwulan I 2022 juga menurun menjadi nihil, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar USD 131,20 ribu. Penurunan kinerja impor barang bahan baku dan barang modal antara lain didorong oleh berakhirnya pembangunan smelter alumina di Kabupaten Ketapang pada triwulan I 2022. Berdasarkan negara asalnya, Malaysia dan Jepang menjadi negara asal impor terbesar ke Kalimantan Barat pada triwulan I 2022 dengan proporsi masing-masing sebesar 33,19% dan 31,01%. Sementara itu, proporsi impor dari Tiongkok berkurang seiring kebutuhan impor barang bahan baku dan modal yang telah berakhir, sejalan pembangunan smelter alumina di Kabupaten Ketapang yang telah selesai pada triwulan I 2022. Impor material yang mengalami kontraksi paling kecil pada triwulan I 2022 adalah *lime, cement and fabricated construction material* mengalami kontraksi -47,76% (yoy).

Saat ini tuntunan pembangunan berkelanjutan di semua sektor merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan. Ada tiga pilar dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk bisa menyelaraskan pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam proses pembangunan berkelanjutan munculkan ide dan konsep yang disebut inisiatif pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*).

Inisiatif pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) adalah pendekatan baru pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari upaya-upaya yang bertujuan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan eko-efisiensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan sinergi antara lingkungan dan ekonomi. Di Indonesia, program *green growth* adalah bagian dari pilar ekonomi hijau dan pembangunan ekonomi rendah emisi menjadi kerangka kerja Bappenas untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program ini dirancang untuk mendukung Indonesia menuju ekonomi hijau melalui investasi publik dan swasta yang tepat sasaran. Tujuan program *green growth* di Indonesia adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang mengakui nilai modal alam sebagai penyedia jasa ekosistem, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, membangun perekonomian lokal, dan bersifat inklusif dan adil. Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen *green growth* dengan dukungan dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Lokasi percontohan *green growth* ini ada di tiga lokasi yaitu Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Pada ketiga kabupaten tersebut dibuat skenario terkait pertumbuhan hijau. Skenario pertumbuhan hijau terdiri dari empat alternatif yang dirumuskan dengan mengacu kepada kondisi penggunaan lahan yang ada saat ini, yaitu: (1) skenario bisnis seperti biasa (BAU), (2) skenario produksi, (3) skenario proteksi, dan (4) skenario produksi-proteksi.

Pemilihan skenario pertumbuhan hijau dipilih dari empat alternatif tersebut oleh para pihak dalam forum diskusi terfokus (FGD). Pemilihan itu melalui perbandingan masing-masing indikator pada setiap skenario dengan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan kriteria jamak (menggunakan perangkat lunak PROMETHEE). Setiap skenario memiliki indikator-indikator sama, yaitu bersifat manfaat (*benefit*) diindikasikan oleh ukuran semakin besar nilainya, semakin baik. Sementara biaya (*cost*) diindikasikan oleh ukuran nilainya semakin rendah semakin baik. Pemilihan alternatif skenario dilakukan melalui FGD dan pengolahan data oleh komputer menggunakan perangkat alat bantu pengambilan keputusan kriteria jamak. Analisis efek skenario terpilih dilakukan melalui pemodelan spasial dan pemodelan statistik.

Hasil analisis menunjukkan skenario produksi-proteksi (*mixed*) merupakan skenario terbaik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten fokus. Meskipun skenario terpilih sama pada ketiga kabupaten fokus, namun urutan prioritas subsektor berbeda pada masing-masing kabupaten fokus. Urutan prioritas pengembangan ekonomi pada tingkat provinsi berturut-turut: tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan; pada tingkat Kabupaten Ketapang: tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perikanan; pada tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara: perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura, kehutanan, perikanan dan pertambangan.

Berdasarkan analisis pemodelan tutupan lahan pada skenario BAU diproyeksikan

dalam periode 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan areal usaha berbasis lahan di Kalimantan Barat hingga 3,5 kali lipat dari kondisi eksisting. Sedangkan bila menggunakan skenario Produksi-Proteksi (*mixed*) peningkatan hanya 2,5 kali lipat (28,57% di bawah BAU). Proyeksi peningkatan areal kegiatan ekonomi berbasis lahan di Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya pada skenario produksi-proteksi (*mixed*) berada di bawah proyeksi pada skenario BAU berturut-turut sebesar 28,58%, 64,38%, dan 85,61%. Pembatas perluasan areal pengembangan ekonomi berbasis lahan adalah kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung, kawasan konservasi (Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam), Kawasan Ekosistem fungsi Lindung Gambut, dan Kawasan Ekosistem Esensial.

Konservasi, restorasi, maupun pembangunan berkelanjutan tidak akan terjadi tanpa adanya peningkatan ekonomi. Pemilihan komoditas memiliki nilai jual lebih atau adanya insentif harga premium dan tetap membutuhkan perlindungan alam sekitar adalah jawaban tepat. Saat ini, semakin banyak komoditas terbukti memiliki kualitas lebih baik apabila diselaraskan dengan penjagaan lingkungan, alam, termasuk hutan, contohnya kakao maupun kopi. Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, aspek sosial, ekonomi dan lingkungan harus terintegrasi menjadi tujuan yang harus diwujudkan secara selaras dan seimbang. Sebagai provinsi yang menjadikan komoditas berbasis lahan sebagai tumpuan ekonomi, Provinsi Kalimantan Barat menjadikan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan sebagai produk unggulan daerah.

Komoditas ini diharapkan pengelolaannya tetap dapat berlanjut untuk menopang perekonomian Kalbar tanpa merusak kondisi lingkungan. Salah satu upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan komoditas berkelanjutan baik itu di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan adalah dengan dikeluarkannya regulasi mengenai pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan yaitu Perda Nomor 6 tahun 2018. Adapun hal penting yang diatur dalam Perda ini adalah mengenai kewajiban bagi konsesi berbasis lahan untuk mengalokasikan minimal 7% dari areal konsesinya untuk areal konservasi. Implementasi Perda ini mendorong untuk sektor-sektor berbasis lahan agar melaksanakan konsep berkelanjutan dalam aspek produksinya.

Mulai dari pengadaan lahan, proses, produk sampai pada distribusinya agar tetap berlanjut dan berkesinambungan. Di sektor kehutanan dikenal istilah *Sustainable Forest Management* (SFM)/Pengelolaan Hutan Lestari. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) adalah pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. PHB merupakan kegiatan untuk mengurus dan menggunakan hutan dan lahan dengan cara dan pada tingkat yang mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada, produktivitas, kapasitas regenerasi, vitalitas dan potensi mereka untuk memenuhi sekarang dan dimasa depan, fungsi ekologi, ekonomi dan social yang relevan, ditingkat lokal, nasional, dan global, dan yang tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya.

Di sektor pertambangan, konsep sustainable mining/tambang berkelanjutan wajib dilaksanakan pelaku usaha dengan melaksanakan reklamasi tambang. Reklamasi merupakan kegiatan pemulihan di lahan tambang, untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan. Manfaat utama reklamasi ini, untuk mengembalikan lahan sesuai dengan kondisi semula sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan lain, baik itu untuk kegiatan perkebunan, perikanan, bahkan pariwisata.

Untuk sektor pertanian, telah ada regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Untuk sektor perkebunan, permintaan pasar/market telah menuntut pelaku usaha untuk mempraktekkan sawit berkelanjutan. Salah satunya mekanisme *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

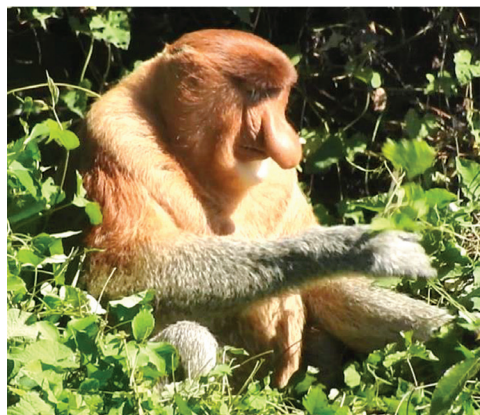
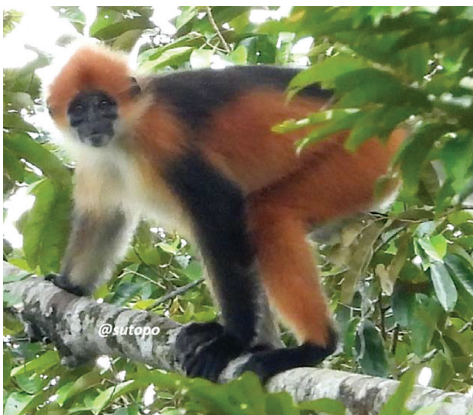
2.1.10. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati terbentuk dari keseragaman dan keberagaman sifat dan cirri makhluk hidup. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup yang dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat. Setiap lingkungan memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati yang ditemukan di hutan tropis Kalimantan Barat, misalnya sejumlah flora dan fauna endemik, diantaranya adalah Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Anggrek Hitam (*Coelogyne pandurata*), Raflesia Kalimantan (*Rafflesia tuan-mudae*), Enggang Gading (*Rhinoplax vigil*), Langur Sentarum (*Presbytis chrysomelas*), Bekantan (*Nasalis larvatus*).

Berdasarkan studi genetika dari Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), terdapat tiga sub-spesies orangutan yaitu *Pongo pygmaeus pygmaeus* yang ditemukan di barat laut Kalimantan, *Pongo pygmaeus wurmbii* di Kalimantan bagian tengah, dan *Pongo pygmaeus morio* di timur laut Kalimantan. Dari ketiga sub-spesies Orangutan Kalimantan tersebut, *Pongo pygmaeus wurmbii* merupakan sub-spesies dengan ukuran tubuh relatif paling besar, sementara *Pongo pygmaeus morio* adalah sub-spesies dengan ukuran tubuh relatif paling kecil. Orangutan Kalimantan umumnya ditemukan di hutan dataran rendah (di bawah 500 mdpl). Hutan dan lahan gambut yang menjadi lokasi tanaman berbuah besar merupakan pusat dari daerah jelajah Orangutan, dibandingkan hutan Dipterocarpaceae yang kering dan didominasi pohon-pohon tinggi berkayu besar, seperti keruing. Orangutan Kalimantan sangat rentan dengan gangguan-gangguan di habitatnya, meskipun *Pongo pygmaeus morio* menunjukkan toleransi yang relatif tak terduga terhadap degradasi habitat di bagian utara Pulau Borneo (Ancorenaz et al. 2005).

Rafflesia Kalimantan (*Rafflesia tuan-mudae*) adalah salah satu jenis *Rafflesia* endemik Kalimantan Barat. *Rafflesia tuan-mudae* adalah bunga parasit yang tidak berakar, tidak berdaun, dan tidak bertangkai. Bunga ini mengisap unsur anorganik dan organik dari tumbuhan inang *Tetrastigma*. Satu-satunya bagian yang bisa disebut sebagai tanaman adalah jaringan yang tumbuh di dalam batang liana (tumbuhan merambat) dari genus *Tetrastigma*. Dapat dijumpai di Cagar Alam Gunung Nyiut, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, kemungkinan besar juga dapat dijumpai di sepanjang Pegunungan Muller yaitu di sekitar perbatasan Kalimantan

Tengah dengan Kalimantan Barat dan Timur, serta di pegunungan Swazner sebelah selatan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.



Gambar 11. Flora dan Fauna Langka di Kalimantan Barat

Langur Sentarum (*Presbytis chrysomelas ssp. cruciger*) merupakan salah satu spesies satwa primata dari keluarga Cercopithecidae. Langur Sentarum adalah sub spesies dari *Presbytis chrysomelas* yang ditengarai penyebarannya ditemukan mulai dari bagian utara Pulau Kalimantan bagian Sabah hingga bagian Sarawak -termasuk juga Danau Sentarum. Langur Sentarum termasuk ke dalam status konservasi *critically endangered*. Tipe habitat Langur Sentarum berupa hutan tropis basah, hutan rawa gambut, dan hutan rawa air tawar dengan ketinggian jelajah mencapai 500 mdpl. Preferensi habitat *Presbytis chrysomelas ssp. cruciger* sesuai dengan kondisi ekosistem di Danau Sentarum, terkhusus di Daratan Semujan. Langur Sentarum umumnya hidup berkelompok dengan jumlah tiga hingga 13 individu per kelompok. Spesies ini merupakan kelompok langur pemakan buah dan biji-bijian yang mengkonsumsi antara 25 hingga 65% dari bagian buah (Smith-Ehlers. 2014).

Bekantan (*Nasalis larvatus*) adalah primata yang termasuk dalam keluarga Cercopithecidae secara internasional satwa ini termasuk dalam Appendix I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dengan status konservasi *endangered* oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Spesies ini hidup di habitat terbatas pada hutan bakau, hutan di sekitar sungai, dan habitat rawa gambut dimana sebagian telah terancam oleh berbagai aktivitas manusia. Kerusakan habitat merupakan ancaman besar terhadap kelestarian hidup bekantan, karena bekantan akan kehilangan tempat untuk mencari makan, minum, tempat berlindung dan bereproduksi. Terjadinya degradasi habitat hutan dataran rendah menimbulkan kekhawatiran akan cepatnya pengurangan luas habitat yang berdampak negatif pada penurunan populasi bekantan (Bismark, 2009).

2.2. Kerangka Regulasi dan Kegiatan Regional Pendukung FOLU Net Sink 2030

Inisiatif Provinsi Kalimantan Barat dalam kebijakan penurunan emisi GRK dimulai sejak periode 2012 hingga saat ini dan hal ini sejalan dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Kerangka regulasi yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuktikan bahwa kesungguhan upaya yang berkaitan dengan pembangunan Kalimantan Barat berwawasan lingkungan, terutama dalam hal penurunan emisi, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan memiliki sinergi dan berkontribusi terhadap target nasional dalam program Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Kinerja tersebut dibuktikan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan dokumen kinerja, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
2. Keputusan Gubernur No. 1215/DLHK/2020 Tentang Target Penurunan dan Alokasi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Barat Tahun 2020-2030
3. Peraturan Gubernur No. 125 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030
4. Peraturan Gubernur Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan Serta Mekanisme Pertukaran Data Kegiatan *Reducing*

Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)

5. Dokumen Satuan Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Barat (SRAP) REDD+ Tahun 2015
6. Dokumen *Forest Reference Emission Level* (FREL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
7. Dokumen Sinkronisasi *Forest Reference Emission Level* (FREL) Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
8. Dokumen Petunjuk Teknis Pengukuran Cadangan Karbon Hutan dan Bukan Hutan (PCKHBH) Tahun 2019
9. Dokumen Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Periode 2013 –2018 Tahun 2020
10. Dokumen SIPE (Strategi Intervensi Penurunan Emisi) Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
11. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2030
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 928/LHK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat

Upaya konservasi, peningkatan serapan emisi dan peningkatan stok karbon hutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan penunjang regional pendukung FOLU *Net Sink* 2030 dapat dilihat dari beberapa upaya, seperti peningkatan kapasitas SDM baik pemerintah dan masyarakat serta penguatan penyusunan regulasi, penguatan tata kelola kawasan dalam upaya membangun kerangka pengelolaan kawasan yang memperhatikan aspek perlindungan sumberdaya, peningkatan produktivitas dan transparansi atau pelibatan parapihak secara luas. Semua upaya yang dilakukan juga diperkuat dengan membangun kesepahaman para pihak melalui kerangka kerja sama, komunikasi, koordinasi yang dijadikan platform media komunikasi, koordinasi para pihak di antaranya fasilitasi Sekretariat Bersama Pengelolaan SDA dan Kehutanan, Forum DAS, Forum KPH, Forum Perhutanan Sosial dan beberapa media komunikasi para pihak.

Kesepahaman yang dibangun ini diimplementasikan di tingkat tapak melalui fasilitasi dan dukungan kepada pelaku upaya konservasi dan perlindungan pengelolaan SDA. Salah satu contoh kegiatan yang dimaksud adalah fasilitasi pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial, baik hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat maupun kemitraan konservasi. Bentuk lainnya, berupa kolaborasi untuk perlindungan kawasan konservasi adalah Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Ketapang. Mulai tahun 2020 telah dikembangkan kebijakan *Green Collaboration* yang mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola areal konservasi terutama pada areal bernilai konservasi tinggi (HCV Area), yang memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, maupun terhadap keanekaragaman hayati dan habitatnya.

Beberapa program daerah yang sejalan dengan program nasional Indonesia's FOLU

Net Sink 2030 telah diimplementasikan dan terdata dalam yurisdiksi Provinsi Kalimantan Barat. Program-program ini sinergi berkontribusi terhadap target penurunan emisi maupun peningkatan serapannya dan cadangan karbon nasional. Beberapa program dimaksud, diantaranya:

- Pengelolaan Hutan Desa Laman Satong Tahun 2012
- Inisiatif perindungan oleh masyarakat Desa Laman Satong untuk menjaga hutan gambutnya dengan kearifan lokal masyarakat, melalui skema perhutanan sosial hutan desa yang dikembangkan desa ini mendapatkan dukungan pembiayaan melalui skema *Voluntary Carbon Standard (VCS)*, sebuah mekanisme pembiayaan sukarela dari donor terhadap kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga wilayah hutannya. Sejak tahun 2012 Hutan Desa Laman Satong mendapat dukungan pembiayaan dalam rangka pengelolaan kawasan hutannya dengan mengimplementasikan beberapa kegiatan dalam rangka perlindungan kawasan, tata guna lahan, patroli, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Tanjungpura Tahun 2016

Merupakan hutan pendidikan dan penelitian yang berperan sebagai laboratorium alam sebagai kawasan untuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan dimulai dari ujicoba provenan, konservasi jenis flora dan fauna sampai kegiatan pencegahan karhutla. Universitas Tanjungpura telah mendapat kepercayaan dari Kementerian LHK untuk mengelola kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 656/MenLHK/Setjen/PLA.0/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016 seluas 19.622 ha yang terletak di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah.

- Hutan Desa Nanga Lauk Tahun 2018
- Hutan Desa Nanga Lauk seluas 1.430 ha merupakan salah satu hutan desa yang dapat dikatakan berhasil dalam rangka menggalang pembiayaan untuk mendukung pengelolaan kawasan areal masyarakat. Pengelolaan Hutan Desa Nanga Lauk telah mendapatkan sertifikasi Plan Vivo dan mendapat dukungan pembiayaan jangka panjang selama 25 tahun (2019 - 2044) dari pihak swasta melalui skema *Sustainable Commodities Conservation Mechanism (SCCM)*. Skema ini merupakan mekanisme investasi dalam rangka pembangunan ekosistem berbasis lansekap dan konservasi dimana penawaran dan permintaan terkait konservasi diharapkan menjadi investasi baru. Kontribusi manfaat iklim yang diberikan oleh Hutan Desa Nanga Lauk sebesar 1.308,2 tCO₂e. Kegiatan yang difasilitasi oleh program “Rimbak Pakai Pengidup” terdiri dari tiga pilar yaitu (1) penguatan kelembagaan dan kapasitas, (2) perlindungan dan rehabilitasi hutan, (3) pengembangan mata pencaharian masyarakat.
- Program *Forest and Climate Change (FORCLIME)* Tahun 2009-2029

Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) adalah program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yang dilaksanakan bersama oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Kerjasama ini bertujuan mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*). Program kerjasama FORCLIME terdiri dari Modul Kerjasama Teknik / *Technic Cooperation* yang diimplementasikan oleh *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dan modul kerjasama keuangan / *financial cooperation* yang didukung oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW). FORCLIME Kerja Sama Teknis (FORCLIME-TC /GIZ), FORCLIME modul kerjasama teknik diimplementasikan dengan dukungan dari GIZ. Modul ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kerangka kelembagaan dan peraturan perundangan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi alam dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Implementasinya dilakukan melalui (1) kerangka kebijakan nasional dan sub nasional pada pembangunan kesatuan pengelolaan hutan, perubahan iklim dan pengembangan REDD+ dan kebijakan pencegahan kebakaran hutan yang diimplementasikan dengan memberikan saran kebijakan dan membantu dalam pembangunan KPH, perubahan iklim dan REDD+. Selain itu juga mendukung pengembangan kebijakan mengenai pencegahan kebakaran hutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Dukungan terhadap kerangka hutan dan perubahan iklim bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi sehingga sesuai dengan tujuan dokumen NDC nasional. Prinsip-prinsip tata kelola kehutanan serta tujuan konservasi keanekaragaman hayati; (2) dukungan pembangunan dan pengembangan KPH di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional dan tingkat provinsi meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas. Sementara pada tingkat daerah, FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH; dan (3) pengembangan kapasitas SDM melalui dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan

- Program FIP Tahun 2018-2023

Program ini bagian dari rencana investasi kehutanan Indonesia yang didukung oleh Program Investasi Kehutanan (*Forest Investment Programme*) atau FIP dan akan melengkapi proyek FIP yang dikelola oleh *World Bank* dan *International Finance Corporation* (IFC) dalam mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Proyek ini akan berinvestasi pada kegiatan-kegiatan REDD+ yang berbasis masyarakat, misalnya perizinan penggunaan lahan berbasis masyarakat, pemantauan hutan berbasis masyarakat dan masyarakat peduli api, regenerasi dan pemeliharaan hutan berbasis masyarakat dan ekowisata berbasis masyarakat di empat KPH di dua kabupaten (Kapuas Hulu dan Sintang) di Provinsi Kalimantan Barat. Proyek ini akan memperkuat kapasitas KPH, kabupaten dan provinsi, memberikan dukungan untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah untuk peningkatan stok karbon dengan kebijakan di tingkat nasional dan pembangun insentif dan moneter serta melaksanakan pemantauan, sistem safeguard dan pengaturan pembagian yang adil dan responsif gender. Dengan mendorong pengelolaan hutan yang lestari

proyek ini tidak hanya mengurangi emisi GRK namun juga meningkatkan stok karbon memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, kehidupan lebih baik bagi masyarakat hutan, memperkuat hak pengelolaan lahan bagi masyarakat hutan adat atas tanah adat mereka dan peningkatan konservasi kehati serta jasa lingkungan.

Hutan Desa Padang Tikar, berupa Program *Sylvofishery* Pesisir (Kepiting Bakau di HL Mangrove) Tahun 2019

Model pengelolaan hutan sosial di Kalimantan Barat yang dapat terbilang sukses mengelola izin yang diberikan. Salah satunya adalah Hutan Desa (HD) Bentang Pesisir Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya. Izin hutan sosial diberikan di sini adalah seluas 76.370 ha dengan subyek gabungan dari 10 desa. Di HD Bentang Pesisir Padang Tikar dihasilkan beberapa produk unggulan yang telah mendapat pasar dan pembeli tetap. Seperti madu mangrove, madu kelulut, kepiting bakau, udang, arang kelapa, dan briket kelapa. Nilai ekonomis dari produk-produk tersebut juga lumayan tinggi. HD ini dapat memproduksi madu kelulut sebanyak 750 kg per bulan dengan total penjualan senilai 229 juta per bulan dengan harga jual 130 ribu per kemasannya yang seberat 425 gram.

Program *Governor's Climate Force Task Force* (GCF-TF) Window A dan Window B Tahun 2018-2020, 2021-2023

Sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendukung target nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang tertuang dalam NDC. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwujudkan dengan membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) untuk mengkoordinir pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Barat, dan menyusun strategi dan kebijakan turunan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat, seperti Strategi dan Rencana Aksi *Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus* (SRAP REDD+) sebagai pedoman dalam pelaksanaan REDD+, *Forest Reference Emission Level* (FREL) sebagai tingkat rujukan emisi Kalimantan Barat, *Monitoring Reporting and Verification* (MRV) sebagai panduan pengukuran kinerja penurunan emisi, dan lain sebagainya.

Untuk memastikan pelaksanaan REDD+, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat aktif mengikuti inisiatif global dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum Internasional dengan menjadi anggota dari *Governor's Climate Force Task Force* (GCF TF). GCF TF merupakan aliansi gubernur sedunia dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satu tujuan partisipasi tersebut yaitu memperkenalkan inisiatif Kalimantan Barat dalam penurunan emisi serta mendorong adanya pendanaan yang berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak.

- Penanaman Pohon di Sekolah Se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Program ini merupakan instruksi khusus Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji, SH, M.Hum, dalam rangka pemulihan hutan dan lahan sebagai upaya mendukung FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat mencanangkan gerakan menanam pohon serentak untuk Kalimantan Barat teduh, hijau, dan lestari. Kegiatan tersebut dicanangkan dimulai dari sekolah se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan penanaman pohon serentak yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat dipusatkan di SMA Negeri 11 Pontianak pada tanggal 19 Juli 2022 dan dilaksanakan bersamaan secara hibrid di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Target sekolah se-Kalimantan Barat yang melaksanakan penanaman pohon hingga tahun 2030 sejumlah 6.485 sekolah yang dimulai dari SD hingga SMA, Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah. Saat ini di pertengahan bulan September 2022, dari target sekolah yang dicanangkan, baru terealisasi 998 sekolah dengan bibit pohon terdistribusi sejumlah 31.389 pohon untuk areal yang telah tertanami diperkirakan seluas 78,47 ha.

TABEL 5. | Target Penanaman Pohon di Sekolah Se-Kalimantan Barat

No	Kabupaten/ Kota	Pusat Kegiatan Penanaman Serentak	Target Sekolah	Realisasi Sekolah	Bibit Terdistribusi	Luas Areal (Ha)
1	Kabupaten Ketapang	SMPN 3 Ketapang	752	13	712	1,78
2	Kabupaten Sambas	SDIT Sulthoniah Raya	598	31	1.483	3,71
3	Kabupaten Kubu Raya	Sd Negeri 9 Kubu Raya	640	120	598	1,50
4	Kabupaten Sanggau	SMPN 1,2,3,4,5 di Sabang Merah, SMAN 1 Tayan Hilir SMAN 1 Sekayam SMAN 1 Tayan Hulu	647			
		KPH Sanggau timur		67	2.638	6,60
		KPH Sanggau Barat		62	2.758	6,90
5	Kabupaten Landak	SD-SMP Swasta Maniamas	610	246	3.291	8,23
6	Kabupaten Sintang	SMPN 04 Kecamatan Sintang	640	61	2.436	6,09
7	Kabupaten Kapuas hulu	SMPN 5 Putussibau	545	12	2.8	7,00
8	Kota Pontianak	SMAN 2 Pontianak	339	81	2.903	7,26

No	Kabupaten/ Kota	Pusat Kegiatan Penanaman Serentak	Target Sekolah	Realisasi Sekolah	Bibit Terdistribusi	Luas Areal (Ha)
9	Kabupaten Bengkayang	SDN 38 Rangkang	400	60	7.124	17,81
10	Kabupaten Melawi	SDN 11 Nanga Pinoh	403	93	1.421	3,55
11	Kabupaten Sekadau	SMPN 10 Sekadau	329	10	1.096	2,74
12	Kabupaten Mempawah	MTSN 1 Mempawah	261	32	288	0,72
13	Kota Singkawang	SMPN 4 Singkawang	168	64	917	2,29
14	Kabupaten Kayong Utara	Kantor Bupati Kayong (Ruang Terbuka Hijau)	163	46	924	2,31
TOTAL			6.495	998	31.389	78,47

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Inisiatif para pihak dalam implementasi program penanaman pohon untuk mendukung program yang telah dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan oleh beragam institusi, mulai dari perguruan tinggi, lembaga sosial, aktivis lingkungan, UPT pemerintah provinsi, rumah ibadah dll. Pada periode 2022 telah tertanam bibit pohon sejumlah 4.391 pohon dengan ragam jenis pohon endemik Kalimantan, pohon buah-buahan dan tanaman hias peneh.

- Keberhasilan IDM Kalimantan Barat Tahun 2022 dampak dari Program yang Berkaitan Dengan Indeks Kelola Lingkungan

Kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan tersebut mulai dari periode 2012 hingga tahun 2022 saat ini telah memberi dampak signifikan terhadap perkembangan daerah. Secara nasional, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi tercepat capaian keberhasilan dalam meningkat Desa Mandiri di Kalimantan Barat terkait Indeks Desa Membangun (IDM). Penilaian IDM berdasarkan oleh tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Beragam program yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Barat terutama program yang memberi dampak signifikan dari sektor lingkungan memberi nilai positif terhadap IKL pada penilaian IDM. Saat ini di tahun 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2022, yaitu (Kalimantan Barat Desa Mandiri 586, Desa Maju 549, Desa Berkembang 802, Desa Tertinggal 94, Desa Sangat Tertinggal 0, Desa Tidak Memenuhi Kriteria 0).

BAB 03

An aerial photograph of a coastal city, likely Banjarmasin in Kalimantan Barat, Indonesia. A large steel truss bridge spans a wide river. The city is densely packed with buildings, and the riverbanks are lined with houses and structures. The sky is clear with some light clouds. The image is partially covered by a green overlay on the left side.

**RENCANA KERJA AKSI MITIGASI 2022 –
2030 DAN PENDANAAN SUB NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB II | RENCANA KERJA AKSI MITIGASI 2022 – 2030 DAN PENDANAAN SUB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.1. Strategi Nasional Untuk Aksi Mitigasi NDC

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*), Indonesia telah menyampaikan dokumen NDC yang pertama pada tahun 2016 dan dokumen pembaruan NDC pada tahun 2021. Dalam komitmen NDC, Indonesia menyampaikan target penurunan emisinya dalam skenario tanpa syarat yang dilakukan dengan upaya sendiri (*unconditional*; CM1) sebesar 29% dan target bersyarat yang membutuhkan dukungan internasional (*conditional*; CM2) sebesar 41% dibandingkan dengan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 (Tabel 9).

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC. Dokumen Peta Jalan (*Road Map*) merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per sub sektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target.

TABEL 6. | Target Penurunan Emisi dalam NDC

Sektor	Emisi 2010 (juta ton CO ₂ e)	Tingkat Emisi 2030 (juta ton CO ₂ e)			Penurunan Emisi 2030			
					juta ton CO ₂ e		% dari BaU	
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2
Energi ¹	453,2	1.669	1.355	1.223	314	446	11	15,50
Limbah	88	296	285	256	11	40	0,38	1,4
Industri	36	70	67	66	3	3,25	0,10	0,11
Pertanian	111	120	110	116	9	4	0,32	0,13
Lahan & Kehutanan ²	647	714	217	22	497	692	17,2	24,1
TOTAL	1,344	2869	2.034	1.683	834	1.185	29,00	41

Sumber: Rencana Kerja Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Catatan: ¹termasuk emisi fugitive; ²termasuk kebakaran gambut

Sektor kehutanan dan lahan berkontribusi terhadap 17% dari 29% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM1, atau 24% dari 41% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM2 seperti yang ditampilkan dalam tabel di atas. Aksi mitigasi pada sektor FOLU difokuskan pada lima aksi mitigasi utama, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Diagram peta jalan aksi mitigasi NDC

Aksi mitigasi yang diharapkan berkontribusi paling besar dalam pencapaian penurunan emisi sektor FOLU ialah penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan lahan gambut, disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan pembangunan hutan tanaman, *Sustainable Forest Management*, dan rehabilitasi hutan. Skenario mitigasi pada sektor FOLU dikembangkan dari modul penggunaan lahan, modul aktivitas, dan modul perhitungan emisi yang telah disusun oleh KLHK pada medio tahun 2019. Modul aktivitas mitigasi dan penggunaan lahan saling berinteraksi satu sama lain, mengikuti input asumsi sosioekonomi (misalnya PDB, pertumbuhan populasi hewan dan manusia, target produksi komoditas kunci, dan tingkat konsumsi pangan dan pakan, dan lain-lain) dan kapasitas lahan, yang ditentukan dari produktivitas tanaman dan indeks penanaman. Terhubungnya asumsi pada kapasitas lahan dengan modul aktivitas mitigasi dan penggunaan lahan, ketercapaian penurunan emisi pada sektor kehutanan akan ditentukan oleh efisiensi penggunaan lahan pada sektor pertanian.

Dalam mencapai target jangka panjang, NDC berperan untuk menjembatani komitmen penurunan emisi menuju *net sink* melalui penguatan dan peningkatan aksi mitigasi dan

dukungan internasional, terutama pada sektor lahan dan kehutanan sebagai salah satu sektor kunci. Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (net emitter), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO₂e, sementara pada skenario LTS yang sejalan dari target Perjanjian Paris (LCCP), sektor ini sudah mencapai kondisi net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e.

Untuk mencapai net sink, aksi mitigasi yang tertuang dalam target NDC masih harus ditingkatkan untuk menjaga tren penurunan emisi sektor FOLU. Untuk itulah maka diperlukan pemantapan kerja dalam Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini. Percepatan pelaksanaan aksi mitigasi dalam Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, terutama penurunan deforestasi dan emisi dari ekosistem gambut, ditujukan untuk dapat menghindari locked-in emission.

Dalam konteks sektor FOLU, *locked-in emission* berkaitan dengan rusaknya ekosistem yang sulit dipulihkan hingga tidak dapat pulih kembali atau *irreversible*, misalnya perubahan kemampuan ekosistem lahan gambut dalam menyerap air dari hidrofilik/suka air menjadi hidrofobik/menolak air, yang merupakan awal dari kondisi kering tak balik atau *irreversible drying* (Noor et al. 2014). Pada kondisi terjadinya locked-in, emisi sektor FOLU di masa depan akan semakin meningkat yang menyebabkan beban biaya mitigasi menjadi lebih tinggi. Dengan perkembangan kajian yang dilakukan melalui kerja pemulihan di Kalimantan Barat selama tahun 2019 dan 2020, ternyata bahwa gambut dapat dipulihkan dan menjadi keharusan bahwa kubah gambut harus dijaga untuk tidak boleh terjadi eksploitasi. Gambaran seperti ini akan menjadi catatan dan langkah penting untuk dimantapkan dalam kerja kebijakan dan operasional FOLU *net sink* ini.

Untuk mencapai *net sink*, intensitas pelaksanaan aksi mitigasi harus ditingkatkan sesegera mungkin yang mengindikasikan tingginya urgensi dukungan internasional, baik dalam konteks kolaborasi riset, investasi, hingga transfer teknologi. Pada sektor kehutanan dan lahan, keberhasilan untuk pencapaian net sink secara tidak langsung harus bersinergi dengan sektor pertanian dan areal penggunaan lainnya. Peningkatan efisiensi penggunaan lahan disertai produktivitas pertanian yang tinggi menjadi kunci pengurangan tekanan terhadap pembukaan lahan baru dari hutan alam. Pemenuhan kebutuhan lahan ke depan harus dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif dan investasi yang besar untuk pengembangan varietas berdaya hasil sangat tinggi dan teknologi budidaya rendah karbon dan adaptif perubahan iklim. Selain itu usaha diversifikasi pangan, terutama dari komoditas HHBK, dapat berdampak positif terhadap penurunan permintaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian, dan menekan konversi lahan pertanian produktif dan sawah, khususnya di Jawa.

Saat ini, beberapa negara mitra perdagangan internasional atau ekspor (Cina, Amerika, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Australia, dll.) sudah menyampaikan sinyal komitmen negaranya untuk menuju net zero emission yang sebagian besar akan dicapai pada tahun 2050. Ini berarti, bahwa tuntutan untuk produk pertanian dengan jejak karbon yang rendah akan semakin tinggi. Peningkatan efisiensi penggunaan lahan dalam memenuhi target produksi pertanian melalui sistem pertanian campur seperti integrasi ternak, tanaman

pangan, perkebunan dan kehutanan menjadi strategi penting agar produk pertanian yang dihasilkan memiliki jejak karbon yang rendah.

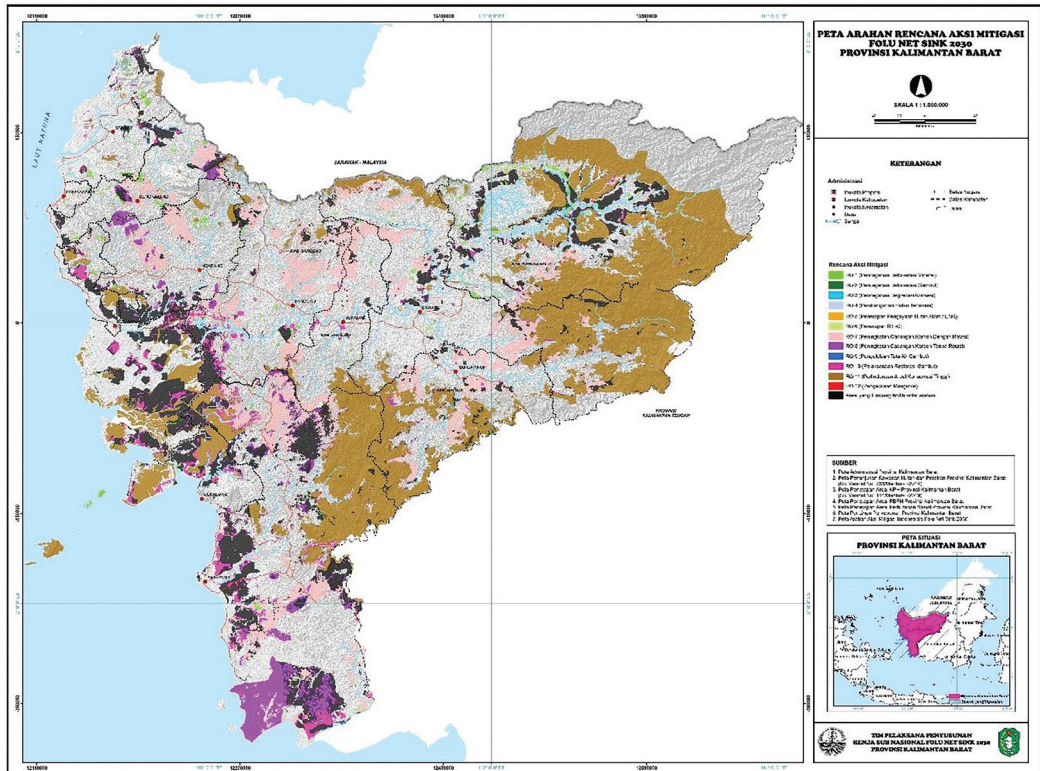
3.2. Strategi Provinsi Kalimantan Barat dalam Mendukung FOLU Net Sink 2030

Penyusunan strategi rencana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dimulai sejak kick off dan Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 pada tanggal 2 Agustus 2022 di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan rangkaian Workshop 1 dan Workshop 2. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai stakeholder dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi, mitra pembangunan dan perusahaan dari sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta sektor usaha berbasis lahan lainnya.

Implementasi rencana kerja aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat mencakup 12 (dua belas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu; 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (enhanced natural regeneration, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove.

Masing-masing rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai arahan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) yang meliputi (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF). Area yang masuk kategori prioritas tinggi ialah yang nilai IPL 7 sampai 9 dan yang masuk kategori sedang ialah yang nilai IPL 5 dan 6, dan yang rendah yang nilai IPL 1 sampai 4.

Hasil analisis spasial yang sudah dilakukan, sebaran lokasi prioritas tiap aksi mitigasi Rencana Operasional (RO) RO1-RO12 di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 10. Tabel tersebut menjelaskan bahwa luas kawasan intervensi untuk aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 7,6 juta ha, dengan luasan terbesar untuk aktivitas RO11 yang mencapai 3,9 juta ha, dan terendah pada aktivitas RO12 yang seluas 21,8 ribu ha. Sedangkan berdasarkan kabupaten, paling luas di Kabupaten Ketapang dengan area intervensi untuk semua RO 2,1 juta ha. Gambar 13 menunjukkan peta sebaran rencana aksi mitigasi di Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 13. Peta Sebaran RO di Kalimantan Barat

TABEL 7. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kota/Kabupaten	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
		Mineral (R01)	Gambut (R02)	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	
1	Bengkayang	33,719	1.577		276	2.746	
2	Kapuas Hulu	124.738	75.215	3.402	269	41.877	
3	Kayong Utara	14.118	11,060		18	465	
4	Ketapang	236.429	86.082	6,120	91.807	29.695	
5	Kota Pontianak						
6	Kota Singkawang	1.327					
7	Kubu Raya	19.885	100.214		983	12.313	
8	Landak	15.884	6,490	135	1.961	9,150	
9	Melawi	10,450	151	6.964	6.291	19.533	
10	Mempawah	6.698	5.927		581	2.581	
11	Sambas	13.788	2.297		6	13.353	
12	Sanggau	15,130	31.071	6.385	3.269	33.746	
13	Sekadau	7080	79	50	1.011	3.813	
14	Sintang	9.059	6.512	9.188	3.275	35.984	
TOTAL		1,344	327.126	32.243	109.745	205.248	

								Total
	RIL-C (R06)	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R11)	Pengelolaan Mangrove (R012)	
	2.746	80.576	18.131	23,922	4.215	24.193		192.103
	41.802	100.741	6.859	11,903	9.988	1.267.334		1.684.127
	465	7.618	4.783	48.241	21.594	137.741	6.083	252.168
	23.841	423.049	279,620	54.907	67,240	896.161	2.657	2.197.609
				205				205
		2.478		189	46	18		4.058
	12.185	11.288	3.939	117.439	46.901	273.065	12.005	610.215
	8.595	91.147	27.139	34.124	7.879	36.088		239.041
	18.981	138.804	8.506	3.775	199	348.611		562.265
	2.562	6.881	608	20.626	10.976	33.054	747	91.242
	13.258	4.905	4.558	10.661	5.928	31,360	337	100.45
	33.742	217.982	12.298	23	25.325	66.185		467.742
	3.791	97.117	1.853	5.046	4.948	33.981		158,770
	31.242	199.791	6.368	22.042	3.788	766.179		1.093.427
	193.199	1.382.377	374.662	376	209.026	3.913.971	21,830	7.653.423

Berkenaan dengan pencapaian target FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat membangun kesadaran dan keikutsertaan para pihak menjadi bagian penting pencapaian keberhasilan rencana yang disusun, melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu, arahan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat disusun melalui pendekatan kewilayahan pemangku kewenangan terhadap wilayah yang dikelola, termasuk pendekatan kewilayahan administrasi.

Arahan pelaksanaan aksi mitigasi berdasarkan unit manajemen pengelolaan pada perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan perhutanan sosial memiliki arahan target aksi mencapai seluas 3,6 juta ha pada semua RO yang berada pada HHK-HA, HHK-HT, RE, PS. Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) non pemegang izin, memiliki arahan target aksi mencapai seluas 2,3 juta ha pada semua RO yang berada pada ke 17 KPH di Kalimantan Barat. Pada Areal Penggunaan Lain (APL) memiliki arahan target aksi mencapai seluas 1,5 juta ha pada semua RO yang berada pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pada kawasan Hak Guna Usaha (HGU) memiliki arahan target aksi mencapai seluas 1,5 juta ha pada semua RO yang berada pada HGU, Izin Lokasi, IUP, Kadastral, APL. Pada kawasan konservasi memiliki arahan target aksi mencapai seluas 144,5 ribu ha pada semua RO yang berada pada CA, TN, TWA.

Berikut ini ditampilkan beberapa tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi berdasarkan unit manajemen pengelolaan kawasan hutan, baik oleh pihak ketiga, Perhutanan Sosial, wilayah tidak dibebani izin, dan unit manajemen pengelolaan di areal penggunaan lain (APL) termasuk hak guna usaha (HGU), non HGU serta kawasan konservasi suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA).



TABEL 8. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial

No	Pemegang Ijin	Arahan Indeks Kelembagaan (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
1	HHK-HA	74.682	30,937	23,108		89,866	83,236	
2	HHK-HT	91,947	88,329	9,518	107,471	107,604	103,768	
3	RE					976	947	
4	PS	12,586	20,327			321		
TOTAL		179,216	139,592	32,625	107,471	198,766	187,952	

Sumber: Hasil Analisis Spasial Provinsi Kalimantan Barat, 2022

TABEL 9. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (non pemegang izin)

No	KPH	Arahan Indeks Kelembagaan (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
1	UNIT I - KPHP	6.012	678			75		
2	UNIT II - KPHP	29.396				1		
3	UNIT III - KPHP	443						
4	UNIT IV - KPHP							
5	UNIT IX - KPHP	1						
6	UNIT V - KPHP	2,837	5.895					
7	UNIT VI - KPHP	19						
8	UNIT VII - KPHP	4.411	6.508			25		
9	UNIT VIII - KPHP	1.553	3.326			17		
10	UNIT X - KPHP							
11	UNIT XI - KPHP	633						

	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	Luas Total (Ha)
	121,917	19,659	1	4,342	811.288	6.642	1.265.678
	976,958	99,468	41	39,318	355.990	2,362	2.024.089
	1,679	144	3	336	10.213	39	14.336
	175	10.680	1,016	9.515	271.316	583	326.519
	1.100.728	129,952	42,377	53.511	1.448.807	9.626	3.630.623

	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	Luas Total (Ha)
	1.350	455	1.342	3.676	11.510		25.097
	42.746	12.617			21.464		106.223
	24	21			22.453		22.942
	1				10.230		10.231
	10				52.403		52.415
	980	8.805	250	2.835	8.685		30.287
		293			6.045		6.357
	1.299	25.527	16	2.283	9.224		49.293
	33	327	860	7.945	32.610		46.671
	2				6.426		6.428
	992	24		9			1.658

No	KPH	Arahan Indeks Kelembagaan (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
12	UNIT XII - KPHP	2.991						
13	UNIT XIII - KPHP							
14	UNIT XIV - KPHP							
15	UNIT XIX - KPHP	293				1.680	1.679	
16	UNIT XV - KPHP							
17	UNIT XVI - KPHP							
18	UNIT XVII - KPHP							
19	UNIT XVIII - KPHP	151						
20	UNIT XX - KPHP	507						
21	UNIT XXI - KPHP	11						
22	UNIT XXII - KPHP							
23	UNIT XXIII - KPHP							
24	UNIT XXIV - KPHP							
25	UNIT XXIX - KPHP	10						
26	UNIT XXV - KPHP	768	1.480					
27	UNIT XXVI - KPHP	16.640				8		
28	UNIT XXVII - KPHP							
29	UNIT XXVIII - KPHP							
30	UNIT XXX - KPHP	142	313					
31	UNIT XXXI - KPHP	15.945	6.279			308	2	
32	UNIT XXXII - KPHP	1.558	1			27		
33	UNIT XXXIII - KPHP	465	2.878					
34	UNIT XXXIV - KPHP	253	288					
TOTAL		85	28.859			2.141	16.812	

Sumber: Hasil Analisis Spasial Provinsi Kalimantan Barat, 2022

							Luas Total (Ha)
	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	
	340	3.835			36.728		43.894
					21.143		21.143
					24.779		24.779
	4.955	477		893	227.612		237.589
					43.694		43.694
					201.270		201.270
					114.645		114.645
		1			96.753		96.904
	26	18			325.192		352.744
	45				210.661		210.716
					40.463		40.463
					68.668		68.668
					65.570		65.570
	11				42.271		42.293
	5	391	38	507	74.942		78.132
	4.413	9.966			16.422		47.450
					151.204		151.204
					28.174		28.174
	2	225	33	626	12.022	10	13.373
	4.702	14.963		3.193	21.133		66.525
	123	6.746	481	7.109	2.416		19.675
	3	82	13	60	32.528	284	36.314
	73	538	90	409	338		1.990
	62.135	85.312	3.125	29.546	2.066,680	294	2.364.812

TABEL 10. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 pada Kawasan Areal Penggunaan Lain

No	Areal Penggunaan Lain	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
1	Pemda Kabupaten Bengkayang	4.818	1.577		16	40	40	
2	Pemda Kabupaten Kapuas Hulu	123.624	75.215		269	1.418	1,418	
3	Pemda Kabupaten Kayong Utara	13.414	8.715			0	0	
4	Pemda Kabupaten Ketapang	51.844	30.989	1	568	447	249	
5	Pemda Kota Pontianak							
6	Pemda Kota Singkawang	1.327						
7	Pemda Kabupaten Kubu Raya	4.067	25.214		0	31	25	
8	Pemda Kabupaten Landak	8.963	3.880	0	381	34	34	
9	Pemda Kabupaten Melawi	6.477	151	510	588	916	916	
10	Pemda Kabupaten Mempawah	3.880	1.524		259	579	579	
11	Pemda Kabupaten Sambas	3.022	1.392			0	0	
12	Pemda Kabupaten Sanggau	8.125	3.942		46	90	89	
13	Pemda Kabupaten Sekadau	2.905	79		34	148	148	
14	Pemda Kabupaten Sintang	6.916	6.155		115	1.007	1,007	
TOTAL		240.094	158.572	511	2.274	5.264	4.505	

Sumber: Hasil Analisis Spasial Provinsi Kalimantan Barat, 2022

	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	Luas Total (Ha)
	8.500	0	23.922	4.215	3.076		46.206
	38.707	2.820	11.903	9.094	188.540		453.008
	7.536	3.396	48.111	18.120	18.329	6.082	123.703
	101.718	12.803	46.100	32.868	85.978	2.628	366.191
			205				205
	2.478		189	46	18		4.058
	4.508	555	89.892	27.491	52.647	2.115	206.542
	9.922	1.150	31.856	6.720	6.731		69.671
	3.384	1.080	3.775	199	8.628		26.623
	3.200	6	20.188	1.881	2.516	747	35.360
	508	107	9.281	1.820	7.612	0	23.745
	11.082	473	17.906	15.237	5.592		62.582
	8.944	26	5.046	4.679	201		22.210
	19.038	19	21.952	3.137	24.686		84.032
	218.669	23.412	330.177	404.034	124.632	11.501	1.524.137

TABEL 11. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 pada Kawasan Hak Guna Usaha

No	Pemegang Ijin	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
1	HGU	6.090	2.281			27	27	
2	ILOK	12.104	8.391		30	14	14	
3	IUP	62.660	50.942		2	68	12	
4	KADASTRAL	6.393	11.006			105	91	
5	APL	152.136	86.216	511	2.242	4.495	4.361	
TOTAL		239.383	158.835	511	2.274	4.709	4.505	

Sumber: Hasil Analisis Spasial Provinsi Kalimantan Barat, 2022

TABEL 12. | Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi R01-R012 pada Kawasan Konservasi

No	Jenis Kawasan Konservasi	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		Mineral (R01)	Gambut (R02)"	Degradasi Konsesi (R03)	PBPH (R04)	ENR (R05)	RIL-C (R06)	
1	CA	4.120	22			555		
2	TN	328	58			0		
3	TWA	222				16		
TOTAL		4.671	80			571		

Sumber: Hasil Analisis Spasial Provinsi Kalimantan Barat, 2022

	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	Luas Total (Ha)
	10.856	219	50.400	3.717	4.881	138	78.635
	10.639	958	44.328	15.469	16.575		108.522
	41.993	3.957	76.544	34.160	115.538	205	386.026
	5.972	2.138	59.643	4.071	17.479	238	107.136
	150.063	15.164	99.411	68.143	250.081	10.993	843.817
	219.523	22.435	330.327	125.506	404.555	11.503	1.524.137

	Rotasi (R07)	Non- Rotasi (R08)	Tata Air (R09)	Restorasi (R10)	Konservasi (R011)	Pengelolaan Mangrove (R012)	Luas Total (Ha)
		134.457		1.295	50		140.499
	1	502		57	489		1.436
		2.004	11	11	29	336	2.630
	1	136.963	11	1.362	568	336	144.564

3.2.1. Strategi Pengelolaan Hutan Lestari

Strategi Bidang I mengenai pengelolaan hutan lestari terbagi menjadi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengendalian pengelolaan kawasan hutan terdiri dari (a) peningkatan dan penguatan operasional multipihak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan karhutla, (b) pemantapan kerjasama operasional dan pendanaan dalkarhutla di tingkat tapak, daerah, nasional, dan internasional, serta (c) peningkatan kapasitas dalkarhutla aparatur pemerintah dan pelaku usaha di wilayah rawan karhutla.

Untuk pengelolaan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan diyakini sebagai salah satu langkah strategis dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Perhutanan sosial merupakan sebuah kebijakan *corrective action* yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses legal pengelolaan hutan. Strategi kegiatan Perhutanan Sosial dalam mendukung pengelolaan hutan lestari diarahkan kepada areal KPHL PIAPS dan KPHP PIAPS dengan menjamin keberlanjutan tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Kegiatan aksi mitigasi perhutanan sosial yang dilakukan pada kedua areal tersebut meliputi ENR (*Enhanced Natural Regeneration*/Pengayaan Regenerasi Alami) dan Pembangunan Hutan Tanaman, serta didukung dengan upaya konservasi cadangan karbon dan pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat (*alternative of livelihood*).

Terhadap strategi multi usaha kehutanan dan teknik pengelolaan hutan produksi, terdiri atas (a) menjamin kepastian investasi dan usaha, (b) penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta teknik intensifikasi pada hutan tanaman, (c) multi bisnis/ multi usaha, (d) evaluasi kinerja usaha, (e) integrasi dengan industri dan pasar, (f) optimalisasi pemanfaatan, (g) penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses areal izin usaha, (h) perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (*water management*), (i) pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla, (j) pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi, (k) identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK, (l) pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK, (m) mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri, (n) optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri, (o) rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan), (p) penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK, (q) mendukung ketahanan energi dengan industri pellet, (r) pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global, (s) fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM, (t) efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.

3.2.2. Strategi Peningkatan Cadangan Karbon

Strategi Bidang II mengenai peningkatan cadangan karbon terbagi menjadi strategi RHL, strategi mangrove, strategi restorasi replika ekosistem, RTH dan ekoriparian. Strategi RHL berada langsung pada lokasi sasaran yang dituju dengan aspek utama berupa (1) menetapkan dan mendaftarkan lokus peningkatan cadangan karbon sebagaimana peta arahan FOLU Net Sink Provinsi Kalimantan Barat, (2) menentukan penanggungjawab aksi mitigasi

berdasarkan wilayah pengelolaan hutan atau pengelola tapak lainnya, (3) pelaksanaan aksi mitigasi dilakukan pengelolaannya oleh unit pengelolaan hutan atau pengelola tapak lainnya, mengintegrasikannya di dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang tingkat tapak atau pengelola tapak lainnya, dan rencana pengelolaan turunannya, (4) membangun komitmen para pemangku kawasan dalam memastikan keberhasilan dan keberlangsungan pelaksanaan RHL, (5) membangun kelembagaan pelaksana aksi mitigasi tingkat tapak, (6) mendorong pelaksanaan kegiatan RHL rotasi dan non rotasi khususnya pada areal yang berizin sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan, (7) penyediaan bibit dengan kuantitas yang mencukupi dan kualitas baik untuk mendukung pelaksanaan RHL, (8) penguatan kelembagaan pengelola RHL ditingkat tapak melalui pembentukan kelompok, peningkatan kapasitas SDM, supervisi, dan bimbingan teknis, (9) mobilisasi dan diversifikasi sumber pendanaan selain APBN antara lain dari APBD, sukuk hijau, investasi, dana hibah, kewajiban rehabilitasi DAS IPPKH, CSR, dan dana masyarakat lainnya serta mengaplikasikan *cross cutting budget* dalam pelaksanaan RHL, (10) membangun akses pasar terhadap produk-produk hasil dari masyarakat terkait *output* dan *outcome* pengelolaan cadangan karbon, (11) mengoptimalkan peran IPTEK untuk menjamin keberhasilan kegiatan RHL, (12) membangun sistem monitoring yang akuntabel, terintegrasi, dan mudah diakses oleh para pihak termasuk kemudahan penanggungjawab tingkat tapak.

Strategi peningkatan cadangan karbon pada ekosistem mangrove sesuai Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 dapat dikelompokkan ke dalam (1) kelompok kenampakan mangrove eksisting dan (2) kelompok kenampakan potensi habitat mangrove. Kelompok mangrove eksisting terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu mangrove lebat, sedang dan jarang masing-masing dengan persentase kerapatan tajuk >70%, 30-70% dan <30%. Kelompok mangrove potensi diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, yaitu areal terabrasi, mangrove terabrasi, lahan terbuka, tambak dan tanah timbul. Sehubungan dengan strategi tersebut, maka strategi untuk perbaikan ekosistem mangrove dilakukan melalui (1) strategi pemenuhan kondisi pemungkin (*enabler*) melalui sinkronisasi/sinergi kebijakan, penguatan basis data perencanaan dengan kerjasama riset perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, (2) strategi implementasi aksi dilakukan dengan cara memulihkan lahan terbuka, tanah timbul dan mangrove terabrasi dengan pola intensif, pengkayaan jenis tanaman mangrove disertai pola *silvofishery* dan akuakultur dengan pendekatan ekosistem (ADPE), mempertahankan ekosistem mangrove yang masih dalam kondisi baik, (3) strategi keberlanjutan mengenai pengarusutamaan hasil rehabilitasi mangrove di tingkat kebijakan, penanggung jawab usaha dan program multi sektor, penguatan sistem silvikultur hutan mangrove lestari, penyediaan bibit mangrove dengan kuantitas dan kualitas yang cukup serta mendorong pengembangan dan pembentukan kelembagaan pengelola hutan mangrove yang cenderung *open access*.

Strategi restorasi replika ekosistem, RTH dan ekoriparian dilakukan dengan pendekatan penyadartahuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan luas ruang terbuka hijau bervegetasi pohon, terutama pada wilayah padat penduduk dengan adopsi ekosistem yang sesuai, dan/atau sekaligus penataan sungai untuk peningkatan kualitas air.

3.2.3. Strategi Konservasi

Strategi Bidang III mengenai konservasi memiliki landasan pengelolaan kolaboratif, dengan prinsip saling menghargai (*mutual respect*), saling mempercayai (*mutual trust*), dan saling memberikan manfaat (*mutual benefits*). Kondisi saat ini terdapat lahan di dalam dan di luar kawasan hutan berupa lahan yang tidak produktif, seperti semak belukar, padang rumput, dan lahan kosong. Diperkirakan 26% dari luasan lahan tidak produktif ini termasuk dalam kategori lahan kritis dan sangat kritis yang perlu segera direhabilitasi. Strategi konservasi kawasan dan peningkatan populasi spesies dilakukan dengan mengacu *Current Policy Scenario* (CPOS), Indonesia akan merehabilitasi lahan tidak produktif dengan prioritas di lahan kritis dan sangat kritis sekitar 4,32 juta ha pada tahun 2030 dan 8,6 Juta ha pada tahun 2050. Berdasarkan *Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LCCP), target ini ditingkatkan menjadi 5,3 Juta ha pada tahun 2030 dan 10,6 Juta ha pada tahun 2050. Program yang telah dilaksanakan untuk percepatan rehabilitasi lahan, yaitu perhutanan sosial dan program rehabilitasi lahan dan kebijakan multi usaha kehutanan untuk konsesi hutan yang memungkinkan penggunaan lahan kritis untuk komoditas pangan dalam bentuk agroforestry. Salah satu strategi penting lainnya dimana perubahan iklim mempengaruhi keanekaragaman hayati adalah dengan mencegah berkurangnya jumlah populasi dan ketersediaan habitatnya serta meningkatkan koridor penghubung antar habitat/kantong populasi (*habitat hub*). Mempertahankan dan mengelola ekosistem penting, baik di dalam kawasan hutan produksi dan lindung, maupun di areal HGU dan APL, merupakan strategi konservasi yang dapat dikuatkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, dimana setiap kawasan atau lahan yang akan dibebani izin untuk kegiatan usaha berbasis lahan wajib memiliki areal konservasi, sekurang-kurangnya 7% dari luas ijin usahanya.

Strategi intensifikasi jasa lingkungan, Taman Hutan Raya dan KHDTK juga mengacu *Current Policy Scenario* (CPOS), menghentikan penerbitan izin baru pemanfaatan lahan gambut melalui Inpres No. 5/2019, mengamankan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan lahan gambut dan pengelolaan air melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15/2017. Sedangkan berdasarkan *Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LCCP) harus mencapai 0,95 Juta ha pada tahun 2030 dan 1,04 Juta ha pada tahun 2050 sehingga target restorasi gambut akan ditingkatkan menjadi 2,7 Juta ha pada tahun 2030 dan 4,2 Juta ha pada tahun 2050.

Strategi pengelolaan High Conservation Value Forest (HCVF) dan kelola fragmentasi habitat dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No.104/2015 yang memberikan peluang untuk meningkatkan kawasan hutan di bawah fungsi lindung, berdasarkan nilai jasa ekosistem kawasan tersebut. Pengurangan degradasi hutan akibat penebangan berlebihan dan perambahan hutan produksi juga menjadi prioritas pemerintah dengan cara sertifikasi wajib yang mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 30/2016 untuk penerapan praktik pengelolaan lestari di hutan produksi. Terget di bawah panduan LCCP, pada tahun 2050 nantinya semua perusahaan konsesi hutan telah menerapkan praktik pemanenan berkelanjutan, yang telah menghasilkan sebanyak 76% konsesi hutan bersertifikat baik. Upaya pemulihan hutan alam maupun di hutan produksi yang rusak juga dilakukan melalui percepatan regenerasi alami/*Enriched Natural Regeneration* (ENR) atau restorasi hutan.

Strategi kemitraan konservasi yang berkaitan dengan konteks keterlanjuran pada kawasan konservasi mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 salah satunya melalui Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan konservasi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9/2021. Proses kemitraan konservasi dapat berupa program pemberdayaan masyarakat atau perjanjian kerjasama (pada blok tradisional) dengan penekanan pada penyelesaian konflik dan kemitraan untuk pemanfaatan HHBK, atau konservasi dalam pemulihan ekosistem (zona rehabilitasi) dengan tujuan utama pengembalian fungsi ekosistem secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, kemitraan konservasi dapat diselaraskan dengan kegiatan RHL maupun perhutanan sosial, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks konservasi, misalnya lokasi koridor lintas satwa (Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No.6/2018). Penanganan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi dilakukan secara adaptif, terstruktur dan penuh kehati-hatian mengingat kompleksnya kondisi yang menjadi akar masalahnya. Penanganan konflik tenurial, dan perumusan alternatif solusinya, tidak hanya dilakukan berdasar pada gejala-gejala yang terlihat dipermukaan (symptoms) melainkan harus dirumuskan berdasar pada informasi yang konkrit dan komprehensif sebagai justifikasi. Nilai intrinsik kawasan konservasi juga perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan perumusan solusi, mengingat kedudukannya sebagai perwakilan kekayaan keanekaragaman hayati. Semua hal tersebut tidak boleh keluar dari konteks pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan sesuai dengan tiga prinsip konservasi, yaitu perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (life support system), pengawetan sumberdaya alam, serta pemanfaatan secara lestari. Pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat diperlukan untuk mengurangi gangguan terhadap kawasan hutan dan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan mereka, bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya tidak terlepas dari peran para pihak.

3.2.4. Strategi Pengelolaan Ekosistem Gambut

Strategi Bidang IV mengenai pengelolaan ekosistem gambut dirumuskan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi permasalahan kerusakan lahan gambut, identifikasi sumber emisi lahan gambut, identifikasi isu strategis dalam pengelolaan lahan gambut, dan identifikasi stakeholder. Berdasarkan hal tersebut maka aksi mitigasi pengelolaan ekosistem gambut pada prinsipnya diarahkan untuk mengembalikan dan memastikan lahan gambut tetap basah agar terhindar dari dekomposisi bahan organik dan kebakaran lahan gambut. Dalam konteks tersebut terdapat tiga isu strategis, yaitu (1) pencegahan deforestasi lahan gambut pada kawasan gambut dengan tutupan hutan alam yang memiliki Indeks Prioritas Lokasi (IPL) yang relatif tinggi dan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) termasuk arahan lindung dan produksi, (2) pengaturan tata air pada lahan gambut rusak yang menjadi area konsesi diprioritaskan pada HGU yang tutupan lahannya sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan, pada semua rentang IPL 1 sampai 9, (3) restorasi gambut pada area non konsesi yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya semusim dan perkebunan pada rentang IPL 7 sampai 9, pemulihan dilakukan dengan mengembangkan pola budidaya paludikultur dan teknik silvikultur lainnya yang memungkinkan berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk area yang tutupan lahan tidak produktif diarahkan untuk kegiatan restorasi yang dapat mendorong atau mempercepat regenerasi secara alami maupun secara buatan dengan pengayaan.

Fokus utama strategi pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan melalui (1) kemitraan dalam pengelolaan ekosistem gambut yang terdiri atas kemitraan operasional berupa pembagian kerja antar pihak dalam satu KHG, kemitraan konsultatif berupa dukungan kepakaran dari para ahli sesuai dengan kebutuhan, kemitraan kontribusi berupa dukungan sumberdaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan bersama, dan kemitraan kolaboratif berupa kerjasama yang mencakup pengambilan keputusan bersama, sharing sumber daya, hingga evaluasi secara bersama; (2) rewetting dan pembangunan sarana pendukung, berupa program pembasahan material gambut yang mengering akibat konversi tutupan lahan, pengeringan, maupun kebakaran dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah gambut. Sarana pendukung yang dibangun berupa infrastruktur pembasahan gambut (IPG), seperti sekat kanal, penimbunan kanal dan sumur bor.

3.2.5. Strategi Instrumen dan Informasi

Strategi Bidang V mengenai instrumen dan informasi terbagi menjadi sosialisasi dan komunikasi publik, *law enforcement*, evaluasi kebijakan RRE dan standarisasi. Strategi sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif dan kolaboratif adalah setengah keberhasilan dari aktifitas komunikasi publik, terutama dalam upaya FOLU *Net Sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 yang relatif baru di Indonesia sehingga upaya adaptasi dengan karakter komunikasi era *Post Truth* mutlak diperlukan. Terdapat enam aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi publik, yaitu (1) analisis situasi, (2) tujuan, (3) strategi yang terbagi atas konten dan media, (4) penentuan isi pesan berupa turunan dari jenis materi konten dan media, (5) rencana aksi, (6) monitoring dan evaluasi.

Strategi *law enforcement* memiliki tiga aspek penting yang harus diimplementasikan, yaitu (1) peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, (2) peningkatan perlindungan lingkungan hidup, (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Strategi evaluasi kebijakan RRE dan standarisasi memiliki tiga turunan strategi yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan segala aspek pada Bidang I hingga Bidang IV, yaitu (1) analisis current situation, (2) pembangunan koordinasi antar bidang untuk penguatan dukungan kebijakan, (3) penyediaan enabling condition antar bidang.

3.3. Target, Program dan Kegiatan Tahun 2022 – 2030

Berdasarkan telaahan terhadap rencana kerja SKPD/UPT KLHK/Instansi/KL di Provinsi Kalimantan Barat, berikut disampaikan target rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun yang meliputi: luas, target rencana operasional, satuan, volume dan perkiraan anggaran periode 2022-2030 (lihat Tabel 16 dan seterusnya). Selanjutnya penyusunan anggaran ini akan disesuaikan dengan arahan wilayah pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan ditingkat tapak, untuk melakukan penyesuaian dengan lokasi sebagaimana pada peta arahan target FOLU Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat Perencanaan untuk tahun 2022-2023 telah disusun melalui Perencanaan SKPD (Renstra), KL (RAK-KL), KPH (RPHJP), PBPH (RKU), KHDTK (RPHJP-KHDTK) maka penyesuaian rencana memungkinkan untuk dilakukan pada periode 2024-2030. Pendekatan berbasis perencanaan anggaran dari satuan kerja atau lembaga akan lebih realistis untuk mencapai target FOLU yang ditetapkan. Adapun pencapaian target berdasarkan bidang sesuai rencana operasional (RO) disampaikan sebagai berikut:

3.3.1. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari (RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6)

A. RO1 Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral

Pogram pencegahan deforestasi merupakan salah satu prioritas penting bagi semua pemangku kawasan. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengurangi deforestasi difokuskan pada wilayah yang risiko untuk terdeforestasi tinggi. Secara rinci, sebaran luas area pelaksanaan program pencegahan deforestasi pada seluruh pemangku kawasan menurut IPL dengan memperhatikan tingkat risiko emisi atau indeks biogeofisik pada semua fungsi kawasan dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan APL. Lokasi yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi ini adalah pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan IPL relatif tinggi dan berdasarkan IJLH termasuk arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan.

B. RO2 Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut

Mengingat pentingnya ekosistem gambut, maka pencegahan deforestasi pada lahan gambut merupakan salah satu prioritas yang sangat penting. Pemilihan lokasi intervensi dilakukan pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan IPL relatif tinggi dan berdasarkan IJLH termasuk arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan.

C. RO3 Pencegahan Deforestasi Konsesi

Pencegahan deforestasi merupakan salah satu prioritas penting bagi semua pemangku kawasan, termasuk pemegang ijin konsesi (PBPH). Hutan produksi sebagaimana fungsinya bertujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang dalam pengelolaannya harus tetap mengutamakan pengelolaan hutan produksi berkelanjutan. Beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan produksi diantaranya aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, kesinambungan produksi, konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta berbagai lini fungsi hutan bagi lingkungan.

D. RO4 Pembangunan Hutan Tanaman

Di dalam kawasan PBPH HT seringkali terdapat potensi perluasan hutan tanaman pada lahan tidak produktif. Selain lahan tidak produktif, cukup banyak area kawasan yang telah

dimanfaatkan masyarakat yang juga potensial untuk dikembangkan hutan tanaman. Namun demikian untuk mengembangkan kawasan tersebut tidaklah mudah karena adanya konflik tenurial dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan solusi penyelesaian persoalan lahan dalam konsesi, salah satunya melalui Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Penentuan lokasi prioritas untuk aksi mitigasi RO4 ini ditujukan untuk meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri pada area konsesi PBPH-HT dan area PIAPS yang masuk ke dalam arahan IJLH produksi. Pembangunan Hutan Tanaman juga dapat berupa hutan alam dan restorasi ekosistem.

E. RO5 *Enhanced Natural Regeneration* (ENR)

Kegiatan pengayaan (ENR) merupakan salah satu kegiatan mitigasi yang diharapkan dapat meningkatkan laju regenerasi alami hutan alam. Upaya mitigasi dengan meningkatkan laju serapan GRK melalui tindakan pengayaan (ENR) memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target NDC dan juga net sink 2030. Di dalam skenario menuju *net sink* 2030, laju regenerasi hutan sekunder di area konsesi yang seluas 0,313 juta hektar melalui pengayaan mencapai 2,5 tonC/ha/tahun. Pemilihan lokasi untuk diterapkan ENR adalah pada area dengan tutupan lahan hutan alam namun berada pada arahan konversi dan rehabilitasi mengindikasikan bahwa kondisi hutan sudah mengalami degradasi berat atau sudah berupa belukar. Kegiatan ENR juga diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya berupa hutan alam dan masuk ke dalam arahan konservasi dan rehabilitasi, termasuk hutan sekunder di arahan produksi.

F. RO6 Penerapan RIL-C

Reduced Impact Logging-Carbon (RIL-C) merupakan teknik pemanenan hutan dengan dampak rendah karbon yang bertujuan untuk mendapatkan volume produksi sesuai target tanpa melakukan degradasi hutan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan stok karbon hutan. Kegiatan RIL-C ini terutama dilakukan pada area dengan tutupan hutan alam primer yang masuk arahan produksi dan berada di konsesi PBPH-HA. Pada area tersebut, RIL dapat diterapkan pada hutan primer dan pada hutan alam sekunder dilakukan dengan teknik SILIN (Tebang Pilih Tanam Rumpang, Tebang Pilih Tanam Jalur). Selain pada PBPH HA, RIL-C juga dapat diterapkan pada area PBPH HT yang berhutan alam. Hal ini memungkinkan karena adanya kebijakan multi usaha kehutanan.

Terkait detail susunan terhadap rencana kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari yang ditargetkan berada pada RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6 dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7. Sedangkan rekapitulasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 13.

TABEL 13. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Patroli perlindungan hutan di HL, HP/HPK terkait pencegahan dan perlindungan Karhutlat	
2	Pemadaman Karhutla	

No	Rencana Kegiatan	RO
3	Groundcheck hotspot	1
4	Pembinaan Masyarakat Peduli Api	
5	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUTLA)	
6	Verifikasi Proklamasi	
7	Budidaya madu lebah dan kelulut	
8	Silvopasture	
9	Silvofishery	
10	Tata Air (Ekowisata Air Terjun, Pengolahan Air Bersih, Perikanan dan Air Bersih)	
11	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1

No	Rencana Kegiatan	R0
12	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
13	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan	
14	Penanaman/ pengkayaan pada hutan produksi	
15	Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan IPM dan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Hutan	
16	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Fasilitasi Pengajuan izin, Penguatan Kelembagaan/RKPS/KUPS, Pengembangan Usaha	
17	Pemasaran/ Promosi Produk Perhutanan Sosial dan Handicraft	
18	Pelaksanaan Smart Patrol berbasis aplikasi pada Perhutanan Sosial	
19	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	
20	Advokasi Implementasi Perda 6 Tahun 2018 ke Pemkab/ Mendorong HCV/TAKE,dll	
21	Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal yang Berizin	
22	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/Penyediaan Data dan informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	
23	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	
24	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	
25	Pengembangan Pembenihan untuk Rehabilitasi Lahan	
26	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	

No	Rencana Kegiatan	RO
27	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	
28	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6.000 m3/tahun	
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
31	Bimtek SDM Pamhut	
32	Penetapan dan Operasional Posko Dalkarhutla	
33	Identifikasi HHBK dan Jasling di KHDTK (Madu, Air Minum, Kaliandra)	
34	Penyadartauan Pencegahan Karhutla (Kampanye/ sosialisasi/penyuluhan/pameran)	2
35	Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Ancaman Karhutla	
36	Patroli Pencegahan Karhutla secara Terpadu	
37	Penaksiran/Penghitungan Luas Karhutla	
38	Pengembangan Perhutanan Sosial di areal KHDTK di 3 Kabupaten	
39	Identifikasi HHBK dan Jasling pada areal konsesi	
40	Pembinaan, Pemantauan, dan Monev pada Areal KPHP Unit XV yang Telah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan/Penyusunan Dokumen Pembelajaran Bersama Hasil Pembinaan dan pemantauan Kegiatan di Luar Kegiatan Kehutanan Pada areal Yang Telah ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan, Terkait Pelaksanaan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas kayu)	3
41	Bimtek Penerapan Multiusaha Kehutanan	
42	Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan	
43	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di Dalam Areal yang Berizin/ Monitoring dan Evaluasi rehabilitasi Pada Areal Berizin	

3.3.2. Bidang Peningkatan Cadangan Karbon (RO7, RO8)

A. RO7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi

Salah satu aksi mitigasi untuk meningkatkan serapan emisi adalah melalui kegiatan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan utama penyelenggaraan RHL adalah menurunnya deforestasi/degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air. Kegiatan RHL dengan rotasi adalah salah satu upaya pemulihan lahan dengan sekaligus meningkatkan fungsi produksi. Pemilihan lokasi prioritas untuk RHL dengan rotasi adalah area dengan IPL tinggi yang tutupan lahannya tidak produktif, lahan budidaya semusim dan perkebunan yang masuk ke dalam arahan produksi dan berada pada kawasan hutan produksi dan bukan merupakan lahan gambut. Apabila pada lahan gambut, maka diarahkan untuk restorasi. Dari aspek penanggungjawab, rehabilitasi untuk rotasi di area APL merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sedangkan di dalam area konsesi merupakan tanggungjawab pemegang izin dan dalam kawasan hutan non konsesi oleh Pemerintah Pusat (KLHK).

B. RO8 Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi

Kegiatan peningkatan cadangan karbon non rotasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang tidak dipanen kayunya (non-rotasi). Kegiatan ini terutama dilakukan pada area hutan lindung dan hutan konservasi, selain itu juga pada hutan produksi yang belum dibebani izin, area PBPH HT dan area perhutanan sosial. Area di luar kawasan hutan konservasi dan lindung yang menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi tanpa rotasi umumnya memiliki nilai konservasi tinggi karena kemungkinan merupakan area perlintasan satwa. Mekanisme penentuan lokasi prioritas kegiatan rehabilitasi ini dinilai berdasarkan kondisi lahan kritis dan DAS yang dipulihkan yang merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas pelaksanaan RHL adalah pada lahan kritis, lahan terbuka dan atau lahan bekas kebakaran dan juga memperhatikan tingkat rawan bencana dan status DAS sebagai DAS prioritas yang merupakan wilayah tangkapan air untuk danau, dam, bendungan atau waduk termasuk sempadan dan dapat juga merupakan wilayah tujuan wisata nasional atau ekosistem tertentu seperti mangrove dan gambut.

Terkait detail susunan terhadap rencana kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon yang ditargetkan berada pada RO7, dan RO8 dapat dilihat pada Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 12. Sedangkan rekapitulasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 14.

TABEL 14. | Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Pengembangan Tanaman MPTS	7
2	Pengembangan Investasi Hijau	
3	Pembuatan demplot Agroforestry dan Bibit	
4	Penanaman dan Pengkayaan jesis Asli	8
5	Rehabilitasi Gambut dan Mangrove	
6	Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	
7	Pembuatan Sekat Kanal	
8	Pemeliharaan Mata Air	
9	Pemeliharaan Penanaman	
10	Rehabilitasi di dalam dan di luar Kawasan Hutan	
11	Gerakan Penanaman Pohon Serentak Kalimantan Barat/ Penghijauan Lingkungan	
12	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL	
13	Fasilitasi Legalitas Perhutanan Sosial	
14	Pemberdayaan Masyarakat Lokalatih Perhutanan Sosial	
15	Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
16	Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	
17	Pengembangan Tanaman Budidaya/perkebunan	
18	Operasional Persemaian dan Distribusi Bibit	
19	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	
20	Penanaman di Areal Kritis KHDTK	

3.3.3. Bidang Konservasi (RO11 dan KK di RO lain)**A. RO11 Perlindungan Area Konservasi Tinggi**

Kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai

dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal. Prioritas lokasi untuk kegiatan aksi mitigasi RO11 ini dilakukan pada kawasan konservasi dan pada area bernilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan konservasi seperti pada kawasan APL. Selain itu, kegiatan RO11 juga dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dengan menjaga area bernilai konsentrasi tinggi (HCVF). Berdasarkan IJLH, area berhutan alam yang menjadi area konservasi adalah area yang masuk ke dalam arahan lindung.

B. RO Lain

Rencana operasional lain merupakan campuran segala jenis kegiatan yang ada dalam berbagai rencana operasional, Mulai RO1 hingga RO12. Prioritas lokasi untuk kegiatan aksi mitigasi bersifat fleksibel dan dapat digolongkan ke berbagai RO.

Terkait detail susunan terhadap rencana kerja Bidang Konservasi yang ditargetkan berada pada RO11 dan KK di RO lainnya dapat dilihat pada Lampiran 13 sampai dengan Lampiran 21. Sedangkan rekapitulasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 15.

TABEL 15. | Rencana Kerja Bidang Konservasi

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Inventarisasi kawassn dengan nilai kehati tinggi dan permasalahan kawasan konservasi	1
2	Patroli pengecekan dan pemeliharaan batas TN-HL-APL	
3	Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan	
4	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman bersama MPA	
5	Pembentukan kelompok tani hutan	
6	Fasilitasi kesepakatan konservasi serta penyusunan rencana kelompok dan RPM	
7	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	
8	Bantuan peningkatan usaha ekonomi produktif	
9	Penanaman pengkayaan spesies asli	
10	Pemeliharaan pengkayaan spesies asli	
11	Renovasi sarana prasarana wisata alam	
12	Pembangunan Saprass wisata di TWA	
13	Inventarisasi Permasalahan CA	
14	Peningkatan kapasitas polisi hutan	

No	Rencana Kegiatan	RO
15	Pengadaan Kendaraan operasional lapangan	
16	Pembuatan papan informasi dan larangan dan himbauan pada areal	
17	Rekonstruksi batas KHDTK (80km)	
18	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan, pengendalian karhutla, inventarisasi dan verifikasi kehati"	2
19	Pemulihan ekosistem dengan mekanisme alami di CA	
20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman bersama MPA	5
21	Pelepasliaran satwa	
22	Patroli pengamanan kawasan konservasi	
23	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan, pengendalian karhutla	7
24	Penanaman intensif/rehabilitasi zona kritis	
25	Pemeliharaan intensif/Rehabilitasi zona kritis	

No	Rencana Kegiatan	R0
26	penanaman intensif/rehabilitasi zona kritis	8
27	Pemeliharaan intensif/Rehabilitasi zona kritis	
28	Bimtek kelompok tani hutan	
29	Inventarisasi dan verifikasi potensi zona tradisional	
30	identifikasi para pihak dalam partisipasi pemulihan ekosistem	
31	Kemitraan konservasi dengan skema pemulihan ekosistem	
32	sosialisasi zonasi pengelolaan	
33	Konsultasi publik review zonasi pengelolaan	
34	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman bersama MPA	
35	Patroli ground check hotspot	
36	Intensifikasi jelajah dan wisata alam	
37	Pengelolaan sanctuary penyu	
38	Patroli pengamanan kawasan konservasi	
39	Monitoring populasi orangutan di CA	
40	Monitoring populasi rusa di CA	
41	Peningkatan usaha jasa lingkungan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	
42	Revegetasi, perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan, serta pengendalian kebakaran hutan	10
43	Pemeliharaan sekat kanal	

No	Rencana Kegiatan	RO
44	Pembinaan dan pengendalian pemberian akses pemanfaatan pada zona tradisional	
45	Bantuan peningkatan usaha ekonomi produktif kemitraan konservasi	
46	Inventarisasi kawassn dengan nilai kehati tinggi dan permasalahan kawasan konservasi	
47	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	
48	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman bersama MPA	
49	Pembersihan jalur wisata di TWA	
50	Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan	
51	Pengembangan tanaman endemik/penanaman pohon tengkawang	
52	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung/ pengembangan pemanfaatan HHBK	
53	Upaya konservasi kawasan bernilai konservasi tinggi di kawasan hutan (HCVF)/ Identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi	
54	Deliniasi areal perlindungan setempat	
55	Pengelolaan rencana tata hutan KPH Kewenangan provinsi/ penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH	
56	Penyiapan baseline database	
57	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian isin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	
58	Penilaian rencana pengelolaan di kawasam hutan produksi	
59	Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan KHDTK	
60	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman bersama MPA	12
61	Inventarisasi dan verifikasi kehati di TWA	

3.3.4. Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut (RO9, RO10, RO12)

RO9 Pengelolaan Tata Air Gambut

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari dekomposisi dan kebakaran pada lahan gambut terutama dilakukan melalui rangkaian kegiatan pembasahan (*rewetting*) dan penghijauan kembali (*revegetasi*). Kegiatan ini difokuskan pada lahan gambut dalam yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian serta pada lahan yang tidak produktif.

Termasuk dalam kegiatan ini ialah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui perbaikan pengelolaan tata air gambut di area perkebunan (HGU) dan hutan tanaman industri (PBPH). Penunjukkan lokasi pengelolaan tata air gambut diprioritaskan pada area konsesi dan HGU yang tutupan lahannya sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan. Pada lokasi tersebut selanjutnya dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pemegang konsesi dalam pengelolaan tata air sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2017.

RO10 Restorasi Gambut

Berbeda dengan aksi mitigasi perbaikan tata air gambut yang dilakukan di area PBPH dan HGU, kegiatan restorasi lahan gambut dilakukan di kawasan APL, wilayah konsesi, dan seluruh kawasan KPH, yang memiliki tutupan lahan tidak produktif, budidaya, dan perkebunan yang berada di semua fungsi kawasan dan semua arahan. Kegiatan restorasi pada area yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya semusim dan perkebunan yang ada di luar konsesi diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi gambut dengan mengembangkan pola budidaya paludikultur dan teknik silvikultur lainnya yang memungkinkan berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk area yang tutupan lahan tidak produktif diarahkan untuk kegiatan restorasi yang dapat mendorong atau mempercepat regenerasi secara alami maupun secara buatan dengan pengayaan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi ikut menentukan keberhasilan dalam menurunkan emisi dari kebakaran gambut yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca nasional terbesar. Oleh sebab itu, hanya dengan kegiatan restorasi gambut masalah penurunan muka air tanah gambut dapat diatasi khususnya pada musim kemarau panjang sehingga risiko kebakaran dapat dikurangi.

RO12 Pengelolaan Mangrove

Walaupun mangrove belum dimasukkan dalam bagian penghitungan target *legally binding* dibawah NDC maupun ambisi Indonesia di bawah LTS-LCCR, namun mangrove mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim mengingat Indonesia adalah negara pemilik mangrove terluas di dunia dengan 3,4 juta hektar. Pada saat ini telah dan sedang dilaksanakan program rehabilitasi mangrove dengan target seluas 600.000 ha. Upaya mitigasi dengan peningkatan cadangan karbon merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) termasuk rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir, dan juga pembangunan hutan tanaman industri pada lahan bercadangan karbon rendah. Kegiatan RHL mangrove bertujuan untuk menurunkan degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Terkait detail susunan terhadap rencana kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut yang ditargetkan berada pada RO9, RO10, dan RO12 dapat dilihat pada Lampiran 22 sampai dengan Lampiran 25. Sedangkan rekapitulasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 16.

TABEL 16. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Pembangunan Sekat Kanal	9
2	Perbaikan tata air KHG	
3	Inventarisasi KHG	
4	Pembuatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar	10
5	Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	
6	Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut	
7	Operasi Pembahasan	
8	Pemeliharaan dan Perbaikan IPG	
9	Fasilitasi Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah	
10	Koordinasi dan Konsolidasi restorasi Gambut	
11	Monitoring dan Evaluasi	
12	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	
13	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan	
14	Peningkatan kapasitas polisi hutan	

3.3.5. Bidang Instrumen dan Informasi

Rencana operasional pada Bidang Instrumen dan Informasi mencakup semua bidang dari bidang 1 hingga bidang 4, serta merupakan campuran segala jenis kegiatan yang ada dalam berbagai rencana operasional, Mulai RO1 hingga RO12. Prioritas lokasi untuk kegiatan aksi mitigasi bersifat fleksibel dan dapat digolongkan ke berbagai RO dan berbagai bidang.

Terkait detail susunan terhadap rencana kerja Bidang Instrumen dan Informasi yang ditargetkan berada pada RO1 hingga RO12 dapat dilihat pada Lampiran 26 sampai dengan Lampiran 32. Sedangkan rekapitulasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 17.

TABEL 16. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut

No	Rencana Kegiatan	R0
1	Sosialisasi Sertifikasi PHL	1-2
2	Patroli Mandiri dan Terpadu	
3	Patroli Batas Negeri (Wilayah Perbatasan)	
4	Puldasi Dugaan adanya kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat	
5	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan perkebunan di areal kawasan hutan produksi terbatas	1
6	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
7	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Wilayah KPH / Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	
8	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL/ Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan KPHP	
9	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	3
10	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	
11	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	
12	Monev Penerapan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahkan Lindung Berdasarkan IJLH	
13	Monev PBPH	
14	Verifikasi Pengaduan Lapangan perihal dugaan Pencemaran air oleh PT	
15	Pengumpulan Data dan Informasi (Puldasi) dugaan adanya kegiatan illegal logging oleh HPH	
16	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan pertambangan ilegal	
17	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kebakaran hutan/lahan di areal konsesi	
18	Pengumpulan Data dan Informasi dugaan adanya kegiatan pengolahan hasil hutan oleh industri primer	

No	Rencana Kegiatan	RO
19	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	4
20	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	
21	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	
22	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	
23	Sosialisasi Hasil Kajian dan Penelitian Pembangunan HT	
24	Bimtek Percepatan Pengembangan HTE pada PBPH dan KPH	
25	Monev Pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE)	
26	Bimtek Fasilitas Penyusunan RPHJP dan RPHJPd,	
27	Workshop penilaian KPH Efektif	5-6
28	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop Tentang Penerapan SILIN	
29	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SILIN pada PBPH	
30	Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Workshop Tentang Penerapan RIL-C	
31	Monitoring dan Evaluasi Penerapan RIL-C pada PBPH	11
32	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan PETI dan illegal logging yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung	
33	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan perambahan di TWA	
34	Operasi dugaan adanya perburuan TSL di Taman Nasional	
35	Operasi dugaan adanya kegiatan perdagangan sisik trenggiling	
36	Perlindungan rimba/gupung di APL oleh masyarakat	1-12.
37	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
38	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait	
39	Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM	1-12.

3.4. Rencana Pendanaan

3.4.1. Pembiayaan yang teridentifikasi Untuk Pencapaian Rencana Operasional

A. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO1

Berdasarkan Tabel 18, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO1 dari tahun 2022-2030 sebesar 231 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 19,5 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 211 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 5,6 juta per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 22,5 juta per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO1 di Kalimantan Barat lebih besar empat kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Meskipun pembiayaan ini lebih besar perlu dilakukan pemeriksaan ulang apakah rencana yang dilaksanakan sesuai dengan target lokasi yang diarahkan. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap rencana dan usulan dari masing-masing SKPD/KL dengan melakukan realokasi pembiayaan.

B. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO2

Berdasarkan Tabel 19, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO2 dari tahun 2022-2030 sebesar 14 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 854 juta dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 13 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 3,4 juta per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 609 ribu per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO2 di Kalimantan Barat lebih kecil lima kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Dengan demikian diperlukan pembiayaan tambahan untuk melaksanakan target RO2.

C. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO3

Berdasarkan Tabel 20, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO3 dari tahun 2022-2030 sebesar 40 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 15 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 25 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 2,7 juta per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 178 ribu per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO3 di Kalimantan Barat lebih kecil 15 kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Dengan demikian diperlukan pembiayaan tambahan untuk melaksanakan target RO3.

D. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO4

Berdasarkan Tabel 21, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO4 dari tahun 2022-2030 sebesar 9,9 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 9,9 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 36,2 juta per ha.

E. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO5

Berdasarkan Tabel 22, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO5 dari tahun 2022-2030 sebesar 5 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 5 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 107,9 ribu per ha.

F. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO6

Berdasarkan Tabel 23, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO6 dari tahun 2022-2030 sebesar 4 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 4 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 107,9 ribu per ha.

G. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO7

Berdasarkan Tabel 24, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO7 dari tahun 2022-2030 sebesar 4 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 91 juta dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 4,4 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 784,3 ribu per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 68,3 juta per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO7 di Kalimantan Barat lebih besar 87 kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Meskipun pembiayaan ini lebih besar perlu dilakukan pemeriksaan ulang apakah rencana yang dilaksanakan sesuai dengan target lokasi yang diarahkan. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap rencana dan usulan dari masing-masing SKPD/KL dengan melakukan realokasi pembiayaan.

H. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO8

Berdasarkan Tabel 25, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO8 dari tahun 2022-2030 sebesar 195 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 23,8 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 170,9 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 495,2 ribu per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 15,8 juta per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO8 di Kalimantan Barat lebih besar 32 kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Meskipun pembiayaan ini lebih besar perlu dilakukan pemeriksaan ulang apakah rencana yang dilaksanakan sesuai dengan target lokasi yang diarahkan. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap rencana dan usulan dari masing-masing SKPD/KL dengan melakukan realokasi pembiayaan.

I. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO9

hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO9 dari tahun 2022-2030 sebesar 6,7 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 6,7 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 50,7 ribu per ha.

J. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO10

Berdasarkan Tabel 27, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO10 dari tahun 2022-2030 sebesar 2,3 miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 2,3 miliar. Dengan membandingkan standar pembiayaan per ha berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun Kalimantan Barat mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 yaitu rerata 3,2 juta per ha, serta usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 8,6 juta per ha, maka dapat dilihat bahwa pembiayaan untuk pencapaian RO10 di Kalimantan Barat lebih besar 2,5 kali lipat dari standar pembiayaan per ha yang dianalisis. Meskipun pembiayaan ini lebih besar perlu dilakukan pemeriksaan ulang apakah rencana yang dilaksanakan sesuai dengan target lokasi yang diarahkan. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap rencana dan usulan dari masing-masing SKPD/KL dengan melakukan realokasi pembiayaan.

K. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO11

Berdasarkan Tabel 28, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO11 dari tahun 2022-2030 sebesar 68,9

miliar yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 3,3 miliar dan bersumber dari APBD Provinsi sebesar 65,6 miliar. Namun untuk standar pembiayaan per ha yang mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tidak ditemukan standar indikatif pembiayaannya, sedangkan usulan pembiayaan oleh masing-masing SKPD/KL sebesar rerata 8,1 juta per ha.

L. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO12

Berdasarkan Tabel 29, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk RO12 dari tahun 2022-2030 sebesar 647,2 juta, yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 647,2 juta. Namun untuk standar pembiayaan per ha yang mengacu pada pembiayaan masing-masing RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tidak ditemukan standar indikatif pembiayaannya.

M. Identifikasi Indikatif Pembiayaan RO13

Berdasarkan Tabel 30, hasil analisis yang dilakukan terhadap indikatif pembiayaan masing-masing SKPD/KL didapatkan pembiayaan untuk lokasi di luar atau lintas RO13 dari tahun 2022-2030 sebesar 86,2 miliar, yang bersumber dari pembiayaan APBN sebesar 86,1 miliar. Namun untuk standar pembiayaan per ha yang mengacu pada pembiayaan di luar atau lintas RO sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tidak ditemukan standar indikatif pembiayaannya.

TABEL 18. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R01

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	85,039	3,884,657	10,729,465	9,866,737	19,713,128	25,497,080	26,083,954	
2	BBTNBKDS	13	13		68,500	1.190.115	754,339	754,339	
3	BTNBDDR			133,000	360,400	360,400	360,400	171,600	
4	BTNNGP	315	24	9,000	9,000		27,000		
5	BKSDA	4,343		1,084,488	1,031,973	549,135	866,335	269,135	
6	BPDAS		30,820	547,169	507,083				
7	BPPI			949,150	949,150	949,150	949,150	949,150	
8	BPSKL		13,582						
9	DLHK		12,184	4,189,277	5,238,000	5,295,000	5,318,000	5,342,000	
10	KHDTK		39,364	502,500	102,500	102,500	102,500	102,500	
Jumlah		89,710	3,980,644	18,144,049	18,133,343	28,159,427	33,874,804	33,672,678	
Rerata		8,971	398,064	1,814,405	1,813,334	2,815,943	3,387,480	3,367,268	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 19. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R02

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	28,859	4,430	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
2	BTNGP	58	280	181,350	27,000	27,000	27,000	27,000	
3	BKSDA	22		133,915	36,075	71,075	36,075	36,075	
4	DLKH	315		499,192	670,000	670,000	670,000	670,000	
5	KHDTK Untan	4,343		50,000	50,000				
Jumlah		28,939	4,710	1,664,457	1,583,075	1,568,075	1,533,075	1,533,075	
Rerata		5,788	942	332,891	316,615	313,615	306,615	306,615	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	22,276,645	19,407,349	16,584,881	13,975,140	18,237,153	164,134,378	1,930,097	42,252	5.662.857
	33,000	33,000	33,000	68,500	326,088	2,934,794	219,727,630	219,670,201	
	171,600	171,600	171,600	171,600	230,244	2,072,200			
					5,000	45,000	143,025	1,899,536	
	296,135	269,135	296,135	296,135	541,956	4,877,606	1,123,192		
					117,139	1,054,252		34,207	
	949,150	949,150	949,150	949,150	949,150	8,542,350			
	5,361,000	5,373,000	5,382,000	4,407,000	5,211,697	46,905,277		3,849,753	
	102,500	102,500	102,500	102,500	146,944	1,322,500		33,597	
	29,163,030	26,305,734	23,492,266			231,888,357	222,923,944	225,529,545	
	2,916,303	2,630,573	2,349,227	2,094,303		23,188,836	22,292,394	22,552,954	

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	7,200,000	249,490	1,625,307	3.401.571
	27,000	27,000	27,000	27,000	79,470	397,350	6,854,094	1,420,782	
	36,075	36,075	36,075	36,075	91,503	457,515	20,440,715		
	670,000	670,000	670,000	670,000	1,171,838	5,859,192			
					20,000	100,000			
	1,533,075	1,533,075	1,533,075	1,533,075		14,014,057	27,544,299	3,046,089	
	306,615	306,615	306,615	306,615		2,802,811	5,508,860	609,218	

TABEL 20. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R03

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp x1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH		140,302	95,000	95,000	6,024,200	5,652,500	5,625,500	
2	BPHP			1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	
Jumlah			140,302	1,770,000	1,770,000	7,699,200	7,327,500	7,327,500	
Rerata			70,151	885,000	885,000	3,849,600	3,663,750	3,663,750	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 21. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R04

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp x1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	BPHP			1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	
Jumlah				1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	
Rerata				1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 22. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R04

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp x1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	2,140							
2	BKSDA	571		54,505	94,195	94,195	94,195	94,195	
3	BPHP			475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	
Jumlah		2,711		529,505	569,195	569,195	569,195	569,195	
Rerata		1,355		176,502	189,732	189,732	189,732	189,732	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	6,452,500	907,500	207,500		2,787,411	25,086,700		178,805	2,714,404
	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	15,075,000			
	8,127,500	2,582,500	1,882,500	1,675,000		40,161,700		178,805	
	4,063,750	1,291,250	941,250	837,500					

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	9,990,000			36,275,919
	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000		9,990,000			
	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000					

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
									107,917
	94,195	94,195	94,195	94,195	89,785	808,065	1,415,907		
	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	4,275,000			
	569,195	569,195	569,195	569,195		5,083,065	1,415,907		
	189,732	189,732	189,732	189,732					

TABEL 23. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R05

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	1,681							
2	BPHP			450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Jumlah		1,681		450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
Rerata		840		225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 24. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R06

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	62,135	33	300,000	300,000	1,180,000	1,000,000	300,000	
2	BTNGP	1	75	16,120	27,000	48,000			
Jumlah		62,136	108	316,120	327,000	1,228,000	1,000,000	300,000	
Rerata		31,068	54	158,060	163,500	614,000	500,000	150,000	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 25. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R07

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	85,312	2,511,413	1,463,302	1,506,956	23,000,895	11,426,087	25,873,088	
2	BBTNBKDS	21	21	28,850	41,850	341,221	278,074	278,074	
3	BTNBDDR	110	110	215,360	141,100	173,000	75,750	434,900	
4	BTNGP	371	353	587,320	60,500	432,500	405,500	397,500	
5	BKSDA	136,461		495,405	696,970	518,940	3,178,340	751,140	
6	BPDAS		2,244	6,798,744	2,388,485	1,197,612			
7	BPSKL		6,533						

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp $\times$ 1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
8	DLHK		1,290	4,659,366	6,564,366	6,564,366	6,564,366	6,564,366	
9	KHDTK		36	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
Jumlah		222,275	10,103	12,013,515	9,709,821	8,340,918	9,802,706	7,375,506	
Rerata		24,697	1,123	1,334,835	1,078,869	926,769	1,089,190	819,501	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 26. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R09

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp $\times$ 1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	3,125	3						
2	TRGD			2,254,633	2,254,633	2,254,633			
3	BKSDA	11							
Jumlah		3,136	3	2,254,633	2,254,633	2,254,633			
Rerata		1,045	1	751,544	751,544	751,544			

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 27. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R010

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rp $\times$ 1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	29,546							
2	BTNGP	57	57		18,000	18,000	18,000		
3	BKSDA	1,306			58,320	308,320	158,320	158,320	
4	TRGD		30		337,095	337,095	337,095		
Jumlah		30,908	87		413,415	663,415	513,415	158,320	
Rerata		7,727	22		103,354	165,854	128,354	39,580	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	6,564,366	6,564,366	6,564,366	6,564,366	6,352,699	57,174,294		44,305,016	
	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	540,000		15,000,000	
	7,243,306	6,993,306	6,993,306	6,993,306		195,423,786	79,997,146	143,059,414	
	804,812	777,034	777,034	777,034		21,713,754	8,888,572	15,895,490	

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
					751,544	6,763,899			50,771

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
					6,000	54,000	949,306	949,367	3.260,330
	158,320	158,320	158,320	158,320	146,284	1,316,560	1,008,411		
					112,365	1,011,285		33,709,500	
	158,320	158,320	158,320	158,320		2,381,845	1,957,717	34,658,867	
	39,580	39,580	39,580	39,580		595,461	489,429	8,664,717	

TABEL 28. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R011

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	2,051,432	1,685,813	2.489.140	1,776,025	10,801,900	10,474,800	10,130,000	
2	BBTNBKDS		465	25,450	50,750	33,000	33,000	33,000	
3	BTNBDDR	18	18	79,650	79,650	79,650	79,650	79,650	
4	BTNGP	5	5				27,000	27,000	
5	BKSDA	79			164,100	144,300	144,300	144,300	
6	KALFOR		2,270	989,341					
7	DLHK			1,584,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
8	KHDTK	15,248							
Jumlah		15,333	2,275	2,573,341	1,864,100	1,844,300	1,871,300	1,871,300	
Rerata		1,917	284	321,668	233,013	230,538	233,913	233,913	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	8,829,800	2,645,100	2,411,000	920,000	5,608,863	50,479,764	24,607	29,944	
	33,000	33,000	33,000	50,750	36,106	324,950		699,524	
	79,650	79,650	79,650	79,650	79,650	716,850	38,952,787	38,959,239	
	27,000	27,000	18,000		14,000	126,000	24,684,762	24,988,101	
	144,300	144,300	144,300	144,300	130,467	1,174,200	14,820,244		
					109,927	989,341		435,787	
	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,687,111	15,184,000			
	1,871,300	1,871,300	1,862,300	1,844,300		68,995,105	78,482,400	65,112,595	
	233,913	233,913	232,788	230,538		8,624,388	9,810,300	8,139,074	

TABEL 29. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R012

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	KPH	294							
2	BKSDA	336			72,150	142,150	72,150	72,150	
Jumlah		631			72,150	142,150	72,150	72,150	
Rerata		315			36,075	71,075	36,075	36,075	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

TABEL 30. | Identifikasi Indikatif Pembiayaan R013

No	Program/ Kegiatan	Luas (Ha)		Anggaran (Rpx1000)					
		Arahan	Usulan	2022	2023	2024	2025	2026	
1	BPKH			13,073,979	1,295,270	9,700,619	18,786,250	13,078,656	
2	BPHP			130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
3	BPPLHK		66,572	245,584					
4	KHDTK		19,682	50,000					
5	RTH Kota Pontianak		3,351	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
Jumlah			89,605	13,502,563	1,478,270	9,833,619	18,919,250	13,211,656	
Rerata			22,401	3,375,641	369,568	2,458,405	4,729,813	3,302,914	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Kalimantan Barat, 2022

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	72,150	72,150	72,150	72,150	71,911	647,200	1,924,297		
	72,150	72,150	72,150	72,150					
	36,075	36,075	36,075	36,075					

					Rata-rata	Jumlah anggaran	Rp/ha arahan	Rp/ha usulan	Standart (Rp/ha)
	2027	2028	2029	2030					
	25,497,625	937,858	1,254,283	1,068,727	9,410,363	84,693,267			
	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,170,000			
					27,287	245,584		3,689	
					11,111	100,000		5,081	
	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000		8,057	
	25,630,625	1,070,858	1,387,283	1,201,727		86,235,851		16,827	
	6,407,656	267,715	346,821	300,432		17,247,170		3,365	

3.4.2. Rencana Sumber Pendanaan yang Dapat Diakses

Pendanaan dapat diusahakan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat ditempuh dengan beberapa mekanisme seperti *result based payment*, insentif maupun *non carbon benefit*. Di dalam *Paris Agreement* disebutkan bahwa negara peserta harus mengenali pentingnya sumber daya keuangan yang cukup dan dapat diprediksi untuk menjalankan semua program yang telah dicanangkan. Jenis-jenis pendanaan berupa:

a. *Upfront Payment*

Pendanaan jenis ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan persiapan seperti penyiapan perangkat kebijakan, peningkatan kapasitas, dan lain-lain. Kegiatan yang menggunakan pendanaan jenis ini telah dan sedang berjalan. Hibah berasal dari bilateral maupun multilateral.

b. *Result-based payment*

Pendanaan jenis ini diperuntukan bagi kegiatan yang telah terverifikasi menurunkan emisi gas rumah kaca. Jenis pendanaan ini belum dilaksanakan di Indonesia, karena belum disahkannya peraturan turunan dari undang-undang nilai ekonomi karbon dan akan dilaksanakan pada fase implementasi.

Sedangkan sumber pendanaan yang bisa digunakan untuk pembiayaan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

1. Sumber dana dalam negeri. Sumber dana ini dapat melalui Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Untuk level sub nasional, daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai perpanjangan dari BLU yang dibentuk Kementerian Keuangan yang khusus mengelola dana lingkungan hidup.
2. *Public Fund* (Dana Publik) merujuk pada dana yang bersumber dan digunakan oleh pemerintah.
3. GCF (*Green Climate Fund*) adalah sebuah mekanisme pendanaan iklim yang beroperasi di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change*. *Green Climate Fund* telah menampung komitmen dana perubahan iklim dengan nilai USD 10,3 miliar yang menjadikan GCF merupakan lembaga pendanaan perubahan iklim terbesar di dunia.
4. FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) *Carbon Fund* merupakan dana amanah lintas donor yang dikelola Bank Dunia. Indonesia adalah salah satu negara penerima dana FCPF *Carbon Fund*. Tujuan dari hibah FCPF adalah untuk berkontribusi pada penguatan kapasitas Indonesia dalam merancang sebuah strategi nasional yang menyeluruh untuk kegiatan berbasis REDD+.
5. BioCF (*Bio Carbon Fund*) merupakan inisiatif Dana *BioCarbon* untuk Bentang Hutan Berkelanjutan (BioCF ISFL atau ISFL) adalah hal baru fasilitas multilateral, didukung oleh pemerintah donor dan dikelola oleh Bank Dunia itu mempromosikan dan menghargai pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, termasuk lingkup deforestasi dan degradasi hutan, pertanian yang lebih berkelanjutan, serta sebagai perencanaan dan kebijakan penggunaan lahan yang lebih cerdas.
6. Dana dari publik atau swasta yang dikelola oleh Bank Dunia untuk membiayai program demonstrasi percontohan yang mengkonservasi karbon ke dalam hutan dan agro

ekosistem.

7. *Bilateral Cooperation* merupakan mekanisme pendanaan yang didapatkan melalui kerja sama antara dua negara.
8. *Private* berupa pendanaan yang diperoleh dari pihak swasta baik secara voluntary maupun melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Semua pembiayaan di atas memungkinkan untuk dapat diakses guna mendukung aksi mitigasi FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat karena sesuai dengan target rencana operasional yang membutuhkan pembiayaan fase implementasi untuk durasi jangka panjang.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 42 dan 43 telah mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Pemerintah masih menyusun Rencana Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Di dalam IELH akan diperjelaskan terkait jenis dana Lingkungan Hidup yang dapat digunakan untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Selain itu, akan diatur pula tentang pengelolaan dana Lingkungan Hidup baik melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau non-BLU dan kelembagaan pengelola dana Lingkungan Hidup. Terkait pengembangan pendanaan ini, ada beberapa mekanisme pendanaan yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu

1. Alternatif Skema Pendanaan 1

Mekanisme ini dikembangkan terkait penerimaan pendanaan yang diperoleh dari berbagai sumber pendanaan. Dalam mekanisme pendanaan ini, dana diterima oleh organisasi independen (LSM/OMS). Dengan mekanisme ini diperlukan koordinasi kuat antara organisasi tersebut dengan pemerintah sehingga penyaluran dan penggunaan pendanaan telah terkoordinasikan dengan baik oleh pemerintah serta sesuai dengan tujuan dari pendanaan yang telah disepakati.

2. Alternatif Skema Pendanaan 2

Pada alternatif skema pendanaan 2 dapat dikembangkan mekanisme pendanaan dengan menggunakan BUMD sebagai institusi penerima pendanaan. Pada mekanisme ini akan ada koordinasi yang kuat antara dewan komisaris dan dewan pengurus BUMD dengan dewan pengarah, komite teknis dan organisasi pelaksana dalam mempergunakan pendanaan yang diterima.

3. Alternatif Skema Pendanaan 3

Pada alternatif skema pendanaan 3, diharapkan pemerintah dapat membentuk suatu struktur pendanaan yang resmi milik pemerintah provinsi, di mana pendanaan langsung diterima dan dikelola oleh pemerintah provinsi di bawah pengawasan langsung Gubernur. Di pemerintah pusat direncanakan akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengakomodir pendanaan FOLU *Net Sink* 2030.

Pembentukan Instrumen Pendanaan FOLU *Net Sink* 2030 harus difasilitasi oleh Pemerintah. Instrumen Pendanaan bekerja berdasarkan potensi dana yang berasal dari berbagai sumber,

potensi pengguna dan penggunaan yang beragam, dan tata kelola yang multipihak. Instrumen keuangan khusus tersebut dibangun dengan tujuan:

1. Mendukung pengembangan program/proyek/kegiatan FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan potensi karbon net sink dari pengelolaan lahan berhutan dan/atau bergambut;
2. Menyediakan mekanisme penyaluran dana kredibel secara internasional bagi calon donor dan investor yang tertarik untuk mendorong dan/atau mendapatkan manfaat dari program/proyek/kegiatan FOLU Net Sink 2030;
3. Mendorong efisiensi pemanfaatan dana dan keadilan distribusi manfaat dari pengembangan program/proyek/kegiatan FOLU Net Sink 2030;
4. Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan ketiga unsur kerangka jaring pengaman sosial (*safeguards*) yaitu fidusia, sosial dan lingkungan hidup

Untuk menjaga kredibilitas Instrumen Pendanaan FOLU Net Sink 2030, dibangun mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*) yang memungkinkan instrumen ini beroperasi secara transparan. Audit keuangan independen oleh lembaga auditor terbaik dilakukan secara berkala. Laporan keuangan Instrumen Pendanaan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Barat dan laporan hasil audit disampaikan kepada Gubernur dan dapat diakses oleh publik. Lembaga FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional meneruskan laporan tersebut kepada Lembaga FOLU Net Sink 2030 Nasional di pusat, untuk keperluan akuntabilitas dana-dana yang berasal dari APBN dan/atau hibah dicatat sebagai penerimaan negara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Lembaga FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional juga dimungkinkan akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengelola pendanaan FOLU Net Sink 2030 dari donor atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang terlepas dari penganggaran APBD, namun tetap dapat menjamin prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi.

3.4.3. Skema Pendanaan Existing Project/Proyek yang Sedang Dikembangkan Sebagai Bentuk Kerjasama Pemerintah

1. Window A dan Window B (GCF *Task Force*)

Sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendukung target nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang tertuang dalam NDC. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwujudkan dengan membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) untuk mengkoordinir pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Barat, dan menyusun strategi dan kebijakan turunan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat, seperti Strategi dan Rencana Aksi *Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus* (SRAP REDD+) sebagai pedoman dalam pelaksanaan REDD+, *Forest Reference Emission Level* (FREL) sebagai tingkat rujukan emisi Kalimantan Barat, *Monitoring Reporting and Verification* (MRV) sebagai panduan pengukuran kinerja penurunan emisi, dan lain sebagainya.

Untuk memastikan pelaksanaan REDD+, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat aktif mengikuti inisiatif global dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum Internasional dengan menjadi anggota dari *Governor's Climate Force Task Force* (GCF TF). GCF TF merupakan aliansi Gubernur sedunia dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satu tujuan partisipasi

tersebut yaitu memperkenalkan inisiatif Kalimantan Barat dalam penurunan emisi serta mendorong adanya pendanaan yang berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan REDD+ di tingkat tapak.

Atas upaya yang telah dilakukan, pada April 2020, Pemprov Kalbar memperoleh pendanaan dari Pemerintah Norwegia melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam program GCF TF Window A untuk memperkuat strategi daerah dalam penurunan emisi GRK disektor hutan dan lahan. Pemprov Kalbar memperoleh pendanaan sebesar USD 400.000 dengan periode pendanaan selama 18 bulan (01 April 2019 s/d 30 Desember 2020), yang bekerja sama dengan IDH Global dan Yayasan IDH sebagai lembaga penyalur pendanaan. Pendanaan tersebut dirancang untuk mendukung 4 tujuan khusus yaitu: 1) melakukan analisis performa implementasi SRAP REDD+ dalam menurunkan emisi sesuai target penurunan emisi, 2) memperkuat Pokja REDD+ dan kelembagaan lain di level sub-nasional untuk mencapai target penurunan emisi, 3) penguatan tata kelola untuk pendanaan REDD+ dan investasi hijau, dan 4) perbaikan kerangka kebijakan sub-nasional untuk mendukung implementasi SRAP REDD+ dan pertumbuhan hijau. Adapun secara rinci, hasil yang diharapkan dan kegiatan yang dilakukan dalam program GCF TF Window A dijelaskan dalam matriks sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Terevaluasinya kinerja SRAP REDD+ dalam penurunan emisi 2012-2018	1.1. Analisis komprehensif terhadap kinerja SRAP REDD+ dalam penurunan emisi 2012-2018
2	Adanya target baru Kalbar dalam penurunan emisi sesuai dengan NDC	2.1. Melakukan penilaian terhadap target emisi yang ditetapkan Pemprov Kalbar 2.2. Menyusun peta jalan dan target (strategi dan target kegiatan prioritas) Pemprov Kalbar dalam mendukung pencapaian kinerja penurunan emisi
3	Terbentuknya Forum REDD+ Provinsi Kalbar untuk mengakselerasikan SRAP REDD+	3.1. Membentuk Forum REDD+ dengan Pemkab untuk mengakselerasikan SRAP REDD+
4	Meningkatnya kapasitas Pokja REDD+ untuk mengakselerasikan SRAP REDD+ dan investasi hijau	4.1. Pelatihan REDD+ dan investasi hijau
5	Terbangunnya SIS REDD+	5.1. Membangun SIS REDD+ sebagai portal informasi implementasi REDD+ dan pertumbuhan hijau di Prov Kalbar
6	Terbangunnya Kelembagaan Tata Kelola Keuangan yang sesuai sebagai portofolio untuk kesepakatan investasi hijau	6.1. Membangun kelembagaan tata kelola keuangan untuk pendanaan SRAP REDD+ dan Green Growth 6.2. Menyusun kerangka investasi hijau untuk unit manajemen (HTI, HPH, Sawit, dll) untuk mengakses investasi hijau
7	7.1. Menyiapkan skema dan struktur keuangan untuk RBP 7.2. Menyiapkan skema dan struktur keuangan untuk RBP	7.1. Menyiapkan skema dan struktur keuangan untuk RBP 7.2. Menyiapkan skema dan struktur keuangan untuk RBP

No	Rencana Kegiatan	RO
8	8.1. Mendorong RAPERDA Perlindungan dan Pengelolaan Gambut di Provinsi Kalimantan Barat 8.2. Menghubungkan antara target penurunan emisi SRAP REDD+ ke dalam RPHJP Kubu Raya	8.1. Mendorong RAPERDA Perlindungan dan Pengelolaan Gambut di Provinsi Kalimantan Barat 8.2. Menghubungkan antara target penurunan emisi SRAP REDD+ ke dalam RPHJP Kubu Raya

Pada tahun 2020, Pemerintah Norwegia melalui UNDP kembali membuka peluang pendanaan melalui GCF TF Window B untuk melaksanakan strategi daerah yang telah disusun dalam program GCF TF Window A. Pada tahun yang sama, Pemprov melalui Pokja REDD+ dengan dukungan IDH Global dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Indonesia (YIDH) mengikuti kompetisi proposal Window B. Proposal Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai salah satu pemenang, dan merupakan 1 dari 7 proposal yang lolos berdasarkan hasil seleksi dari 35 proposal dari 35 negara bagian/provinsi anggota GCF TF. Pendanaan yang diperoleh sebesar USD 1.426.491 dengan periode pendanaan selama 24 bulan (30 Juli 2021 – 30 Juli 2023).

Terkait tujuan dari program GCF TF Window B untuk Implementasi Model Yurisdiksi di Kubu Raya Dalam Memastikan Kontribusi Daerah Untuk REDD+ dan NDC Nasional dengan 2 tujuan khusus yaitu: (1) memperkuat model yurisdiksi dan kapasitas Pokja provinsi dan kabupaten serta (2) mendorong adopsi skala luas pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Adapun secara rinci, hasil yang diharapkan dan kegiatan yang dilakukan dalam program GCF TF Window B sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	RO
1	Platform di level provinsi, kabupaten, lanskap/proyek terhubung dalam MRV	1.1. Pelatihan untuk Pokja REDD+ dan Pokja PPI Kubu Raya 1.2. Membangun SOP untuk Pokja REDD+ dan Pokja PPI Kubu Raya 1.3. Pelaksanaan MRV tahunan untuk level provinsi dan Kubu Raya 1.4. Mengoneksikan antara Pokja REDD+ dengan Pokja PPI dan proyek di tingkat lanskap 1.5. Operasionalisasi Pokja REDD+ 1.6. Memperkuat kerangka regulasi untuk REDD+
2	Solusi pendanaan jangka panjang untuk REDD+	2.1. Membangun Special Purpose Vehicle (SPV) di level lanskap 2.2. Fasilitasi business matching dengan green investor 2.3. Membangun portofolio investasi hijau di KKR 2.4. Memperkuat kapasitas pengelolaan usaha di hutan desa (5 desa) 2.5. Membangun proposal untuk GCF dan RBP
3	Perlindungan dan rehabilitasi mangrove dan gambut	3.1. Perlindungan dan Rehabilitasi dengan co-funding dengan sektor swasta 3.2. Meningkatkan kapasitas KPH KKR dalam MRV dan perlindungan hutan

No	Rencana Kegiatan	RO
4	Adopsi praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan	4.1. Mendorong Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk 1.000 petani mandiri di Kubu Raya 4.2. Membangun organisasi tani 4.3. Meningkatkan kapasitas 1.000 petani mandiri 4.4. Meningkatkan dukungan swasta untuk perkebunan berkelanjutan 4.5. Mengkoordinasikan perusahaan perkebunan untuk pengelolaan berkelanjutan dan monitoring capaian

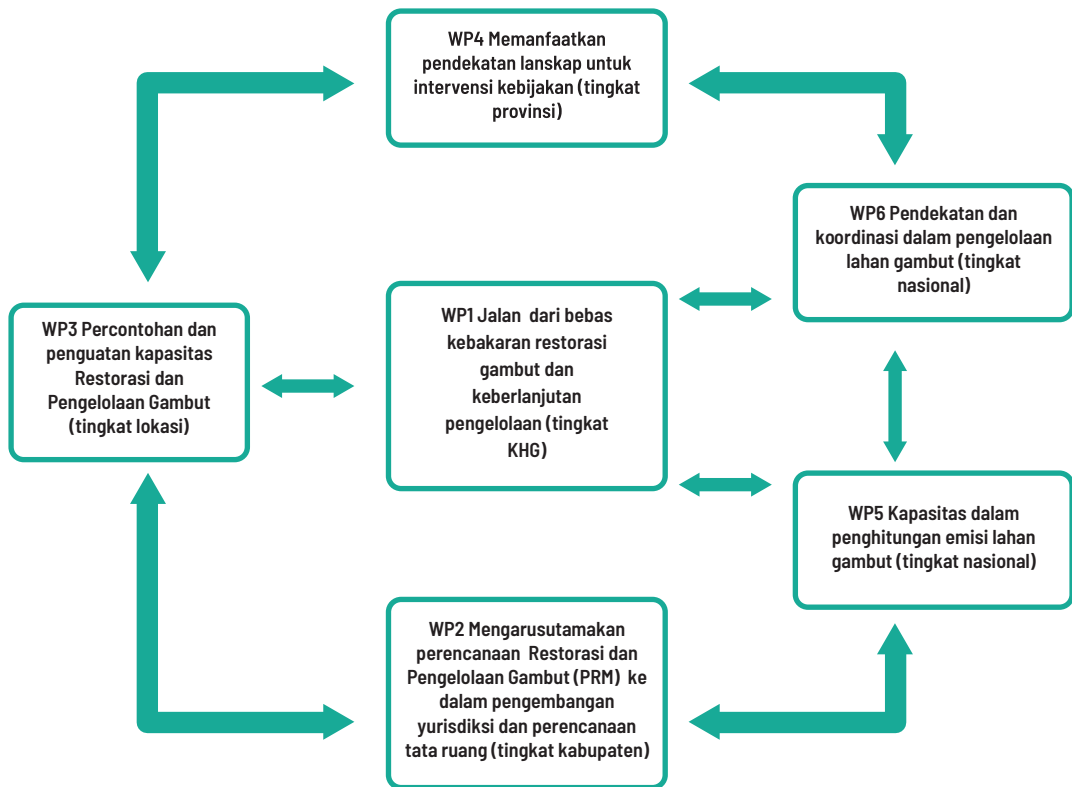
2. Green Climate Fund

Berdasarkan rentang waktu proyek selama 7 tahun, periode 2024-2030 *Green Climate Fund* melaksanakan kegiatan yang memberi dampak dalam rangka upaya kontribusi pengurangan emisi akibat GRK sebesar 11,72 tCO₂e. Sebagai bentuk aksi mitigasi dengan wilayah prioritas lima kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan aksi mitigasi memiliki tujuan untuk mengimplementasikan rencana aksi penurunan emisi satuan rencana aksi Provinsi Kalimantan Barat dan memenuhi target komitmen Kalimantan Barat dalam aksi mitigasi perubahan iklim serta kontribusi pada NDC.

3. Peat Impact ICRAF Indonesia

Berdasarkan rentang waktu proyek, pertahun 2020-2023 ICRAF Indonesia melaksanakan kegiatan *Peat-IMPACT* dalam rangka upaya kontribusi pengurangan emisi akibat GRK dengan Peningkatan Pengelolaan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Indonesia, dalam bentuk riset aksi. Namun pada Tahun 2020 belum dapat berjalan oleh sebab pandemi Covid-19, sehingga baru dapat dilaksanakan per November 2020.

Sebagai bentuk riset aksi, kegiatan *Peat-IMPACT* dimulai dengan penelitian lapangan di 31 desa di dua KHG yakni KHG Kapuas-Terentang dan Kapuas-Ambawang. Namun empat desa dinyatakan tidak masuk dalam kategori oleh sebab gambutnya sudah terdegradasi dan alih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Dari 27 desa tersisa kemudian dipilih 6 desa sebagai desa demplot. Untuk keseluruhan 27 desa penelitian memiliki luasan 237.096,52 ha, dan dimana 6 desa demplot di dalamnya seluas 57,178,33 ha. Secara lengkap model intervensi aktivitas dari luasan 6 desa demplot ditampilkan pada gambar di bawah ini (khususnya WP3 dan WP4):



Gambar 14. Model Intervensi Aktivitas Peat-IMPACT

4. FORCLIME

Forest Programme (FP-I) atau dikenal juga sebagai *Program Forest and Climate* (FORCLIME) merupakan kerjasama pembangunan secara bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Bank Pembangunan dan Investasi (KFW) Jerman. Program FORCLIME terdiri dari dua Modul:

a. Pertama adalah Modul Teknis (*Technical Module*) atau FORCLIME-TC Program ini diimplementasikan oleh GIZ. Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini,

Program ini mendukung Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional.

GIZ bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan kebijakan nasional dan sektor strategi, dalam rangka mengawal penyusunan strategi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan untuk pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi. Partisipasi efektif para pihak merupakan

faktor penting dari kesuksesan proses penyusunan perencanaan dan strategi.

Tim ini memberikan pendampingan terkait dengan penyusunan dan adaptasi regulasi untuk reformasi tata kelola hutan dan skema kehutanan masyarakat. Yang akan melibatkan dukungan untuk pendekatan inovatif melalui program percontohan dan dengan mengikuti proyek bioekonomi berbasis hutan. Diskusi nasional, regional dan internasional dan pengembangan strategi akan memberi manfaat dari umpan balik tentang keberhasilan dan tantangan yang relevan di lapangan.

Program FORCLIME difokuskan pada hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam membuat keputusan-keputusan pemanfaatan lahan dan sumber daya. Dalam hal ini, advisor internasional dan nasional memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengelola dan memonitor hutan-hutan. Pembentukan unit pengelolaan hutan (KPH) dan skema kehutanan masyarakat dengan cara yang menyatukan pengelolaan berbagai kategori hutan, dari hutan lindung hingga hutan produksi, di bawah satu atap sangat penting untuk reformasi ini. Selain itu, pembentukan KPH sebagai penyedia layanan publik, termasuk pemantauan dan berbagai tugas lainnya, akan menempatkan tanggung jawab manajemen lebih dekat ke lapangan. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui bidang strategis :

1. Bidang Strategis-1: Kerangka kebijakan kehutanan di tingkat nasional dan daerah

Bidang strategis (SA) 1 FORCLIME (TC Module) memberi saran kebijakan dan membantu dalam menyiapkan dan perbaikan kebijakan terkait serta membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan mengenai pengelolaan hutan lestari di tingkat nasional dan daerah. Dalam pelaksanaannya, SA-1 memberi saran kebijakan dan dukungan terkait dengan perencanaan kehutanan (tata kelola kehutanan), mitigasi perubahan iklim (REDD+, sasaran NDC), konservasi hutan/keragaman hayati, penerapan kebijakan dan peraturan terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kompensasi fiskal ekologi (*ecological fiscal transfer*), implementasi kebijakan terkait gender, serta harmonisasi kebijakan tingkat nasional dan daerah dalam mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

2. Bidang Strategis-2: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

FORCLIME mendukung Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kerja sama teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (PHL). Konsep awal di balik PHL adalah untuk menunjukkan keberlanjutan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial dalam suatu kesatuan pengelolaan hutan. Berdasarkan perkembangan kebijakan kehutanan yang ada di Indonesia, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan layanan publik, sedangkan Perhutanan Sosial (PS) mengacu pada skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak yang bertujuan untuk kelestarian dengan mengupayakan pengelolaan hutan melalui peningkatan hasil ekonomi, ekologi, dan sosial. Sementara dukungan di tingkat nasional dan provinsi terutama berfokus pada pelaksanaan pembangunan kehutanan dan peningkatan kapasitas.

3. Bidang Strategis-3: Pengembangan Sumber Daya Manusia

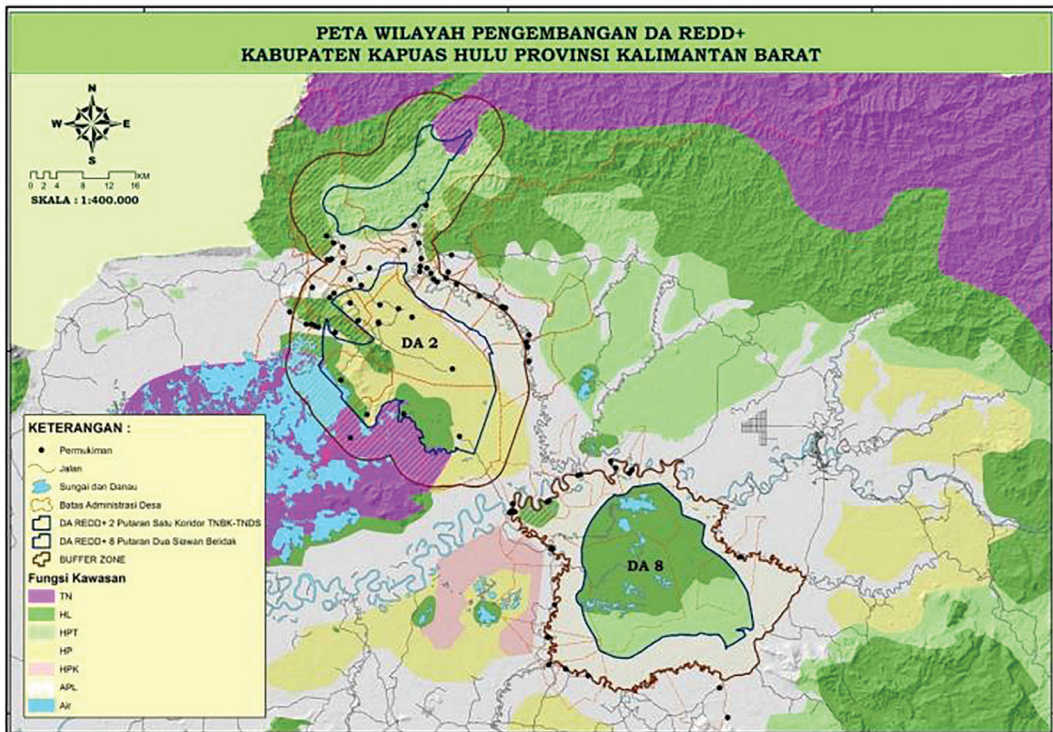
FORCLIME menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nasional dan sub-nasional dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Pendampingan program FORCLIME diarahkan pada: (1) Pengembangan kebijakan dan standar terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan; (2) Penguatan kapasitas manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan (khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pusdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan - LHK di Bogor, pusat pelatihan daerah di Makassar dan universitas lokal); dan (3) Pengembangan pelatihan yang terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan melalui pelatihan menggunakan metoda campuran antara di dalam kelas dan dalam jaringan (daring-online).

b. Kedua, Modul Financial (*Financial Module*) atau dikenal sebagai FORCLIME-FC

Program FORCLIME-FC berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan bertindak selaku *Programme Executing Agency* adalah Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal KLHK. Durasi program pada awalnya direncanakan selama 10 tahun (2011 - 2020), dan dalam implementasinya mengalami perpanjangan menjadi 12 tahun (2011 - 2022).

Gambar 14. Model Intervensi Aktivitas Peat-IMPACT



Penyelenggaraan kegiatan program FORCILME-FC di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan dalam bentuk Investasi Pengembangan DA REDD+

(*Demonstration Activity Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*). Lokasi penyelenggaraan kegiatan investasi dilaksanakan pada areal DA REDD+ Putaran Pertama (DA#2) dengan luas sekitar 153.418 ha, berada di tiga wilayah Kecamatan, yaitu Batang Lupar (8 Desa), Embaloh Hilir (1 Desa), dan Embaloh Hulu (7 Desa), dan Areal DA REDD+ Putaran Kedua (DA#8) dengan luas sekitar 94.650 ha, berada di wilayah Kecamatan Bika (1 Desa), Mentebah (1 Desa), Boyan Tanjung (4 Desa), Embaloh Hilir (4 Desa), Bunut Hilir (6 Desa).

Hingga akhir Bulan Desember tahun 2020, kegiatan Investasi Pengembangan DA REDD+ di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di 32 Desa dampingan pada 7 wilayah kecamatan. Namun sejak tahun 2021, program FORCLIME-FC memfokuskan pendampingannya pada perbaikan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Berbasis Masyarakat melalui Perhutanan Sosial di 12 desa dengan skema Hutan Desa yang luas arealnya mencapai 48.563 ha. Berdasarkan *Annual Work Plan* DPMU Kapuas Hulu tahun anggaran 2022, kegiatan Investasi Pengembangan DA REDD+ yang dilakukan meliputi :

- Perencanaan Guna Lahan Partisipatif (PLUP);
- Patroli Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM);
- Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman dengan pola Budidaya Kehutanan-Pertanian (Agroforestri), Budidaya Kehutanan-Perikanan (Silvofishery), dan Budidaya Kehutanan-Peternakan (Silvopastura);
- Perbaikan sistem Perladangan melalui Budidaya Tanaman Sayur-Mayur (Hortikultura);
- Pengembangan Pemanfaatan Lestari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Perbaikan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Berbasis Masyarakat melalui pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa;
- Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran Produk Investasi;
- Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Mitra Program;
- Diseminasi Hasil-hasil Investasi.

5. *Forest Investment Programme (FIP) Indonesia Project (IP)*

Berdasarkan waktu proyek pertahun, di tahun 2022 FIP telah menginvestasikan pendanaan sekitar 49,5 miliar untuk aksi mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat. Bentuk aksi tersebut dilakukan pada wilayah kerja dua kabupaten di Kalimantan Barat yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Dirjen KSDAE dengan mengimplementasikan beragam kegiatan untuk pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang.

6. Kalimantan Forest (KALFOR)

Berdasarkan rentang waktu proyek selama 7 tahun, periode 2017-2024 KALFOR melaksanakan kegiatan yang memberi dampak dalam rangka upaya kontribusi penguatan perencanaan dan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan di Kalimantan. Bentuk aksi tersebut dilakukan pada wilayah kerja dua kabupaten di Kalimantan Barat yakni Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang. Kegiatan yang memberi dampak terhadap peningkatan cadangan karbon yang telah dilakukan bertujuan untuk membangun, menyelamatkan, dan menjaga hutan di luar kawasan hutan atau pada kawasan APL.



BAB 04



**MONITORING DAN EVALUASI AKSI
MITIGASI FOLU NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI AKSI MITIGASI FOLU NET SINK 2030 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Monitoring dan evaluasi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat merupakan rangkaian proses penting dalam kegiatan untuk mengukur capaian dari kegiatan/proyek/program yang telah dilaksanakan secara berkala. Melalui proses ini efektivitas upaya dan efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan/proyek/program akan terukur secara kuantitatif dan pembagian manfaat akan terlaksana secara adil. Oleh karena itu, sistem monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang tidak terkait dengan lembaga yang melaksanakan instrumen pendanaan.

Tujuan sistem monitoring dan evaluasi adalah mendukung pelaksanaan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat melalui mekanisme pengukuran, dan pelaporan kinerja oleh pelaksana kegiatan/ proyek/program, serta mekanisme verifikasi independen yang sejalan dengan perkembangan metodologi dan modalitas yang diputuskan UNFCCC dan NDC. Dengan adanya sistem ini setiap kegiatan/proyek/program di indeks prioritas lokasi (IPL) dapat diukur secara akurat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui mekanisme, (1) Monitoring dan evaluasi rutin tahunan, yaitu penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan; (2) Monitoring dan evaluasi tertentu, yaitu penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan.

Agar sistem monitoring dan evaluasi dapat menjadi entitas yang *highly trustable* dan memiliki *high integrity*. Institusi monitoring dan evaluasi dibangun dengan prinsip-prinsip berikut: (1) taat asas (*consistent*), menjamin tersedianya metodologi yang konsisten dari waktu ke waktu dan berlaku di seluruh lokasi kegiatan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat; (2) lengkap (*complete*), kelengkapan informasi mencakup cadangan karbon di semua komponen ekosistem, baik yang di atas tanah (batang, ranting, daun) dan di bawah tanah (akar), serta biomassa yang telah terurai sebagian atau seluruhnya (nekromassa, serasah, gambut); (3) teliti (*accurate*), ketelitian data merupakan unsur penting yang terkait dengan efektivitas penurunan emisi di lokasi prioritas; (4). terbuka (*transparent*), hasil dan metodologi pengukuran yang dilaporkan dijamin keterbukaannya sebagai informasi publik oleh lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi; (5) dapat diperbandingkan (*comparable*), hasil pengukuran dapat dibandingkan antar waktu untuk tapak kegiatan/proyek/program yang sama, atau antar tapak kegiatan/proyek/program yang sama tipologinya.

4.1. Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi

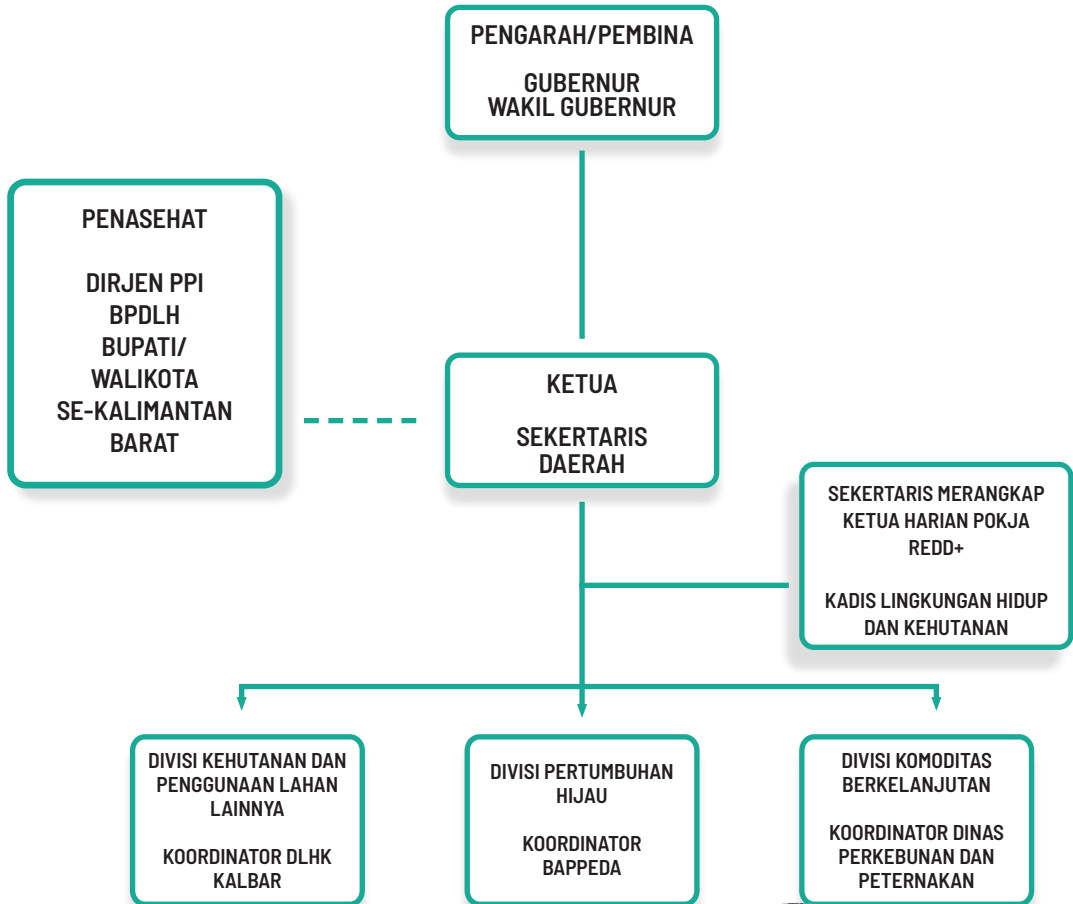
Beberapa persyaratan untuk kerangka kerja kelembagaan monitoring dan evaluasi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah: (1) Koordinasi, koordinasi terpusat dan mekanisme kerjasama untuk meningkatkan kapasitas monitoring evaluasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat, merinci serta mengawasi peran, tanggung jawab dan manfaat tambahan serta usaha-usaha lainnya; (2) Pengukuran dan pemantauan, unit teknis untuk memperoleh dan menganalisis data yang terkait dengan rencana operasional di tingkat nasional dan sub nasional; (3) Pelaporan, unit yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data yang relevan di pusat pangkalan data, untuk estimasi nasional dan pelaporan internasional sesuai dengan standar IPCC, penilaian ketidakpastian dan rencana pengembangan, (4) Pembuktian, suatu kerangka kerja independen untuk membuktikan efektivitas tindakan-tindakan monitoring dan evaluasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka panjang di berbagai tingkat yang berbeda dan oleh berbagai pelaku yang berbeda. Berbagai pelaku dan sektor yang berbeda perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem pemantauan berjalan efisien dalam jangka panjang. Keberlanjutan merupakan prinsip yang penting dalam pengaturan kerangka kerja kelembagaan monitoring dan evaluasi.

Berkenaan dengan kelembagaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program kegiatan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 928/LHK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat.

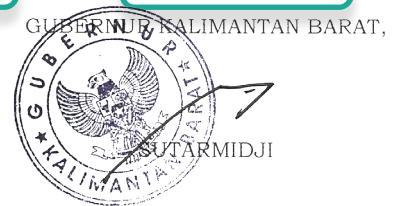
Sebagai lembaga *ad-hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lembaga ini diberikan mandat untuk mengkoordinasikan para pihak atau lembaga yang melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Dalam susunan kelembagaan tersebut Gubernur Kalimantan Barat selaku pengarah, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat selaku ketua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat selaku ketua harian.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat selain sebagai ketua harian juga merangkap sebagai kepala sekretariat yang bertugas mengkoordinir Kelompok Kerja (Pokja) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus yang terdiri dari divisi pertumbuhan hijau, divisi hutan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dan divisi komunitas berkelanjutan, menyusun standar operasional prosedur (SOP) aktivitas Pokja, menetapkan keanggotaan Pokja, menetapkan komite investasi, komite monitoring dan evaluasi, serta komite pakar. Untuk lebih jelas struktur susunan kelembagaan Pokja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR KELOMPOK KERJA



Gambar 16. Kelembagaan Pokja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat



4.2. Strategi Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian akhir di kegiatan ini untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan. Jika terdapat kesenjangan (*gap*) antara rencana dengan realisasi, misalnya pelaksanaan yang tidak tepat pada lokasi program kegiatan yang diarahkan, maka diantaranya dapat dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pada masing-masing lembaga dan melakukan realokasi anggaran kegiatan. Sehingga target pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai.

Pengukuran dan pelaporan kinerja monitoring dan evaluasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang akan diterapkan ke semua aktivitas Rencana operasional dengan pola bertahap, sesuai dengan yang diarahkan oleh panduan kebijakan FOLU Net Sink 2030 nasional. Aktivitas-aktivitas yang diukur meliputi 12 (dua belas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan, yaitu; 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (*enhanced natural regeneration* (ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove. Pengukuran dan pelaporan yang dilaksanakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan dari FOLU Net Sink 2030 nasional menuju pencapaian kondisi *net sink* dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e sesuai standar internasional secara bertahap.

Penerapan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat akan meliputi kawasan yang luas, berbagai tipe tutupan lahan serta proses-proses kompleks pertukaran informasi dari banyak pihak. Dengan demikian dibutuhkan suatu sistem yang terlegitimasi untuk mengetahui besarnya pencapaian tersebut. Sistem monitoring dan evaluasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat akan dibagi menjadi lima subsistem berdasarkan cakupan, tujuan khusus, kegiatan teknis, data, informasi dan analisa yang terlibat serta lembaga-lembaga khusus yang terkait. Dalam implementasinya sub-subsistem ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan terintegrasi yang dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Sub Sistem	Deskripsi
Subsistem monitoring dan deforestasi	Subsistem monitoring dan deforestasi merupakan bagian yang berkoordinasi dengan subsistem monitoring deforestasi yang dikembangkan di tingkat nasional. Hasil pemantauan di tingkat sub nasional harus disampaikan ke tingkat nasional sebagai bahan masukan perbaikan sistematis ke depannya. Hasil pemantauan nasional juga disampaikan ke tingkat sub nasional sehingga terjadi pertukaran data terkini (<i>real time updating</i>) selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi (<i>ground truthing</i>) oleh pengelola wilayah kerja
Subsistem monitoring perubahan tutupan lahan	Subsistem monitoring perubahan tutupan lahan merupakan bagian yang berkoordinasi dengan tingkat nasional. Subsistem ini membutuhkan kemampuan menginterpretasikan citra satelit, klasifikasi tutupan lahan, pengetahuan dan pemahaman lokal. Semua hasil yang telah dikompilasikan harus dimonitor melalui pengecekan secara langsung di lokasi (<i>ground truthing</i>)

Sub Sistem	Deskripsi
Subsistem faktor emisi	Subsistem faktor emisi bertujuan untuk mengkompilasi dan menghitung nilai karbon, berupa cadangan karbon dan serapan CO ₂ pada berbagai tutupan lahan dengan tingkat keakuratan nilai-nilai intrinsik yang selama ini digunakan sebagai faktor emisi karbon. Nilai tersebut diperoleh bersumber dari basis data instansi terkait, yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pertambangan yang memiliki amanat pengelolaan kawasan
Subsistem basis data terestrial dan spasial	Subsistem basis data terestrial dan spasial mendukung tiga subsistem di atas, yaitu deforestasi, perubahan tutupan lahan dan basis data terestrial-spasial melalui basis data karbon hutan dan potensi kehutanan, basis data persamaan alometrik dan basis data spasial semua tipe tutupan hutan
Subsistem informasi jaring pengaman sosial (<i>safeguards</i>)	Subsistem informasi jaring pengaman sosial (<i>safeguards</i>) dibutuhkan agar program pengurangan emisi gas rumah kaca dapat berlangsung dan tujuan FOLU Net Sink 2030 tidak merugikan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Sistem ini memberi masukan informasi terkini (<i>real time</i>) kepada unit pengendali pembangunan untuk dapat dilakukan pendampingan dan konsultasi dengan unit manajemen (penanggung jawab kawasan) terkait tindakan memperbaiki tata kelola kawasan agar program yang dijalankan linier.

Terhadap strategi monitoring evaluasi kinerja pengelolaan ekosistem gambut dilakukan melalui pemantauan tinggi muka air (TMA) dan indikator-indikator kerusakan lainnya, seperti kebakaran dan berkurangnya tutupan di lahan gambut. Saat ini Ditjen PPKL sedang mengembangkan sistem pemantauan untuk tata air yang dikelola oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yaitu Simatag 4.0. BRGM juga melakukan upaya pemantauan tinggi muka air melalui pemasangan alat pemantau tinggi muka air (APTMA). Sampai tahun 2022 diperkirakan sejumlah 183 unit alat yang terpasang, sehingga alat tersebut menyampaikan data tinggi muka air secara *realtime* setiap jamnya. Data ini kemudian diolah dan ditampilkan untuk publik melalui SIPALAGA. Ke depan, Kementerian LHK melalui Ditjen PPKL akan menggabungkan semua alat pemantau tinggi muka air yang ada untuk ditampilkan pada SIPPEG yaitu sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran kinerja pengelolaan ekosistem gambut.

Selain pemantauan tinggi muka air, BRGM secara khusus mengembangkan PRIMS (pranata informasi restorasi gambut) yang dapat diakses oleh publik melalui www.prim.sbrg.go.id. Pada website ini dapat dimonitor indikator-indikator kerusakan ekosistem gambut yang terjadi seperti kebakaran melalui indikasi hotspot dan burnscar, tinggi muka air, kelembaban dan pembukaan tutupan di lahan gambut. PRIMS juga menampilkan aktivitas restorasi yang telah dilakukan melalui pembangunan sumur bor, sekat kanal, timbun kanal, revegetasi, revitalisasi, dan desa mandiri peduli gambut. Pada sistem ini juga bisa melihat knowledge management system yang telah dibangun, menampilkan ruang pengetahuan yang terkait dengan gambut dan pengelolaan ekosistem gambut. Terakhir, bekerjasama dengan BMKG, BRIN dan IPB, pada

situs ini bisa dilihat *early warning system* (EWS) yang dikembangkan melalui *Fire Danger Rating System* (FDRS Gambut). EWS ini dapat memproyeksikan tingkat kerawanan baik kebakaran permukaan, kebakaran dalam, intensitas api, ketersediaan bahan bakar, dan lain-lain hingga 7 hari ke depan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan gambut yang meluas.

4.3. Jaring Pengaman Sosial (*Safeguards*)

Keputusan UNFCCC di Cancun mengamanatkan kepada negara-negara peserta untuk membangun sistem informasi mengenai implementasi *Safeguards System for Information Provision*, yaitu:

1. Aksi haruslah saling melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional serta relevan dengan konvensi dan kesepakatan internasional.
2. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan peraturan perundangan dan kedaulatan nasional.
3. Menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat maupun penduduk lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, hukum dan situasi nasional, serta memperhatikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat.
4. Partisipasi penuh dan efektif para pihak terkait, khususnya masyarakat adat dan penduduk lokal, dalam tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dan 72 dari keputusan ini.
5. Tindakan harus konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa tindakan yang dirujuk pada paragraf 70 dalam keputusan ini tidak digunakan untuk pengkonversian hutan alam, melainkan digunakan untuk memberikan insentif pada perlindungan dan konservasi jasa hutan alam beserta jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat sosial maupun lingkungan lainnya.
6. Tindakan untuk mengatasi resiko pengalihan.
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi

Berdasarkan tujuh kriteria di atas mengenai jaring pengaman sosial (*safeguards*), maka harus dipatuhi juga mengenai tujuh prinsip kriteria dalam pelaksanaannya, berupa:

1. Kepatuhan hukum dan konsistensi dengan program kehutanan nasional
2. Transparansi dan efektivitas tata kelola hutan nasional
3. Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal
4. Efektivitas partisipasi para pihak
5. Konservasi keanekaragaman hayati, jasa sosial dan lingkungan
6. Tindakan untuk menangani risiko balik (*risk of reversals*)
7. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi (*emission displacement*)

Mengenai tujuh uraian terkait prinsip kriteria pelaksanaan di atas, kriteria 6 dan 7 dianggap

paling penting dan berpengaruh yaitu aksi untuk menangani risiko-balik (*risk of reversals*) dan aksi untuk mengurangi pengalihan emisi (*emission displacement*). Program pengurangan atau penurunan emisi dari deforestasi atau degradasi hutan, selalu berbenturan dengan parapihak yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang membutuhkan lahan. Tidak hanya bagi kelompok masyarakat adat atau kelompok masyarakat lainnya, juga kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lebih mapan, seperti pengusaha yang melakukan bisnis usahanya dalam sektor hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat membuka kemungkinan para pihak yang berkepentingan untuk pengurangan resiko konflik sosial termasuk juga penyelesaian konflik lahan, khususnya pada lahan non hutan yang menjadi fokus usaha budidaya perkebunan dan pertanian. Dukungan bagi program sertifikasi produk hijau dari sektor perkebunan dapat menjadi insentif yang menguatkan program pencegahan emisi dari sektor perkebunan dan hutan tanaman. Dengan dukungan perguruan tinggi, teknik silvikultur baru, pemilihan komodoti dan pengembangan sistem pelaporan dan monitoring evaluasi yang terbuka akan membantu mempermudah aksi mitigasi potensi konflik sosial.

Di sisi lain, penerapan sistem sertifikasi sebagai insentif pasar juga penting diterapkan dan didukung pemerintah. Tidak hanya pada produk perkebunan dan tanaman kehutanan, juga pada produk produk non kayu yang menjadi hasil dari upaya pencegahan atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pendekatan program selain difokuskan pada target rencana operasional, juga perlu dibangun dan rancang pada wilayah zona penyangga (*buffer*) untuk meminimalisir potensi konflik sosial akibat tekanan kebutuhan lahan atau keinginan untuk mendapat program yang sama dari wilayah rencana operasional yang tidak secara langsung mendapat manfaat.

Konversi hutan untuk kebutuhan areal perkebunan melalui program utamanya adalah mengurangi konversi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit, skala besar maupun skala kecil. Terutama untuk pengalokasikan lahan baru. Regulasi lain yang diperlukan adalah regulasi tentang pembangunan industri pengolahan sawit. Sedapat mungkin, industri pengolahan sawit tidak berada dalam jarak yang cukup dekat dengan kawasan hutan. Seperti yang diketahui, buah sawit harus diolah paling lambat 48 jam sejak pemanenan (Sofianan *et al*, 2015). Dengan demikian, akan mengurangi potensi pembukaan perkebunan kelapa sawit skala kecil (masyarakat di dalam kawasan hutan). Di sektor industri perkebunan, kebijakan moratorium gambut dan juga penerapan HCV, berdampak pada pengurangan areal tanam potensial. Belum lagi konflik atau penolakan dari masyarakat setempat.

Program penurunan emisi, akan dipandang sebagai hambatan baru yang akan mendorong pemilik usaha mengalihkan atau memindahkan usahanya ke wilayah lainnya. Program penurunan emisi perlu mendorong penerapan sertifikasi RSPO/ISPO yang memberikan insentif pasar bagi produsen kelapa sawit dan produk turunannya. Di sisi lain, proyek dapat mendorong pelaksanaan industri yang lebih efisien, sehingga mampu menekan biaya operasional. Proyek penurunan emisi perlu mempromosikan dan mendorong alternatif ekonomi bagi masyarakat, selain kepada petani perkebunan kelapa sawit skala kecil.

Pengembangan industri kehutanan yang dapat mendekati potensi perkebunan kelapa sawit, namun dengan risiko emisi lebih rendah dapat menjadi alternatif usaha. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dapat menjadi alternatif menarik. Namun harus diimbangi dengan kemudahan akses modal dan fasilitasi pengolahan pasca panen dan penjangkauan pasar. *Leakage* (kebocoran emisi) adalah kejadian meningkatkan emisi karbon di tempat lain akibat pengurangan emisi di suatu tempat. *Leakage* mungkin terjadi akibat diterbitkannya sebuah kebijakan. Contoh klasiknya adalah upaya penertiban kegiatan pertanian dalam hutan mendorong terjadinya perpindahan kegiatan di kawasan hutan lain. Dalam hal ini, kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dari kegiatan berbasis lahan dalam hal proyek penurunan emisi dari degradasi dan deforestasi adalah terjadi pengurangan emisigas rumah kaca di luar areal proyek yang ditetapkan. Wilayah utama target proyek adalah wilayah yang memiliki hutan dan lahan gambut yang baik dan terjaga. Mekanisme jaring pengaman sosial (*safeguards*) perlu dikembangkan untuk mengurangi risiko kebocoran aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 di Kalimantan Barat. Potensi kebocoran mungkin saja terjadi pada skala kecil dan dalam skala lebih luas. Penerapan kebijakan di satu wilayah tertentu (dalam unit kabupaten atau dalam satu unit manajemen produksi) juga diprediksikan menjadi pemicu kebocoran di luar wilayah yuridiksi administrasi (kabupaten, provinsi, badan usaha bahkan negara).

4.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi

Keberhasilan implementasi dan keberlanjutan program pengurangan emisi sangat bergantung pada aktivitas yang aktif mendukung dari beragam tingkatan, kelompok usaha, pemerintah dan juga kelompok masyarakat. Terlebih lagi, keberlanjutan program penurunan emisi sangat tergantung pada kebijakan politik pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung program penurunan emisi dalam kerangka FOLU Net Sink 2030. Kebijakan dimaksud adalah penerapan kebijakan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan, HCV, kebijakan pelaksanaan *Reduce Impact Logging* untuk pengurangan emisi karbon (RIL-C), perhutanan sosial dan kebijakan kunci lainnya yang berkaitan dengan tatakelola lahan. Tidak hanya kebijakan pada tingkat nasional, juga pada tingkat provinsi serta regional kabupaten.

Di tingkat nasional kebijakan tentang perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai upaya pemberian hak kelola kepada masyarakat, namun dalam skala lebih luas, sebagai upaya menurunkan tekanan ke dalam kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan lahan pemukiman dan pertanian. Di tingkat provinsi, perubahan tataruang perlu menjadi perhatian. Perubahan tataruang dapat menjadi sarana perbaikan tatakelola lahan untuk mendukung penurunan emisi Kalimantan Barat. Mempertahankan kawasan-kawasan hutan sering kali berhadapan dengan tantangan ekonomi (masyarakat setempat, regional dan nasional) yang masih menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan murah dan mudah serta tidak memperhatikan kemampuan hutan untuk beregenerasi kembali.

Kebijakan provinsi dan nasional sangat berpengaruh dan banyak kebijakan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah. Perubahan politik (pergantian pimpinan –presiden, gubernur ataupun bupati) dapat memperkuat ataupun melemahkan/menghambat implementasi yang akhirnya dapat mendorong terjadinya efek balik dari kebijakan penurunan

emisi gas rumah kaca.

Keberhasilan jangka panjang dari proyek penurunan emisi gas rumah kaca selain sangat bergantung pada kebijakan politik juga pada dukungan yang berkelanjutan dari sektor swasta (perusahaan) dan masyarakat setempat. Program perubahan iklim dapat memperkuat pengawasan pengelolaan hutan, namun implementasi kegiatan sangat tergantung pada komitmen dari aktor lokal dalam kegiatan perlindungan hutan. Untuk alasan inilah, sangat penting dalam program pengurangan emisi untuk meminimalisir transaksi ekonomi (*economic trade off*) dan menyediakan manfaat jangka panjang.

Berbagai resiko berkaitan erat dengan permasalahan dalam hal pembagian manfaat. Di Provinsi Kalimantan Barat, implementasi penerimaan manfaat dirancang untuk berbasiskan pada pencapaian hasil (*performance based benefits*). Komunikasi dan koordinasi selalu menjadi permasalahan laten dalam berbagai program. Lemahnya koordinasi antar sektor berbasis lahan dapat menghambat perbaikan tatakelola lahan yang menjadi unsur penting untuk memastikan keberlanjutan program penurunan emisi, koordinasi kebijakan antar instansi, khususnya pada sektor berbasis lahan menjadi tantangan utama. Kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, sektor berbasis lahan, dikelola oleh dinas yang berbeda-beda. Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengelola sumber daya berbasis lahan dengan kerangka kerja masing-masing.

Permasalahan tumpang tindih mandat pada masing-masing dinas menjadi faktor penghambat untuk mencapai tatakelola lahan. Misalnya beberapa kasus dalam administrasi lahan, dipisahkan antara kawasan hutan dan non kawasan hutan, masing-masing dikelola oleh kerangka regulasi dan kelembagaan tersendiri. Koordinasi vertikal antar level pemerintahan menjadi sangat penting dalam keberlanjutan program. Menurut cara pengelolaan faktor resiko, Pemerintah Kabupaten memainkan peran penting dalam pelaksanaan reformasi kebijakan berhubungan dengan perkebunan. Dukungan dari kebijakan daerah untuk pelaksanaan tergantung pada kemampuan daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan provinsi. Koordinasi kuat antara Dinas Lingkungan dan Kehutanan dengan ATR/BPN di tingkat provinsi terkait dengan registrasi lahan dan TORA perlu di teruskan dan diperkuat.

Lemahnya kapasitas kelembagaan, diidentifikasi sebagai faktor utama penyebab deforestasi. Kelemahan ini menyebabkan kebijakan tentang RIL-C dan HCV nampak berjalan di tempat. Demikian juga dengan kebijakan yang mendukung masyarakat setempat kurang efektif, khususnya setelah kebijakan berakhir. Berdasarkan *assessment* di atas, potensi resiko balik akibat lemahnya kapasitas kelembagaan atau tidak efektifnya koordinasi vertikal/antar sektor dapat dikategorikan tingkat resiko menengah (medium).

Efektivitas jangka panjang program deforestasi sangat dipengaruhi oleh beragam faktor penyebab yang saling berkaitan dan mungkin saja lebih rumit. Perlu media dan waktu yang cukup untuk mengurai permasalahan satu persatu dan membangun program bersama antar sektor. Beberapa faktor membutuhkan kebijakan pemerintah sedangkan faktor lain membutuhkan solusi berkelanjutan dan jangka panjang. Faktor resiko ini dapat dikategorikan tingkat resiko menengah (medium).

Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diawali dengan musim kering yang sangat berkaitan dengan kejadian *El Nino Southern Oscillation*. Sejarah mencatat kejadian ini berulang dalam rentang 3-7 tahun sekali. Kejadian kebakaran hutan dan lahan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Kebakaran menjadi lebih parah, ketika pembukaan lahan dilakukan di lahan gambut dan untuk mendapatkan kondisi media tanam yang lebih baik, petani membutuhkan abu hasil pembakaran. Abu ini sangat bermanfaat meningkatkan pH tanah gambut. Program penurunan emisi, perlu mendorong dan mempromosikan perubahan tata kelola dan teknik budidaya di lahan gambut. Peningkatan pengetahuan melalui diskusi antara petani, peneliti dan pengambil kebijakan tentang sifat fisik dan kimia gambut, air akuifer, pengelolaan gambut lestari harus terus menerus dilakukan. Dilihat dari potensi resiko, faktor ini dapat dikategorikan tingkat resiko menengah (medium).

4.5. Tanggung Jawab dan Penilaian Capaian Kinerja

Memperhatikan arahan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat maka diperlukan kerjasama yang kuat dengan memperhatikan distribusi tanggungjawab para pihak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD/KL/institusi sebagai bagian mekanisme rentang kendali untuk proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Jika capaian target kinerja di bawah persentase yang diharapkan, misalnya hanya tercapai 49%, maka kita ingin memastikan apakah sumberdaya yang sudah dialokasikan dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut sudah berjalan dengan optimal atau belum. Apabila belum optimal, maka pendekatan kolaborasi dari para pihak dapat diarahkan untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, tanggungjawab capaian kinerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga satuan penurunan emisi ton CO₂e akan dibagi per kapita masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Mengacu pada Dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 168/Menlhk/PKTL/PLA.1/ 2/2022 tanggal 24 Februari 2022, disebutkan bahwa pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) akan tercapai pada tahun 2030 sebesar 4,23 ton CO₂e per kapita. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat sejumlah 5,5 juta penduduk, maka emisi total per kapita adalah 23,265 juta ton CO₂e.

Dengan memperhatikan standar perhitungan emisi yang dihasilkan pada luasan tertentu, misalnya pada tutupan hutan primer yang menyimpan 200 ton biomassa setara dengan 734 ton CO₂e, maka sedikitnya luasan kawasan hutan primer yang harus dijaga minimal 31.696 ha saja.

Berdasarkan arahan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,6 juta ha tidak berarti bahwa luasan tutupan hutan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan dapat dieksploitasi, namun menjadi komitmen Provinsi Kalimantan Barat untuk berkontribusi dalam pembangunan rendah emisi dan pencapaian target nasional yang telah ditetapkan. Dibalik hal tersebut harus menjadi tanggung jawab dunia internasional untuk memberikan apresiasi dan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



BAB 05



PENUTUP

BAB V. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat merupakan pemaparan rincian dari turunan dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan bagi seluruh UPT, OPD, dan parapihak yang berkepentingan dalam pengelolaan pada basis hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh rencana aksi, target, program, dan kegiatan yang tersusun dalam dokumen ini secara detil merincikan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat sub nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Program yang telah disusun dalam dokumen ini menjadi komitmen bagi Provinsi Kalimantan Barat guna tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca nasional sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung *net zero emission* sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC sub nasional Provinsi Kalimantan Barat terhadap rencana operasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global.

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*) untuk pencapaian NDC
2. Bahwa sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah merumuskan kebijakan daerah, strategi dan rencana aksi, serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk penurunan emisi GRK, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang berkontribusi terhadap target nasional dalam program Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
3. Bahwa untuk pencapaian target FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan luasan sebesar 7,6 juta ha yang didistribusikan dalam Rencana Operasional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 (RO 1-12).
4. Bahwa luasan tutupan hutan yang perlu dipertahankan oleh Kalimantan Barat untuk berkontribusi pada capaian target nasional FOLU Net Sink 2030 dengan asumsi net emisi per kapita sebesar 4,23-ton CO₂e adalah sebesar 7,6 juta ha dengan target serapan total adalah 32,1 juta ton CO₂e atau setara dengan 12% kontribusi untuk nasional.
5. Bahwa untuk melaksanakan RO 1-12 guna mencapai target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan nasional sebesar 7,6 juta ha, maka diperlukan pendanaan sebesar Rp 25,2 triliun.
6. Bahwa mengacu pada identifikasi pembiayaan yang dilakukan di SKPD/KL di Provinsi

Kalimantan Barat sampai 2030, maka pembiayaan yang tersedia sebesar Rp 728,2 miliar. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Barat masih membutuhkan pendanaan sebesar Rp 24,5 triliun untuk mencapai target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan nasional sebesar 7,6 juta ha 7. Bahwa sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Kalimantan Barat melalui Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Kalimantan barat untuk memastikan implementasi berjalan dan terdaftar dalam sistem registasi

8. Bahwa untuk pelaksanaan RO 1-12 harus disusun *Social and Environmental Safeguard* (SES) yang terintegrasi dengan Safeguard Information Sistem REDD+ (SIS REDD+) yang telah dirancang nasional, serta memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang teregistrasi dalam *National Registry System* (NRM)
9. Bahwa setiap komponen RO perlu terus dibangun, dikembangkan, diselaraskan, serta konsisten untuk memastikan pencapaian target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat
10. Bahwa pelaksanaan RO 1-12 untuk mencapai target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat diimplmentasikan oleh para pihak dengan berbagi tanggungjawab berdasarkan wilayah kelola dan otoritas pengelolaan wilayah
11. Bahwa untuk memastikan sinergitas para pihak pelaksanan RO 1-12 dari level provinsi, kabupaten, desa, serta proyek di tingkat tapak, maka *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) harus dirancang secara sistematis dan komperhensif.

5.2. Saran

1. Menyusun kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pelaksanaan RO 1-12 yang termuat dalam Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat
2. Memperkuat kelembagaan baik di level provinsi, kabupaten, desa, serta unit manajemen di tingkat tapak untuk memastikan pelaksanaan RO 1-12
3. Membangun harmonisasi atas kesenjangan yang terjadi antara perencanaan dan capaian pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat, termasuk memastikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak yang dilaksanakan diluar arahan nasional sebesar 7,6 juta ha masuk dan berkontribusi pada pencapaian target sebagaimana Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat
4. Perlu menghitung kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan dengan memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan pada instansi/SKPD/KL yang telah direncanakan. Kesenjangan pembiayaan ini selanjutnya akan dijadikan usulan kepada pihak terkait di level nasional maupun mengembangkan skema pembiayaan internasional.
5. Sinergitas dan mengoptimalkan peran pembiayaan dari proyek-proyek yang berjalan, akan berjalan (dalam perencanaan) dalam yurisdiksi sub nasional untuk mencapai

target FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan dan jika diperlukan untuk menemukan alternatif potensial pembiayaan lainnya dalam rangka percepatan implementasi rencana aksi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RO 1-12 harus dibangun dan dilaksanakan secara konsisten dan komperhensif guna memastikan pencapaian target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pelaksanaan *Social and Environmental Safeguard* (SES), registrasi program dan kegiatan dalam *National Registry System* (NRM), dan *Benefit Sharing Mechanism* (BSM)

5.3. Disclaimer

Bahwa Rencana Operasional ini merupakan upaya dan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai carbon neutral identik dengan *net zero emission* Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, melalui skenario LCCP dan pada LTS-LCCR 2050 menetapkan target *net sink* pada sektor FOLU (beyond net zero emission). Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui skenario LCCP seperti semangat yang ditegaskan dalam langkah ambisius untuk mencapai net zero emission sektor FOLU pada 2030. Dalam kaitan ini tetap mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam perjalanan pelaksanaan tugas kerja, perkembangan kebijakan dan referensi global, nasional maupun lokal, yang memerlukan *safeguard* dalam bentuk pelaksanaan pada target minimal sesuai skenario CPOS (*current policy scenario*).

Dinamika kerja terkait dengan data/informasi geospasial, yaitu IGT KLHK periode pemutakhiran 2018 - 2019 yang bersumber dari basis data geospasial KLHK. Telaahan spasial ini merupakan bagian dari hasil telaah kegiatan integrasi program berbasis spasial di tingkat tapak di KLHK tahun 2020. Menjadi penting untuk menegaskan tentang Disclaimer ini atas gambaran kondisi dan situasi:

Pertama: memberikan pengaman dan apabila skenario LCCP tidak bisa kita capai (karena *conditional* dan *unconditional*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap konsisten dan sesuai dengan komitmen *legally binding* (yaitu NDC) namun tetap menunjukkan ambisinya untuk menggunakan skenario LCCP.

Kedua: ditujukan untuk memberikan gambaran bahwa bilamana masih terdapat ketidaksesuaian di lapangan terkait angka-angka, perlu dilihat dan dipertimbangkan sebagai kewajaran dengan kondisi perbedaan periode data yang dipakai.

Ketiga: terdapat isu lintas sektor yang akan mempengaruhi pencapaian target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Kalimantan Barat termasuk antara lain target pengurangan emisi di sektor FOLU dengan kebutuhan lahan antara pengembangan energi biomassa, ketahanan pangan dan target pengurangan emisi di sektor FOLU.

Keempat: dapat terjadi perbedaan hasil analisis dan kerja lapangan (meskipun diantaranya tidak prinsip/tidak signifikan) karena akibat penggunaan skala peta yang berbeda (*level of intensity of the map*) terutama dikaitkan dengan kegiatan RHL. Terhadap hal ini akan terus dilakukan langkah koherensi.

Kelima: di sisi lain dalam kegiatan awal untuk menyatukan atau integrasi usaha dari puluhan unit satuan kerja (dan tidak menutup kemungkinan antar kabupaten/kota), juga dapat terjadi bias persepsi atas suatu metodologi, seperti misalnya dalam asumsi *survival rate* NDC dan LTS 23% luasan aktual 23%, dibandingkan dengan syarat keberhasilan (ditegaskan tentang persentasi tanaman tumbuh) yaitu 75% seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Terhadap hal-hal seperti ini, sambil kegiatan terus berjalan akan dilakukan koherensi pandangan, metodologi dan hasilnya.

Keenam: meski kecil kemungkinan terjadi, dengan perubahan kebijakan dan tata kerja untuk semakin efektif menghasilkan aktualisasi prinsip *Sustainable Forest Management*, *Forest Governance* serta *Carbon Governance*, masih terdapat kemungkinan masalah kelembagaan, dalam arti kegiatan dan unsur pelaksana kerja, terutama di tingkat kabupaten/kota yang sangat besar kemungkinan akan mencakup beberapa bentuk kelembagaan dengan rule base yang sambil berjalan akan terus diselaraskan (*learning by doing*).

Ketujuh: pada tingkat sub nasional hal terkait dengan pendekatan capaian NDC dan pendekatan *low carbon development* (yang di antaranya mencakup sektor FOLU) disesuaikan dengan pendekatan NDC sebagaimana mandat UU No. 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kalimantan Barat dalam Angka 2022. BPS Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak
- Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian [BBSDLP]. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia skala 1:250.000. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Bank Indonesia. 2022. Bank Indonesia: Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Mei 2022. Bank Indonesia. Jakarta
- Bismark, M. 2009. Biologi Konservasi Bekantan (*Nasalis larvatus*). Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Badan Litbang Departemen Kehutanan, Bogor.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 144/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Barat. Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387). Jakarta
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Jakarta
- Noor M, Masganti, dan Agus F. 2014. Pembentukan dan Karakteristik Gambut Tropika Indonesia. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. IAARD Press. Jakarta
- Provinsi Kalimantan Barat. 2014. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah

- Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2014. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2020. Keputusan Gubernur Nomor 1215/DLHK/2020 Tentang Target Penurunan dan Alokasi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030. Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2020. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2030. Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2021. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7). Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat. 2022. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 928/LHK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus di Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak
- Republik Indonesia. 1956. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris

- Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Kementerian Luar Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Keuangan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249). Kementerian Keuangan. Jakarta
- Smith-Ehlers DA. 2014. The effects of land-use policies on the conservation of Borneo's endemic Presbytis monkeys. *Biodiversity and Conservation* 23: 891–908.
- Wetlands Internasional. 2002. Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan Tahun 2000 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada. Jakarta

The background is a solid teal color. Overlaid on this is a blurred, high-contrast image of a plant, possibly a lily, with long, curved petals and a prominent stamen. A pattern of small, light-colored dots is scattered across the upper portion of the image, creating a textured effect.

Lampiran - Lampiran

LAMPIRAN 1. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPHL Wilayah VIII Pontianak

No	Program / Kegiatan	Luas (Ha)	R0	Satuan	Volume	
1.1.	Identifikasi HHBK dan Jasling		3	OT	135	
1.2.	Monev PBPH		3	OT	225	
1.3.	Bintek Penerapan Multiusaha Kehutanan		3	Keg	18	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU BPHL Wilayah VIII Pontianak, 2022

LAMPIRAN 2. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPDAS Kapuas

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Luas (Ha)	R0	Satuan	Volume	
1.1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Karhutla	Desa Kubu, Desa Sepuk Laut, Desa Permata, Desa Betuah, Desa Sui Bemban	1	29.595			

Sumber: DIPA tahun 2022, Pagu Indikatif tahun 2023 BPDAS Kapuas

LAMPIRAN 3. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Groundcheck Hotspot	Provinsi Kalimantan Barat	1					TNI, POLRI, Manggala Agni	
1.2.	Pemadaman	Provinsi Kalimantan Barat	1					TNI, POLRI, Manggala Agni	
1.3.	Pembinaan MPA	Provinsi Kalimantan Barat	1		Desa	1			

[illegible]

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	525.000	450.000							

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.4.	Monev Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan daerah rawan kebakaran	Provinsi Kalimantan Barat	1				1	1	
1.5.	Verifikasi Proklamasi	Provinsi Kalimantan Barat	1		Desa	12			

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, Renstra Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan

LAMPIRAN 4. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari BPSKL Wilayah Kalimantan

1. LPHD Belaban Raya

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Budidaya Lebah Madu	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	1			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	
1.2.	Silvopasture	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	2			APL, HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	
1.3.	Silvofishery	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	1			APL, HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	
1.4.	Tata Air (Ekowisata Air terjun dan Pengolahan Air Bersih)	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	4.325			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.5.	Ekowisata Perikanan dan Edukasi	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	4.325			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	

Sumber: RKPS LPHD Belaban Raya, 2022

2. LPHD Bukit Banjar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Budidaya Lebah Madu	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	1	1			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.2.	Silvopasture	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	1	2			APL, HL	KUPS, UPT Terkait	
1.3.	Silvofishery	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	1	1			APL, HL	KUPS, UPT Terkait	
1.4.	Tata Air (Ekowisata Air terjun dan Pengolahan Air Bersih)	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	1	803			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.5.	Ekowisata Perikanan dan Edukasi	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	1	803			HL	KUPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Belaban Raya, 2022

[illegible]

3. LPHD Rimbak Sangiang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Budidaya Lebah Madu	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	1	1			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.2.	Silvopasture	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	1	2			APL, HL	KUPS, UPT Terkait	
1.3.	Silvofishery	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	1	1			APL, HL	KUPS, UPT Terkait	
1.4.	Tata Air (Ekowisata Air terjun dan Pengolahan Air Bersih)	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	1	3.976			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.5.	Ekowisata Perikanan dan Edukasi	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	1	3.976			HL	KUPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Rimbak Sangiang, 2022

LAMPIRAN 5. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari KPH di Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sambas									
1.1.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KTH	Izin PS	1		KTH/Desa	15	HP/HL	KPH, LHK, BPHP, BPKH, Masy	
1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Wil. Kerja KPH (128.318)	1				HP/HL	KPH. Masy, Pemda, Polri	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Karhutla	Wil. Kerja KPH (128.318)	1				HP/HL	KPH. Masy, Pemda, Polri	
KPH Wilayah Bengkayang									
1.1.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		1				HL, HPT, HP	KPH, BPHP; KTH, PEMDA; LSM	
1.2.	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan		1				HL, HPT, HP	KPH, BPDASHL; Pemda, Masy sekitar hutan	
1.3.	Penanaman / pengkayaan pada hutan produksi		1				HL, HPT, HP	KPH, BPDASHL; Pemda, Masy sekitar hutan	
1.4.	Pemasaran/Promosi produk perhutanan sosial		1				HL, HPT, HP	KPH, BPHP; KTH, Pemda; LSM	
1.5.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		1				HL, HPT, HP	KPH; MPA; Pemda Bengkayang;	
1.6.	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		1				HL, HPT, HP	KPH; MPA; Pemda Bengkayang; Manggala Agni DAOP Singkawang; Polri; TNI-AD	
1.7.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan		1				HL, HPT, HP	KPH, Manggala Agni DAOP Singkawang, KTH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	419,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
	26.416	33.020	212.924	145.002	166.947	180.672	202.800	460.708	457.452
			151.500	166.650	183.315	201.647	221.692	243.858	268.244
			106.050	116.655	128.321	141.153	155.184	170.701	187.771
		100.000	120.000	144.000	172.800	207.360	248.832	298.598	298.598
	113.356	148.930	195.724	257.298	338.343	445.052	585.595	770.761	1.014.798
	650.000	715.000	786.500	865.149	951.664	1.046.831	1.151.513	1.266.665	1.393.332
			150.000	165.000	181.500	199.650	219.615	241.577	265.734

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sanggau Barat									
1.1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Karhutla	Wilker KPH	1		Kegiatan	1	HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Polri, TNI, Manggala Agni	
1.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Fasilitas Pengajuan Izin, Penguatan kelembagaan/RKPS/KUPS, Pengembangan Usaha	Wilker KPH	1		Kelompok	50	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, BPSKL, Masy, Pemda, Mitra, FPV, PBPH	
1.3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Wilker KPH	1		Kegiatan	1	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Polri, TNI, Gakkum	
1.4.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Wilker KPH	1		Kegiatan	2	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Mitra, FPV	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	538.639	562.626	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10.000	27.380	30.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					25.000	25.000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.5.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Cinta Lingkungan	Wilker KPH	2		Kegiatan	3	HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Mitra, Sekolah	
1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Urusan Kehutanan ke OPD Terkait di Pusat/Provinsi/ Kabupaten (Advokasi Implementasi Perda 6 Tahun 2018 ke Pemkab/Mendorong HCV/TAKE,dll)	Wilker KPH	3		Kegiatan	1	HL, HP, APL	DLHK, KPH, Pemegang IUP, Masy, Pemda, Mitra	
KPH Wilayah Sanggau Timur									
1.1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Karhutla	Seluruh wilayah KPHP Unit IV	1	266.183	Bulan	10	HP - HL - APL	" Pemkab, Kecamatan, Desa, TNI POLRI, Manggala Agni, Masyarakat	
1.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Fasilitas Pengajuan Izin, Penguatan kelembagaan/ RKPS/KUPS, Pengembangan Usaha	Kelompok Pemegang Izin Perhutanan Sosial	1		HKm	5		" Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Seluruh wilayah KPHP Unit IV	1	266.183	Bulan	10	HP - HL - APL	" Pembkab, Kecamatan, Desa, TNI POLRI, Manggala Agni, Masyarakat	
1.4.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Wilker KPH	1		Kegiatan	2	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Mitra, FPV	
1.5.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Cinta Lingkungan	Wilker KPH	2		Kegiatan	3	HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Masy, Pemda, Mitra, Sekolah	
KPH Wilayah Landak									
1.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Perizinan PS	1				HL, HP, APL	KPH, Pengelola PS dan NGO	
1.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Fasilitas Pengajuan Izin, Penguatan kelembagaan/ RKPS/KUPS, Pengembangan Usaha	Perizinan PS	1			4,576	HL	KPH, LPHD	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Wilayah Kerja KPH	1	55,343	Bulan	4,576	HP,HL, APL	KPH, Pemda, Masyarakat	
1.4.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Wilayah Kerja KPH		104,986			HP,HL, APL	KPH, Pemda, Masyarakat	

KPH Wilayah Mempawah

1.1.	Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Desa Pasir/ Anjungan Dalam/Kecurit/ Toho Ilir	1	1,171	Bulan	12	HP	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.2.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Desa Pasir/ sejegi/Kec urit/ Toho Ilir	1	382	Bulan	13	HP	KPH/Pemda /Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan		2	12	Bulan	13	HP	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.4.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan		2	3,314	Bulan	12	HP	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.5.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	9 Kecamatan	1	43,640	KTH	5	HP/HL	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.6.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/Koordinasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	10 Kecamatan	1	50,925	Izin	11	HP/HL	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.7.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	11 Kecamatan	1	89,989	Izin	10	HP	KPH/Pemda /Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	7,680								
	25,032								
		8,798							

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.8.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	12 Kecamatan	1	4,576	Izin	1	HL		
KPH Wilayah Sintang Utara									
1.1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/Sosialisasi, Koordinasi, Penyuluhan dan Patroli	Wilker KPH	1	269,264	Kegiatan	1	HP/HL	KPH, DLHK, TNI, POLRI, GAKKUM, Masyarakat	
1.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Wilker KPH	1	269,264	Kegiatan	1	HP/HL	DLHK, KLHK, KPH, KTH, masyarakat	
1.3.	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pelatihan, Fasilitasi Penyusunan RKPS, RKT dan Pembentukan KUPS	Wilker KPH	1	269,264	LDPH	10	HP/HL	LDPH, KLHK, Pemda, NGO	
1.4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial/KTH (Promosi Produk/Fasilitasi Pemasaran/ Pameran/Fasilitasi Kemitraan Usaha/ Bantuan Alat Ekonomi Produktif)	Wilker KPH	1	269,264	LDPH	10	HP/HL	KPH, Pemda, LDPH	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sintang Timur									
1.1.	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Desa Melingkat, Desa Pakak, Desa Sungai Buaya	1		Kelompok (Desa)	3	HL, HP, HPT	Masyarakat	
1.2.	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Wilayah KPHP Unit XIV	1		Unit	1	HL, HP, HPT	KPH	
1.3.	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Penanaman (pelaksanaan RHL)	HL-Blok Inti	1	24,336				Masyarakat	
1.4.	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Pemeliharaan tanaman tahun I (P1)	HL-Blok Inti	1	24,336				Masyarakat	
1.5.	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Pemeliharaan tanaman tahun II (P2)	HL-Blok Inti	1	24,336				Masyarakat	
1.6.	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin	HL-Blok Inti	1		kegiatan	7		Masyarakat	
1.7.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		kegiatan/ tahun	6		KPH	
1.8.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan Partisipatif Dalkarhutla dan TNI/POLRI	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		kegiatan/ tahun	6		Stakeholder Terkait	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.9.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Penguatan Regu Brigdalkarhutla dan Pengamanan Hutan	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		regu/tahun	2		KPH	
1.10.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Sosialisasi Pengendalian Karhutla	Desa-desa di Wilayah KPHP Unit Xiv	1		desa	41		Masyarakat	
1.11.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		MPA	8		Masyarakat	
1.12.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pelatihan Dalkarhut kepada Masyarakat Peduli Api	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		kegiatan/ tahun	2		Masyarakat	
1.13.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Monitoring Hotspot	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	1		kegiatan/ tahun	12		KPH	
1.14.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin/ Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan	Kantor Pemegang Ijin	1		kegiatan/ tahun	6		pemegang ijin	
1.15.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin/ Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian kepada para pemegang izin	Kantor Pemegang Ijin	1		kegiatan/ tahun	6		pemegang ijin	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.16.	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait/ Rapat Koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab terkait pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit XVII pada UPT KPH Wilayah Sintang Timur	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1		kegiatan/ tahun	1		Stakeholder Terkait	
1.17.	Rasionalisasi Wilayah Kelola/ Koordinasi terkait Rasionalisasi Wilayah KPH	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1		kegiatan	2		Stakeholder Terkait	
1.18.	Pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada Areal KPHP yang Telah Terdapat Izin/ Rapat Pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan para Pemegang Ijin	UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1		Tahun	1		Pemegang Ijin	
1.19.	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Desa Mapan Jaya, Desa Tanah Merah, Desa Puruk Beribit, Desa Begori	1				HL, HP, HPT	Masyarakat	
1.20.	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	KPHP Unit XV	1				HL, HP, HPT	KPH	
1.21.	Pemberdayaan Masyarakat/Kajian Sumber-sumber Penghidupan Berkelanjutan	KPHP Unit XV	1	207,079			HL, HP, HPT	KPH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	311,009								
		144,711							
			10,000	10,000	10,000	10,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.22.	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin /Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Rencana Rehabilitasi Sipil Teknis	Blok Inti di Hutan Lindung dan Blok Perlindungan di Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas	1					KPH	
1.23.	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin /Pelaksanaan Rehabilitasi Sipil Teknis	Blok Inti di Hutan Lindung dan Blok Perlindungan di Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas	1	65,183				KPH	
1.24.	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin /Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Rencana Rehabilitasi Vegetasi	KPHP Unit XV	1					KPH	
1.25.	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin /Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi Vegetasi	KPHP Unit XV	1	207,079				KPH	
1.26.	Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin /Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Sipil Teknis dan Vegetasi.	KPHP Unit XV	1					KPH	
1.27.	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Patroli Illegal Logging, Illegal Fishing, dan Illegal Hunting	KPHP Unit XV	1	207,079				KPH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			10,000	10,000	10,000	10,000			
			20,000	20,000	20,000	20,000			
			10,000	10,000	10,000	10,000			
			20,000	20,000	20,000	20,000			
			30,000	30,000	30,000	30,000			
			50,000	50,000	50,000	50,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.28.	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Pelaksanaan Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	KPHP Unit XV	1	207,079				KPH	
1.29.	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Pelaksanaan Pendidikan Konservasi Keanekaragaman Hayati Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Kelola KPHP Unit XV Sintang Timur	KPHP Unit XV	1	207,079				KPH	
1.30.	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Penyediaan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Neraca Sumber Daya Alam Wilayah KPHP Unit XV Sintang Timur	KPHP Unit XV	1	207,079			KPH		
1.31.	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Monitoring dan Evaluasi Neraca Sumberdaya Alam Wilayah KPHP Unit XV Sintang Timur	KPHP Unit XV	1	207,079			KPH		
1.32.	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait/ Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinergi dengan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	KPHP Unit XV	1				Instansi dan Stakeholder Terkait		

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			50,000	50,000	50,000	50,000			
			30,000	30,000	30,000	30,000			
			10,000	10,000	10,000	10,000			
			20,000	20,000	20,000	20,000			
			20,000	20,000	20,000	20,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.33.	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait/ Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinergi Pembangunan KPHP Unit XV Sintang Timur dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	KPHP Unit XV	1				Instansi dan Stakeholder Terkait		
1.34.	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait/ Pelaksanaan Rapat Sosialisasi Pembangunan KPHP Unit XV Sintang Timur dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama	KPHP Unit XV	1				Instansi dan Stakeholder Terkait		
1.35.	Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP Unit XV yang Telah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan/ Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan di Luar Kegiatan Kehutanan pada Areal yang Telah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan terkait Pelaksanaan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas kayu)	KPHP Unit XV	3				pemegang ijin		

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			20.000	20.000	20.000	20.000			
			50.000						
			20.000	20.000	20.000	20.000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.36.	Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP Unit XV yang Telah Ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan/ Penyusunan Dokumen Pembelajaran Bersama Hasil Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan di Luar Kegiatan Kehutanan pada Areal yang Telah ada Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan, terkait Pelaksanaan PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas kayu)	KPHP Unit XV						pemegang ijin	
1.37.	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	KPHL Unit XVI					HL, HPT	KPH	
1.38.	Rapat Koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab terkait pengelolaan hutan di wilayah KPHL Unit XVI pada UPT KPH Wilayah Sintang Timur	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Bara							
1.39.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan	Wilayah KPHL Unit XVI					HL, HPT		

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.40.	"Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan Partisipatif Dalkarhutla dan TNI/POLRI"	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.41.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Penguatan Regu Brigdalkarhutla dan Pengamanan Hutan	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.42.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Sosialisasi Pengendalian Karhutla	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.43.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.44.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pelatihan Dalkarhut kepada Masyarakat Peduli Api	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.45.	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Monitoring Hotspot	Wilayah KPHL Unit XVI	1				HL, HPT		
1.46	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Penanaman (pelaksanaan RHL) pada Lahan Kritis skala 625 batang/ha	HL-Blok Inti	1						
1.47	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/ Pemeliharaan tanaman tahun I (P1)	HL-Blok Inti	1						

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.48	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/Pemeliharaan tanaman tahun II (P2)	HL-Blok Inti	1						
1.49	Rehabilitasi pada Areal kerja di luar Izin/Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin	HL-Blok Inti	1						
1.50	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Getah	Blok Pemanfaatan	1	175					
1.51	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan Pohon Penghasil Getah Tahun ke-1	Blok Pemanfaatan	1	175					
1.52	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Kulit Kayu	Blok Pemanfaatan	1	156					
1.53	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan Pohon Penghasil Kulit Kayu Tahun ke-1	Blok Pemanfaatan	1	156					
1.54	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan Pohon Penghasil Kulit Kayu Tahun ke-2	Blok Pemanfaatan	1	156					
1.55	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah- buahan	Blok Pemanfaatan	1	772					

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				488.800	488.800	488.800	488.800	488.800	488.800
				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			1.250.900						
				433.475					
				1.115.088					
					386.412				
						311.532			
					5.518.256				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.56	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah-buahan	Blok Pemanfaatan	1	772					
1.57	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah- buahan	Blok Pemanfaatan	1	772					
1.58	Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan	Kantor Pemegang Ijin	3						
1.59	Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian kepada para pemegang izin	Kantor Pemegang Ijin	3						
1.60	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal yang berizin/ Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi pada Areal Berizin	Pt Batasan, Pt Borneo Kurnia Mandiri, Pt Harapan Kita Utama, Pt Karya Rekanan Binabersama, Pt Kawedar Wood Industry, Pt Sari Bumi Kusuma, Pt Utan Sibau Persada	3				HPT		
1.61	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Desa Buntut Ponte	1				HPT	Masyarakat	
1.62	Program Pengelolaan Hutan/ Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	KPHP Unit XVII	1				HL, HP, HPT	KPH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						1.912.244			
							1.541.684		
			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		144.711							
			433.475						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.63	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan n Pohon Penghasil Getah Tahun ke-1	HL Blok Pemanfaatan (Petak HL-56)	1	175			HL	Masyarakat	
1.64	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan n Pohon Penghasil Getah Tahun ke-2	HL Blok Pemanfaatan (Petak HL-56)	1	175			HL	Masyarakat	
1.65	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Kulit Kayu	HPT-Blok Pemanfaatan HHK-HA (Petak HPT-398)	1	156			HPT	Masyarakat	
1.66	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan n Pohon Penghasil Kulit Kayu Tahun ke-1	HPT-Blok Pemanfaatan HHK-HA (Petak HPT-398)	1	156			HPT	Masyarakat	
1.67	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Pemeliharaan n Pohon Penghasil Kulit Kayu Tahun ke-2	HPT-Blok Pemanfaatan HHK-HA (Petak HPT-398)	1	156			HPT	Masyarakat	
1.68	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah-buahan	HPT-Blok Pemberdayaan Masyarakat (Petak HPT-124; HPT-168; HPT-226; HPT-257; HPT-279; HPT-43; HPT-58; HPT-580; HPT-616; HPT-75; dan HPT-83)	1	772			HPT	Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.69	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah-buahan	HPT-Blok Pemberdayaan Masyarakat (Petak HPT-124; HPT-168; HPT-226; HPT-257; HPT-279; HPT-43; HPT-58; HPT-580; HPT-616; HPT-75; dan HPT-83)	1	772			HPT	Masyarakat	
1.70	Pengembangan MPTS Pola Agroforestry/ Penanaman Pohon Penghasil Buah-buahan	HPT-Blok Pemberdayaan Masyarakat (Petak HPT-124; HPT-168; HPT-226; HPT-257; HPT-279; HPT-43; HPT-58; HPT-580; HPT-616; HPT-75; dan HPT-83)	1	772			HPT	Masyarakat	
1.71	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan	Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		
1.72	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Patroli Pengamanan Hutan Partisipatif Dalkarhutla dan TNI/POLRI	Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		
1.73	"Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/Penguatan Regu Brigdalkarhutla dan Pengamanan Hutan"	"Wilayah KPHP Unit XVII"	1				HL, HPT,HP		
1.74	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Sosialisasi Pengendalian Karhutla	Desa-deso di Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.75	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		
1.76	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Pelatihan Dalkarhut kepada Masyarakat Peduli Api	Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		
1.77	Pengendalian Karhutla dan Pengamanan Hutan/ Monitoring Hotspot	Wilayah KPHP Unit XVII	1				HL, HPT,HP		
1.78	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait/ Rapat Koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab terkait pengelolaan hutan di wilayah KPHP Unit XVII pada UPT KPH Wilayah Sintang Timur	Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintang Timur	1						
1.79	"Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin/Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan"	Kantor Pemegang Ijin	3						
1.80	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin/ Koordinasi, Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian kepada para pemegang izin	Kantor Pemegang Ijin	3						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sekadau									
1.1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap	1		Unit	1	HP dan HL	KPH, Masyarakat, PS	
1.2	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan / Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kec Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap	1		KTH	10	HP, HL , dan APL	KPH, Masyarakat, KTH, PS	
1.3	Pemberdayaan Masyarakat / Pengembangan Produk HHBK dan Handicraft	Desa-desa di sekitar kawasan KPH	1		KTH	21	HP, HL , dan APL	KPH, Masyarakat, KTH, PS	
1.4	Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam / Perlindungan Hutan	KPHL Unit XII pada UPT KPH Wilayah Sekadau	1		Kecamatan	2	HL	KPH, Masyarakat, KTH, PS	
1.5	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BRIGDALKARHUTLA)	KPHL Unit XII pada UPT KPH Wilayah Sekadau	1		Unit	1	HL dan HP	KPH, Masyarakat, PS	
1.6	Masyarakat Peduli Api (MPA)	Desa-desa di sekitar KPH Sekadau	1		Desa	20	HP, HL , dan APL	KPH, Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	100.038								
			70.000	140.000	190.000	155.000	185.000	175.000	
			68.000	60.000	68.000	60.000	68.000	60.000	
			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
			85.000	60.000	85.000	60.000	85.000	60.000	
			52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.7	Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal Berizin	Lokasi izin	3		Izin	7	HP	KPH, Pemegang Ijin	
1.8	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin	Pemegang izin	3		Kali/ Tahun	2	HL dan HP	KPH, Pemegang Ijin	

KPH Wilayah Melawi

1.1	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	KPHP 22, KPHP 23, KPHP 24 dan KPHL 13	1	333.470	Kegiatan	1	HP, HL	KPH, Dinas LHK Provinsi, BPHP dan Masyarakat	
1.2	Pemberdayaan Masyarakat	KPHP Unit 22 dan KPHL Unit 13	1		Kegiatan / KTH / Stup	14, 34 Kegiatan / 136 KTH / 150 Stup	HP, HL	KPH dan Masyarakat	
1.3	Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berijin	KPHP Unit 22 dan KPHL 13	3	131.837	Pemegang Ijin	131.837		KPH dan Pemegang Ijin	

KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara

1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	KPH Unit 18 dan unit 19	1				HL	KPH	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	KPH Unit 18 dan unit 19	1				HL	KPH	
1.3	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	KPH Unit 18 dan unit 19	1				HL dan HP	KPH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-
	749.050	404.800	530.800	410.800	410.800	682.000	160.800		
	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	650.000								
	-	40.000							
			39.147						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur									
1.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	10 desa	1				HL, HP, HPT	KPH	
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulan gan kebakaran hutan dan lahan	2 Kecamatan	1				HL, HP, HPT, APL	KPH	
1.3	Pengembangan Pemaanfaatan HHK, HHBK dan atau Jasa Lingkungan / (Pemetaan Potensi)	Desa Nanga Raun (HHBK dan Jasling), Desa Rantau Bumbun (Jasling), Desa Ribang Kadeng (HHBK)	1		Desa	3	HL, HP	KPH, Desa, Masyarakat	
1.4	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Desa Nanga Raun, Sebintang, Bahenap, Kensuray, Suka Maju	1		LPHD	4	HL, HP, HPT, APL	KPH, LPHD, KTH	
1.5	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Desa Nanga Raun, Sebintang, Bahenap, Kensuray, Suka Maju	1		LPHD & KTH	5	HL, HP, HPT, APL	KPH, LPHD, KTH	
KPH Wilayah Kayong									
1.1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Wilker KPH	1	75.873			HP/HL	KPH, Pemda, TNI, POLRI, GAKKUM, Masyarakat	
1.2	Pelaksanaan Smart Patrol pada Hutan Desa	Kecamatan Simpang Hilir	1	7.912			HP/HL	KPH, LPHD, YP, FFI	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggula ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Wilker KPH	1	75.873			HP, HL, APL	KPH, Pemda, TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat	
1.4	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Wilker KPH	1	2.200			HP/HL	DLHK, KLHK, KPH, LPHD, PEMDA, Masyarakat, FFI, YP	
KPH Wilayah Ketapang Selatan									
1.1	"Pelaksanaan Perlindungan Hutan du HP dan HL/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahaan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan"	Kec Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai	1		Kecamatan	3	HP, HL, APL	KPH	
1.2	"Pelaksanaan Perlindungan Hutan du HP dan HL/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahaan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan"	Kec Nanga Tayap, Matan Hilir Utara, Benua Kayong, Muara Pawan	1		Kecamatan	4	HP, HL, APL	KPH	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	"Pelaksanaan Perlindungan Hutan du HP dan HL/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan"	"Kec Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, Sei Melayu Rayak, Kendawangan, Nanga Tayap, Jelai Hulu, Marau"	1		Kecamatan	7	HP, HL, APL	KPH	
1.4	"Pelaksanaan Perlindungan Hutan du HP dan HL/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan"	Kec Kendawangan, Air Upas, Singkup	1		Kecamatan	3	HP, HL, APL	KPH	
1.5	"Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan/ Penyiapan"	Kec Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1		Kecamatan	3	HP, HL	"KPH, NGO, Masyarakat"	
1.6	"Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan/ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial"	Kec Nanga Tayap, Matan Hilir Utara, Benua Kayong, Muara Pawan	1		Kecamatan	4	HP, HL	"KPH, NGO, Masyarakat"	
1.7	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat diBidang Kehutanan/ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	"Kec Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, Sei Melayu Rayak, Kendawangan, Nanga Tayap, Jelai Hulu, Marau"	1		Kecamatan	7	HP, HL	"KPH, NGO, Masyarakat"	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.8	"Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial"	Kec Kendawangan, Air Upas, Singkup	1		Kecamatan	3	HP, HL	"KPH, NGO, Masyarakat"	
KPH Wilayah Kuburaya									
1.1	Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Desa Kubu	2	1,104			HPT	DLHK Prov. Kalbar	
1.2	Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Desa Kubu	2	1,104			HPT	DLHK Prov. Kalbar	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, RPHJP KPH di Kalimantan Barat

LAMPIRAN 6. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Se - Kalbar	1		Orang	26	HL, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PS	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.2.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Se - Kalbar	1		Lokasi		HL, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PS	
1.3.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Se - Kalbar	1	12,000	Kabupaten	12	HL, HP dan APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.4.	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Ketapang dan Kota Pontianak	1	93	Unit	2	APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy	
1.5.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Se - Kalbar	1	12,5	Batang	5000	APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.6.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Se - Kalbar	1	78,47	Ha		APL	DLHK, KPH, Pemkab, Sekolah (998 dari 6.495	
1.7.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.8.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/ tahun	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	HP dan APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.9.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.10.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	HP, HL dan APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy	
1.11.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy	
1.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy	
1.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	HP, HL, APL	DLHK, KLHK, Pemda, Masy	
1.14	Kunjungan Lapangan, Monitoring, evaluasi kewajiban/ketaatan UM	12 kab/kota	1		dok	1	HP, HL, APL	KLHK, KPH, Mitra	
1.15	Pembinaan/ koordinasi/Konsultasi penegakan hukum	17 lokasi (KPH)	1		dok	1	HP, HL, APL	Polri, KLHK, KPH, Mitra	
1.16	Patroli Pengamanan Hutan	17 lokasi (KPH)	1		dok	1	HP, HL, APL	Polri, KLHK, KPH, Mitra	
1.17	Bimtek SDM Pamhut	1 Pontianak	1		dok	1	HP, HL, APL	KLHK, KPH, Mitra/NGO	
1.18	Penetapan dan Operasional Posko Dalkarhutla	Dinas LHK Prov Kalbar	1		Dokumen	1	HP, HL, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.19	Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla	Kalbar	1		Dokumen	1	HK, HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan	
1.20	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.21.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	HP, HL dan APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.22.	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Ketapang	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy	
1.23.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Se - Kalbar	1		Dokumen	1	APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, PS	
1.24.	Penyadartahuan Pencegahan Karhutla (kampanye/ sosialisasi/pe nyuluhan/pameran)	14 kab/kota se- Kalbar	2		Dokumen	1	HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan , Mitra	
1.25.	Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Ancaman Karhutla	Pontianak	2		Dokumen	1	HK, HL, HP, APL	KPH Dinas LHK Prov Kalbar dan OPD Pemprov terkait	
1.26.	Peningkatan koordinasi dlm rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalkarhutla melalui rapat kerja, rapat koordinasi serta kunjungan kerja	Se - Kalbar & Nasional	2		Dokumen	1	HK, HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan , Mitra	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.27.	Patroli Pencegahan Karhutla secara Terpadu	Se - Kalbar	2		Dokumen	1	HK, HL, HP, APL	DLHK, TNI, POLRI, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan, Mitra	
1.28.	Penaksiran/ Penghitungan Luas Karhutla	Se - Kalbar	2		Dokumen	1	HK, HL, HP, APL	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, perkebunan, Mitra	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU BPHL Wilayah VIII Pontianak, 2022

LAMPIRAN 7. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari KHDTK Untan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1	Identifikasi HHBK dan Jasling di KHDTK (Madu, Air Minum, Kaliandra)	KHDTK Untan	1		25	10	HP, HPT	Masyarakat di 14 Desa	
2	"Pengembangan Perhutanan Sosial di areal KHDTK di 3 Kabupaten"	KHDTK Untan	2		1	1	HP	Masyarakat di 14 Desa	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU BPHL Wilayah VIII Pontianak, 2022

LAMPIRAN 8. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari KHDTK Untan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Penanaman	Desa Sejuah	8	50			HL	Poktan	
1.2	Penanaman	Desa Pisang (Entawak)	8	50			HL	Poktan	

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	58.200.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
	152.370.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	166,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		124,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	396,219	147,232	114,372			62,500	62,500	62,500	62,500
	387,742	147,212	114,409						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Penanaman	Desa Pisang (Rosak)	8	50			HL	KTH	
1.4	Penanaman	Desa Meragun	8	65			HL	Poktan	
1.5	Penanaman	Desa Lembah Beringin	8	75			HL	KTH	
1.6	Penanaman	Desa Nanga Tikan	8	100			HL		
1.7	Penanaman	Desa Tanah Merah	8	100			HL	Pokmas	
1.8	Penanaman	Desa Nanga Masau	8	250			HL	Pihak Ke 3	
1.9	Penanaman	Desa Tapang Manua	8	150			HL	Pihak Ke 3	
1.10.	Penanaman	Desa Pakak	8	225			HL	Pihak Ke 3	
1.11.	Penanaman/ Rehabilitasi Hutan mangrove	Kubu	8	25			HL	Kelompok Masyarakat Maju Tani	
1.12.	Kebun Bibit Rakyat	9 Kabupaten	8		Kelompok	52		BPDAS, Pokmas	
1.13.	Kebun Bibit Desa	3 Kecamatan	8		Kelompok	3		BPDAS, Pokmas	
1.14.	Pengadaan Bibit Produktif	Provinsi Kalimantan Barat	8		Batang	120,000		BPDAS, Pokmas	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	396,169	147,192	114,447						
	515,140	191,351	148,849						
	594,468	220,592	171,557						
	841,358	299,773	234,788						
	1,236,515	412,950	299,190						
	411,510	335,423							
	244,470	196,590							
	362,674	290,170							
	48,425								
	52,000								
	3,000								
	2,280,000								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.15.	Pembuatan Sekat Kanal dalam rangka perlindungan areal RHL	Desa Sungai Abau, Langan Baru, Kepala Gurung, Tanjung, Nanga Kelapan, Pakak dan Lembah Beringin	8	1,104	Desa	7		BPDAS, KPH	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023 BPDAS Kapuas

LAMPIRAN 9. | Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon BPSKL

1. LPHD Belaban Raya

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pengayaan Jenis Asli	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	50 (20.000 Bibit)			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.2	Penanaman tanaman untuk menjaga sumber mata air dan mencegah banjir	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	3,383			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Pembibitan	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450 (260.000 Batang)			APL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.4	Penanaman	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.5	Pemeliharaan	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.6	Pemanenan	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.7	Pengolahan	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.8	Pemasaran	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.9	Agroforestry	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	450			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	
1.10.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	8	4,325			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait, Private sektor	

Sumber: RKPS LPHD Belaban Raya, 2022

[illegible]

2. LPHD Bukit Banjar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pengayaan Jenis Asli	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	10 (4.000 Batang)			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.2	Penanaman tanaman untuk menjaga sumber mata air dan mencegah banjir	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	803			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.3	Pembibitan	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	40 (16.000 Batang)			APL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.4	Penanaman	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	16.000 Batang			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.5	Pemeliharaan	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	16.000 Batang			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.6	Pemanenan	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	16.000 Batang			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.7	Pengolahan	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	16			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.8	Pemasaran	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	16			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.9	Agroforestry	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	40			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.10.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	803			HL	KUPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Bukit Banjar, 2022

[illegible]

3. LPHD Rimbak Sangiang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pengayaan Jenis Asli	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	50			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.2	Pembibitan	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	132.000 Batang			APL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.3	Penanaman	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.4	Pemeliharaan	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.5	Pemanenan	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.6	Pengolahan	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.7	Pemasaran	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	
1.8	Agroforestry	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	450			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.9	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	8	3976			HL	KUPS, UPT Terkait	
1.10.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	803			HL	KUPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Rimbak Sangiang, 2022

[illegible]

4. LPHD Simpang Tiga Sembelangan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pengayaan Jenis Asli	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	50 (32.000 Bibit)			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.2	Pembibitan	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450 (288.000 Batang) cv			APL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.3	Penanaman	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.4	Pemeliharaan	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.5	Pemanenan	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.6	Pengolahan	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.7	Pemasaran	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	UPT Terkait Pokja PPS, Mitra Potensial	
1.8	Agroforestry	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	450			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait Private sektor	
1.9	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan desa)	8	4325			HL	KUPS, NGO, UPT Terkait Private sektor	
1.10.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	8	803			HL	KUPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Simpang Tiga Sembelangan, 2022

[illegible]

LAMPIRAN 10. | Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon KPH Di Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sambas									
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Pembenihan dan Rehabilitasi Lahan	Wil. Kerja KPH (128.318)	8		btg	1,600	APL	KPH, Pemda, Masy	
KPH Wilayah Bengkayang									
1.1.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		8				HL, HPT, HP	KPH, BPHP; KTH, PEMDA; LSM	
1.2.	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan		8				HL, HPT, HP	KPH, BPDASHL; Pemda, Masy sekitar hutan	
KPH Wilayah Sanggau Barat									
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Gerakan Penanaman Pohon Serentak Kalimantan Barat, Penghijauan Lingkungan (Bantuan Bibit Gratis), Fasilitas Bibit untuk Pengembangan Hutan Milik Desa	Sekolah di Wilker KPH, Lahan Masy/ Desa, Ki-ka Jalan, Wilker KPH	8		Bibit	2,683	APL	KPH, IUP, Masy, Pemda, Mitra, Sekolah, BPDASHL	
1.2.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Wilker KPH	8		Unit	2	APL	KPH, Masy, Pemda, PBPH, Mitra	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL/ Pembuatan Demplot Agroforestry, Bantuan Bibit kepada Kelompok PS	Wilker KPH	8		Bibit	10,000	HL, HP	DLHK, KPH,KLHK, Masy, Pemda, Polri, TNI, Gakkum	
KPH Wilayah Sanggau Timur									
1.1.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Seluruh wilayah KPHP Unit IV	8		Batang	4,000		BPDASHL Kapuas	
1.2.	Penanaman Serentak	Sekolah - Sekolah di Kabupaten Sanggau	8					Dinas Pendidikan	
1.3.	Rehabilitasi pada Areal Kerja Luar Izin	HL Bengkawan dan HL Gunung Jelai	8		Ha	7,005			
1.4.	Pembinaan dan pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal yang berizin	Perhutanan Sosial	8		HKm	10		Pemegang izin	
KPH Wilayah Landak									
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Pembenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Wilayah Kerja KPH	8	11,4	Desa	5	APL	KPH, Desa, Pokmas, KTH	
1.2.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Pembenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Wilayah Kerja KPH	8	29,76			APL	KPH, Desa, Pokmas, KTH	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Gerakan Penanaman Pohon Serentak	Sekolah tingkat SD,SMP dan SMA di wilker KPH	8	8,22	Sekolah	246	APL	Bupati, KPH, Dinas Terkait Sekolah	
KPH Wilayah Mempawah									
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan / Pengembangan Perbenihan untuk RehabilitasiLahan	Desa anjunga dalam, Ansiap, Antibar, Bukit Batu, bumbun, kecurit, malikian, parigi, re'es, sejegi, sekabuk, semudun, suak barangan, sungai kunyit hulu, sungai rasau, toho ilir	8	294	Bibit	10,000	HP/HL	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.2.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan / Pengembangan Perbenihan untuk RehabilitasiLahan	Desa Amawang, anjungan dalam, ansiap, antibar, bukit batu, bumbun, kecurit, malikian, parigi, pasir, re'es, sejegi, sekabuk, semudun, suak barangan, sungai kunyit hulu, sungai rasau, toho ilir	8	33			HP/HL	KPH/Pemda /Masyarakat	
1.3.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL/ Pembuatan Demplot	"Desa Anjungan Dalam, bukit batu, malikian bumbun, pasir, rees, sejegi, sekabuk, semparong paret raden, semudun,sungai kunyit hulu, toho ilir"	7	33			HP	KPH/Pemda /Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sintang Utara									
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Pembenihan dan Rehabilitasi Lahan	Wilker KPH	8	269,264	Batang	10,000	APL	KPH, Pemda, Sekolah, dan Masyarakat	
1.2.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Gerakan Penanaman Pohon Serentak Kalimantan Barat, Penghijauan Lingkungan	Wilker KPH	8	269,264	Kegiatan	1	APL	KPH, Pemda, Sekolah, dan Masyarakat	
1.3.	Fasilitasi Pembangunan Hutan Pola Agroforestry	Wilker KPH	8	269,264	LDPH	10	HP/HL	KPH, LDPH	
KPH Wilayah Sintang Timur									
1.1.	Fasilitasi Legalitas Perhutanan Sosial/ Pendampingan dan Fasilitasi Legalitas Hutan Desa	Wilayah KPHP Unit XIV	8		Desa	1	HL, HP, HPT	Masyarakat	
1.2.	Fasilitasi Legalitas Perhutanan Sosial/Inisiasi Kerjasama Perhutanan Sosial dengan Stakeholder Adat	Wilayah KPHP Unit XIV	8		Desa	2	HL, HP, HPT	Masyarakat	
1.3.	Fasilitasi Legalitas Perhutanan Sosial/Fasilitasi Perhutanan Sosial (Skema HTR, HD atau Kerjasama Agroforestry, tergantung hasil keputusan inisiasi kerjasama dengan stakeholder adat)	HL-Blok Pemanfaatan dan HPT Blok Pemberdayaan	8	17,207,079			HL,HPT	Masyarakat	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.4.	Pemberdayaan Masyarakat/ Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Hutan Desa/Hutan Adat	KPHP Unit XV	8	24,336			HL,HP,HPT	Masyarakat	
1.5.	Pemberdayaan Masyarakat/Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan Hutan Desa Kegiatan Pembangunan Hutan DesaPemberdayaan Masyarakat/ Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Hutan Kemasyarakatan	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP,HPT	Masyarakat	
1.6.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP,HPT	KPH	
1.7.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP,HPT	Masyarakat	
1.8.	Pemberdayaan Masyarakat/ Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	blok pada Hutan Produksi	8				HP	KPH	
1.9.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	blok pada Hutan Produksi	8	207,079			HP	Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			25,000	25,000	25,000	25,000			
			15,000	15,000	15,000	15,000			
			15,000	15,000	15,000	15,000			
			10,000	10,000	10,000	10,000			
					20,000				
			10,000	10,000	10,000	10,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.10.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemanfaatan Kawasan	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP, HPT	Masyarakat	
1.11.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP, HPT	Masyarakat	
1.12.	Pemberdayaan Masyarakat/ Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	KPHP Unit XV	8	207,079			HL,HP, HPT	Masyarakat	
1.13.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/ Pembentukan Kelompok Tani Budidaya dan Pengolahan Rotan	Blok Pemanfaatan	8						
1.14.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Rotan	Blok Pemanfaatan	8						
1.15.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/Pembuatan Demplot Budidaya Rotan	Blok Pemanfaatan	8						

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			30,000	30,000	30,000	30,000			
			30,000	30,000	30,000	30,000			
			30,000	30,000	30,000	30,000			
				6,000	6,000	6,000			
					8,000	8,000	8,000		
					10,000	10,000	10,000		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.16.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan	Blok Pemanfaatan	8						
1.17.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Pasak Bumi/ Pembentukan Kelompok Pengolahan Pasak Bumi	Blok Pemanfaatan	8						
1.18.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Pasak Bumi/ Pelatihan Pengolahan Pasak Bumi	Blok Pemanfaatan	8						
1.19.	Pemberdayaan Masyarakat/ Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Budidaya HHBK Pasak Bumi/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan Pasak Bumi	Blok Pemanfaatan	8						
1.20.	Pendampingan dan Fasilitasi Legalitas Hutan Desa	Blok Pemanfaatan	8						

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						16,000	16,000	16,000	
			6,000	6,000					
				10,000	10,000				
					10,000	10,000			
				30,000	30,000				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.21.	Pemberdayaan Masyarakat/Kajian Sumber-sumber Penghidupan Berkelanjutan	Blok Pemanfaatan	8						
1.22.	Pengembangan Olahan Rotan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan	Desa Mentajoi (Kec. Serawai)	8				HPT	Masyarakat	
1.23.	Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/ Pembentukan Kelompok Tani Budidaya dan Pengolahan Rotan	Desa Mentajoi, Desa Nanga Bihe, Desa Mensuang, Desa Buntut Ponte, Desa Nanga Tekungai, Desa Merako Jaya	8				HPT		
1.24.	Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Rotan	Desa Mentajoi, Desa Nanga Bihe, Desa Mensuang, Desa Buntut Ponte, Desa Nanga Tekungai, Desa Merako Jaya	8				HPT		
1.25.	Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/Pembuatan Demplot Budidaya Rotan	Desa Mentajoi, Desa Nanga Bihe, Desa Mensuang, Desa Buntut Ponte, Desa Nanga Tekungai, Desa Merako Jaya	8				HPT		
1.26.	Pengembangan Budidaya HHBK Rotan/	Desa Mentajoi, Desa Nanga Bihe, Desa Mensuang, Desa Buntut Ponte, Desa Nanga Tekungai, Desa Merako Jaya	8				HPT		

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				10,000					
			15,000						
		12,000	12,000	12,000					
			26,000	26,000	26,000				
			10,000	10,000	10,000				
				16,000	16,000	16,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.27.	Pengolahan Komoditi Salak/ Pembentukan Kelompok Pengolahan Salak	Desa Mensuang	8				APL, HL, HPT		
1.28.	Pengolahan Komoditi Salak/ Pelatihan Pengolahan Salak	Desa Mensuang	8	207,079			APL, HL, HPT		
1.29.	Pengolahan Komoditi Salak/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan Salak	Desa Mensuang	8	207,079			APL, HL, HPT		
1.30.	Fasilitasi Legalitas Perhutanan Sosial/ Pendampingan dan Fasilitasi Legalitas Hutan Desa	Wilayah KPHP Unit XVII	8	207.079			HL<HPT		

KPH Wilayah Sekadau

1.1	Pengembangan Budidaya Tanaman Lamtoro	Wilayah Tertentu (9 petak)	7		Hektar	1500	HP	KPH, Masyarakat, Pemegang Ijin	
1.2	Pengembangan Investasi	Blok HPT Pemanfaatan, Blok HL Pemanfaatan, Blok HP Pemanfaatan HHK-HT	7	2,47	Kegiatan	2	HP	KPH, Masyarakat, Pemegang Ijin	
1.3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Kec Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap	8		Hektar	25	APL	KPH, Masyarakat, KTH, PS	
1.4	Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Ijin		8		Hektar	33000	HL	KPH, Pemegang Ijin	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.5	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di Dalam Areal yang Berijin	7 pemegang izin	8		izin	7	HP	KPH, Pemegang Ijin	
1.6	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL/ Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kec Kapuas dan Kec Meriau, Kec Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap	8		KTH/Jasling	3	HP, HL , dan APL	KPH, Masyarakat, KTH	
1.7	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu / Promosi wisata alam riam Tengaik	Blok HL - Pemanfaatan /Blok HPT - Pemanfaatan HHK-HT	8		Tahun	8	HP dan HL	KPH, Masyarakat, KTH	
1.8	Pemanfaatan Ekowisata air terjun Saka Dua	Blok HL - Pemanfaatan	8		Kelompok	1	HL	KPH, Masyarakat, KTH	
1.9	Pengembangan Budidaya Tanaman Kopi dan Kakao	Blok HP - Pemberdayaan Masyarakat / Wilayah Tertentu	8		Kelompok	3	HP	KPH, Masyarakat, KTH	
1,10	Pengembangan Budidaya Jamur Selangking dan Ikan Semah	Blok HL - Pemanfaatan / Wilayah Tertentu	8		Kelompok	2	HL	KPH, Masyarakat, KTH	

KPH Wilayah Melawi

1.1	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang	8		Kecamatan	13	APL	KPH, Masyarakat	
1.2	Penanaman Pohon Serentak untuk Kalbar Teduh Hijau dan Lestari	SD, SMP dan SMA Se Kabupaten Melawi	8		Sekolah		HP,APL	KPH, Pemkab Melawi	
1.3	Sosialisasi dan Gerakan Siswa Peduli Lingkungan melalui Aksi Menanam Pohon	SMA dan SMK	8			3.000	APL	KPH, Sekolah	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.4	Rehabilitasi Pada Areal Kerja di Luar Ijin	KPHP Unit 22 dan KPHL 13	8	700	Hektar/ Paket	20,341 Ha/ 5 Paket/ 27 kegiatan/ 700Ha	HP,HL	KPH dan BPDAS HL	
1.5	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Yang BerIjin	KPHP Unit 22 dan KPHL 13	3		Kegiatan/ Hektar	11 Kegiatan /17,394 Ha	HP,HL	KPH dan Pemegang ijin	
KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara									
1.1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		8				APL	KPH, Sekolah, Instansi Pemerintah	
KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan									
1.1	Operasional persemaian permanen	RPH mentebah	8		Unit	1		KPH	
1.2	Distribusi Bibit Untuk Kegiatan penanaman serentak Prov	SD, SPM di KH	8		Bibit	500	APL	Dinas Pendidikan, Dinas LH Kab.KH	
1.3	Pengembangan HHBK	Wilayah Kerja KPH	8		KTH	10			
KPH Wilayah Kayong									
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Pembenihan dan Rehabilitasi Lahan	Wilker KPH	8	72.000.000			HP/HL	KPH dan Masyarakat	
KPH Wilayah Ketapang Utara									
1.1	Pembuatan Demplot Durian	Desa Batudaya	8	0,25	Batang	200	APL	KPH, Desa	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			11.975.100	130.000	14.500.600	130.000	14.580.500	130,000	
			5.816.700						
	70.000								
		25.350	25,000	25,000	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000
			10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	26.974	43.376	43.376	43.376	43.376	43.376	43.376	43.376	43.376
	75.111								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Ketapang Selatan									
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Wilayah Kerja KPH Ketapang Selatan	8		Batang	12000	APL	KPH	
KPH Wilayah Kuburaya									
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara/ Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Rasau Jaya Umum	8		Bibit	15000			

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, RPHJP KPH di Kalimantan Barat

LAMPIRAN 11. | Rencana Kerja Bidang Peningkatan Cadangan Karbon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Kegiatan Penghijauan Lingkungan	Se-Kalbar	8	78,47	Sekolah	998	APL	DLHK,KPH, Pemkab, Sekolah	
1.2.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial	Se-Kalbar	8	52	Batang	20,000	HL/HP	LPHD Dampungan Earthqualizer	
1.3.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial		8	425	Batang	170,000	HL/HP	Dampungan GIZ	
1.4.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial		8	10	Batang	4,000		Dampungan CIFOR	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.5.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial		8	25	Batang	10,000	HA	Dampingan INTAN	
1.6.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial		8	45	Batang	18,000	HL/HP	Dampingan Riak Bumi / Jaringan Tengkawang	
1.7.	Rehabilitasi di Areal Perhutanan Sosial		8						
1.8.	Revegetasi Ekosistem Gambut	Se-Kalbar	8	630	Hektar		HL,HP	DLHK, BRGM, KLHK, Pemda, Masy	
1.9.	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Se-Kalbar	8	25	Kelompok		APL,HP	DLHK, BRGM, KLHK, Pemda, Masy	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, DLHK Prov. Kalimantan Barat

LAMPIRAN 12. | Rencana Kerja Bidang peningkatan Cadangan Karbon KHDTK Untan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1	Penanaman di areal kritis KHDTK	KHDTK Untan	8	36	Hektar	10	HL,HP	Masyarakat di 14 Desa	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU Fakultas Kehutanan Untan, 2022

[illegible]

LAMPIRAN 13. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi dan Permasalahan KK	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1	13,36	Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1.2.	Penegasan Batas (Patroli Pengecekan dan Pemeliharaan Batas TN-APL)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES & Masyarakat	
1.3.	1.3 patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1.4	Fasilitasi Kesepakatan Konservasi serta Penyusunan Rencana Kelompok dan RPM	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES & Masyarakat	
1.5	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES & Masyarakat	
1.6	Bantuan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan	1	HL/HP	BBTNBKDS, PEMDES & Masyarakat	
1.7	Penanaman Pengkayaan (Hutan rawa sekunder di Zona Tradisional 9,70 ha)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1.8	Pemeliharaan Pengkayaan (T+1 dan T+2)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	1		Kegiatan	2	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		17,750							17,750
		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
			9,400						
			15,750						
			53,350						
			585,002						
				254,753	254,753				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,9	Inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi dan Permasalahan KK	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	8	20,63	Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,10	Penegasan Batas (Patroli Pengecekan dan Pemeliharaan Batas TN-APL)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	8		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES & Masyarakat	
1,11	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	8		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,12	Penanaman Intensif (Semak belukar rawa di Zona Tradisional 4,76 ha)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	8		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,13	Pemeliharaan Tanaman Tanaman Intensif (T+1 dan T+2)	Desa Tintin Seligi Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	8		Kegiatan	2	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,14	Inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi dan Permasalahan KK	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11	2,45	Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,15	Inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi dan Permasalahan KK ekspedisi Batas Provinsi Kaltim)	Desa Bungan Jaya & Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		17,750							17,750
		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
			572,113						
				466,587	466,587				
		17,750							17,750
		53,250							53,250

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,16	Penegasan Batas (Patroli Pengecekan dan Pemeliharaan Batas TN-HL- termasuk lokasi hasil tata batas P4TKH)	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, KPH Kapuas Hulu Utara, PEMDES & Masyarakat	
1,17	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,18	Pembinaan dan Pengendalian Pemberian Akses Pemanfaatan pada Zona Tradisional (KN Meliau Maju)	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES, KN Meliau Maju	
1,19	Bantuan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Kemitraan Konservasi (KN Meliau Maju)	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, PEMDES, KN Meliau Maju	
1,20	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Desa Bungan Jaya & Desa Tanjung Lokang Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,21	Penanaman Pengkayaan (Hutan rawa sekunder di Zona Tradisional 1,34 ha)	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
			16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850
	20,00								
		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
			299,371						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,22	Pemeliharaan Pengkayaan (T+1 dan T+2)	Desa Melemba Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan	2	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,23	Inventarisasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi dan Permasalahan KK	Desa Bungan Jaya Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu	11	462,08	Kegiatan	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	
1,24	Penegasan Batas (Patroli Pengecekan dan Pemeliharaan Batas TN-HL)	Desa Bungan Jaya Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, KPH Kapuas Hulu Timur, PEMDES & Masyarakat	
1,25	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Desa Bungan Jaya Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu	11		Kegiatan/ Tahun	1	TN	BBTNBKDS, Masyarakat	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, Renstra, Dokumen RPE BBTNBKDS

LAMPIRAN 14. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Patroli perlindungan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan	Desa Nusa Poring	1		Kegiatan	34	TN	Masyarakat, TNI, POLRI	
1.2.	Patroli perlindungan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan	Desa Rantau Malam	1		Kegiatan	54	TN	Masyarakat, TNI, POLRI	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				236,224	236,224				
		17,750							17,750
	12,725	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
	12,725	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	38,600	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
	94,400	283,200	283,200	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Patroli perlindungan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan	Desa Meroboi	8	71.64	kegiatan	34	TN	Masyarakat, TNI, POLRI	
1.4	Patroli Perlindungan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan	Desa Belaban Ella	11	10	kegiatan	27	TN	Masyarakat, TNI, POLRI	
1.5	Pembentukan kelompok/ Penyusunan RPP RKT	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1.6	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas teknis kelompok	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	2	TN	Masyarakat, Narasumber terkait	
1.7	Pembibitan	"Desa Meroboi"	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1.8	Penanaman	"Desa Meroboi"	8	15.59	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1.9	Pemeliharaan tanaman tahun berjalan	"Desa Meroboi"	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,10	Pemantauan tahun berjalan	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,11	Pemeliharaan tahun ke 1	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,12	Pemantauan tahun ke 1	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,13	Pemeliharaan tahun ke 2	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,14	Pemantauan tahun ke 2	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,15	Penilaian Keberhasilan	Desa Meroboi	8	-	kegiatan	1	TN	Masyarakat	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,16	Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Zona Tradisional	Desa Meroboi	8	20	kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,17	Identifikasi para pihak dalam partisipasi Pemulihan Ekosistem	Desa Meroboi	8		kegiatan	1	TN	Masyarakat	
1,18	Penandatanganan PKS Kemitraan Konservasi dengan Skema Pemulihan Ekosistem	Desa Meroboi	8		kegiatan	1	TN	Pemda, Masyarakat	
1,19	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK	Desa Meroboi	8	3	kegiatan	17	TN	Masyarakat, Perguruan Tinggi	
1,20	Inventarisasi kawasan dengan nilai kehati tinggi dan Permasalahan Kawasan Konservasi	Desa Belaban Ella	11	8	kegiatan	9	TN	Perguruan Tinggi, Masyarakat	
1,21	Konsultasi publik review zonasi pengelolaan		8		kegiatan	1	TN	Pemda, Perguruan Tinggi, UPT KemenLHK, Masyarakat,	
1,22	Sosialisasi zonasi pengelolaan	Desa Meroboi	8		kegiatan	1	TN	Pemda, Masyarakat	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, Renstra, Dokumen RPE TNBBBBR

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		37,700							
	20,957	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750
	166,653								
		27,650							

LAMPIRAN 15. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan serta pengendalian karhutla	Desa Laman Satong	1	23.26	Kegiatan	2	TN	TN & ASRI	
1.2.	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	"Desa Sempurna"		5.4	Kegiatan	1	TN	TN & FFI	
1.3.	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan, Pengendalian karhutla, Inventarisasi dan verifikasi kehati	Desa Matan Jaya	2	279.67	Kegiatan, Ha	17	TN	"TN, PT. KUTj, Perguruan Tinggi"	
1.4	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Matan Jaya	7	0.91	Kegiatan	1	TN	TN	
1.5	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan serta pengendalian karhutla	Desa Simpang Tiga	7	57.97	Kegiatan	4	TN	TN, ASRI & YIARI	
1.6	Pengendalian karhutla	Desa Pangkalan Telok	7	15.42	Kegiatan	1	TN	TN	
1.7	Pengendalian karhutla	Desa Matan Jaya	8	69.52	Ha	69.52	TN	TN, mitra	
1.8	Revegetasi, perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan, serta pengendalian kebakaran hutan	Desa Simpang Tiga	10	56.88	Kegiatan	6	TN	TN, FFI, YIARI	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-
	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-
	181,350	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-
	-	27,000	27,000	-	-	-	-	-	-
	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-
	-	18,000	18,000	18,000	10,000				
	-	18,000	18,000	18,000					

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.9	Penanaman intensif/ Pengkayaan	"Desa Matan Jaya"	7	1.04	Ha	1	TN	"TN, PT. KUTj"	
1.10	Penanaman intensif/ Pengkayaan	Desa Pangkalan Telok	8	17.62	Ha	18	TN	TN, PT. LPT	
1.11	Penanaman intensif/ Pengkayaan	"Desa Matan Jaya"	8	25.17	Ha	25	TN	"TN, PT. KUTj"	
1.12	Penanaman intensif/ Pengkayaan	"Desa Matan Jaya"	8	1	Ha	1	TN	"TN, PT. KUTj"	
1.13	Pemulihan ekosistem	"Desa Laman Satong"	8	173.79	Ha	174	TN	TN, ASRI	
1.14	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Matan Jaya	1	0.09	Kegiatan	1	TN	TN	
1.15	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Matan Jaya	1	0.01	Kegiatan	1	TN	TN	
1.16	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Matan Jaya	1	0,33	Kegiatan	1	TN	TN	
1.17	Inventarisasi dan verifikasi kehati	Desa Simpang Tiga	8	3,48	Kegiatan	1	TN	TN	
1.18	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Riam Berasap	8	62,44	Kegiatan	1	TN	TN, FFI	
1.19	Perlindungan, pengamanan dan penjagaan kawasan	Desa Sempurna		2,57	Kegiatan	1	TN	TN	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	16,120	-	-	-	-	-	-	-	-
	190,185	-	-	-	-	-	-	-	-
	390,135	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	15,500	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	387,500	387,500	387,500	387,500	387,500	387,500	387,500
	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-
	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-
	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-
	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	27,000	27,000	-	-	-	-	-	-
	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.20	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,89	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.21	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,0014	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.22	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	2,75	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.23	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	"Desa Matan Jaya"	11	0,03	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.24	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	"Desa Matan Jaya"	11	0,02	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.25	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,001	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.26	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,02	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.27	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,19	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.28	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,08	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.29	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,17	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.30	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,79	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.31	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,06	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.32	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Matan Jaya	11	0,01	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	
1.33	Mitigasi konflik manusia dan satwa liar	Desa Sempurna	11	0,03	Kegiatan	1	TN	TN, Mitra	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, Renstra, Dokumen RPE TNGP

LAMPIRAN 16. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDA Kalimantan Barat)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.2.	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.3.	Patroli Ground Chek Hotspot	Desa Mandor	1		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.4	Pembentukan Kelompok Desa Simpang Kasturi	Desa Simpang Kasturi	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Simpang Kasturi	Desa Simpang Kasturi	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-
	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	12,025	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220
	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420
	17,000								
	30,200								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.6	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Simpang Kasturi	Desa Simpang Kasturi	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.7	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Mandor	5		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.8	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Desa Mandor	5		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1.9	Patroli Ground Chek Hotspot	Desa Mandor	5		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,10	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Mandor	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,11	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa MandorDesa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	1		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,12	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Desa MandorDesa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,13	Patroli Ground Chek Hotspot	Desa MandorDesa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,14	Pembentukan Kelompok Desa Kramat Jaya	Desa Kramat Jaya	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	50,000								
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220
		5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220
	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710
	21,500								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kramat	Desa Keramat Jaya	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,16	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Keramat Jaya	Desa Keramat Jaya	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,17	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,18	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,19	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,20	Patroli Ground Chek Hotspot	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,21	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	10		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,22	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	10		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,23	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,24	Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,25	Patroli Ground Chek Hotspot	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,26	Pembentukan Kelompok Desa Engkangin	Desa Engkangin	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,27	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Engkangin	Desa Engkangin	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,28	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Engkangin	Desa Engkangin	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,29	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,30	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,31	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,32	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	2		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,33	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	5		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,34	Pembentukan Kelompok Desa Nibung	Desa Nibung	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Nibung	Desa Nibung	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,36	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Nibung	Desa Nibung	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,37	Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam di TWA. Gunung Melintang	Kab. Sambas	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,38	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,39	Identifikasi dan Verifikasi Wilayah Kemitraan konservasi di TWA. Gunung Melintang	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,40	Pembentukan Kelompok Desa Santaban	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Santaban	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,42	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Santaban	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,43	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab.Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,44	Pembentukan Kelompok Desa Malek	Desa Malek	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,45	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Malek	Desa Malek	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	23,050								
	17,000								
	30,200								
	50,000								
		12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
				17,000					
				30,200					

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,46	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Malek	Desa Malek	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,47	Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam di TWA. Sungai Liku	Kab.Sambas	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,48	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab.Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,49	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab.Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,50	Renovasi Sarana Prasarana Wisata Alam di TWA. Tanjung Belimbing	Pontianak	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar	
1,51	Pembangunan Sarpras Wisata di TWA. Tanjung Belimbing	Pontianak	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar	
1,52	Pengelolaan Sanctuary Penyu	Desa Sebusus	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,53	Pembentukan Kelompok Desa Sebusus	Desa Sebusus	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				50,000					
		35,000							
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
	251,000								
		507,275							
	37,200	31,930	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
					17,000				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,54	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebusus	Desa Sebusus	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,55	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Sebusus	Desa Sebusus	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,56	Intensifikasi Jasling dan Wisata Alam di TWA. Tanjung Belimbing	Kab. Sambas	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,57	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,58	Pembersihan Jalur Wisata di TWA. Tanjung Belimbing	Kab. Sambas	11		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,59	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	11		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,60	Pemeliharaan Tanaman Lanjutan di Demplot Pemulihan Ekosistem CA Mandor	Desa Mandor	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					30,200				
	50,000				50,000				
		35,000							
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		19,800							
		12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
	85,000	87,500							

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,61	Pemulihan Ekosistem dengan Mekanisme Alami di CA. Mandor seluas 150 Ha	Desa Mandor	8		Kegiatan	8	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,62	Pemulihan Ekosistem dengan Mekanisme Alami di CA. Muara Kendawangan seluas 859 Ha	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	2		Kegiatan	8	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,63	Pembangunan Sekat Kanal	Pontianak	10		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,64	Pemeliharaan Sekat Kanal	Pontianak	10		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,65	Kajian Pemulihan Ekosistem Bekas Perkebunan Sawit	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,66	Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,67	Pemulihan Ekosistem bersama Masyarakat	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,68	Pemeliharaan Tanaman dalam rangka Pemulihan Ekosistem	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	60,300								
	97,840								
			250,000						
				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		34,620							
		35,000							
				2,580,000					
					250,000	250,000			

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,69	Pemulihan Ekosistem bersama Masyarakat (15 Ha)	Desa Sebusus	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,70	Pemeliharaan Tanaman dalam rangka Pemulihan Ekosistem (15 Ha)	Desa Sebusus	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,71	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	12		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,72	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	12		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,73	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan bersama MPA	Kab. Sambas	12		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,74	Patroli Rutin di KPHK Pasy - Mandor dan MMP	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,75	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Desa Mandor	1		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,76	Inventarisasi Pemasalahan CA. Mandor	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar	
1,77	Pelepasliaran Satwa	Desa Mandor	5		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,78	Patroli Rutin di KPHK Pasy - Mandor dan MMP	Desa Mandor	5		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,79	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Desa Mandor	5		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,80	Patroli Rutin di KPHK Pasy - Mandor dan MMP	Desa Mandor	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,81	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Desa Mandor	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,82	Patroli Rutin di KPHK CA. Muara Kendawangan dan MMP	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	1		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,83	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Desa Kendawangan dan Desa Pembedilan	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,84	Patroli Rutin di KPHK CA. Muara Kendawangan dan MMP	Desa Kendawangan	2		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,85	Monitoring Populasi Orangutan di CA. Mura Kendawangan 147.613 Ha	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,86	Monitoring Populasi Rusa di CA. Mura Kendawangan 147.613 Ha	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,87	Patroli Rutin di KPHK CA. Muara Kendawangan dan MMP	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,88	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,89	Patroli Rutin di KPHK CA. Muara Kendawangan dan MMP	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	10		Kegiatan	2	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,90	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,91	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, TNI, POLRI dan Masyarakat	
1,92	Inventarisasi Permasalahan Kawasan Konservasi di CA. Gunung Nyiut seluas 91.775,1 Ha	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,93	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,94	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	8		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,95	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	11		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,96	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,97	Patroli Rutin di KPHK Nyiut dan MMP	Kab. Sambas	2		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,98	Inventarisasi dan Verifikasi KEHATI di TWA. Gunung Melintang	Kab. Sambas	2		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,99	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	5		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,100	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,101	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,102	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,103	Inventarisasi dan Verifikasi KEHATI di TWA. Sungai Liku	Kab. Sambas	12		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,104	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	12		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,105	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,106	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	8		Kegiatan	2	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,107	Patroli Rutin di KPHK Melintang dan MMP	Kab. Sambas	11		Kegiatan	11	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,108	Inventarisasi dan Verifikasi KEHATI di TWA. Tanjung Belimbing	Kab. Sambas	12		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			35,000						
	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
			35,000						
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
		24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050
		120,250	120,250	120,250	120,250	120,250	120,250	120,250	120,250
			35,000						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,109	Rekonstruksi Batas CA. Mandor sepanjang 25,35 KM / seluas 2.879,14 Ha	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, BPKH Wil III Pontianak, PEMDA dan Masyarakat	
1,110	Sosialisasi RPJP/Blok CA. Mandor	Desa Mandor	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, PEMDA dan Masyarakat	
1,111	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Pontianak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, GAKKUMLHK dan POLDA Kalbar	
1,112	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Pontianak	1		Unit	2	CA	BKSDA Kalbar	
1,113	Orientasi Batas CA. Muara Kendawangan	Desa Kendawangan, Desa Pembedilan, Desa Seriam	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,114	Pembangunan Resort Pembedilan	Pontianak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, GAKKUMLHK dan POLDA Kalbar	
1,115	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Pontianak	1		Unit	2	CA	BKSDA Kalbar	
1,116	Reviu Blok CA. Gunung Nyiut	Kab. Bengkayang dan Kab. Landak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, PEMDA dan Masyarakat	
1,117	Peningkatan Fungsi Kantor Pengelola Pusat Informasi TSL di Serimbu	Pontianak	1		Kegiatan	1	CA	BKSDA Kalbar, GAKKUMLHK dan POLDA Kalbar	

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	75,869								
		64,200							
	82,959								
			70,000						
		52,588							
				500,000					
			70,000						
		45,700							
	251,260								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,118	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Pontianak	1		Unit	2	CA	BKSDA Kalbar	
1,119	Orientasi Batas TWA. Gunung Melintang	Kab. Sambas	1		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,120	Pembahasan dan Penandatanganan Hasil Identifikasi Wilayah Kemitraan Konservasi di TWA. Gunung Melintang	Desa Santaban	8		Kegiatan	1	TWA	BKSDA Kalbar dan Masyarakat	
1,121	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Pontianak	1		Unit	2	TWA	BKSDA Kalbar	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, Renstra, Dokumen RPE BKSDA

LAMPIRAN 17. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Desa Kubu	11	121			HPT	DLHK Prov. Kalbar	
1.2	Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Desa Kubu	11	1,104			HPT	DLHK Prov. Kalbar	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023 BPDAS Kapuas

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			70,000						
		50,975							
	30,700								
			70,000						

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22169	57083	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 18. | Rencana Kerja Bidang Konservasi BPSKL Wilayah Kalimantan

1. LPHD Belaban Raya

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Perlindungan dan Pengamanan	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	3383			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.2	Patroli Kebakaran	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	3,383			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan. sektor,	
1.3	Patroli Perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu, pencurian flora/ fauna	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	3,383			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.4	Pembuatan papan informasi dan larangan dan himbauan pada areal Hutan Desa	Desa Sungai Melayu (Hutan Desa)	1	3,383			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	

Sumber: RKPS LPHD Belaban Raya, 2022

[illegible]

2. LPHD Bukit Banjar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Perlindungan dan Pengamanan	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	11	803			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.2	Patroli Kebakaran	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	11	803			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.3	Patroli Perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu, pencurian flora/ fauna	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	11	803			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	
1.4	Pembuatan papan informasi dan larangan pada areal Hutan Desa	Desa Tanjung Medan (Hutan Desa)	11	803			HL	Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait dan Para Pihak yang relevan.	

Sumber: RKPS LPHD Bukit Banjar, 2022

[illegible]

3. LPHD Rimbak Sangiang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Perlindungan dan Pengamanan	Desa Nanga Tayap (Hutan Desa)	11	3976			HL	KLHK, Pemkab, NGO, Private sektor, Pokja PPS, UPT Terkait	

Sumber: RKPS LPHD Rimbak Sangiang, 2022

4. LPHD Simpang Tiga Sembelangan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Perlindungan dan Pengamanan	Desa Simpang Tiga Sembelangan (Hutan Desa)	11	4325			HL	UPT Terkait, Pokja PPS, Mitra Potensial	

Sumber: RKPS LPHD Simpang Tiga Sembelangan, 2022

LAMPIRAN 19. | Rencana Kerja Bidang Konservasi KPH Di Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Bengkayang									
1.1	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			3,383			HL	KPH, BPHP; KTH, Pemda; LSM	
1.2	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan			3,383			HL	KPH, BPDASHL; Pemda, Masy Sekitar Hutan	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-	-	35,000	40,250	46,288	53,231	61,216	70,398	80,957
	-	-	96,000	110,400	126,960	146,004	167,905	193,090	222,054

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sanggau Barat									
1.1	Kajian Baseline Keanekaragaman Hayati/Potensi Karbon/Desain Tapak di Kawasan Hutan Lindung Wilayah Kerja UPT KPH Wilayah Sanggau Barat (HL Belungai/HL Tiong Kandang/Suruh Tembawang/ Pala Pasang/ Bungkar)	Unit III dan V	11		Kelompok Hutan	1	HL	KPH, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	
KPH Wilayah Sanggau Timur									
1.1	Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Seluruh wilayah KPHP Unit IV	11	266,183				Pemkab, Kecamatan, Desa, TNI POLRI, Manggala Agni, Masyarakat	
KPH Wilayah Landak									
1.1	Pengembangan Tanaman Endemik/ Penanaman Pohon Tengawang	PT KSP, Yayasan Rumah Pelangi	11	3	Batang	225	HP	KPH, PBPH, Yayasan	
1.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Pengembangan Pemanfaatan HHBK	Desa Agak, Desa Pahauman, Desa Keranji Mancal	11				HP/HL	KPH dan LPHD	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sintang Utara									
1.1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha	Wilker KPH	11	269,264	kegiatan	1	HP/HL	KPH, Pemda dan Masyarakat	
1.2	Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH/RPHJPd	Wilker KPH	11	269,264	unit	3	HP/HL	KPH, KLHK, DLHK, Pemda	
1.3	Operasionalisasi KPH/Sarpras KPH	Wilker KPH	11	269,264	kegiatan	1	HP/HL	KPH	
KPH Wilayah Sintang Timur									
1.1	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di /Kawasan Hutan (HCVF) Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Wilayah Kelola KPHP Unit XIV KPH Sintang Timur	11		kegiatan	1		KPH	
1.2	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Hutan (HCVF)/ Penyuluhan Konservasi	Desa-desa di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHP Unit XIV	11		Desa	41		KPH	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Delineasi Areal Perlindungan Setempat/ Delineasi Areal Sempadan Sungai	Blok Inti dan Blok Perlindungan	11		kegiatan	1		KPH	
1.4	Delineasi Areal Perlindungan Setempat/ Inventarisasi Sumber-sumber Mata Air	Blok Inti dan Blok Perlindungan	11		kegiatan	1		KPH	
1.5	Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	KPHP Unit XV	11	207,079				KPH	
1.6	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Delineasi Areal Sempadan Sungai	Blok Inti	11				HL		
1.7	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Inventarisasi Sumber-sumber Mata Air	Blok Inti	11				HL		
1.8	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Hutan (HCVF)/ Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi:	Blok Inti	11				HL, HPT		
1.9	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Hutan (HCVF)/ Penyuluhan Konservasi	Desa-desa di KPHL Unit XVI Dalam dan Sekitar Wilayah	11				HL, HPT		

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.10	Deliniasi Areal Perlindungan Setempat/ Delineasi Areal Sempadan Sungai	Blok Inti dan Blok Perlindungan					HL, HPT		
1.11	Deliniasi Areal Perlindungan Setempat/ Inventarisasi Sumber- sumber Mata Air	Blok Inti dan Blok Perlindungan					HL, HPT		
1.12	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Hutan (HCVF)/ Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	Desa Nanga Bihe, Desa Baras Nabun, Desa Rantau Malam, Desa Mensuang, Desa Menakon, Desa Buntut Purun, Desa Nanga Pahangan, Desa Nanga Mentomoi, Desa Riam Sabon, Desa Buntut Sabon, Desa Sungai Tambun					HL, HPT, APL		
1.13	Upaya Konservasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Hutan (HCVF)/ Penyuluhan Konservasi	Desa-desa di Dalam dan Sekitar Wilayah KPHP Unit XVII					HL, HPT,HP		

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sekadau									
1.1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan KPH Kewenangan Provinsi/ Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kec Nanga Taman	11			1			
1.2	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola / Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan,		11						
1.3	HHBK dan potensi konflik	Kec. Nanga Taman, Nanga Mahap, Meliau	11		Kecamatan	3	HL dan HP	KPH, Masyarakat, Pemegang Ijin	
1.4	Penataan Hutan / Penataan dan Penandaan Batas Blok dan Petak	Kec. Nanga Taman, Nanga Mahap, Kapuas dan Meliau	11		km	76	HL dan HP	KPH, Masyarakat, PS	
1.5	Pengembangan Data Base	Kantor KPHL Sekadau Unit XII	11		paket	6		KPH, Masyarakat, PS	
1.6	Sistem Informasi	Kantor KPHL Sekadau Unit XII	11		paket	1		KPH, Masyarakat, PS	
1.7	Penyiapan Baseline Database	Kantor KPHL Sekadau Unit XII	11		paket	2		KPH, Masyarakat, PS	

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	61,437								
			80,000		80,000		80,000		
				140,000		98,000	84,000		
			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
			15,000						
			140,000	50,000					

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Melawi									
1.1	Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	"KPHP 22, KPHP 23, KPHP 24 dan KPHL 13"		333.47	Bulan	12	HP, HL	KPH, Manggala Agni, TNI, POLRI, Pemkab	
KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan									
1.1	Budidaya Keratom	Selimbau, Jongkong	11	2				KTH	
1.2	Budidaya Jerenang	Selimbau	11	1				KTH	
1.3	Pelatiham Masyarakat Peduli Api (MPA)	Desa - Desa Dalam Wilayah Kerja KPH	11					KPH, BRIGDAL KARHUTLA, BPBD, MPA, Manggala Akni Semitau	
1.4	Pengutanan dan pendampingan LPHD/KTH	Wil. Kerja KPH	11					KPH Pemegang ijin Persetujuan PS	
1.5	Penyelenggaraan Karbon Hutan	Kec. Bunut Hilir dan Kec. Bunut Hulu	11	18,498					
KPH Wilayah Kayong									
1.1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/ atau Jasa Lingkungan	Dusun Besar, Dusun Kecil, Pemangkat, Satai Lestari	11	197,676			HP/HL	KPH, Pemda dan Masyarakat	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Ketapang Utara									
1.1	Perlindungan Hutan di HP dan HL	Seluruh Wilayah Kerja KPH Ketapang Utara	11		OH	3,400	HP, HL	KPH	
KPH Wilayah Kuburaya									
1.1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi/ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Karhutla	Desa Kubu, Desa Sepuk Laut, Desa Permata, Desa Betuah, Desa Sui Bemban	11	29,595			HL	DLHK Prov. Kalbar	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, RPHJP KPH di Kalimantan Barat

LAMPIRAN 20. | Rencana Kerja Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Se - Kalbar	11	13,36	Dokumen	1	HL HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	
1.2.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Se - Kalbar	11		Dokumen	1	HL HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	

[illegible][illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Se - Kalbar	11		Dokumen	1	HL HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	
1.4	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Se - Kalbar	11		Dokumen	1	HL HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, DLHK Prov. Kalimantan Barat

LAMPIRAN 21. | Rencana Kerja Bidang Konservasi pada KHDTK Untan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Rekonstruksi batas KHDTK (80 km)	KHDTK Untan	1	19,622	Kegiatan	1	HL HP	Masyarakat di 14 Desa	
1.2.	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	KHDTK Untan	11	19,622	Kegiatan/ Tahun	1	HL HP	Masyarakat di 14 Desa	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU Fakultas Kehutanan Untan, 2022

LAMPIRAN 22. | Kegiatan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut TRGD

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Pembangunan Sekat Kanal	Kabupaten Sambas	9	25 Unit			APL & HP	Swakelola ke Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	138,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	654,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	400,000	400,000							
	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2,254,633	2,254,633	2,254,633						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.2.	Pembuatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara	10	30 Ha			HL HP	Swakelola ke Masyarakat	
1.3.	Bantuan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayong Utara	10	25 Kelompok			APL & HP	Swakelola ke Masyarakat	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023 TRGD Kalimantan Barat

LAMPIRAN 23. | Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut	KHG Sungai Punggur Besar – Sungai Kapuas	10		6	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung	10		13	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Durian – Sungai Kualan	10		13	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan	10		20	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	252,095	252,095	252,095						
	85,000	85,000	85,000						

Anggaran (Rp x 1.000)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	360,000								
	2,177,236								
		1,000,000							
		1,200,000							

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
		KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu	10		26	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kapuas – Sungai Mandor	10		21	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti	10		15	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung	10		17	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Durian – Sungai Kualan	10		9	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kapuas – Sungai Ambawang	10		5	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
1.2	Revegetasi/ Penanaman Kembali gambut bekas terbakar		10	33	33	Ha	HP	KPH	
1.3	Revitalisasi mata pencaharian masyarakat di lahan gambut	KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung	10		20	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kapuas– Sungai Mandor	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1,560,000							
			945,000						
			750,000						
			935,000						
			500,000						
			230,000						
		693,000							
	1,968,000								
	255,000								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
		KHG Sungai Kapuas-Sungai Ambawang	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Durian-Sungai Kualan	10		1	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Mempawah-Sungai Peniti	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Durian – Sungai Kualan	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kepulu – Sungai Pesaguan	10		1	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Pawan – Sungai Kepulu	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Kapuas – Sungai Mandor	10		3	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Mempawah – Sungai Peniti	10		2	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Sambas Besar – Sungai Seiyung	10		8	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
		KHG Sungai Durian – Sungai Kualan	10		1	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	255,000								
	85,000								
	255,000								
		600,000							
		200,000							
		600,000							
			300,000						
			200,000						
			800,000						
			100,000						

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
		KHG Sungai Kapuas – Sungai Ambawang	10		1	Unit	APL	Kelompok Masyarakat	
1.4	Operasi Pembasahan	Provinsi Kalimantan Barat	10		1	Prov	HL, HP, APL	Pokmas, MPA, KPH	
1.5	Pemeliharaan dan Perbaikan IPG	Provinsi Kalimantan Barat	10		1	Prov	HL, HP, APL	Pokmas, MPA, KPH	
1.6	Fasilitasi Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	10		1	Prov	HL, HP, APL	TRGMD	
1.7	Koordinasi dan Konsolidasi restorasi gambut	Provinsi Kalimantan Barat	10		1	Prov	HL, HP, APL	TRGMD	
1.8	Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	10		1	Prov	HL, HP, APL	Seluruh pihak	

LAMPIRAN 24. | Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Inventarisasi KHG		9	25 Unit	KHG		APL, HL, HP	KPH	
1.2.	Perbaikan tata air KHG		9		KHG		APL, HL, HP	KPH	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			100,000						
	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	550,000	550,000	550,000						
	250,000	250,000	250,000						
	200,000	200,000	200,000						
	300,000	800,000	1,000,000						

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2,254,633	2,254,633	2,254,633						
	252,095	252,095	252,095						

LAMPIRAN 25. | Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut KPH Di Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Kuburaya									
1.1.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		10				APL	KPH, BPHP; KTH, Pemda; LSM	
1.2.	Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan		10				APL	KPH, BPDASHL; Pemda, Masy sekitar hutan	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, RPHJP KPH di Kalimantan Barat

LAMPIRAN 26. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah III Pontianak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat			Layanan	1			
1.2.	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat			Layanan	1			

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			49,000	56,350	64,803	74,523	85,701	98,557	113,340
			67,000	77,050	88,608	101,899	117,183	134,761	154,975

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	15,850	50,000	50,000	102,500	102,500	87,500	87,500	78,500	78,500
	20,450	50,000	50,000	102,500	102,500	87,500	87,500	78,500	78,500

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Kabupaten Landak, Sanggau, Kayong Utara, Singkawang dan Melawi			Re-komen-dasi Kebijakan	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat, KPH Kabupaten Landak, Kayong Utara, Singkawang dan Melawi serta Masyarakat	
1.4	Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu			Re-komen-dasi Kebijakan	1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat, KPH Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu serta Masyarakat	
1.5	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	Kabupaten Kubu Raya			Klaster	4		KPH Kabupaten Kubu Raya dan Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	6,633,827		8,541,289	17,657,092	11,719,229	24,365,432			
	5,957,724								
	279,128	327,925	365,200	365,200	187,100	300,248	279,128	327,925	365,200

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1,6	Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	Kabupaten Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Sanggau			Layanan	1		KPH Kabupaten Kayong Utara, Bengkayang, Mempawah dan Sanggau serta Masyarakat	
1,7	Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	PT. Putra Alam Lestari			Badan Usaha	1			
1,8	Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	Seluruh wilayah provinsi Kalimantan Barat			Layanan	1			

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023 BPKHTL Wilayah III Pontianak

LAMPIRAN 27. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai Pelestarian Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII Pontianak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Sosialisasi Sertifikasi PHL		1		Keg	9			
1.2	Monev Penerapan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahan Lindung Berdasarkan IJLH		3		OT	225			

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	167,000	87,345	124,530	140,601	167,000	87,345,000	124,530	140,601	167,000
		60,000	60,000	119,157	80,327	60,000	60,000	119,157	80,327
		720,000	509,600	299,200	720,000	509,600	299,200	509,600	299,200

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Monev Penerapan Kebijakan Pelarangan Penebangan Hutan Primer Masuk Arahkan Produksi Berdasarkan IJLH		3		OT	270			
1.4	Monev PBPH		4		OT	270		PBPH-HA dan HT yang ada RKT	
1.5	Monev PBPH		4		OT	225		PBPH-HT yang ada RKT	
1.6	Monev PBPH		4		OT	225		PBPH-HT yang ada RKT	
1.7	Monev PBPH		4		OT	225		PBPH-HT yang ada RKT	
1.8	Sosialisasi Hasil Kajian dan Penelitian Pembangunan HT		4		Keg	9		PBPH-HT yang ada RKT	
1.9	Bintek Percepatan Pengembangan HTE pada PBPH		4		Keg	9			
1.10	Bintek Fasilitas Penyusunan RPHJP dan RPHJPD,		4		Keg	8			
1.11	Workshop penilaian KPH Efektif		4		Keg	8			

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.12	Sosialisasi Pengembangan HTE di KPH		4		Keg	8			
1.13	Monev Pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE)		4		OT	78			
1.14	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop Tentang Penerapan SILIN		5 & 6		Keg	9		All PBPH-HA	
1.15	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SILIN pada PBPH		5 & 6		OT	135		All PBPH-HA	
1.16	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop Tentang Penerapan RIL-C		5 & 6		Keg	9		All PBPH-HA	
1.17	Monitoring dan Evaluasi Penerapan RIL-C pada PBPH		5 & 6		OT	90		All PBPH-HA	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU BPHL Wilayah VIII Pontianak

[illegible]

LAMPIRAN 28. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Patroli Mandiri	Provinsi Kalimantan Barat	1&2		Desa	150		Manggala Agni	
1.2	Patroli Terpadu	Provinsi Kalimantan Barat	1&2					TNI, POLRI, MPA	
1.3	Patroli Batas Negeri (Wilayah Perbatasan)	Provinsi Kalimantan Barat	1&2		Tim	14		Manggala Agni	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023 BPPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan

LAMPIRAN 29. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1	Verifikasi Pengaduan Lapangan perihal dugaan Pencemaran air oleh PT Persut	Natai Batu, Kelurahan Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang	3	1,500	m2	1	APL	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang 2. Pengadu Saudara Sandi	
1.2	Puldasi Dugaan adanya kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh masyarakat	Randau Jungkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang	1	-	-	1	Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. KPH Wilayah Ketapang Utara	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	622,500	622,500	622,500	622,500	622,500	622,500	622,500	622,500	622,500
	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500	126,500
	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Pengumpu- lan Data dan InformasiAn- cam an dan Gangguan Kawasan Hutan dan Hasil hutan (Rp 30.040.000)								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.3	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan pertambangan zircon yang dilakukan oleh PT. Alamanda di areal konsesi PT. Mayangkara Tanaman Industri	Kecamatan Jelai, Kabupaten Ketapang	3	±15		1	Hutan Produksi	1. Pemerintah Kabupaten Ketapang 2. Manajemen PT. Mayangkara Tanaman Industri	
1.4	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan illegal logging yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung Gunung Biwa	Desa Sungai Ringin, Kab. Sekadau	11	-	-	1	Kawasan Hutan Lindung G. Biwa Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap	1. UPT KPH Wilayah Sekadau 2. Manajemen PT. Wana Subur Persada	
1.5	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan penambangan batuan dan tanah urug tanpa izin di bidang lingkungan	Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang	1	-	-	1	APL	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang	
1.6	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kebakaran hutan/lahan di areal konsesi PT MSL yang dilakukan oleh masyarakat (Harun cs)	Pontianak, Kalimantan Barat	3	±15	Ha	1	Hutan Produksi	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. Manajemen PT Muara Sungai Landak	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.7	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan perkebunan di areal kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Pumpai dsk.	Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang	1	± 222.1	Ha	1	Hutan Produksi Terbatas Pumpai	1. UPT KPH Ketapang Utara 2. Manajemen PT. Agrajaya Baktitama	
1.8	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan illegal logging dan usaha pengolahan dan penumpukan kayu illegal	Kecamatan Sokan Desan Melana, Kecamatan Pinoh Selatan Desa Mandau Baru, Kecamatan Sayan Desa Nanga Raku Kabupaten Melawi	1	± 100	Ha	1	Kawasan HL.Bt. Mancung. HP. Ng. Pinoh – S. Sokan. HPT. Bt. Penitin K	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. UPT KPH Melawi 3. Gakkum Seksi Wilayah 3 Pontianak	
1.9	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya peredaran hasil hutan secara illegal	Desa Muara Jekak, Desa Petai Patah, kecamatan Sandai	1	-	-	1	Hutan Produksi	UPT KPH Ketapang Utara	
1.10	Pengumpulan Data dan Informasi (Puldasi) dugaan adanya kegiatan illegal logging oleh HPH PT Dudja	Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten	3	-	-	1	Hutan Produksi	Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah Kalbar	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Peng- umpulan Data dan Informasi il- legal logging (Rp								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.11	Verifikasi Pengaduan dugaan kegiatan perambahan PT. HASKA Andalan Kalbar dan PT. Simpuluh Berkah Sentosa (SBS)	Dusun Sungai Tengah, desa Sebusubus, Kecamatan Sajingan Besar	3	149.6	Ha	1	Taman Wisata Alam (TWA) Asuansang	1. Balai KSDA Kalimantan Barat 2. Resort Konservasi Wilayah (RKW) Sajingan Besar	
1.12	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan perambahan di TWA Banning oleh Masyarakat	TWA Banning, Kecamatan Sintang, Desa	11	20m x 40m (800 M2)	m2	1	Taman Wisata Alam (TWA) Banning	Balai KSDA Kalimantan Barat	
1.13	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan illegal logging oleh masyarakat	Jalan Lintas Selatan Nomor 22B, Keluarahan Kedamin Hilir Kecamatan Putusibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	UPT KPH Kapuas Hulu Timur	
1.14	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan perambahan yang dilakukan oleh Masyarakat	Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor-B, Kabupaten Landak	1	400	Ha	1	kawasan Hutan Produksi (HP) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1. Direktorat Pengukuhan dan Direktorat Pelepasan Kawasan Hutan KLHK 2. Universitas Tanjung Pura selaku Pihak Pengelolaan KHDTK 3. Dinas Tata Ruang Kabupaten Landak 4. Dinas Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Non Perusa- haan (Rp 15.200.000)								
	DIPA Peng- umpulan Data dan Informasi Perambahan Kawasan Hutan (Rp 23.960.000)								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.15	Operasi dugaan pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Kabupaten Bengkayang oleh masyarakat	Hutan Lindung Gunung Bawang, Dusun Lumar Desa Tiga Berkat, Gunung Serantak Desa Tiga Berkat, Dusun Molo Desa Seren Selimbau, RT Sekayok Kelurahan Sebalu, Desa Saka Taru dan Desa Lembah Bawang	11	1,100	Ha	1	kawasan HP Sungai Behe	UPT KPH Wilayah Bengkayang	
1.16	Pengumpulan Data dan Informasi dugaan adanya kegiatan pengolahan hasil hutan oleh industri primer CV Sari Pasifik	JL. Adi Sucipto Gang Sagu KM.12 RT 2/RW 3 No.99, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya	11	-		1	-	BPHP Wilayah Kalbar	
1.17	Operasi dugaan adanya kegiatan perdagangan sisik trenggiling yang terjadi di Kabupaten Melawi dalam Hutan PT Asia Tani Persada yang dilakukan oleh masyarakat	Jalan Raya Nanga Pinoh-Sintang, KM 5, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh	11	Men- gamankan sisik trenggiling seberat 17,4 (Tujuh belas koma Empat) Kilogram		1	-	Penyidikan oleh Gakkum Seksi Wilayah III Pontianak dan telah P21	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Operasi Pengamanan Kawasan Hutan (Rp 83.144.000)								
	DIPA Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (Rp 23.960.000)								
	DIPA Operasi TSL (Rp 83.144.000)								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.18	Dugaan adanya kegiatan perambahan Areal di Konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada dalam Hutan PT Asia Tani Persada yang dilakukan oleh masyarakat Hutan Tanaman Industri	Ketapang	3	-	-	1	Hutan Produksi	1. DLHK Provinsi Kalimantan Barat 2. Gakkum	
1.19	Operasi dugaan adanya perburuan TSL di Taman Nasional Gunung Palung, Ketapang	Taman Nasional Gunung Palung, Ketapang	11	37,572	Ha	1	Taman Nasional Gunung Palung	Gakkum Seksi Wilayah 3 Pontianak	
1.20	Verifikasi Pengaduan dugaan adanya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jalan Raya Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak	1	29,000	Ha	1	APL, Hutan Produksi, HPT, HL	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak 3. Universitas Tanjung Pura selaku Pengelola KHDTK	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Perjalanan Dinas (Rp 5.700.00)								
	DIPA operasi Pembalakan Liar (Rp 6.1640.000)								
	DIPA Penanganan Pengaduan Perusahaan (Rp 15.200.000)								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.21	Operasi Dugaan adanya kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat	Randau Jungkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang	1	-	-	1	Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2. KPH Wilayah Ketapang Utara	

Sumber: DIPA 2022 BPHLHK Wilayah Kalimantan

LAMPIRAN 30. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi KPH Di Kalimantan Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Sambas									
1.1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan	KPH		128,318	Ha		HP/HL	KPH, DLHK, BPHP, BPKH, Masy	
1.2	Penyusunan Rencana Pengelolaan / RPHJPd	KPH		128,318	Ha		HP/HL	KPH, DLHK, BPHP, BPKH, Masy	
KPH Wilayah Sanggau Barat									
1.1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Wilayah KPH / Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	Unit III dan V			Dokumen	2	HL HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	DIPA Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (Rp 61.640.000)								

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	29,720	36,120	36,120	36,120	36,120	36,120	36,120	36,120	36,120
	12,430	12,430	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	-	33,624	-	30,000	30,000	-	-	-	30,000

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan HP dan HL/ Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan KPHP	Unit III dan V			Dokumen	4	HL, HP	DLHK, KPH, KLHK, Pemda, Masy, PBPH, Mitra	
KPH Wilayah Landak									
1.1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH /Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya	3 Desa		3,200			HL	KPH	
KPH Wilayah Mempawah									
1.1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)/ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	9 Kecamatan	1	95,565	Dokumen	1	HP/HL	KPH/ Pemda/ Masyarakat	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	-	26,370	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	-	-	150,000	60,000		60,000	75,000	75,000	75,000
	29,640	14,896							

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Desa Bukit Batu		592			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Desa Bukit Batu		592			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.4	Pemanfaatan Hutan di Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Koordinasi dan Sinkronisasi	Desa Bukit Batu		592			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.5	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)/ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Desa Bukit Batu		592			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.6	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Desa Bukit Batu		592			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.7	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Desa kubu padi,wajok hulu		3,447			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.8	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Desa kubu padi,wajok hulu		3,447			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.9	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung/ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Desa kubu padi,wajok hulu		3,447			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.10	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)/ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Desa kubu padi,wajok hulu		3,447			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
1.11	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Desa kubu padi,wajok hulu		3,447			HP	KPH/ Pemda/ Masyarakat	
KPH Wilayah Sekadau									
1.1	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait	Desa-desa dalam kawasan KPH			Desa	20			
1.2	Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM	Luar/ Dalam Provinsi			Kegiatan	2			

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
			37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Melawi									
1.1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	KPHP 22, KPHP 23, KPHP 24 dan KPHL 13	277,427	56,043	Dokumen	1	HP, HL		
1.2	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya	KPHP Unit 22 dan KPHL 13			Hektar / Kilometer /Kegiatan / Dokumen		3900 Hektar / 334 Kilometer / 27 Kegiatan/ 10 Dokumen		
KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur									
1.1	Penyusunan rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan/ (Kegiatan Pemetaan Potensi)	Desa Rantau Bumbun (HHBK), Desa Ribang Kadeng (Jasling), Desa Rantau Kalis (HHBK dan Jasling)			Desa/ Dokumen / Laporan	3	HL, HP, HPT	KPH	
KPH Wilayah Kayong									
1.1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH dalam Pemetaan Potensi Konflik Kawasan oleh Masyarakat	Dusun Besar, Dusun Kecil, Pemangkat, Satai Lestari		72,000			HP/HL	KPH	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
KPH Wilayah Kuburaya									
1.1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Wilker KPH			KTH	5		Pemdes	

Sumber: DIPA 2022, Pagu Indikatif 2023, RPHJP KPH di Kalimantan Barat

LAMPIRAN 31. | Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi Pada KHDTK Untan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Pengesahan dan sosialisasi RPHJP KHDTK Untan	KHDTK Untan		19,622	Layanan	1	HP,HPT	KLHK dan UPT KLHK terkait	

Sumber: Usulan Kegiatan FOLU Fakultas Kehutanan Untan, 2022

LAMPIRAN 32. | Di Luar Kawasan Hutan (KALFOR)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	RO	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.1.	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Ensaid Panjang, Kec. Kelam Permai	11	153	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	64,351	64,351	64,351	64,351	64,351	64,351	64,351	64,351	64,351

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	50,000,000	50,000,000							

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	786,341								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.2	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Bangun, Kec. Sepauk	11	628	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.3	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Sungai Buluh, Kec. Tempunak	11	830	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.4	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Peninsung, Kec. Sepauk	11	72	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.5	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Tanjung Balai, Kec. Sepauk	11	49	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.6	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Balai Harapan, Kec. Tempunak	11	49	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	29,000								
	29,000								
	29,000								

No	Program / Kegiatan	Lokasi	R0	Luas (Ha)	Satuan	Volume	Status Kawasan	Pihak Terlibat	
1.7	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Temiang Kapuas, Kec. Sepauk	11	71	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.8	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Nanga Merkak, Kec. Ketungau Hilir	11	15	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.9	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Pelimping, Kec. Kelam Permai	11	287	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	
1.10	Perlindungan rimba/ gupung di APL oleh masyarakat	Desa Sungai Pukat, Kec. Kelam Permai	11	117	Kegiatan		Non Kawasan Hutan	Ditjen PKTL KLHK, Dinas LHK Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah desa, KalFor, Solidaridad	

Sumber: Dana KALFOR,

Anggaran (Rp x 1.000)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	29,000								
	29,000								
	29,000								
	29,000								

LAMPIRAN 33. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HHK-HA

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
1	PT AGRA PRIMERA PLANTATION (DH.WANAKAYU BATUPTH)	SK.103/Menhut-II/2014	22,538		6		514	
2	PT BAKTI DWIPA KARIZA	SK.50/Menhut-II/2012					4,970	
3	PT BATASAN	SK.416/Menhut-II/04			4,238		5,328	
4	PT BINA OVIVIPARI SEMESTA	SK.260/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021	2,568	862			1,970	
5	PT BOMA RESOURCES	SK.117/MENLHK/Setjen/HPL.0/2/2019			86		435	
6	PT BORNEO KURNIA MANDIRI	1002 TAHUN 2001			1,202		1,252	
7	PT CAHAYA KARYA DAYAINDO	SK.26/Menhut-II/2012			2,063		3,616	
8	PT DUAJA CORP. II	SK.90/Kpts-II/2001	39,075		167		3,188	
9	PT HARAPAN KITA UTAMA	SK.803/Kpts-VI/1999			2,676		3,696	
10	PT KALIMANTAN SATYA KENCANA	SK.737/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019			3,441		7,421	
11	PT KANDELIA ALAM	SK.249/Menhut-II/2008	184	5			4,224	
12	PT KARUNIA HUTAN LESTARI	SK.315/Menhut-II/2009	9,555				1,263	
13	PT KARYA REKANAN BINABERSAMA	SK.263/Menhut-II/2004					5,842	
14	PT KAWEDAR WOOD INDUSTRY	SK.414/Menhut-II/2009	97		1,775		3,047	
15	PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA	SK.216/Menhut-II/2008	666	30,070			23	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	480	7,161	4,733			22,090		57,521
	4,968	5,944	599			317		16,798
	4,750	1,322	66			36,901		52,605
	1,968	971	594		754	5,165	2,447	17,298
	431	1,726	243			30,561		33,483
	1,251	128	816			18,703		23,353
	3,613	3,768	256			28,204		41,522
	3,176	23,522	3,506			39,863		112,497
	3,696	318	43			35,501		45,929
	6,912	3,421	292			39,574		61,062
	4,224	2,163	992	1	471	8,549	4,178	24,991
	1,239	8,422	1,351			27,988		49,817
	5,836	16,010	281			21,521		49,490
	3,040	5,558	606			59,022		73,145
	23	570	56		3,117	30,713	17	65,255

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
16	PT PANGKAR BEGILI	SK.71/MENHLK/SETJEN/HPL.1/2/2018			176		1,019	
17	PT SARI BUMI KUSUMA	SK.58/Menhut-II/2007					6,128	
18	PT SEWAKA LAHAN SENTOSA	SK.236/Menhut-II/2007			1		190	
19	PT SINERGI BUMI LESTARI	SK.559/Menhut-II/2006			558		1,211	
20	PT SUKA JAYA MAKMUR	SK.106/Kpts-II/2000			3,632		7,756	
21	PT TORAS BANUA SUKSES	SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020			1,028		20,541	
22	PT UTAN SIBAU PERSADA	SK.168/Menhut-II/2012			467		3,210	
23	PT WANA MUKTI LESTARI	SK.401/Menhut-II/2012			5		1,087	
24	PT WANASOKAN HASILINDO	SK.162/Menhut-II/2005			1,587		1,935	
TOTAL			74,682	30,937	23,108		89,866	

LAMPIRAN 34. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HHK-HT

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
1	PT ALFA BORNEO LESTARI	SK.764/Menhut- II/2014	-	-	98	-	1,100	
2	PT ASIA TANI PERSADA	SK.353/Menhut- II/2010	5,994	3,183	-	209	377	
3	PT BHATARA ALAM LESTARI	SK.631/Menhut- II/2013	1,044	1,179	-	322	747	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	1,009	4,942	731			20,352		28,229
	2,500	8,833	219			59,466		77,145
	190	368	49			32,019		32,817
	1,208	1,230	555			9,937		14,698
	6,485	2,789	1,856			155,622		178,140
	20,541	2,357	12			0		44,478
	2,689	14,220	410			54,066		75,062
	1,075	5,527	1,162			31,655		40,511
	1,934	647	230			43,500		49,833
	83,236	121,917	19,659	1	4,342	811,288	6,642	1,266,678

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	1,083	18,729	1,198	-	-	10,485	-	32,694
	358	3,514	1,633	3,439	732	8,834	3	28,275
	745	1,494	160	-	927	1,482	-	8,099

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
4	PT BINA SILVA NUSA	SK.286/Menhut- II/2007	45	1,833	-	30	0	
5	PT BOMA PLANTATION	SK.212/Menhut- II/2012	-	-	33	-	3,937	
6	PT BUANA MEGATAMA JAYA	SK.715/Menhut- II/2009	3,473	23	-	22,075	1,306	
7	PT BUMIMAS ALAM MAKMUR	22/1/IUPHHK- HTI/ PMDN/2016	-	-	-	-	1,423	
8	PT CITRA MULIA INTI	2/1/IUPHHK- HTI/ PMDN/2015	-	-	-	-	10,726	
9	PT DAYA TANI KALBAR	SK.33/Menlhk/S etjen/HPL.0/1/20 19	8,637	21,553	-	604	4,559	
10	PT DUTA ANDALAN SUKSES	SK.716/Menhut- II/2014	-	-	-	-	5,934	
11	PT DUTA BINTANG GEMILANG	SK.845/Menhut- II/2014	1,637	-	-	192	1,637	
12	PT FAJAR WANA LESTARI	SK.231/Menhut- II/2013	-	-	-	-	12,582	
13	PT FINNANTARA INTIGA	SK.7903/MENL HK- PSKL/PKTHA/P SL.1/12/2021	4	68	-	1,504	5,049	
14	PT GAMBARU SELARAS ALAM	SK.5770/MENL HK- PSKL/ PKTHA/P SL.1/9/2018	106	22	-	392	90	
15	PT GAPURA PERSADA KATULISTIWA	SK.288/Menhut- VI/2011	0	-	135	-	1,722	
16	PT HUTAN KETAPANG IND (DH. KERTAS BASUKI R)	SK.59/Menhut- II/2007	4,889	-	-	25,499	1,509	
17	PT INDADI VERYO	4/1/IUPHHK- HTI/ PMDN/2018	978	-	-	27	978	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	0	-	1	6	1.05	1,877	-	10,836
	3,932	29,211	560	-	-	10.39	-	48,065
	1.24	1,264	10,482	-	3,759	2,322	-	45,945
	1,423	1,996	122	-	-	-	-	4,964
	10,726	9,596	249	-	-	0	-	31,297
	4,531	145	174	10,586	3,664	25.75	77	80,279
	5,934	21,811	628	-	-	0	-	34,306
	1,637	15,191	158	-	-	-	-	20,452
	12,578	1	2	-	-	4	-	28,452
	5,049	193,594	2,609	-	502	68	-	212.06
	89	19	666	35	137	40	-	20.21
	1,722	6,276	108	-	-	0	-	9,963
	1,408	38,688	21,886	-	881	3.58	-	98,339
	978	7,324	15	-	-	-	-	10,301

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
18	PT INDO PUTRA BERSAMA	SK.155/MENLH K/SETJEN/HPL. 0/2/2019	1,26	-	-	5,288	864	
19	PT INHUTANI III NANGAPINAH	SK.523/Menhut- II/2011	3,256	-	-	5,702	3,256	
20	PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI	SK.332/Menhut- II/2007	352	4,352	-	531	-	
21	PT KAYNA RESOURCES	13/1/IUPHHK- HTI/PMDN/2017	-	-	-	-	1,163	
22	PT KUSUMA PUSPAWANA	SK.326/Kpts- II/1998	-	-	9	-	127	
23	PT LAHAN CAKRAWALA	SK.727/Kpts- II/1997	-	-	-	-	310	
24	PT LAHAN SUKSES	SK.318/Kpts- II/1998	979	-	-	138	979	
25	PT LEMBAH JATI MUTIARA	"SK.92/Kpts- II/1998"	41	-	-	-	4,883	
26	PT MAHKOTA RIMBA UTAMA	SK.555/Menhut- II/2009	17,495	-	-	1,577	1,687	
27	PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (SK 227)	SK.227/Menhut- II/2007	2,278	-	-	17,928	490	
28	PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (SK 480)	SK.480/MENHU T-II/2009	788	17,613	-	2,639	3,171	
29	PT MAYAWANA PERSADA	SK.723/Menhut- II/2010	22	480	-	18	1,825	
30	PT MENGGALA RAMBU UTAMA	SK.506/MENHU T-II/2009	3,435	14,212	-	250	1,835	
31	PT MERANTI LAKSANA	SK.324/Kpts- II/1998	-	-	-	-	835	
32	PT MERANTI LESTARI	SK.315/Kpts- II/1998	-	-	-	-	455	
33	PT MITRA JAYA NUSAINDAH	SK.308/Menhut- II/2010	-	-	-	-	1,24	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	861	217	459	-	-	399	-	9,348
	3,256	53.05	1,564	-	-	-	-	70,084
	-	75	260	3,368	3,069	4,704	-	16,712
	1,138	25,711	652	-	-	11,958	-	40.62
	126	3,503	2,142	-	-	4,448	-	10,354
	310	6.72	333	-	-	28	-	7,701
	979	9,766	78	-	-	-	-	12.92
	4,883	3,737	40	-	-	3	-	13,586
	1.2	48,716	3,488	-	-	16,304	-	90,468
	428	135	7,722	-	-	1,911	-	30,893
	398	2,819	445	4,416	5,301	42,141	7	79,739
	1,719	35,946	9,556	94	7,898	79,773	0	137,331
	1,835	-	215	29	1,818	15,812	1,654	41,094
	831	14,604	73	-	-	1,711	-	18,054
	449	12,992	532	-	-	7,531	-	21,959
	1,239	32,116	1.08	-	-	3.7	-	39,374

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
34	PT MUARA SUNGAI LANDAK	"SK.389/Menlhk/ Setjen/HPL.0/10/ 2020"	-	686	-	-	-	
35	PT NITIYASA IDOLA	SK.329/Kpts- II/1998	2,049	-	-	1	3,302	
36	PT NUSANTARA KALIMANTAN LESTARI (DH PT GARUDA KL)	2/1/IUPHHK- PB/PMDN/2017	776	-	-	15	383	
37	PT PRIMA BUMI SENTOSA	SK.459/MENHU T-II/2009	6,094	-	-	557	499	
38	PT PURBA MARGANA LESTARI	SK.208/Menlhk/ Setjen/ HPL.0/5/2 021	3	-	-	-	12,135	
39	PT RIMBA EQUATOR PERMAI	SK.320/Menhut- II/2004	1.14	-	38	353	1,106	
40	PT SEGAH BANGUN PERSADA	SK.450/Menhut- II/2011	-	-	226	-	467	
41	PT SINAR KALBAR RAYA	SK.75/Menlhk/S etjen/HPL.0/3/20 21	818	1.69	-	674	38	
42	PT SINAR MAKMUR DWISESA	SK.17/1/IUPHH K- HTI/ PMDN/2017	0	-	-	-	338	
43	PT UNGGUL KARYA INTI JAYA	SK.311/Menhut- II/2012	456	-	-	2,272	2,929	
44	PT WANA ARGANUSANTARA	SK.285/MENLHK/SETJEN/HPL. 0/4/2019	-	-	-	329	-	
45	PT WANA HIJAU PESAGUAN	569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/201 7	17,829	-	1,382	342	1.32	
46	PT WANA LESTARI JAYA	SK.266/Menlhk/ Setjen/ HPL.0/5/2 021	-	-	6,385	-	7.57	
47	PT WANA SUBUR LESTARI (DH. SARI BUMI KUSUMA)	SK.450/Menhut- II/2010	634	21,435	-	8	5	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	-	-	-	268	153	9.11	-	10,217
	3,302	80,279	2,524	-	-	83	-	92,656
	383	15.59	7,998	-	-	394	-	40,796
	491	57,204	4,545	-	-	5,605	-	74,996
	12,112	21,131	388	-	-	-	-	45.77
	1,106	15,645	8	-	-	35	-	19.43
	465	12.9	254	-	-	2,682	-	16,995
	38	20,876	668	165	4,426	2,471	-	31,864
	304	2,703	1.44	-	0	11,324	-	16,109
	2,929	25,663	956	-	-	4,993	-	40,198
	-	7.63	227	-	-	-	-	8,186
	1,265	27,392	6,596	-	-	32,268	-	88,393
	7.57	19,639	268	-	283	1,347	-	43,061
	5	-	247	12,956	4,719	22,064	622	62,692

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
48	PT WANA SUBUR PERSADA	SK.717/Menhut- II/2014	1,723	-	1,211	30	713	
49	PT WANAKERTA EKALESTARI	SK.2010/Menhut -VI/2007	100	-	-	1.59	4	
TOTAL			91,947	88,329	9,518	107,471	107,604	

LAMPIRAN 35. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan RE

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
1	PT EKOSISTEM KHATULISTIWA LESTARI	SK.560/ Menhut- II/2011	-	-	-	-	976	

LAMPIRAN 36. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PS

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
1	GAPOKTAN SINAR HARAPAN	SK.365/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/1/2021						
2	GAPOKTAN SUMBER KARYA	SK.1652/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2019						
3	KLPHD ampung Baru	SK.10870/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		218				
4	KOPERASI PRODUSEN USAHA KARYA KEMILAU	SK.6308/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/5/2019						
5	KSU BERSAMA	SK.5684/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
6	KT BEGANAK	5224/229/Hutbun-1/12						

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
7	KT BOROSIKI	SK.4393/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/8/2017						
8	KTH MAJU BERSAMA	SK.5473/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2020						
9	KTH MAYANG KARANDO	SK.9026/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2018						
10	KTH RAJAKI TALINO	SK.2826/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/5/2020	37					
11	KTH TANAMAN RAKYAT PERASAK	SK.5838/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018						
12	LPHD Alam Hijau	SK.713/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
13	LPHD Ambarawa	SK.519/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017	0	3				
14	LPHD Ambawang	SK.10648/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	308	1,682			0	
15	LPHD Ansiap	SK.6192/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/11/2020	71					
16	LPHD Bahenap	SK.7010/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017						
17	LPHD Balai Agas	SK.10027/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
18	LPHD Banjar Lestari	SK.709/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
19	LPHD Batang Kanyau	SK.3193/Menlhk-PSKL / PSL.0/5/2017						
20	LPHD Batang Tau	SK.686/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
21	LPHD Batu Ampar	SK.515/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017	320	2,621			0	
22	LPHD Batu Barat Jaya	SK.10872/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	23					
23	LPHD Batu Bolah	SK.6704/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017						

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
						129		129
						9		9
				27	27			54
		121						158
						189		189
						1,161		1,161
			8		24	2,003		2,038
			44	344	462	3,077		5,917
								71
						10,340		10,340
						4,563		4,563
						1,250		1,250
						1,029		1,029
						40		40
		0	310	112	256	25,673		29,292
		2	2			201		228
						1,746		1,746

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
24	LPHD Belaban Rayak	SK.4670/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2018	745				0	
25	LPHD Berlimang	SK.10884/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		26				
26	LPHD Betuah	SK.10889/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
27	LPHD Bukit Banjar	SK.6188/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018	6					
28	LPHD Bukit Layang	SK 6682/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017						
29	LPHD Buntut Sabon	SK.8934/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2018						
30	LPHD Bunut Hulu	SK.5690/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
31	LPHD Cuhai	SK.6572/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017	11					
32	LPHD Dabong	SK.3820/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2017						
33	LPHD Danau Paluh Lestari	SK.1540/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	849	303			26	
34	LPHD Dange Aji	SK.1020/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021						
35	LPHD Dusun Besar	SK.5735/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
36	LPHD Dusun Kecil	SK.5697/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
37	LPHD Hutan Bersama	SK.710/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017		79				
38	LPHD Jasa	SK.6687/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017						
39	LPHD Jongkong Manday	SK.4392/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2020						
40	LPHD Kaliau	SK.6777/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2018						

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
			2,566			745		4
					21	247		294
						814		814
			14			546		566
						1,119		1,119
						10,957		10,957
						2,507		2,507
						1,380		1,391
						2,089		2,089
			3,625		3,678	1,178		9,659
			62			1,144		1,206
						1,367		1,367
						1,057		1,057
						1,958		2,037
						2,151		2,151
						2,202		2,202
						1,097		1,097

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
41	LPHD Kalibandung	SK.4769/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2018		2,617				
42	LPHD Kelingkang Bersatu	SK.6734/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017						
43	LPHD Kensuray	SK.5737/MENLHK/PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
44	LPHD Kubu	SK.10638/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
45	LPHD Kubu Padi	SK.10296/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		864			15	
46	LPHD Kumbang Betedoeh	SK.714/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
47	LPHD Landau garong	SK.3560/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2020						
48	LPHD Lanjak Deras	SK.4657/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2018						
49	LPHD Lauk Bersatu	SK.685/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
50	LPHD Lela	SK.10888/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		18				
51	LPHD Lemmanis	SK.1538/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	369				0	
52	LPHD Medan Mas	SK.522/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
53	LPHD Melemba	SK.4393/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2020						
54	LPHD Mengkalang	SK.5325/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2020	3					
55	LPHD Mengkalang Jambu	SK.10875/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
56	LPHD Mensiau	SK.5740/MENLHK/PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
57	LPHD Mentajoi	SK.9802/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/11/2019						

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
58	LPHD Mentari Kapuas	402/Ekbang/2015						
59	LPHD Mio Lestari	SK.1027/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	36				20	
60	LPHD Muara Baru	SK.1537/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021						
61	LPHD Muara Palung	SK.10867/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	5	223			1	
62	LPHD Nanga Betangai	SK.10126/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
63	LPHD Nanga Betung	399/Ekbang/2015						
64	LPHD Nanga Bihe	SK.4284/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2020						
65	LPHD Nanga Jelundung	SK.4219/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2020						
66	LPHD Nanga Potai	SK.8903/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2019						
67	LPHD Nanga Raun	SK.108/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/1/2018						
68	LPHD Nanga Sakai	SK.8939/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2018						
69	LPHD Nanga Sebintang	SK.10848/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
70	LPHD Nanga Semangut	SK.1264/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2018						
71	LPHD Nanga Sokan	SK.9792/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/11/2019						
72	LPHD Nipah Panjang	SK.524/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017	23	93				
73	LPHD Nusa Kenyikap	SK.9095/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2019						
74	LPHD Nyanggai	SK.4014/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/4/2019						

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
75	LPHD Nyuai	SK.687/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
76	LPHD Padang Tikar	SK.523/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
77	LPHD Pangkalan Telok	SK.3802/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/4/2019	3					
78	LPHD Pasir	SK.10885/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	105	5				
79	LPHD Pematang Gadung	SK.896/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	544	3,340			9	
80	LPHD Penepian Raya	400/Ekbang/2015						
81	LPHD Permata	SK.10871/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		528				
82	LPHD Piawas	SK.10025/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
83	LPHD Poring	SK.4013/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/4/2019						
84	LPHD Puruk Sandi	SK.8943/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2018						
85	LPHD Riam Piyang	SK.4032/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2020						
86	LPHD Rimak Koling Raya	SK.6233/MENLHK-PSKL / PKSP/PSL.0/9/2018	689				0	
87	LPHD Rimba Melaban	SK.850/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2020						
88	LPHD Rimbak Sangiang	SK.1539/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	31					
89	LPHD Ringo Lojok	SK.4668/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2018						
90	LPHD Sanatab	SK.6172/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018						
91	LPHD Santaban	SK.6232/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018						

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
						3,707		3,707
						39		39
			159			559		721
			2		125	1,174		1,410
			16		147	3,865		7,921
						217		217
						1,906		2,434
						258		258
						782		782
						1,681		1,681
						2,984		2,984
			121			827		1,636
						1,327		1,327
			318			1,718		2,067
			403					403
						2,688		2,688
						1,223		1,223

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
92	LPHD Satai Lestari	SK.5736/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
93	LPHD Sebusubus	SK.682/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
94	LPHD Sekabuk	SK.1536/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021						
95	LPHD Selat Remis	SK.10890/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
96	LPHD Selaup	SK.5163/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
97	LPHD Semanga'	SK.10375/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	1,042	184				
98	LPHD Senempak	SK.3760/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/4/2019						
99	LPHD Sepakat	SK.10212/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
100	LPHD Sepandan	SK.4767/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2018						
101	LPHD Seruat Dua	K.3879/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2017						
102	LPHD Simpang Keramat	SK.708/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
103	LPHD Simpang Tiga Sembelangaan	SK.5973/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018						
104	LPHD Suak Barangan	SK.4216/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2020	10					
105	LPHD Sunan Bersatu	SK.1030/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021	1,830	837			169	
106	LPHD Sungai Abau	SK.4161/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2018						
107	LPHD Sungai Ajung	SK.4155/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/6/2018						

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
						292		292
						3,959		3,959
						352		352
			0			71	0	71
						1,026		1,026
					140	1,532		2,897
						30		30
						533		533
						1,692		1,692
						563		563
						369		369
			6			2,148		2,154
			10					21
			421		580	2,339		6,176
						711		711
						1,928		1,928

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
108	LPHD Sungai Asam	SK.10847/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019		230				
109	LPHD Sungai Bemban	SK.10887/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	112	0				
110	LPHD Sungai Besar	SK.5883/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017	382	3,212			21	
111	LPHD Sungai Buaya	SK.4543/MENLHK-PSK L/ PKPS/PSL.0/5/2019						
112	LPHD Sungai Jawi	SK.525/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
113	LPHD Sungai Mawang	SK.10507/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
114	LPHD Sungai Nibung	SK.3883/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/7/2017						
115	LPHD Sungai Pelang	SK.6688/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2017	35	246			28	
116	LPHD Sungai Sintang	SK.4537/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/5/2019						
117	LPHD Tamao	SK.5733/MENLHK/PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
118	LPHD Tanjung	401/Ekbang/2015						
119	LPHD Tanjung Beringin	SK.10373/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019	916	898				
120	LPHD Tanjung Harapan	SK.518/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017	505	1,546			28	
121	LPHD Tanjung Satai	SK.5732/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/10/2017						
122	LPHD Tanoeh Menjuakng	SK.5913/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/9/2018	3,576					

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
				1	1	230		461
			63		0	1,183		1,358
			45		553	5,738		9,951
						27		27
						2,896		2,896
						635		635
						2,085		2,085
			28		123	274		734
						140		140
						5,885		5,885
						1,865		1,865
						9,780	551	12,144
		0	115	138	2,004	8,435	29	12,800
						323		323
			636			3,576		7,788

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
123	LPHD Tasik Malaya	SK.521/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017						
124	LPHD Teluk Nibung	SK.516/Menlhk-PSKL / PKPS/PSL.0/2/2017		555			4	
125	LPHD Teluk Pakedai Hulu	SK.10881/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
126	LPHD Teluk Pakedai Satu	SK.10877/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/12/2019						
127	LPHD Tuan Berjaya Lestari	SK.1593/MENLHK-PSKL / PKPS/PSL.0/3/2021						
128	MHA Iban Dayak Iban Menua Sungai Utik MHA Iban Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang	SK.3238/MENLHK-PSKL / PKTHA/PSL.1/5/2020						
129	MHA Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon	SK.5771/MENLHK-PSKL / PKTHA/PSL.1/9/2018						
130	MHA Ketemenggungan Tae	SK.5770/MENLHK-PSKL / PKTHA/PSL.1/9/2018	1					

LAMPIRAN 37. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan KHDTK

No	Pemegang Ijin	SK	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)					
			R01	R02	R03	R04	R05	
1	Hutan Pendidikan dan Pelatihan (Universitas Tanjungpura)	SK.656/Menlhk/Setjen /PLA.0/8/2016	-	-	-	-	-	

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
						1,932		1,932
				5	424	559		1,547
						230		230
						708		708
						3,545		3,545
						6,345		6,345
						286		286
			703			1		705

								TOTAL
	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	
	-	-	-	-	-	15,248	-	15,248

LAMPIRAN 38. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain HGU

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	PT AGRONUSA INVESTAMA SBS	57	53	-	-	-	-	
2	PT AIRLANGGA SAWIT JAYA	889	-	-	-	-	-	
3	PT AYU SAWIT LESTARI	-	-	-	-	-	-	
4	PT BANGUN MAYA INDAH	-	-	-	-	-	-	
5	PT BAROKAH KITA UTAMA	-	-	-	-	-	-	
6	PT BINTANG HARAPAN DESA	-	-	-	-	-	-	
7	PT BONTI PERMAI JAYARAYA	-	3	-	-	-	-	
8	PT BUDIDAYA AGRO LESTARI	-	-	-	-	-	-	
9	PT BUKIT PRIMA PLANTINDO	-	-	-	-	-	-	
10	PT BUMI AGRO LESTARI	39	-	-	-	-	-	
11	PT BUMI PRATAMA KHATULISTIWA	-	-	-	-	-	-	
12	PT BUMI SUBUR LESTARI	0	179	-	-	-	-	
13	PT CEMARU LESTARI	65	44	-	-	-	-	
14	PT CERIA PRIMA	575	23	-	-	-	-	
15	PT CHARINDO PALMA OETAMA	65	-	-	-	-	-	
16	PT DUTA SURYA PRATAMA	299	-	-	-	-	-	
17	PT FANGIONO AGRO PLANTATION	33	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	-	-	1,969	227	130	-	2,436
	-	-	-	-	-	-	889
	361	-	-	-	-	-	361
	10	-	-	-	-	-	10
	64	-	-	-	-	-	64
	-	-	53	-	-	-	53
	-	-	118	10	3	-	134
	41	-	-	-	-	-	41
	28	-	797	-	-	-	826
	-	-	-	-	39	39	118
	-	-	4,767	13	-	-	4.78
	271	29	173	264	469	-	1,385
	400	24	4,235	414	66	-	5,247
	143	-	8,627	213	23	-	9,605
	-	-	-	-	-	-	65
	-	-	-	-	-	-	299
	397	9	-	-	33	-	472

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
18	PT GRAND UTAMA MANDIRI	0	-	-	-	-	-	
19	PT HARAPAN HIBRIDA KALBAR	256	-	-	-	-	-	
20	PT HARAPAN SAWIT LESTARI	-	-	-	-	-	-	
21	PT ICHTIAR GUSTI PUDI	1	11	-	-	-	-	
22	PT KALIMANTAN BINA PERMAI	288	-	-	-	26	26	
23	PT KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA	-	-	-	-	-	-	
24	PT KARYA BOGA KUSUMA	6	-	-	-	-	-	
25	PT KARYA BOGA MITRA	-	-	-	-	-	-	
26	PT LIMPAH SEJAHTERA	-	-	-	-	-	-	
27	PT MITRA ANEKA REZEKI	3	4	-	-	-	-	
28	PT MITRA INTI SEJATI PLANTATION	47	-	-	-	-	-	
29	PT MITRA KARYA SENTOSA	32	-	-	-	-	-	
30	PT MULTIDAYA FORTUNA	508	352	-	-	-	-	
31	PT PANCARAN KENCANA MAS	96	-	-	-	-	-	
32	PT PATIWARE	-	54	-	-	-	-	
33	PT PELITA BUMI KARYA ABADI	-	-	-	-	-	-	
34	PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII NGABANG	-	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	-	-	349	-	34	-	382
	1,854	47	-	102	225	-	2,485
	4,642	-	-	-	-	-	4,642
	1	41	881	147	12	-	1,093
	36	-	-	-	-	-	377
	96	-	276	1	-	-	372
	2	-	-	-	-	-	8
	1	-	0	64	-	-	65
	427	-	11,697	-	-	-	12,124
	-	-	262	26	7	3	306
	54	-	-	-	-	-	101
	-	-	-	-	-	-	32
	33	0	161	43	355	-	1,451
	11	-	-	-	96	96	300
	-	-	5,153	239	54	-	5.5
	-	-	-	-	81	-	81
	7	-	-	-	-	-	7

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
35	PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PARINDU	-	-	-	-	-	-	
36	PT PINYUH INTI UTAMA	-	-	-	-	-	-	
37	PT PRAKARSA TANI SEJATI	391	-	-	-	-	-	
38	PT PURNA KAHURIPAN	-	-	-	-	-	-	
39	PT PUTRA MAKMUR LESTARI	93	-	-	-	-	-	
40	PT RAFI KAMAJAYA ABADI	86	23	-	-	-	-	
41	PT RANA WASTU KENCANA	92	-	-	-	-	-	
42	PT REZEKI KENCANA	-	0	-	-	-	-	
43	PT RIAU AGRO TAMA PLANTATION	46	-	-	-	-	-	
44	PT SATRIA MULTI SUKSES	170	-	-	-	-	-	
45	PT SAWIT DESA KAPUAS	-	-	-	-	-	-	
46	PT SAWIT MITRA ABADI	15	-	-	-	-	-	
47	PT SEPANJANG INTI SURYA MULIA	855	-	-	-	-	-	
48	PT SIME INDO AGRO	-	-	-	-	-	-	
49	PT SINAR DINAMIKA KAPUAS	49	28	-	-	-	-	
50	PT SINTANG AGRO MANDIRI	-	-	-	-	-	-	
51	PT SINTANG RAYA	-	-	-	-	-	-	
52	PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR	-	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	-	-	-	42	-	-	42
	-	-	158	-	-	-	158
	33	16	-	-	345	-	785
	38	-	-	-	-	-	38
	198	-	-	-	-	-	291
	30	-	2,326	63	23	-	2,551
	7	-	-	-	-	-	99
	-	-	205	-	7	-	212
	22	-	-	-	-	-	68
	-	-	1,250	94	170	-	1,684
	18	-	-	0	-	-	18
	104	-	-	-	-	-	118
	197	43	-	-	789	-	1,883
	18	-	-	-	-	-	18
	11	-	30	36	28	-	182
	-	-	1.34	-	0	-	1.34
	-	-	21	-	1	-	21
	73	-	-	-	-	-	73

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
53	PT SURYA BORNEO INDAH	-	-	-	-	-	-	
54	PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA	387	-	-	-	-	-	
55	PT UMEKAH SARI PRATAMA	32	-	-	-	0	0	
56	PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA	443	-	-	-	-	-	
57	PT WIRA RIVACO MANDUM	-	-	-	-	-	-	
58	PT WIRATA DAYA BANGUN PERSADA	165	1,506	-	-	-	-	
TOTAL		6,086	2,281	-	-	27	27	

LAMPIRAN 39. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain ILOK

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	PT AGRI SENTRA LESTARI	305	-	-	-	-	-	
2	PT AGRINA SAWIT PERDANA	-	-	-	-	-	-	
3	PT AGRO ABADI CEMERLANG	-	-	-	-	-	-	
4	PT AGRO CIPTA PERSADA	261	-	-	-	-	-	
5	PT AGRO GADING SEJAHTERA	260	-	-	-	-	-	
6	PT AGRO PLANINDO UTAMA	124	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	-	-	181	22	-	-	203
	43	2	-	-	353	-	785
	34	8	-	-	32	-	105
	253	-	82	108	-	-	886
	268	-	-	-	-	-	268
	622	0	5,286	1,588	1,507	-	10,675
	10,844	219	50,397	3,717	4,881	138	78,616

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	4	-	-	-	-	-	309
	12	-	-	-	-	-	12
	41	-	-	-	-	-	41
	1	0	0	213	103	-	578
	1	-	-	-	-	-	260
	0	-	-	-	-	-	124

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
7	PT AGRO SUKSES LESTARI	28	-	-	-	-	-	
8	PT AGRO TANI MANDIRI	14	-	-	-	-	-	
9	PT AGRONUSA INVESTAMA LDK	1	100	-	-	-	-	
10	PT AIRLANGGA SAWIT JAYA	211	-	-	-	-	-	
11	PT ASIA BHAKTI AGRO	-	-	-	-	-	-	
12	PT BAMBOE JAYA PLANTATION	300	-	-	-	-	-	
13	PT BERSATU KITA MAKMUR	-	-	-	-	-	-	
14	PT BINA AGRO BERKEMBANG LESTARI	-	252	-	-	-	-	
15	PT BINTANG HARAPAN DESA	-	-	-	-	-	-	
16	PT BONTI PERMAI JAYARAYA	650	3,645	-	-	-	-	
17	PT BORNEO EDO INTERNASIONAL AGRO	26	12	-	-	-	-	
18	PT BORNEO KETAPANG PERMAI	292	-	-	-	-	-	
19	PT BORNEO KHATULISTIWA PALMA	74	-	-	-	-	-	
20	PT BORNEO MURIA PLANTATION	659	-	-	-	-	-	
21	PT BUANA HIJAU ABADI	99	195	-	-	-	-	
22	PT BUKIT PRIMA PLANTINDO	-	-	-	-	-	-	
23	PT BUMIMAS JAYA MAKMUR	-	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	501	-	220	12	-	-	761
	-	-	-	-	-	-	14
	18	1	1,679	320	101	-	2,221
	14	-	-	-	-	-	224
	-	-	-	-	129	-	129
	-	-	-	-	-	-	300
	2,067	-	-	-	-	-	2,067
	-	-	2,293	1,269	325	-	4,138
	25	-	209	-	-	-	234
	1	0	1,569	1,392	4	-	10,946
	281	1	6	1,182	31	-	1,539
	30	-	-	-	-	-	322
	35	-	-	-	-	-	110
	175	-	-	-	-	-	834
	171	-	2,681	276	226	-	3,648
	12	-	220	-	-	-	232
	229	-	-	-	-	-	229

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
24	PT CAHAYA UNGGUL PRIMA	17	-	-	-	-	-	
25	PT CHARINDO PALMA OETAMA	116	-	-	-	-	-	
26	PT CIPTA TUMBUH BERBUAH	-	0	-	-	-	-	
27	PT CITRA NIAGA PERKASA	55	155	-	-	-	-	
28	PT CONDRONG GARUT	532	1	-	-	-	-	
29	PT DAYA LANDAK PLANTATION	-	-	-	-	-	-	
30	PT DAYA SUMBER MAKMUR	69	-	-	-	-	-	
31	PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA	125	-	-	-	-	-	
32	PT DUTA RENDRA MULYA	2	136	-	-	-	-	
33	PT DUTA SEJAHTERA UTAMA	44	-	-	-	-	-	
34	PT DUTA SURYA PRATAMA	124	-	-	-	-	-	
35	PT GAPURA ALAS MAKMUR	-	-	-	-	-	-	
36	PT GEMILANG SAWIT KENCANA	180	119	-	-	-	-	
37	PT GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR	450	-	-	-	-	-	
38	PT GRAND MANDIRI UTAMA	1	1	-	-	-	-	
39	PT GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA	-	-	-	-	-	-	
40	PT GUNUNG RIJUAN SEJAHTERA 2	-	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	5	-	-	-	-	-	22
	-	-	-	-	-	-	116
	-	-	376	14	441	-	831
	1	-	8,651	272	210	-	9,344
	49	298	882	483	1,757	-	5,259
	23	-	-	-	-	-	23
	4	-	-	-	-	-	73
	66	0	-	-	3	-	194
	-	-	3,014	6	565	-	3,724
	42	-	-	-	-	-	86
	131	-	-	-	-	-	254
	513	-	-	-	-	-	513
	117	103	2,218	367	298	-	3,402
	100	-	-	-	-	-	550
	52	-	3	-	8	-	64
	11	-	-	-	-	-	11
	24	-	-	-	-	-	24

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
41	PT HILTON DUTA LESTARI	69	-	-	-	-	-	
42	PT ICHTIAR GUSTI PUDI 1	-	-	-	-	-	-	
43	PT ICHTIAR GUSTI PUDI 2	68	-	-	-	-	-	
44	PT INDOMAL SAWIT JAYA	495	0	-	-	0	0	
45	PT INDORESIN PUTRA MANDIRI	68	-	-	-	-	-	
46	PT INMA JAYA GROUP	80	-	-	-	-	-	
47	PT JAKE SARANA	-	-	-	-	-	-	
48	PT KAPUAS RIMBA SEJAHTERA	322	-	-	-	-	-	
49	PT KHARISMA UTAMA KHATULISTIWA	0	-	-	-	-	-	
50	PT KIARA SAWIT ABADI	-	-	-	-	-	-	
51	PT KUSUMA MENTARI MAKMUR	534	-	-	-	-	-	
52	PT LANDAK SUBUR PLANTATIONS	44	-	-	-	-	-	
53	PT LINGKAR INDAH PLANTATION	7	-	-	-	-	-	
54	PT MAISKA BHUMI SEMESTA	-	-	-	-	-	-	
55	PT MAKMUR AGRO LESTARI	62	39	-	-	-	-	
56	PT MAKMUR JAYA MALINDO	273	69	-	-	-	-	
57	PT MALINDO PERSADA KHATULISTIWA	42	-	-	-	-	-	
58	PT MEGA SAWINDO PERKASA	182	81	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	23	-	-	-	-	-	93
	42	-	977	188	-	-	1,208
	47	10	187	86	59	-	458
	867	-	17	0	26	-	1,406
	85	-	-	-	-	-	153
	4	-	-	-	-	-	84
	-	-	-	-	134	-	134
	35	-	-	-	-	-	357
	15	-	-	-	-	-	15
	-	-	-	-	25	-	25
	7	-	-	-	-	-	540
	6	-	-	-	44	-	94
	-	-	151	35	-	-	192
	108	-	-	-	-	-	108
	0	-	1,859	87	40	-	2,086
	305	-	68	87	99	-	901
	-	-	-	-	-	-	42
	1	56	1,733	735	260	-	3,048

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
59	PT MITRA KARYA SENTOSA	8	-	-	-	-	-	
60	PT MULTI PRIMA ENTAKAI	77	-	-	-	-	-	
61	PT MUSTIKA ABADI KHATULISTIWA	2	-	-	-	-	-	
62	PT NUSA JAYA PERKASA	-	-	-	-	-	-	
63	PT NUSANTARA SARANA ALAM	-	-	-	-	-	-	
64	PT PALM AGRO KATULISTIWA	43	93	-	-	-	-	
65	PT PALMA AGRO LESTARIJ	153	-	-	-	1	1	
66	PT PALMA MEGAH MULIA	443	-	-	-	-	-	
67	PT PALMINDO LESTARI	31	-	-	-	-	-	
68	PT PERDANA SAWIT PLANT	203	-	-	-	-	-	
69	PT PERKASAMAS LANGGENG	17	-	-	30	-	-	
70	"PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN"	670	-	-	-	-	-	
71	"PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII KEMBAYAN"	-	-	-	-	-	-	
72	"PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII MELIAU"	346	-	-	-	-	-	
73	"PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII NANGA JETAK"	47	-	-	-	-	-	
74	"PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PARINDU"	425	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	-	-	-	-	-	-	8
	-	-	295	133	-	-	505
	51	-	-	-	2	-	56
	-	-	1,137	1	0	-	1,139
	14	-	-	-	-	-	14
	7	-	16	516	624	-	1,298
	283	-	-	-	-	-	438
	12	-	-	-	-	-	454
	-	-	-	-	-	-	31
	19	-	-	-	-	-	222
	232	-	-	-	-	-	278
	220	-	-	-	-	-	889
	26	-	-	-	-	-	26
	-	-	311	-	-	-	657
	-	-	-	-	250	-	298
	11	-	-	629	-	-	1,065

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
75	"PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII SEI TEBELIAN"	11	34	-	-	-	-	
76	PT PRATAMA PROSENTINDO	-	-	-	-	-	-	
77	PT PRIMA SAWIT ANDALAN	-	-	-	-	-	-	
78	PT PULAU TIGA LESTARI JAYA	8	-	-	-	-	-	
79	PT PUNDI LAHAN KHATULISTIWA	-	-	-	-	-	-	
80	PT PUSPA KUMALA SEJAHTERA	300	6	-	-	-	-	
81	PT RATUBADIS ADHI PERKASA	-	-	-	-	-	-	
82	PT REZEKI KENCANA	6	87	-	-	-	-	
83	PT RIMBA BORNEO MAKMUR	-	-	-	-	-	-	
84	PT SABAN SAWIT SUBUR	121	15	-	-	-	-	
85	PT SARASWANTI AGRO ESTATE	138	505	-	-	-	-	
86	PT SATRIA MULTI SUKSES	223	2	-	-	-	-	
87	PT SATYANUSA INDAH PERKASA	157	44	-	-	-	-	
88	PT SAWIT DESA KAPUAS	274	-	-	-	-	-	
89	PT SAWIT EMAS PERSADA	37	-	-	-	-	-	
90	PT SEPANJANG INTI SURYA UTAMA	6	-	-	-	-	-	
91	PT SIME INDO AGRO	46	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	240	-	189	40	34	-	547
	9	-	-	-	-	-	9
	-	-	-	-	2,171	-	2,171
	41	-	-	-	-	-	49
	-	-	-	-	39	-	39
	64	-	-	4	6	-	381
	738	-	-	-	-	-	738
	-	-	123	-	148	-	365
	31	-	-	-	-	-	31
	812	2	39	199	102	-	1,29
	3	54	852	741	643	-	2,937
	58	10	813	843	198	-	2,148
	5	-	23	-	44	-	273
	392	0	7	806	-	-	1,48
	-	-	-	-	-	-	37
	6	-	-	-	-	-	12
	191	-	-	-	-	-	237

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
92	PT SINAR SAWIT ANDALAN	-	-	-	-	-	-	
93	PT SINARDINAMIKA KAPUAS9	-	-	-	-	-	-	
94	PT SINTANG AGRO MANDIRI	-	36	-	-	-	-	
95	PT SOLUSI JAYA PERKASA	-	1	-	-	-	-	
96	PT SUMATERA JAYA AGRO LESTARI	38	238	-	0	-	-	
97	PT SUMBER HASIL PRIMA	-	-	-	-	-	-	
98	PT SURYA AGRO PALMA	78	136	-	-	-	-	
99	PT SURYA DELI	53	-	-	-	-	-	
100	PT SURYA JAYA SELARAS	19	-	-	-	-	-	
101	PT TEBAR TANDAN TENERAH	83	-	-	-	13	13	
102	PT TEMILA AGRO ABADI	83	349	-	-	-	-	
103	PT TINTING BOYOK SAWIT MAKMUR	-	-	-	-	-	-	
104	PT WAHANA PLANTATION	620	561	-	-	-	-	
105	PT WERDI SAWIT AMBAWANG	-	223	-	-	-	-	
106	PT. UNKNOWN	74	-	-	-	-	-	
TOTAL		12,101	8,391	-	30	14	14	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	0	-	-	-	615	-	615
	-	-	-	-	915	-	915
	-	-	1,224	39	147	-	1,446
	-	-	0	-	223	-	224
	154	2	2,022	554	286	-	3,294
	0	-	-	-	9	-	9
	264	28	3,707	2,311	211	-	6,735
	7	-	-	-	-	-	59
	6	-	-	-	-	-	25
	217	-	-	-	-	-	325
	87	393	1,975	542	432	-	3.86
	11	-	-	-	-	-	11
	42	-	314	31	640	-	2,208
	-	-	2,265	372	263	-	3,123
	84	-	-	683	-	-	841
	10,638	958	44,328	15,469	16,575	-	108,518

LAMPIRAN 40. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain IUP

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	PT ADITYA AGROINDO	29	11	-	-	-	-	
2	PT AGRAJAYA BAKTITAMA	840	-	-	-	3	3	
3	PT AGRI PLUS	66	-	-	-	-	-	
4	PT AGRINDO PRIMA NIAGA	-	-	-	-	-	-	
5	PT AGRO LESTARI KENCANA	1.07	-	-	-	-	-	
6	PT AGRO LESTARI MANDIRI	39	-	-	-	-	-	
7	PT AGRO MANUNGAL SAWITINDO	12	-	-	-	-	-	
8	PT AGRO SEJAHTERA MANUNGAL	-	-	-	-	-	-	
9	PT AGRONUSA INVESTAMA SBS	-	289	-	-	-	-	
10	PT ALAO KUNING	101	-	-	-	-	-	
11	PT ANDES AGRO INVESTAMA	-	-	-	-	-	-	
12	PT ANDES SAWIT LESTARI	0	-	-	-	-	-	
13	PT ANDES SAWIT MAS	-	-	-	-	-	-	
14	PT ANUGERAH PALM INDONESIA	1,198	-	-	-	0	-	
15	PT ANUGRAH MAKMUR SEJATI	167	-	-	-	-	-	
16	PT ARRTU BORNEO PERKEBUNAN	-	-	-	-	-	-	
17	PT ARRTU ENERGIE RESOURCES	-	679	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	72	-	32	4	40	-	188
	554	58	-	-	809	-	2,267
	1	201	-	-	62	-	330
	291	-	-	-	-	-	291
	27	564	-	-	961	-	2,622
	1,603	12	-	-	27	-	1,682
	3.3	0	-	-	10	-	3,322
	103	-	-	-	-	-	103
	-	-	240	750	509	-	1,788
	-	-	-	-	-	-	101
	7	-	-	-	-	-	7
	462	-	-	-	-	-	462
	552	-	-	-	-	-	552
	2.56	123	-	-	864	-	4,746
	3	-	60	53	-	-	283
	383	1	1	-	-	-	384
	2,119	28	3,566	3.98	733	-	11,104

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
18	PT ARRTU PLANTATION	-	-	-	-	-	-	
19	PT ARVENA SEPAKAT	80	-	-	-	-	-	
20	PT ASIA MUKTI LESTARI	567	-	-	-	-	-	
21	PT AYU SAWIT LESTARI	-	-	-	-	-	-	
22	PT BANGUN NUSA MANDIRI	-	-	-	-	-	-	
23	PT BATU MAS SEJAHTERA	216	-	-	-	-	-	
24	PT BENGKAYANG SUBUR	-	-	-	-	-	-	
25	PT BERKAH SAWIT ABADI	578	-	-	0	-	-	
26	PT BERKAT NABATI SEJAHTERA	-	-	-	-	-	-	
27	PT BINA AGRO BERKEMBANG LESTARI	-	-	-	-	-	-	
28	PT BORNEO ESTATE SEJAHTERA	2,785	8,384	-	-	-	-	
29	PT BORNEO INTERNASIONAL ANUGERAH	2	8,181	-	-	-	-	
30	PT BORNEO PALMA PRIMA	4	-	-	-	-	-	
31	PT BUANA TUNAS SEJAHTERA	2,411	-	-	-	-	-	
32	PT BUDIDAYA AGRO LESTARI	-	-	-	-	-	-	
33	PT BULUH CAWANG PLANTATION	-	-	-	-	-	-	
34	PT BUMI PERKASA GEMILANG	0	162	-	-	-	-	
35	PT BUMI SAWIT SEJAHTERA	396	56	-	-	0	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	23	-	-	-	-	-	23
	931	-	-	-	76	-	1,087
	22	-	-	-	233	-	822
	28	-	-	-	-	-	28
	183	-	-	-	-	-	183
	318	0	-	-	197	-	730
	53	-	-	-	-	-	53
	86	5	-	1	492	-	1,162
	510	0	3.24	690	-	-	4.44
	-	-	1,106	4	-	-	1.11
	1.44	70	-	825	11,127	-	24,632
	-	-	10	235	8,181	-	16,609
	0	-	-	2	-	-	6
	93	-	-	-	2,411	-	4,915
	80	-	-	-	-	-	80
	-	-	-	-	153	-	153
	1	0	4,666	263	1,471	-	6,563
	130	28	5,989	2,333	450	-	9,383

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
36	PT BUMI TANI JAYA	5,267	28	-	-	-	-	
37	PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG	76	-	-	-	-	-	
38	PT CITRA SAWIT CEMERLANG	6,098	-	-	-	-	-	
39	PT CONDRONG GARUT	174	109	-	-	-	-	
40	PT DUTA NUSA LESTARI	146	-	-	-	-	-	
41	PT FAJAR SAUDARA LESTARI	154	45	-	-	-	-	
42	PT GERBANG BENUA RAYA	-	269	-	-	-	-	
43	PT GRAHA AGRO NUSANTARA	0	3.1	-	-	2	-	
44	PT GUNAJAYA KETAPANG SENTOSA	-	-	-	-	-	-	
45	PT HAMPARAN KENCANA SAKTI	365	0	-	-	-	-	
46	PT HARAPAN SAWIT LESTARI	-	-	-	-	-	-	
47	PT INDO SAWIT KEKAL	-	-	-	-	-	-	
48	PT INTELLYSIS JAYA GEMILANG	-	-	-	-	-	-	
49	PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN	28	-	-	-	-	-	
50	PT JO PERKASA AGRO TECHNOLOGIES	42	-	-	-	-	-	
51	PT KALIMANTAN PRIMA AGRO MANDIRI	1.24	350	-	-	-	-	
52	PT KAPUAS BIO AGRO	5,701	-	-	-	-	-	
53	PT KAPUASINDO PALM INDUSTRY	3,677	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	2,912	75	-	-	4,831	-	13,113
	28	0	315	-	784	76	1,278
	285	438	-	-	5,498	-	12,319
	7	37	13	43	283	-	666
	43	-	1.16	254	146	-	1,749
	96	0	2,423	298	560	77	3,654
	-	-	1,516	54	1,068	-	2,907
	-	-	1,058	114	5,161	-	9,434
	12	17	-	-	-	17	46
	2	-	1	-	62	33	463
	353	-	-	-	-	-	353
	1,075	-	-	-	-	-	1,075
	45	-	-	654	-	-	699
	-	-	-	-	-	-	28
	49	-	-	-	-	-	91
	3,653	231	-	1,841	1,109	-	8,424
	1,462	0	-	-	3,707	-	10.87
	60	139	-	-	3,306	-	7,181

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
54	PT KARTIKA PRIMA Cipta	943	1,979	-	-	-	-	
55	PT KARYA MAKMUR LANGGENG	1,917	144	-	-	-	-	
56	PT KARYA SUKSES UTAMA PRIMA	176	-	-	-	-	-	
57	PT KELIAU MAS PERKASA	119	-	-	-	-	-	
58	PT KHATULISTIWA AGRO ABADI	7,805	-	-	-	-	-	
59	PT KUSUMA ALAM SARI	-	2,546	-	-	-	-	
60	PT LADANG SAWIT MAS	28	-	-	-	-	-	
61	PT LANANG AGRO BERSATU	63	-	-	-	-	-	
62	PT LEDO LESTARI	-	-	-	-	-	-	
63	PT LESTARI ABADI PERKASA	261	-	-	-	-	-	
64	PT LESTARI ALAM RAYA	918	15	-	-	-	-	
65	PT LESTARI GEMILANG INTISAWIT	51	-	-	-	-	-	
66	PT MENTARI PRATAMA	236	-	-	-	-	-	
67	PT MITRA ANDALAN SEJAHTERA	-	230	-	-	-	-	
68	PT MITRA ANEKA REZEKI	96	8	-	-	-	-	
69	PT MITRA KAPUAS AGRO	3,137	-	-	-	-	-	
70	PT MITRA KARYA SENTOSA	1,381	55	-	-	-	-	
71	PT MITRA SAUDARA LESTARI	148	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	654	20	459	625	2,875	-	7,556
	210	363	117	3	2,052	-	4,806
	66	-	-	-	-	-	242
	-	-	229	67	-	-	415
	333	6	-	-	7,254	-	15,399
	-	-	458	167	6,411	-	9,581
	18	25	-	-	25	-	96
	19	2	-	-	27	-	111
	2	-	24	12	-	-	37
	1,618	76	-	-	246	-	2,201
	1,067	-	1,771	5	15	-	3,792
	6	-	-	-	49	-	106
	323	-	-	-	226	-	784
	-	-	8,025	128	378	-	8,761
	-	-	853	20	21	3	1
	418	30	-	-	3.01	-	6,596
	545	70	1,624	34	1,361	-	5.07
	722	96	-	-	146	-	1,111

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
72	PT MITRA SAWIT KUMALA ABADI	-	-	-	-	-	-	
73	PT MULIA BAKTI KAHURIPAN	-	-	-	-	-	-	
74	PT NUSA JAYA PERKASA	-	-	-	-	-	-	
75	PT PALM AGRO MAKMUR	605	-	-	-	-	-	
76	PT PALMDALE AGRO ASIA LESTARI MAKMUR	229	3,341	-	-	-	-	
77	PT PARAMITA INTERNUSA PRATAMA	123	3,104	-	-	-	-	
78	PT PARNA AGROMAS	-	692	-	-	-	-	
79	PT PENCETUS SAWIT ANDALAN	-	-	-	-	-	-	
80	PT PENDAMAR KREASI MANDIRI	-	-	-	-	-	-	
81	PT PENITI SUNGAI PURUN	-	212	-	-	-	-	
82	PT PERMATA HIJAU RESOUSES	-	-	-	-	-	-	
83	PT PERSADA GRAHA MANDIRI	265	2.76	-	-	-	-	
84	PT PERTIWI LENGGARA AGROMAS	-	-	-	-	-	-	
85	PT PINANG WITMAS ABADI	18	4.04	-	-	3	-	
86	PT PRAKARSA WIRANATA	225	-	-	-	9	9	
87	PT PRANA INDAH GEMILANG	120	753	-	-	50	-	
88	PT PRIMANUSA MITRA SERASI	877	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	0	0	-	5	-	-	6
	268	-	-	-	-	-	268
	-	-	3,612	-	2	-	3,613
	103	-	-	-	-	-	708
	32	225	603	1,661	4,556	-	10,647
	35	0	5,108	2,457	3,112	-	13,939
	-	-	2,323	1,848	944	-	5,807
	-	-	-	-	10	-	10
	-	-	665	-	-	-	665
	-	-	7,424	74	212	-	7,922
	-	-	552	15	-	-	567
	57	0	711	389	2,762	-	6,944
	41	-	-	-	-	-	41
	-	1	312	192	6,296	-	10,863
	319	-	-	-	-	-	562
	889	502	1,495	1,396	868	-	6,073
	61	-	-	-	-	-	939

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
89	PT PULAU TIGA LESTARI JAYA	1,288	18	-	-	-	-	
90	PT PUNGGUR ALAM LESTARI	-	-	-	-	-	-	
91	PT PUTRA LIRIK DOMAS	-	1	-	-	-	-	
92	PT PUTRA SARI LESTARI	285	2,153	-	-	-	-	
93	PT RAJAWALI JAYA PERKASA	-	-	-	-	-	-	
94	PT RATUBADIS ADHI PERKASA	-	-	-	-	-	-	
95	PT REZEKI KENCANA	-	-	-	-	-	-	
96	PT RIZKI SAWIT AMBAWANG	-	143	-	-	-	-	
97	PT SANDAI MAKMUR SAWIT	358	-	-	-	-	-	
98	PT SANDIKA NATA PALMA	-	-	-	-	-	-	
99	PT SATRIA MANUNGAL SEJAHTERA	-	-	-	2	-	-	
100	PT SATRIA MULTI SUKSES	0	-	-	-	-	-	
101	PT SAWIT JAYA MAKMUR	378	943	-	-	-	-	
102	PT SAWIT KAPUAS KENCANA	1.18	-	-	-	-	-	
103	PT SAWIT MAKMUR SEJAHTERA	742	-	-	-	-	-	
104	PT SEBUKIT INTERNUSA	93	522	-	-	-	-	
105	PT SINAR KARYA MANDIRI	11	1,506	-	-	-	-	
106	PT SUKSES KARYA SAWIT	272	-	-	-	-	-	

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	22	-	20	1,181	18	-	2,547
	-	-	-	-	710	-	710
	-	-	6	1	2	-	10
	1,116	43	1,789	2,124	2,153	-	9,663
	-	-	279	525	-	-	805
	6	-	-	-	-	-	6
	-	-	-	-	372	-	372
	-	-	3,842	86	143	-	4,214
	1,868	30	-	-	346	-	2,603
	19	-	-	-	-	-	19
	6	-	-	-	-	-	8
	-	-	2	4	0	-	6
	1,235	4	2,036	615	1,465	-	6,676
	40	-	-	-	480	-	1.7
	318	200	-	-	634	-	1,894
	106	0	2,288	2,791	593	-	6,393
	1,748	109	2,565	1,024	1,517	-	8.48
	989	1	-	-	150	-	1,412

No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
107	PT SUMATERA JAYA AGRO LESTARI	319	-	-	-	-	-	
108	PT SUMATERA MAKMUR LESTARI	44	-	-	-	-	-	
109	PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR	-	13	-	-	-	-	
110	PT SWADAYA MUKTI PRAKARSA	958	-	-	-	-	-	
111	PT TEBAR TANDAN TENERAH	26	-	-	-	-	-	
112	PT TSYAFIUDDIN CORPORATION	132	51	-	-	-	-	
113	PT WAHANA HAMPARAN HIJAU	3,299	4,048	-	-	-	-	
114	PT WILMAR SAMPAS PLANTATION	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		62,658	50,942	-	2	68	12	

LAMPIRAN 41. | Tabel Daftar Nama Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain IUP

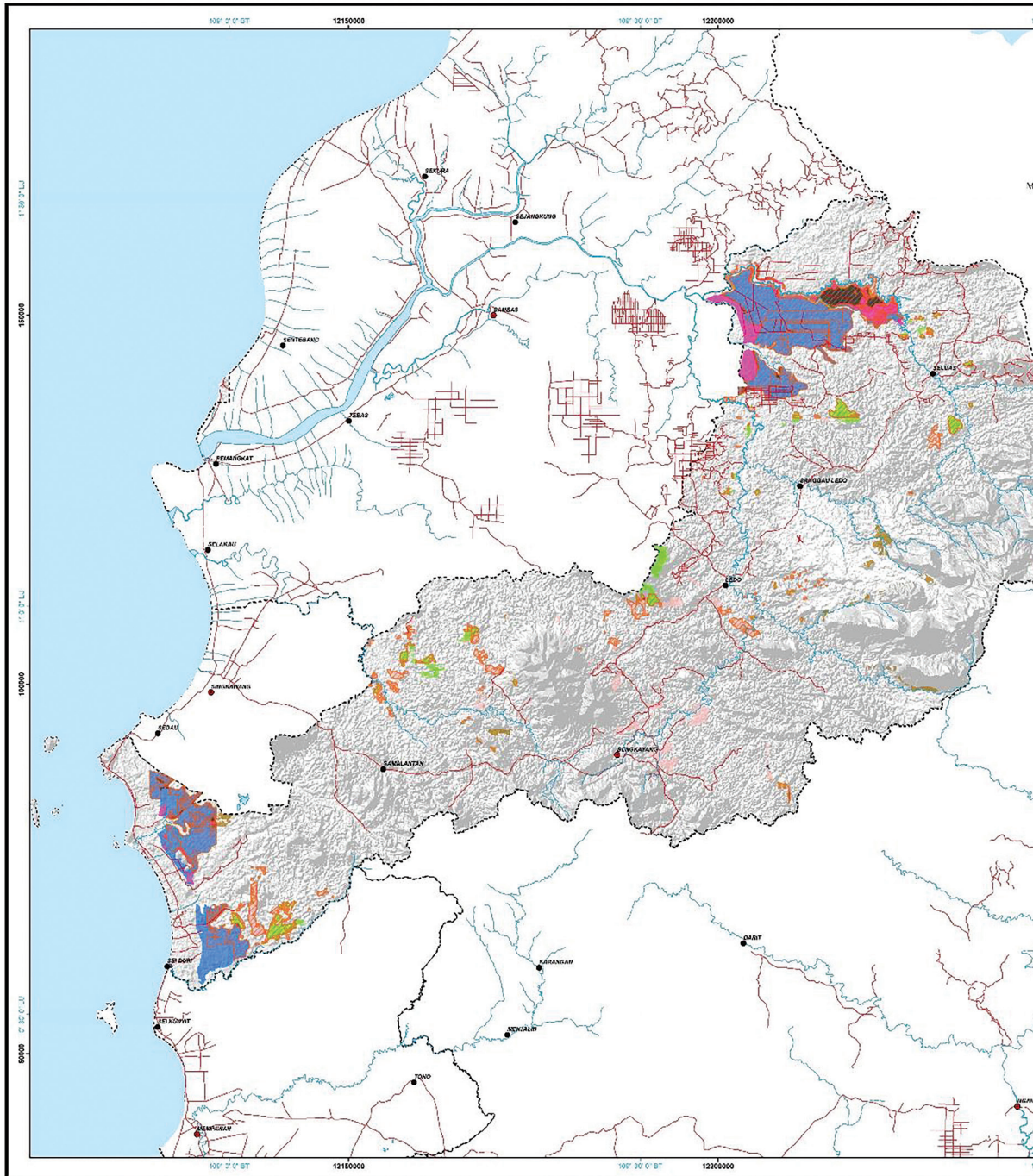
No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
1	CA Mandor	1,151				555		
2	CA Muara Kendawangan	2,949	22					
3	CA Nyiut Penrissen	20						
4	TN Betung Kerihun							
5	TN Bukit Baka Bukit Raya							
6	TN Danau Sentarum	13						

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	159	57	-	-	241	-	777
	153	26	-	-	44	-	266
	-	-	1,529	4,068	13	-	5,623
	369	7	-	-	950	-	2,283
	0	-	-	-	-	-	26
	-	-	175	6	193	-	558
	1	38	252	183	7,317	-	15,139
	-	-	-	-	8	-	8
	41,979	3,957	76,544	34,106	115,530	205	386,001

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
		324			1		2,031
		134,087		1,295			138,353
		46			49		115
					463		463
		110			18		129
		21			2		36

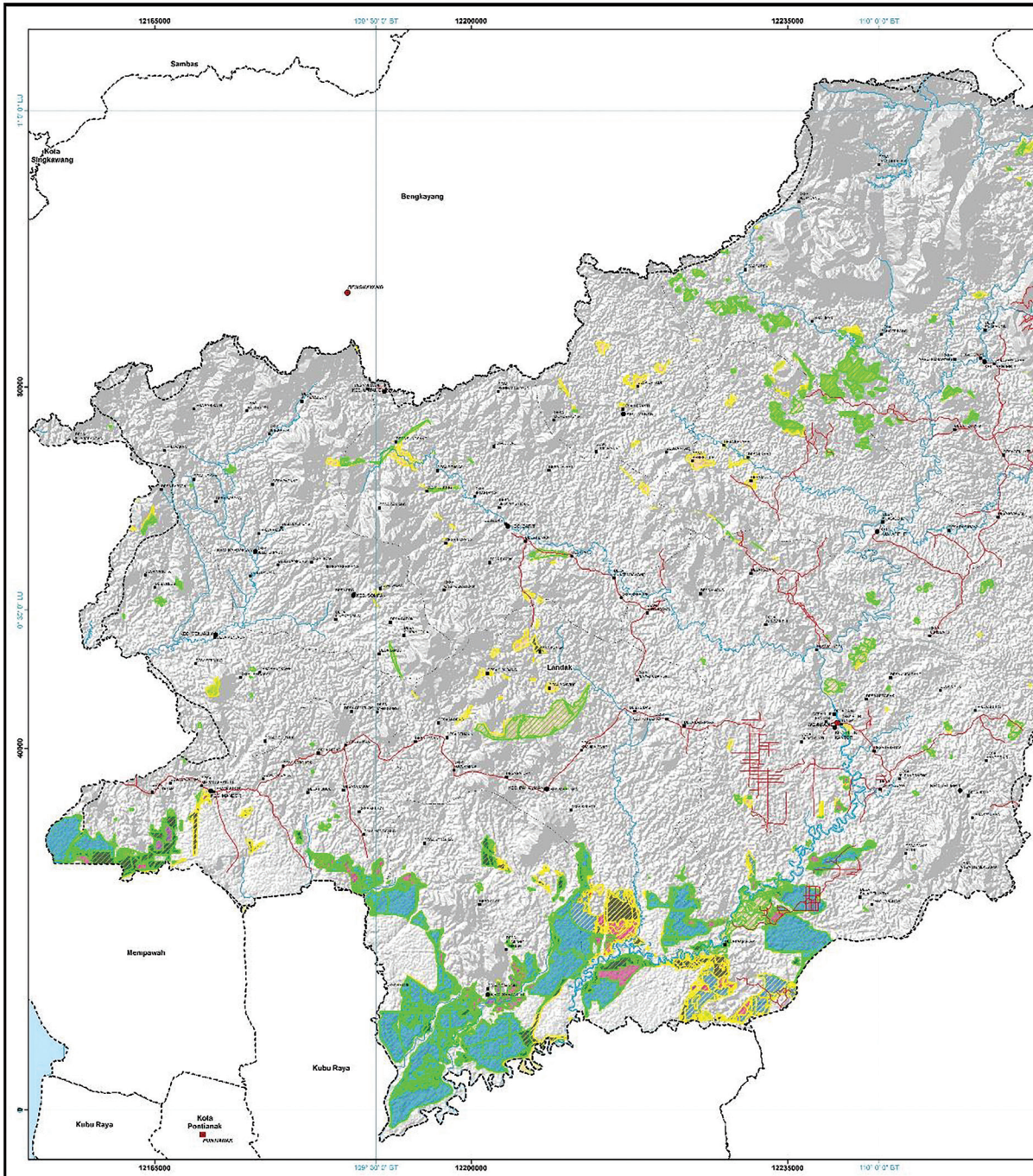
No	Perusahaan	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi (Ha)						
		R01	R02	R03	R04	R05	R06	
7	TN Gunung Palung	315	58					
8	TWA Gunung Melintang	187				16		
9	TWA Sungai Liku	14						
10	TWA Tanjung Belimbing	21						
TOTAL		4,671	80			571		

							TOTAL
	R07	R08	R09	R010	R011	R012	
	1	371		57	5		807
		934	11	11			1,158
		4,338				315	767
		633			29	21	705
	1	136,963	11	1,362	568	336	144,564



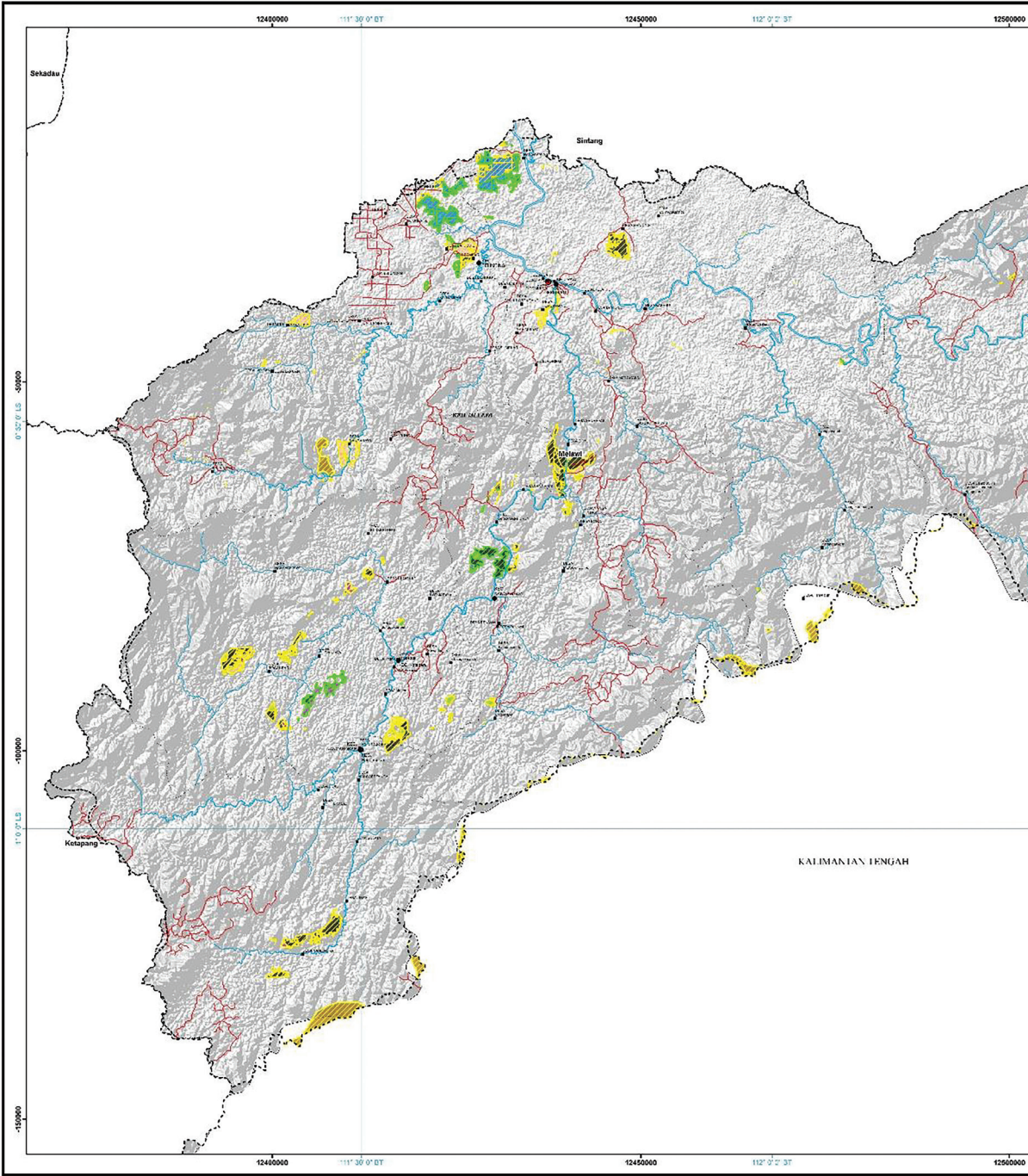


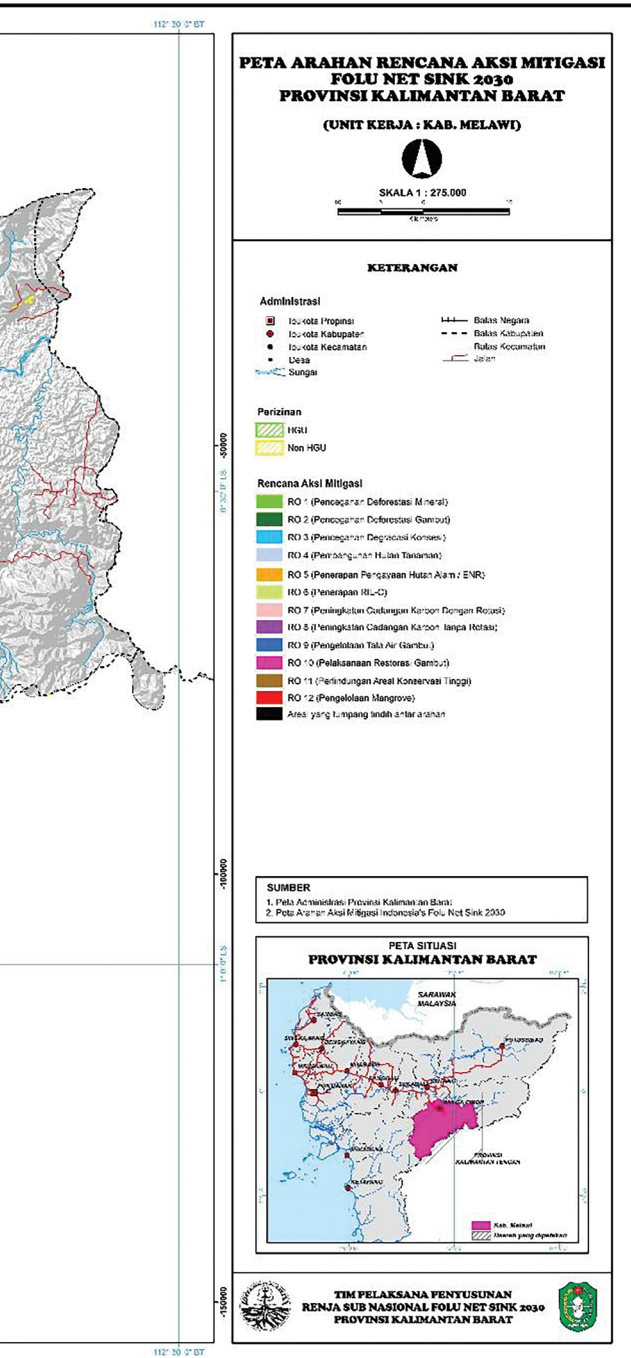
LAMPIRAN 43. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Landak



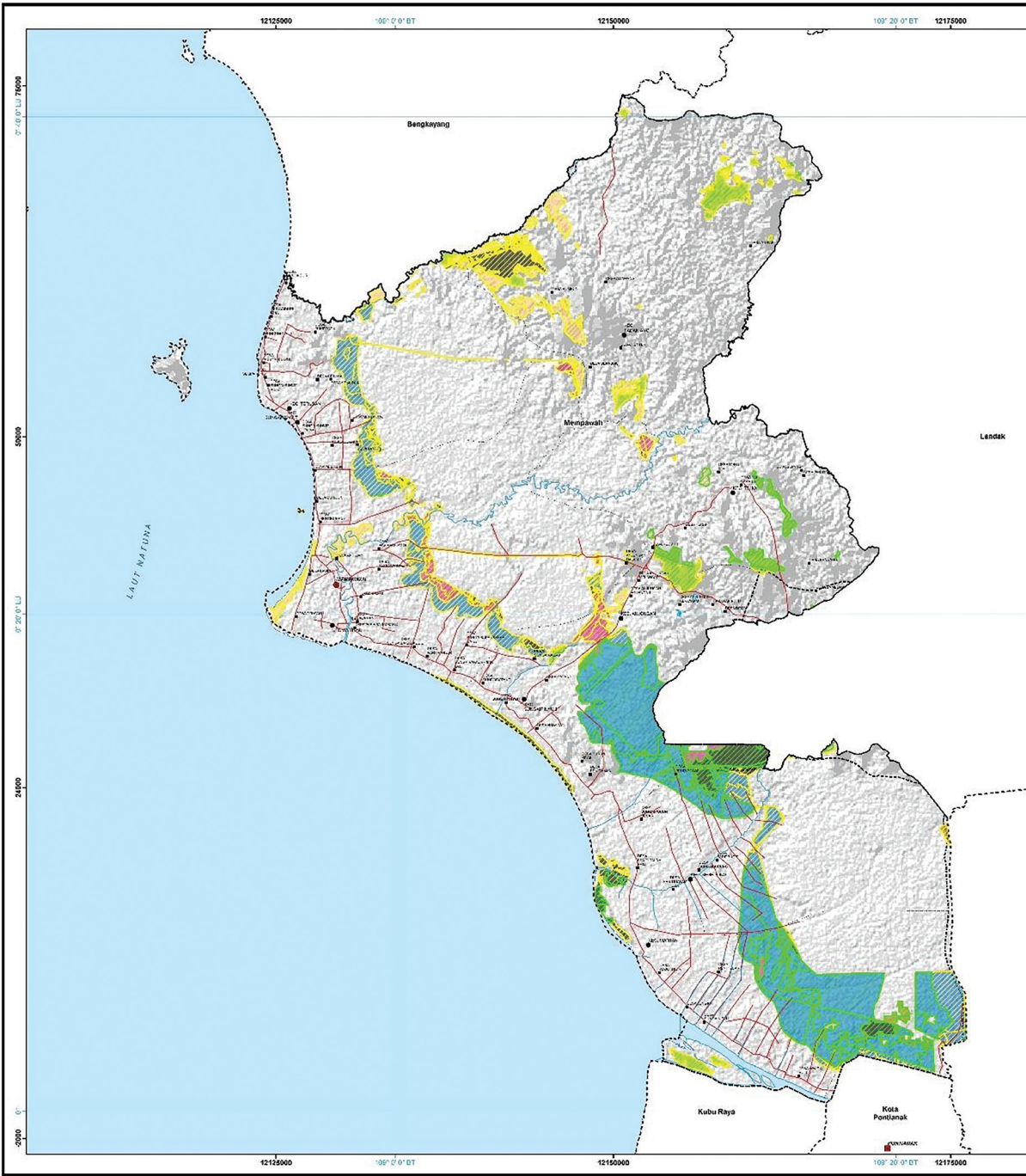


LAMPIRAN 44. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Melawi





LAMPIRAN 45. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Mempawah



**PETA ARAHAN RENCANA AKSI MITIGASI
FOLU NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
(UNIT KERJA : KAB. MEMPAWAH)



SKALA 1 : 150.000



KETERANGAN

Administrasi

- | | |
|-------------------|-----------------|
| Ibukota Provinsi | Batas Negara |
| Ibukota Kabupaten | Batas Kecamatan |
| Ibukota Kecamatan | Batas Desa |
| Desa | Sungai |

Perizinan

- HGU
 Nnon HGU

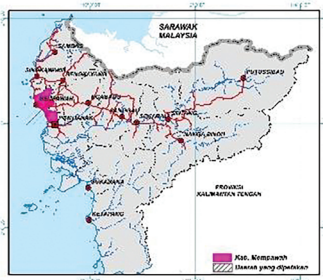
Rencana Aksi Mitigasi

- RO 1 (Pencegahan Deforestasi Miring)
 RO 2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
 RO 3 (Pencegahan Degradasi Karst)
 RO 4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
 RO 5 (Penerapan Pengayatan Hutan Alam / ENR)
 RO 6 (Penerapan R-L-C)
 RO 7 (Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi)
 RO 8 (Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi)
 RO 9 (Pengalokasian Taz Al / Gambut)
 RO 10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
 RO 11 (Peningkatan Areal Konservasi Tinggi)
 RO 12 (Pengelolaan Mangrove)
 Areal yang tumpang tindih antar arahan

SUMBER

1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat
 2. Peta Arahkan Aksi Mitigasi Indonesia's FoLU Net Sink 2030

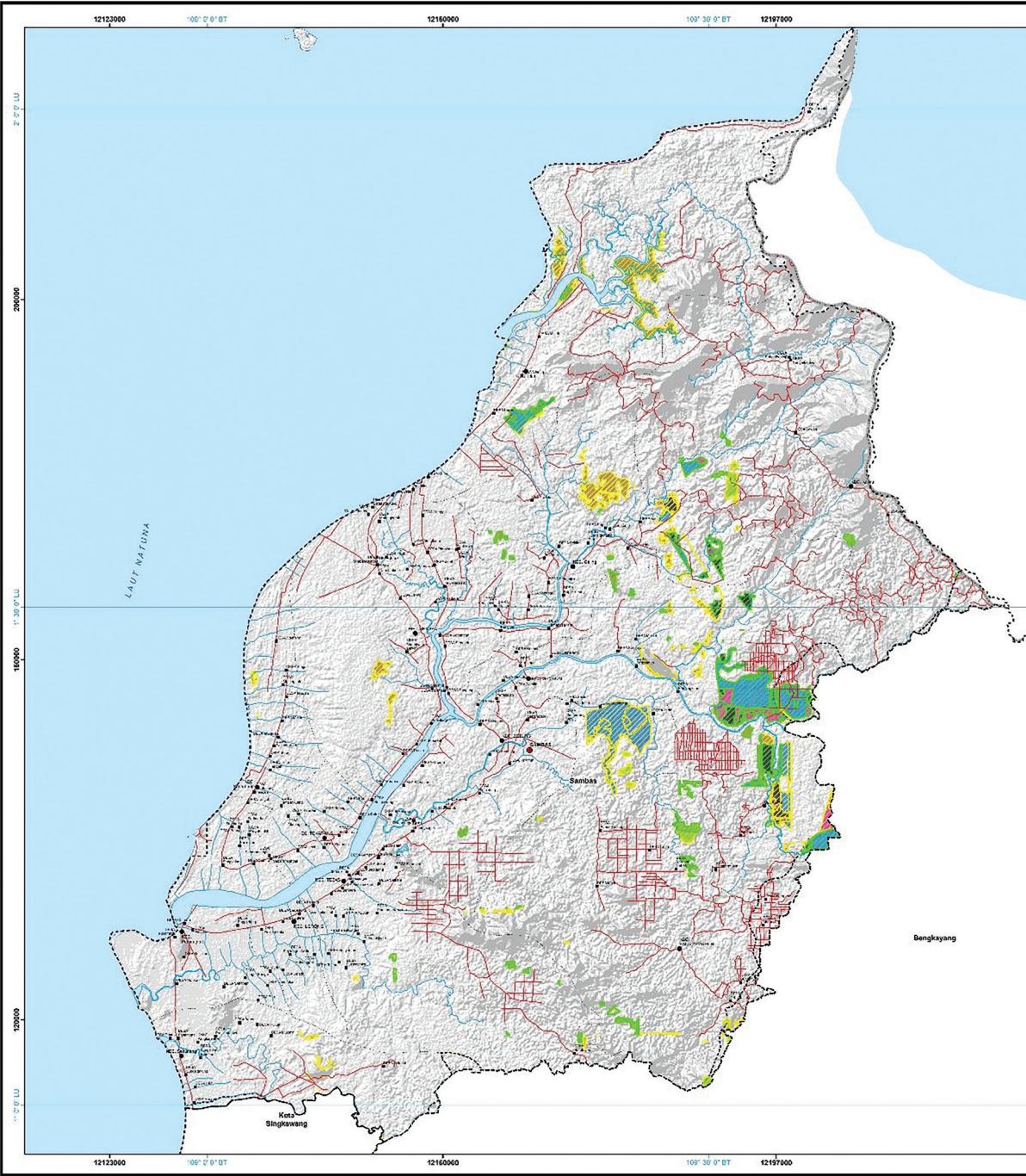
**PETA SITUASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

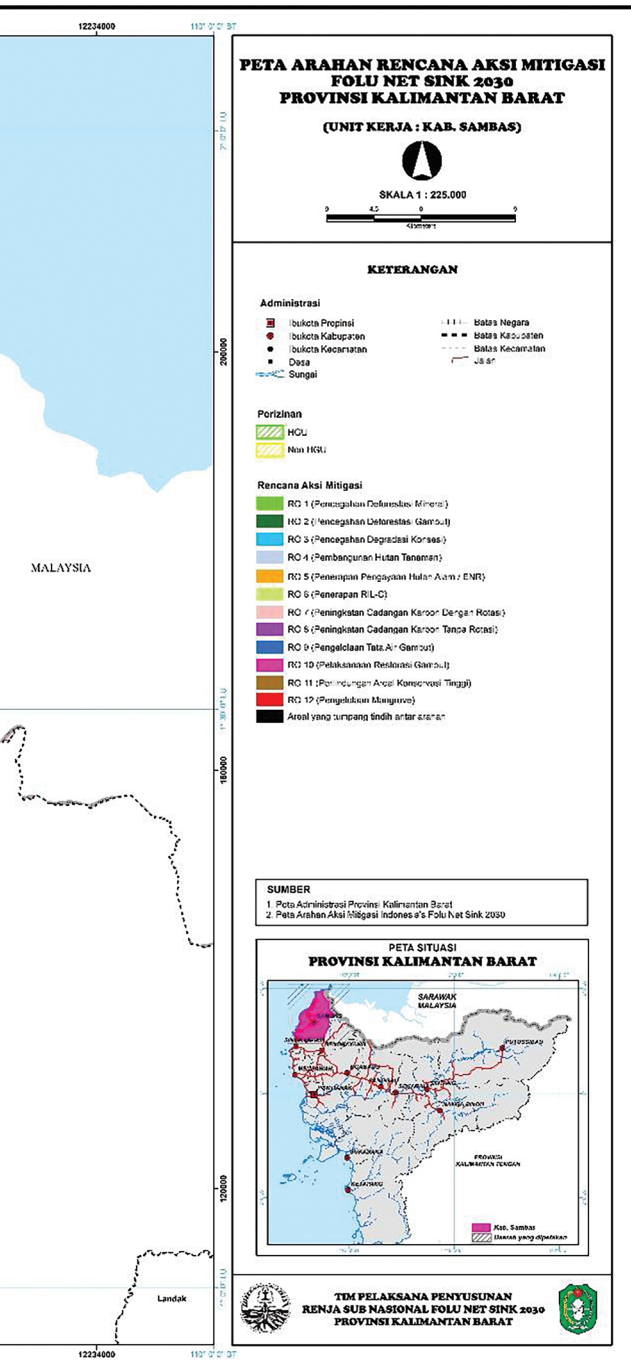


**TM PELAKSANA PENYUSUNAN
RENJA SUB NASIONAL FOLU NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

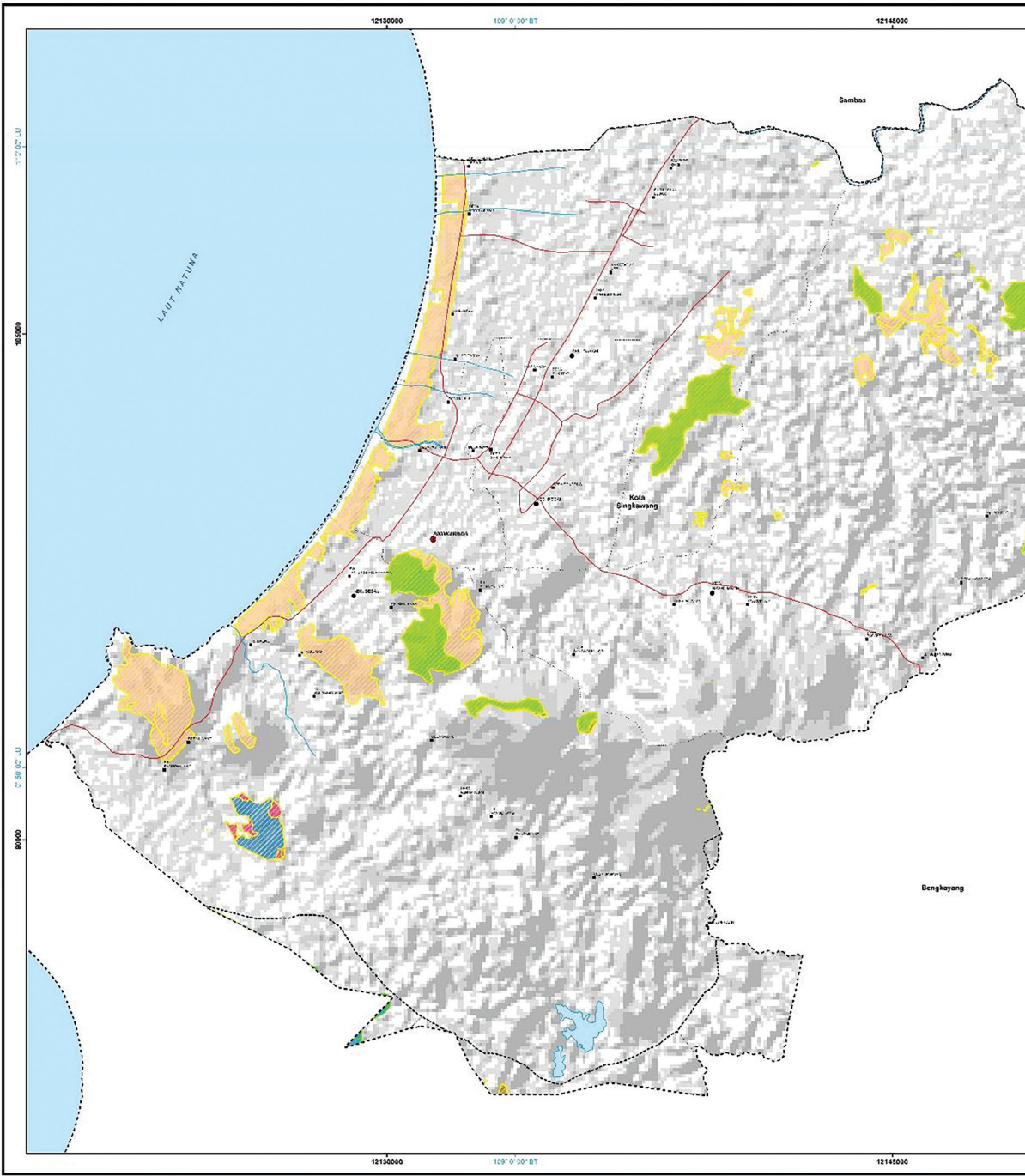


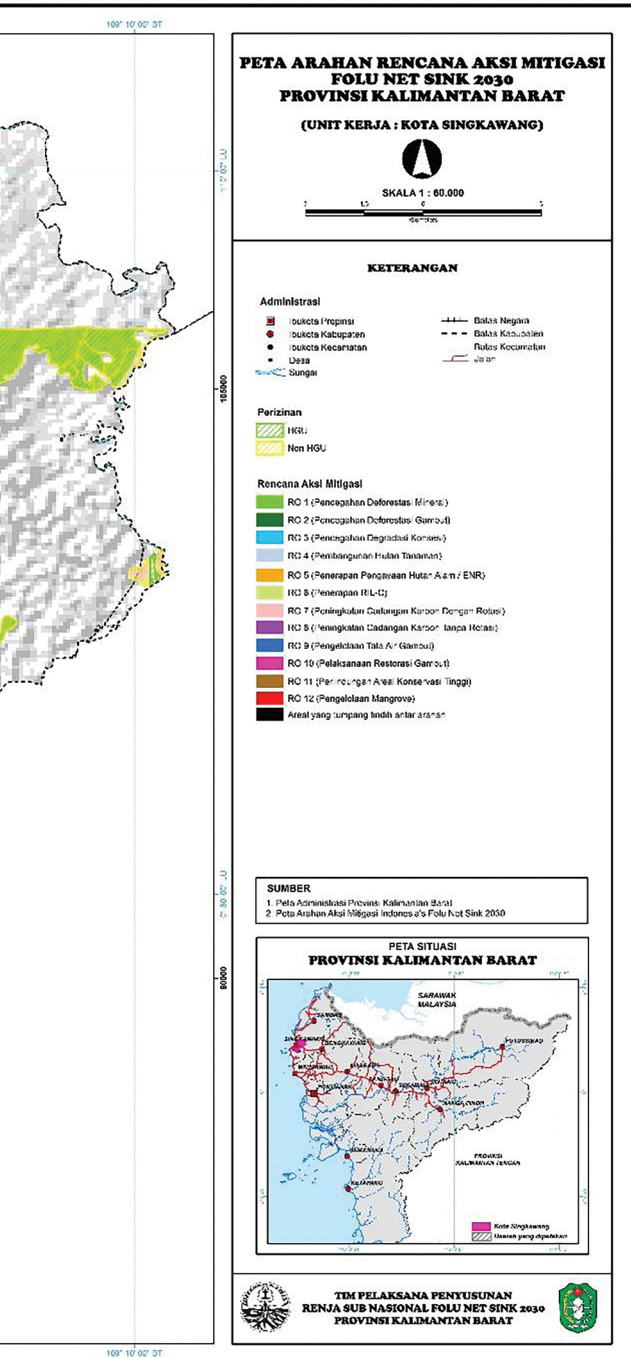
LAMPIRAN 46. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sambas

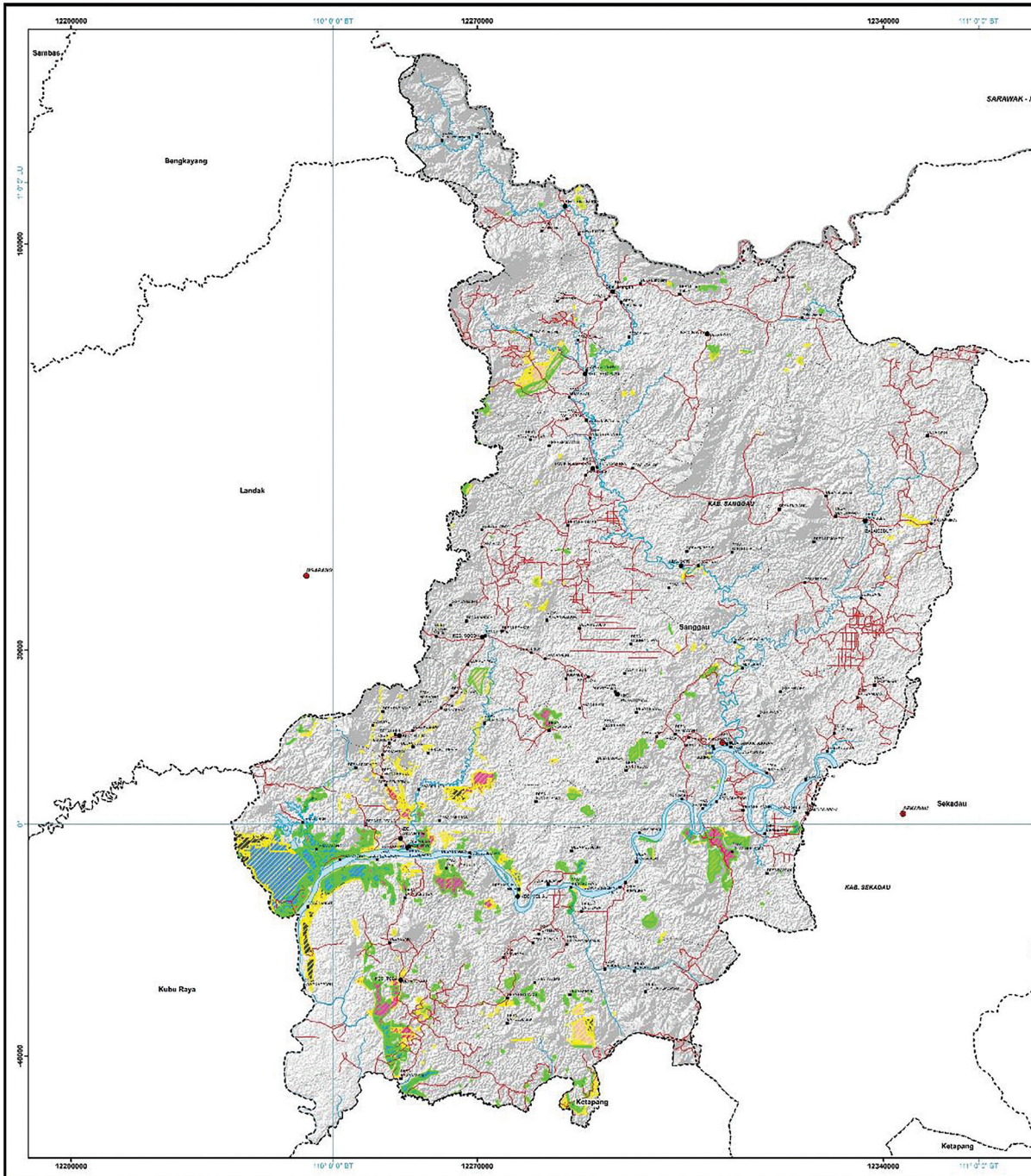


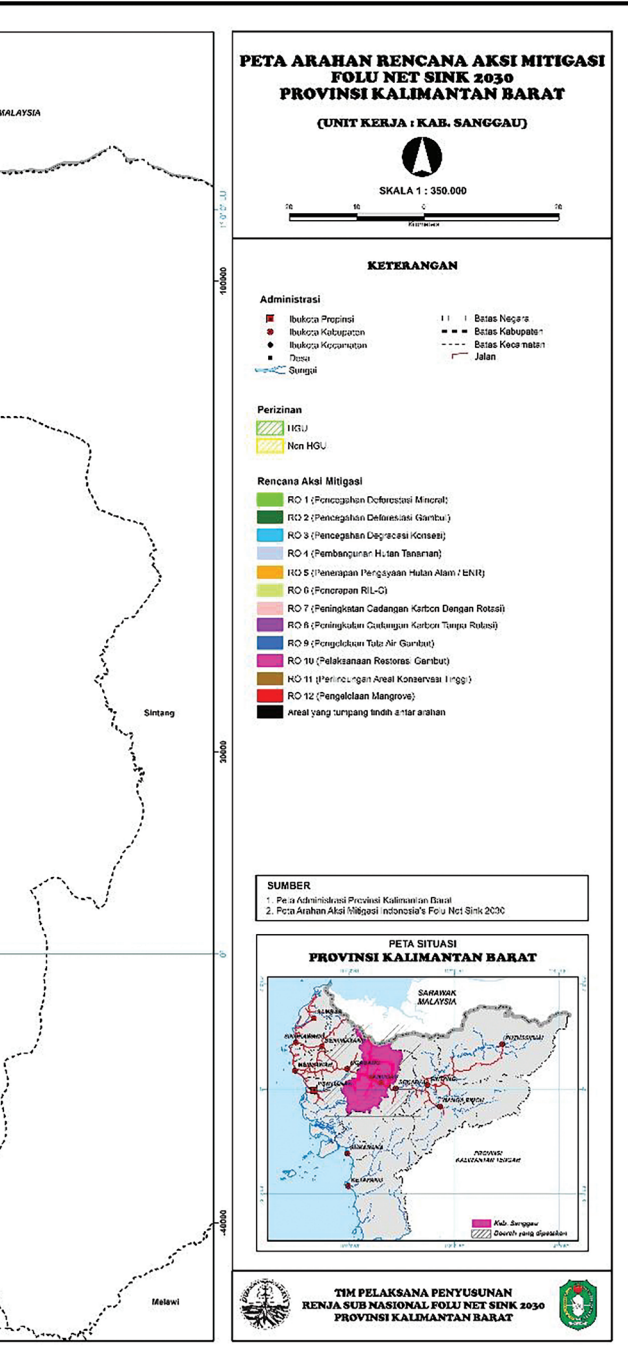


LAMPIRAN 47. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kota Singkawang

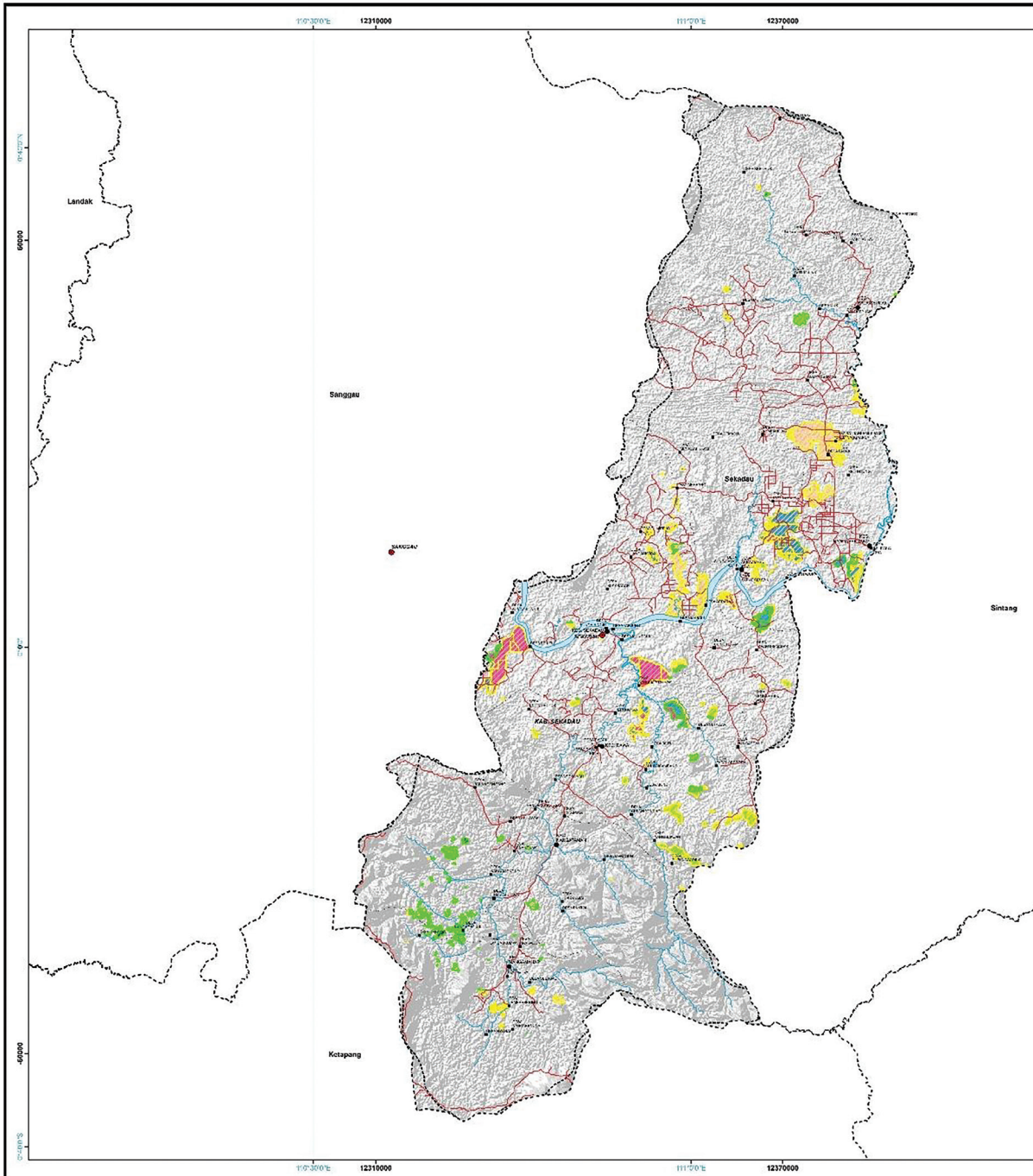


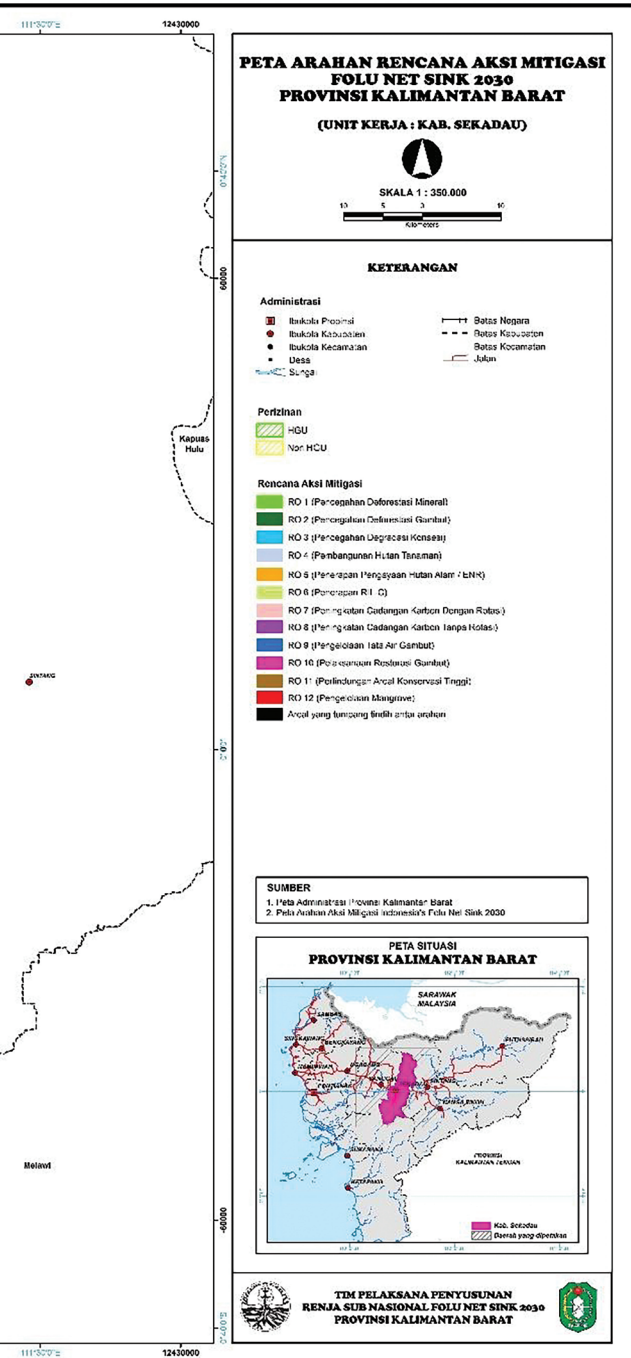




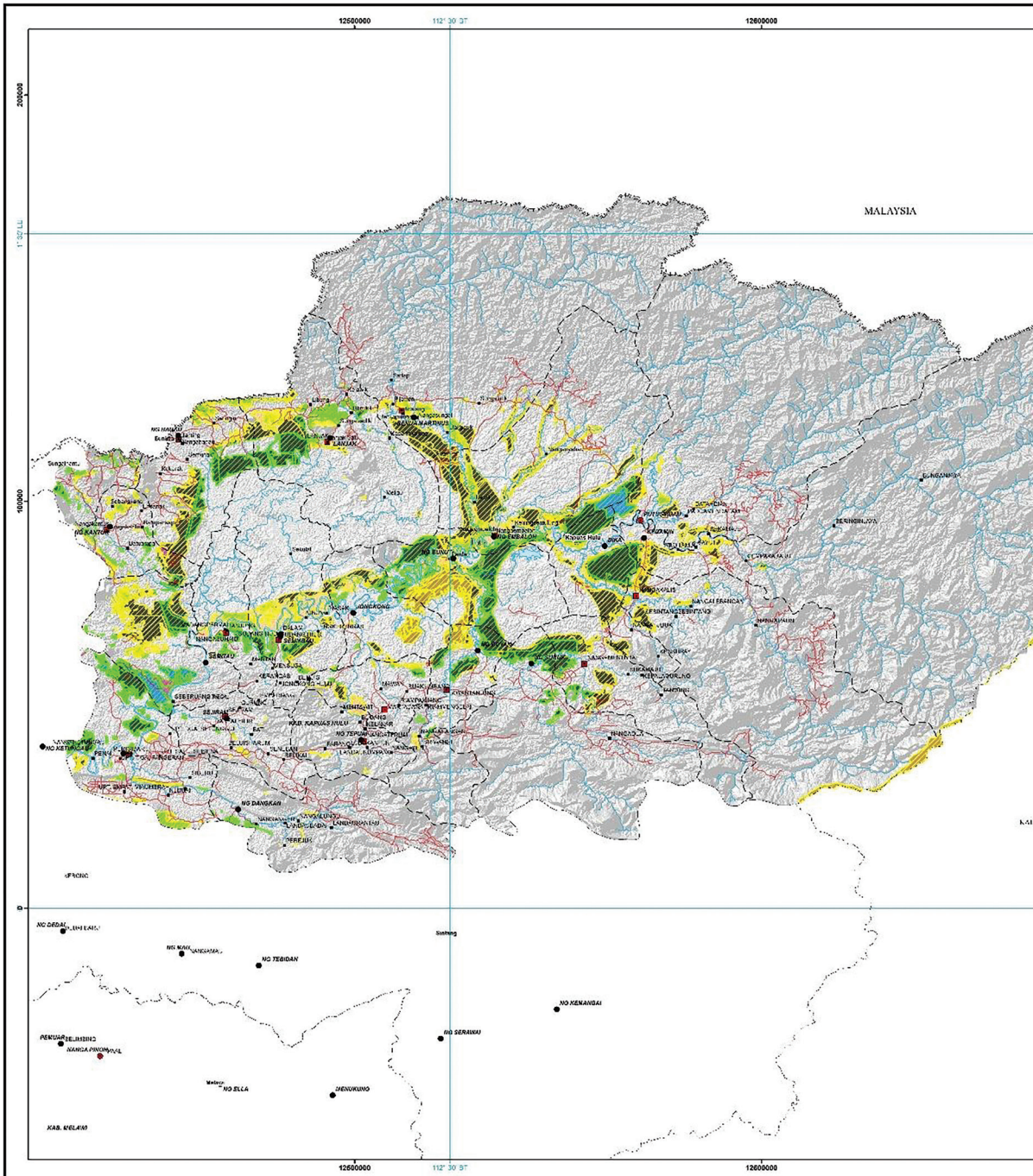


LAMPIRAN 49. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sekadau

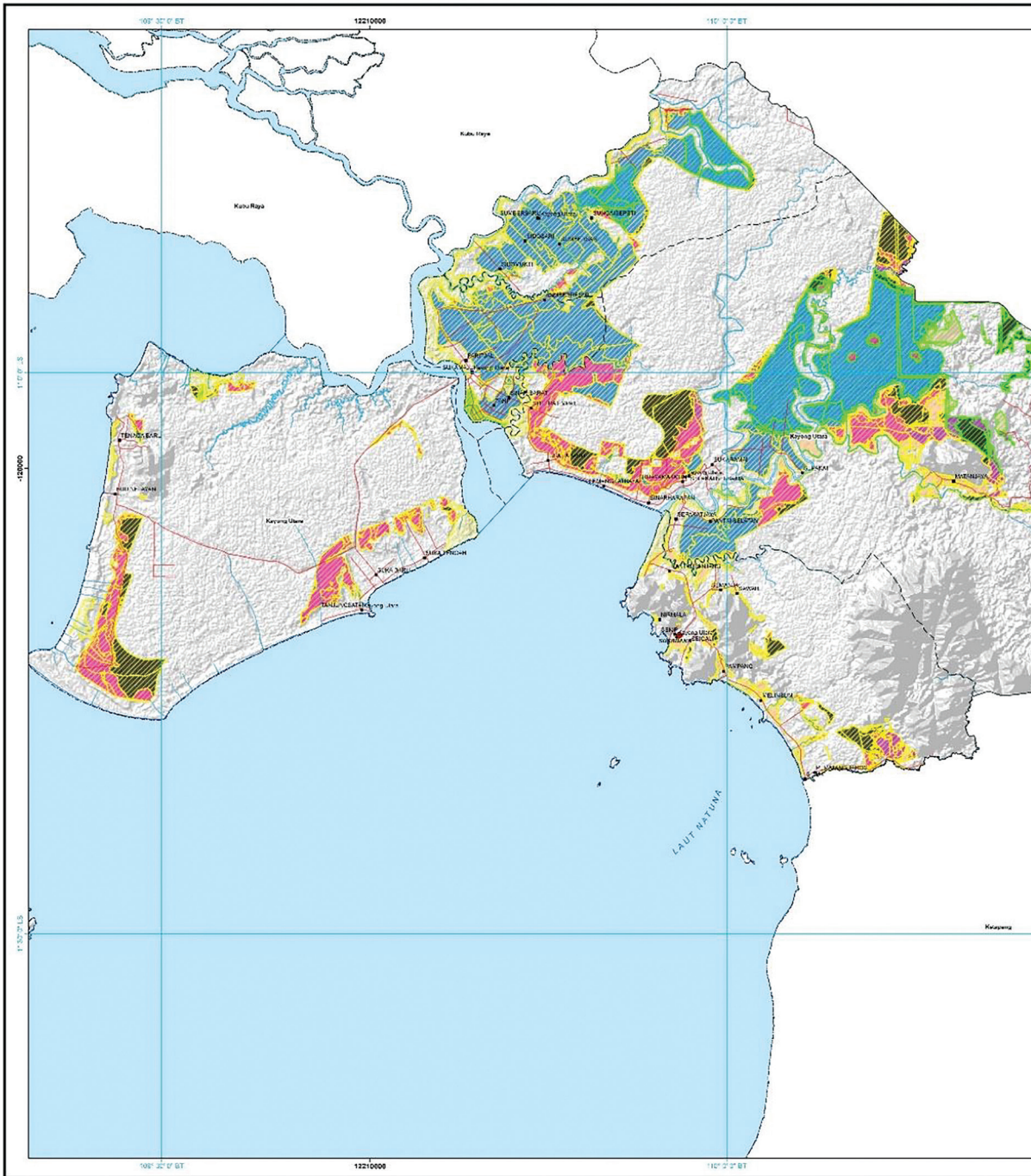


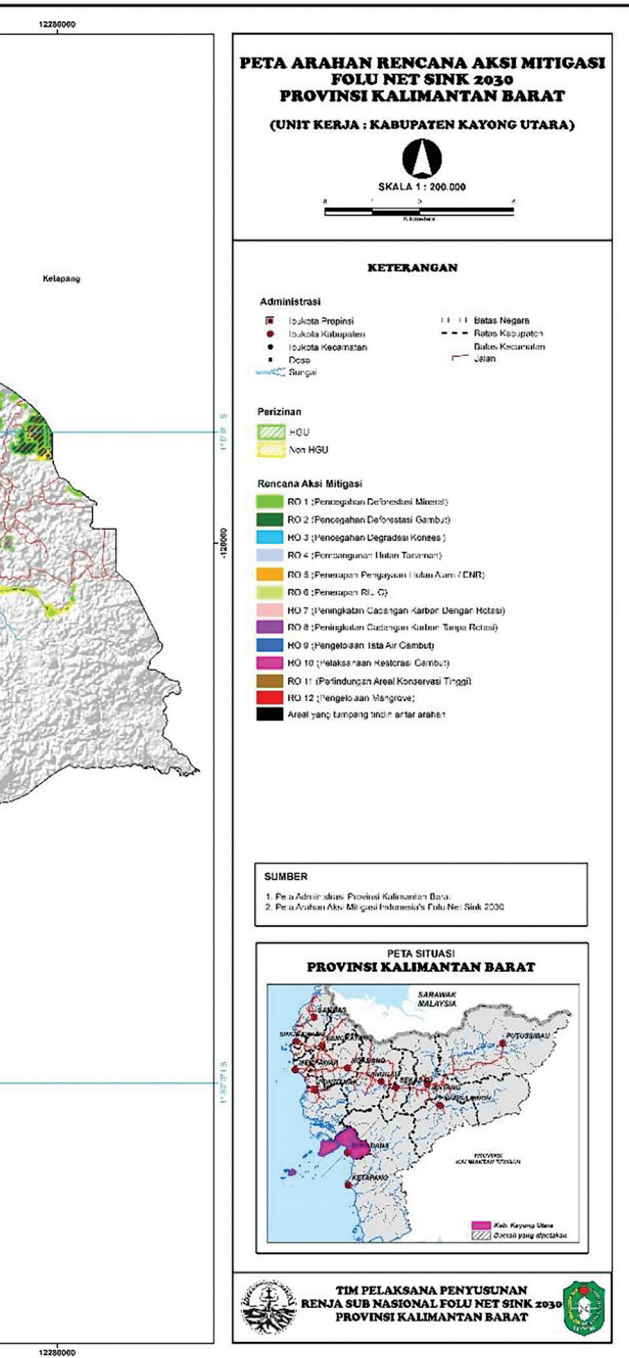


LAMPIRAN 50. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Kapuas Hulu

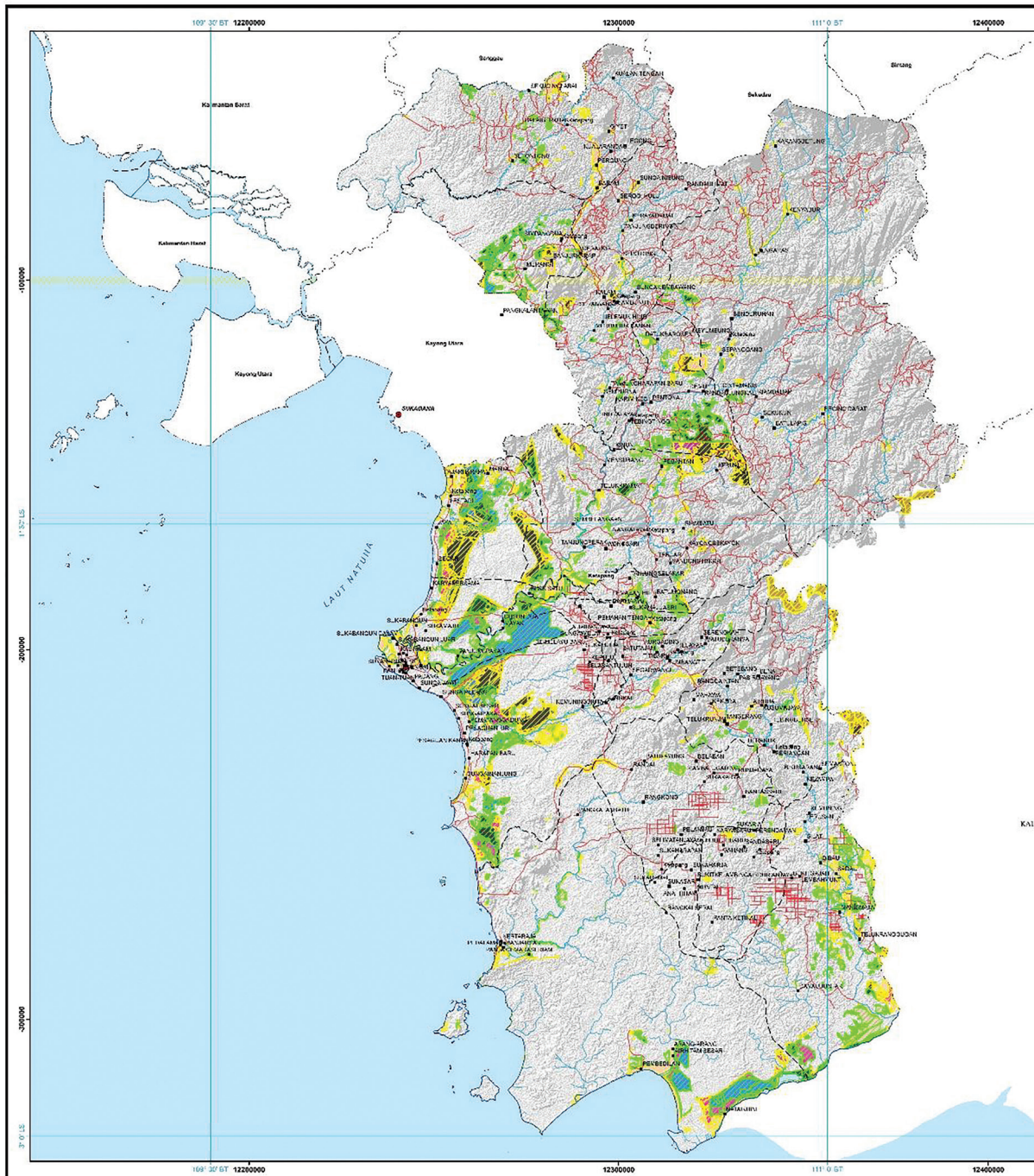


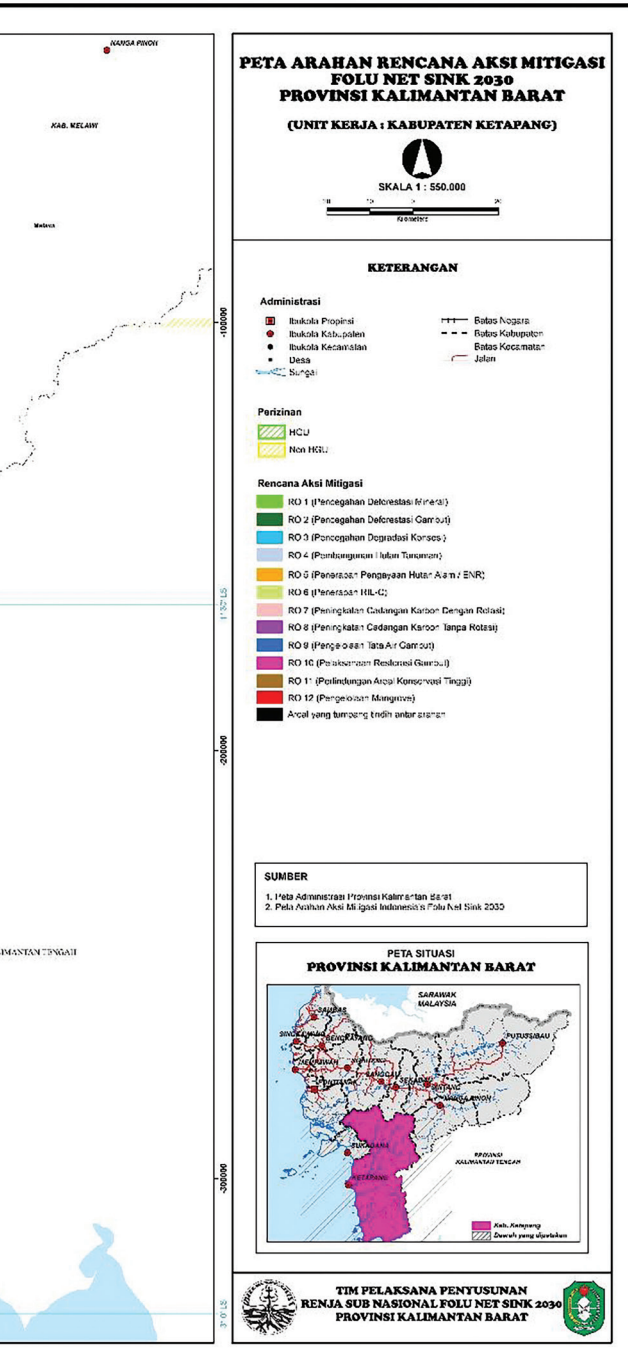




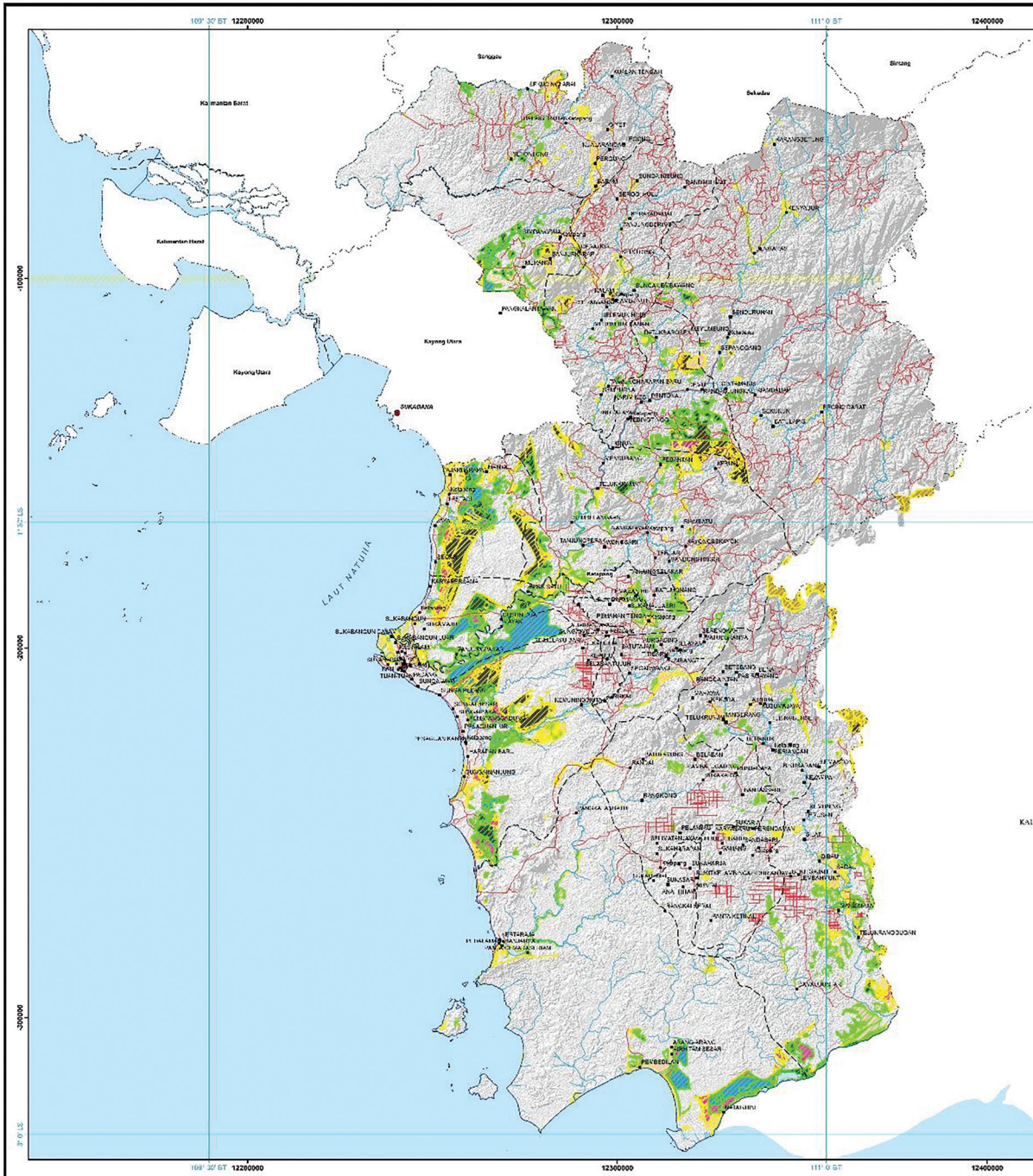


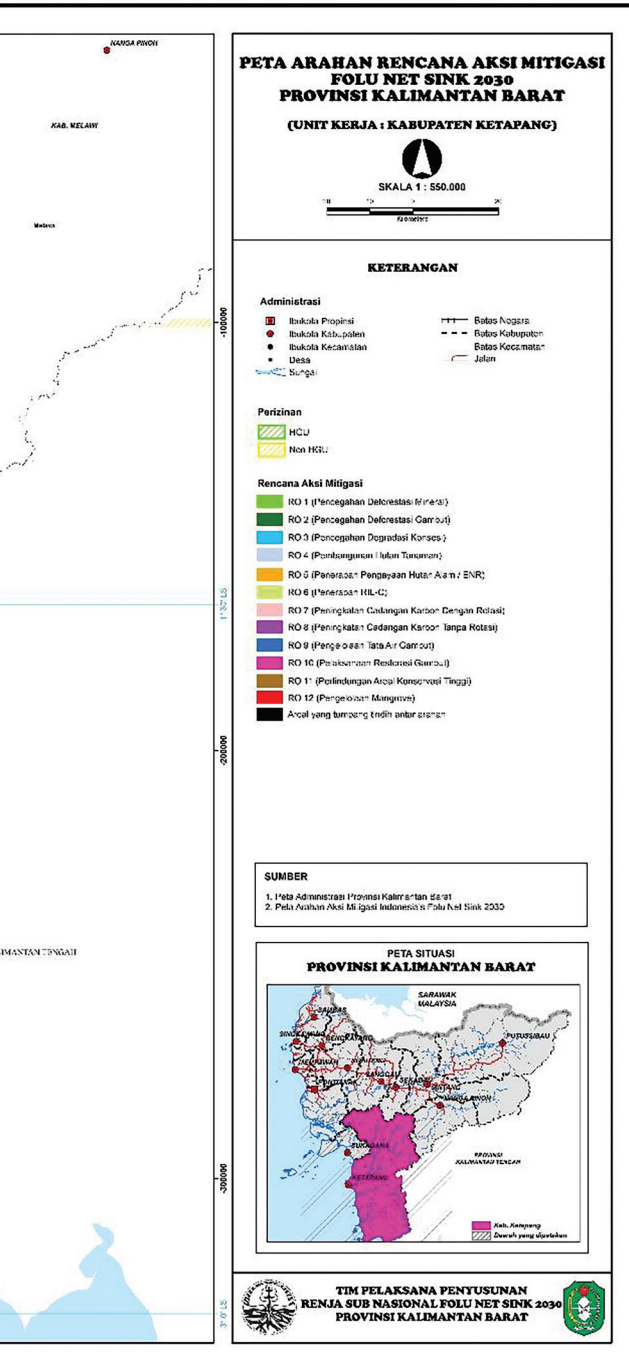
LAMPIRAN 52. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Ketapang



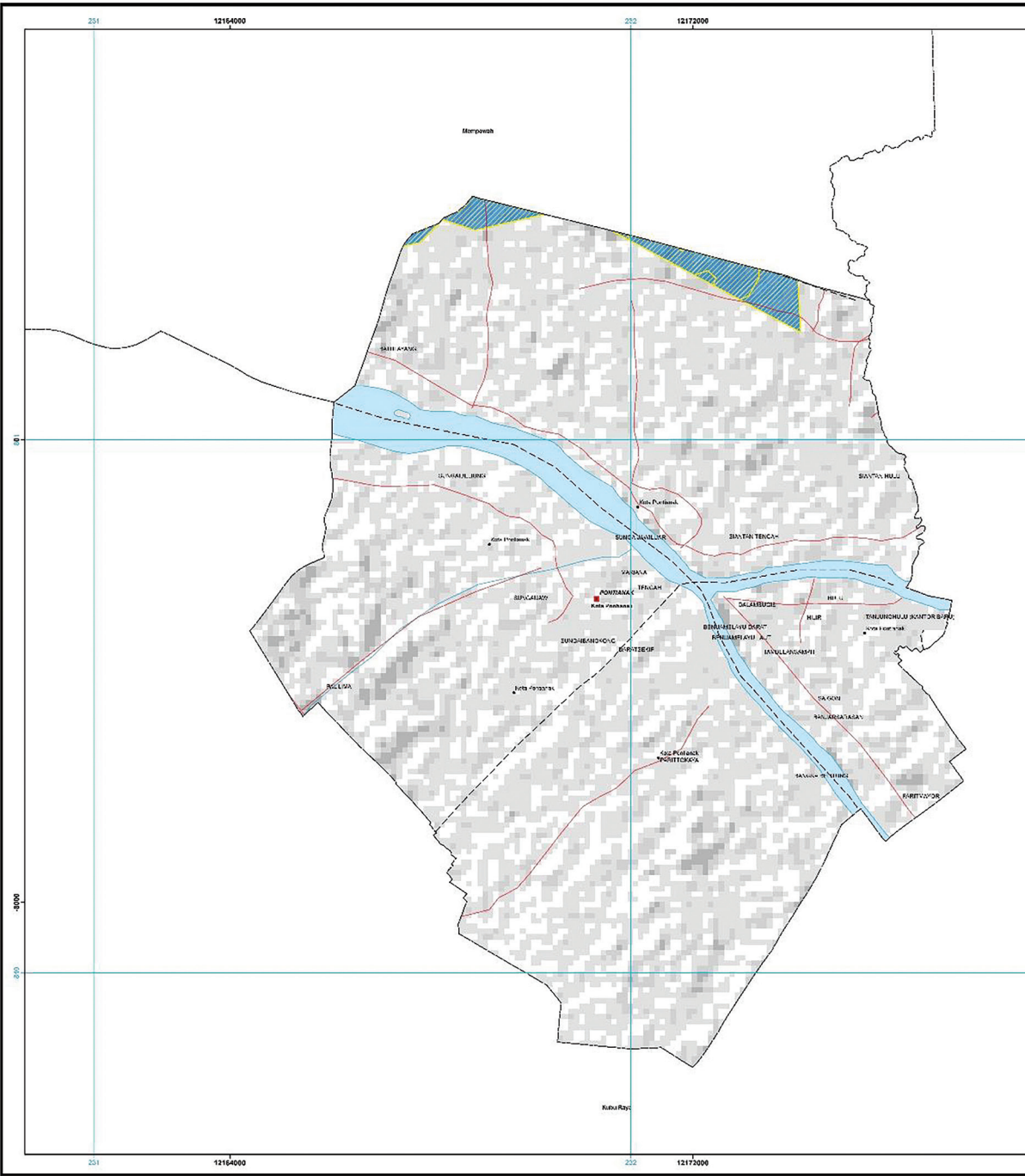


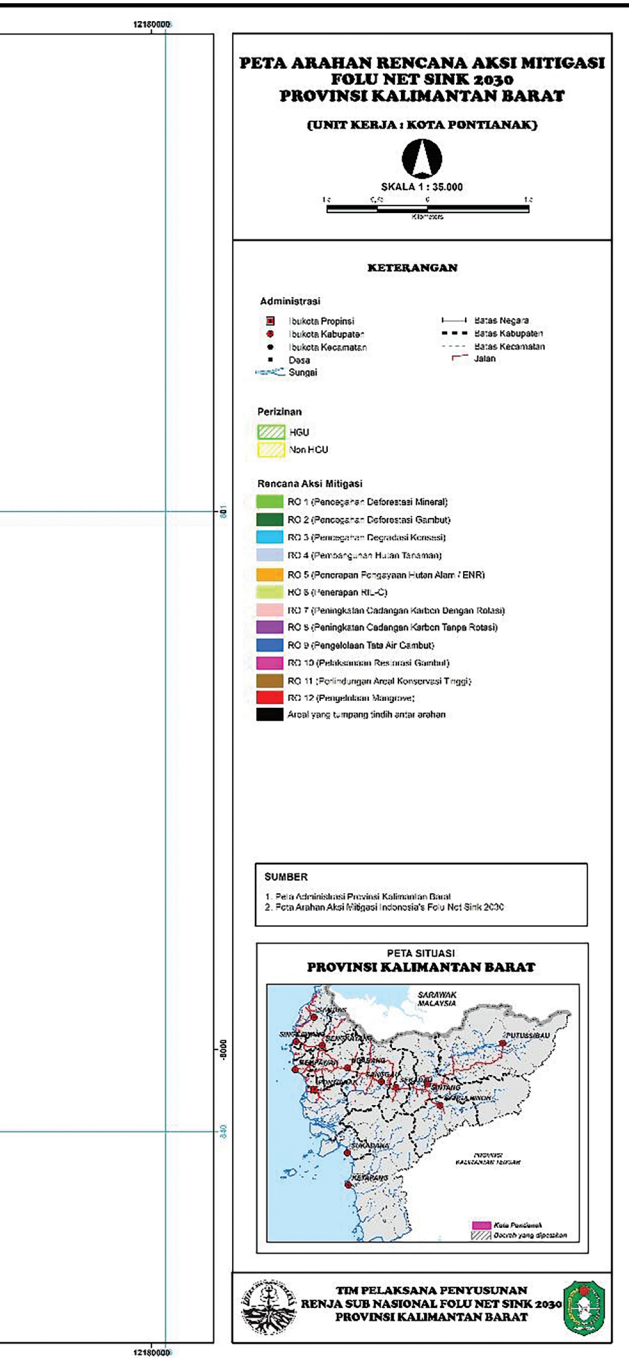
LAMPIRAN 52. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Ketapang



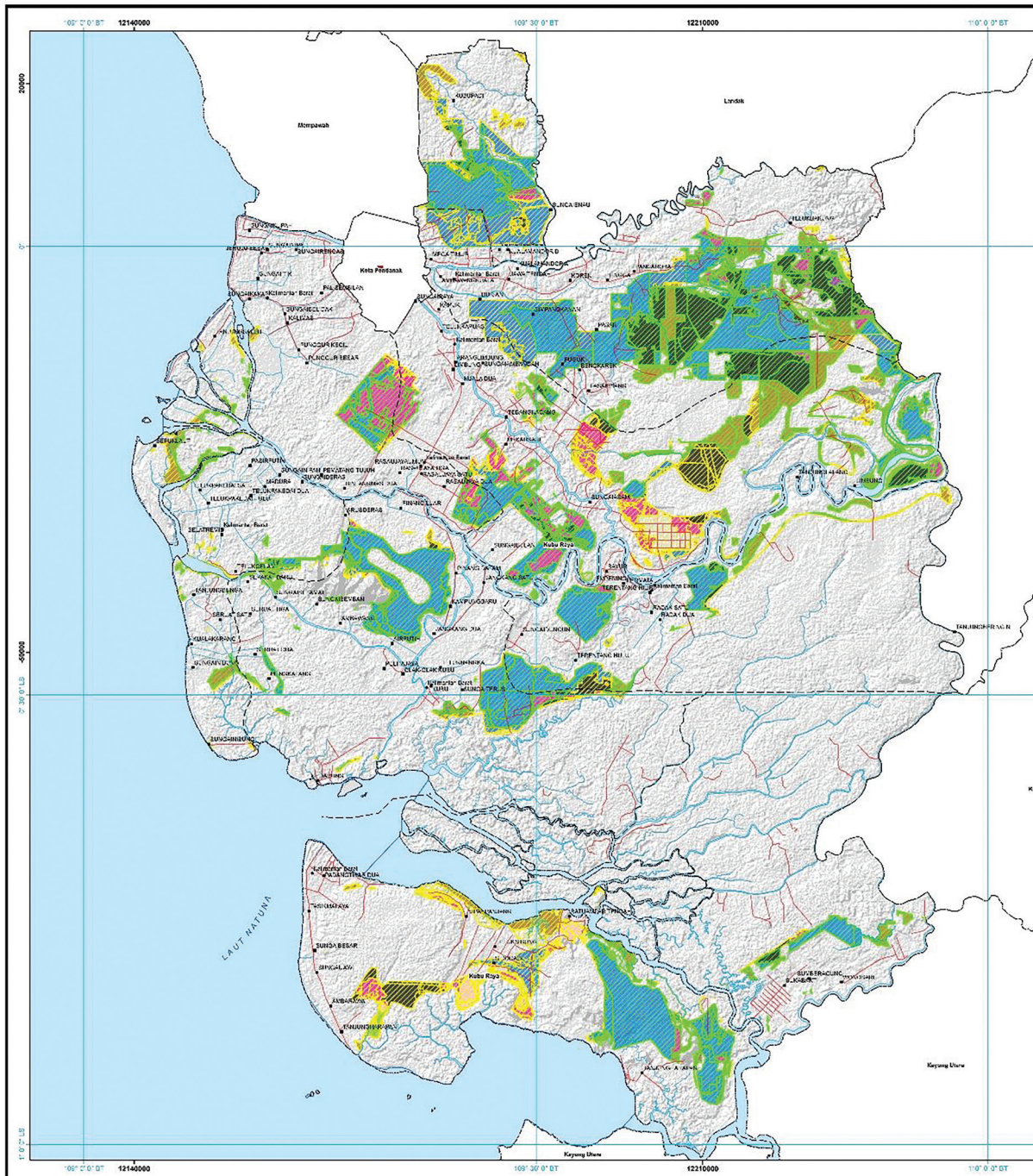


LAMPIRAN 53. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kota Pontianak





LAMPIRAN 54. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Kubu Raya



**PETA ARAHAN RENCANA AKSI MITIGASI
FOLU NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(UNIT KERJA : KABUPATEN KUBURAYA)**



KETERANGAN

Administrasi

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Desa
- Sungai
- +— Batas Negara
- == Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan

Perizinan

- HGU
- Non HGU

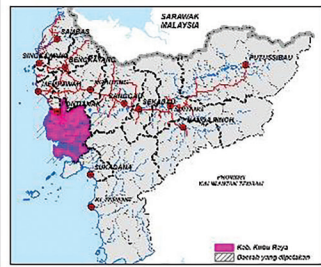
Rencana Aksi Mitigasi

- RO 1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO 2 (Pencegahan Deforestasi General)
- RO 3 (Pencegahan Degradasi Karsang)
- RO 4 (Peningkatan Hutan Tanaman)
- RO 5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam / FNR)
- RO 6 (Penerapan RIL-C)
- RO 7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Hutan)
- RO 8 (Peningkatan Cadangan Karbon Terapi Rotasi)
- RO 9 (Pengaliran Tata Air Gambut)
- RO 10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO 11 (Peningkatan Areal Konservasi Tinggi)
- RO 12 (Pengaliran Mangrove)
- Areal yang tumpang tindih antar arahan

SUMBER

1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat
2. Peta Arahan Aksi Mitigasi Indonesia's FoLU Net Sink 2030

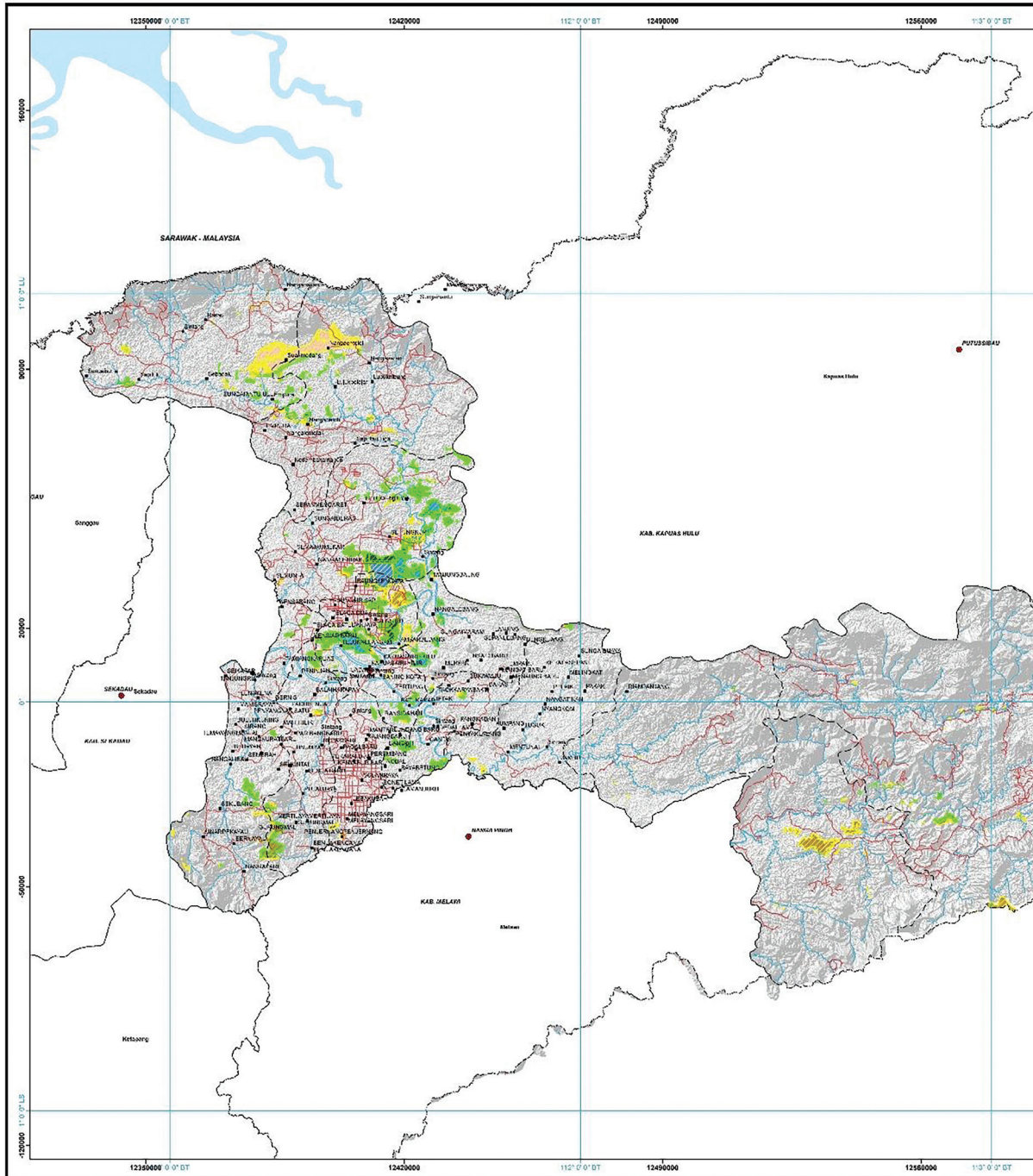
**PETA SITUASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
RENJA SUB NASIONAL FOLU NET SINK 2030
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



LAMPIRAN 55. | Peta Rencana Operasi Unit Kerja Kabupaten Sintang





INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia